



PROCEEDING

International Simposium of Javanese Studies

Yogyakarta, 8th March 2022



PROCEEDING International Simposium of Javanese Studies

Yogyakarta, 8th March 2022

PROCEEDING

Editor : Dr. Ir. Revianto Budi Santoso, M.Arch

Penerbit ANDI

PROCEEDING

Hak Cipta ©2022 pada Penulis

Editor : Dr. Ir. Revianto Budi Santoso, M.Arch

Setting : Eri Andwiatwoni

Desain Cover : Ismadi

Korektor : Yatmi

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, baik secara elektronik maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penulis.

Diterbitkan oleh Penerbit ANDI

Percetakan: ANDI OFFSET

Jl. Beo 38-40, Telp. (0274) 561881 (Hunting),

Fax. (0274) 588282 Yogyakarta 55281

Ed. I, Cetakan I: 2022.

iv + 128 hlm.; 21 x 29,7 cm.



KATA PENGANTAR



Salam Budaya, Salam Pamuji Rahayu.

- Yang terhormat Ngarsa Dalem Sri Sultan Hamengku Bawono Ka 10, Gusti Kanjeng Ratu Hemas, dan Keluarga Keraton Yogyakarta,
- Yang terhormat para anggota Keluarga Kerajaan Sahabat, Duta Besar, Konsul, Diplomat, para Rektor, Professor, dan cendekiawan sekalian,
- Bapak dan Ibu tamu undangan, pembicara, moderator, serta para peserta simposium semuanya.

Sejak tahun 2019, Keraton Yogyakarta mengadakan Simposium Internasional Budaya Jawa dalam rangka peringatan kenaikan takhta, yaitu Tingalan Jumenengan Dalem Sri Sultan Hamengku Bawono Ka 10. Tema pertama kala itu mengenai manuskrip, yang ditandai dengan dikembalikannya 75 naskah lama dari Keraton Yogyakarta dalam bentuk digital, oleh British Library. Tema kedua pada tahun 2020 mengenai busana keraton dan tema ketiga pada tahun 2021 mengenai jamuan kenegaraan. Sementara pada tahun 2022 ini, Keraton Yogyakarta menyajikan tema mengenai “Kontribusi Keraton Yogyakarta kepada Bangsa”.

Adanya Simposium dan Pameran dalam rangka Tingalan Jumenengan Dalem beberapa tahun terakhir merupakan bukti upaya keraton yang terus menerus membuka diri, agar nilai-nilai luhur dapat terus dilestarikan, yakni dengan menghadirkan ruang untuk menjaga berkembangnya atmosfer tukar pikiran khususnya tentang budaya Jawa. Meski tahun ini harus kembali digelar secara daring, hendaknya kita tetap memanjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena diskusi tukar pikiran masih dapat kita selenggarakan, bahkan melintasi batas negara. Kami berharap, diskusi yang terbangun dapat menjangkau ruang yang lebih luas, hingga berbagai penjuru dunia.

Bapak/Ibu, dan Saudara-saudara sekalian,

Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia telah melalui tapak demi tapak perjuangan menempuh kemerdekaan. Para pahlawan dan negarawan mewujudkan ruang kemerdekaan dengan pengorbanan yang tidak mudah. Puncaknya, ditandai dengan Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, yang merupakan momentum kelahiran Republik Indonesia.

Beragam dukungan terhadap republik yang baru lahir tersebut muncul dari berbagai kerajaan di Nusantara yang lebih dulu lahir dan bersifat otonom sebagai pusat-pusat pemerintahan. Merunut kembali catatan sejarah, Yogyakarta turut berpartisipasi aktif menjaga dan mempertahankan Republik Indonesia. Berbagai peristiwa seperti Amanat 5 September 1945, pemindahan ibu kota negara ke Yogyakarta, Agresi Militer Belanda II, Serangan Umum 1 Maret 1949, hingga kelahiran Republik Indonesia Serikat menjadi momentum sejarah yang sangat erat dengan Yogyakarta. Tidak terelakkan, partisipasi keraton beserta masyarakat Yogyakarta dalam periode awal kemerdekaan

sangat kuat bersatu padu. Seperti falsafah yang diamanatkan oleh Pangeran Mangkubumi, leluhur Keraton Yogyakarta, Golong Gilig, Manunggaling Kawula Gusti, bersatu padunya rakyat dan pemimpin terbukti kuat dapat mempertahankan sekaligus menjaga republik pada masa awal setelah kelahirannya.

Dalam simposium yang diselenggarakan Keraton Yogyakarta tahun ini, para peserta akan diajak mengulas kembali Kontribusi Keraton Yogyakarta kepada Bangsa dalam berbagai bidang. Dalam bidang pendidikan, Sri Sultan Hamengku Buwono I merintis pendidikan berbasis budaya melalui Sekolah Tamanan, hilir berganti setiap Sultan yang bertakhta senantiasa mempertahankan model pendidikan di dalam keraton, hingga kemudian berkembang menjadi sekolah-sekolah ala barat yang awalnya berdiri di atas fasilitas keraton. Estafet perjuangan di bidang pendidikan diteruskan pula oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX dengan mengizinkan kawasan keraton sebagai ruang belajar dan beraktivitas Universitas Gadjah Mada.

Dalam bidang ekonomi, Sri Sultan Hamengku Buwono VII menjalani dinamika politik hingga ekonomi yang diwujudkan dalam konsolidasi Tedhak Loji. Kemudian, Falsafah Manunggaling Kawula Gusti diejawantahkan sebagai model pemerintahan dan pembangunan ekonomi untuk kepentingan masyarakat. Dalam bidang politik, Sri Sultan Hamengku Buwono IX memprakarsai pembangunan Selokan Mataram pada masa penjajahan Jepang. Tidak hanya itu, karya seni dari keraton, misalnya tari-tari Kagungan Dalem dan gamelan, tidak hanya menjadi atribut legitimasi para Sultan, keberadaannya bahkan menjadi alat diplomasi yang mengharumkan nama bangsa dalam pentas kebudayaan di berbagai negara.

Bapak/Ibu dan para hadirin, meski dalam segala keterbatasan, simposium ini semoga menjadi sarana untuk memperkuat jati diri kita sebagai bangsa. Akhir kata, terima kasih sebesar-besarnya atas dukungan dari Ngarsa Dalem Sri Sultan Hamengku Bawono Ka 10, Gusti Kanjeng Ratu Hemas, para pembicara, peserta, panitia, dan segenap pendukung acara simposium budaya Jawa tahun 2022. Selamat berdiskusi dan menggelorakan kembali semangat perjuangan Yogyakarta dalam menjaga kedaulatan Indonesia.

Matur nuwun.

Gusti Kanjeng Ratu Hayu

REVIEWER

JENNIFER LINDSAY, Dr. adalah seorang penulis, penerjemah, peneliti, dan duta budaya pemenang Anugerah Kebudayaan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 2019 dengan karya dan pemahamannya yang mendalam tentang Indonesia. Sejak tiba di Indonesia pada tahun 1970, posisi Lindsay termasuk Atase Kebudayaan di Kedutaan Besar Australia, Program Officer di Ford Foundation, dan Pemimpin Proyek yang merekam dan membuat katalog manuskrip bersejarah di Keraton Yogyakarta. Sekarang menjabat sebagai Honorary Associate Professor di School of Culture, History and Language, Australian National University

ANNABEL TEH GALLOP, Dr. adalah Kepala Koleksi Asia Tenggara di British Library, London, Inggris. Dia menyelesaikan pendidikan di Bristol University dan School of Oriental and African Studies (SOAS), London University, di mana dia mendapatkan gelar doktor (PhD) pada 2002 dengan disertasi *Malay Seal Inscriptions: A Study in Islamic Epigraphy from Southeast Asia*. Minat utama penelitiannya adalah manuskrip, surat, dokumen, dan cap Melayu, serta seni Al-Quran di Asia Tenggara.

MATTHEW ISAAC COHEN, Ph.D. adalah Profesor di Departemen Seni Drama di Professor di University of Connecticut, dengan spesialisasi dalam tradisi global teater boneka dan seni pertunjukan Indonesia yang mengajar di berbagai penjuru dunia. Ia memperoleh gelar doktoralnya dalam bidang antropologi di Universitas Yale. Professor Cohen menulis tiga monografi, *The Komedi Stamboel: Popular Theater in Colonial Indonesia, 1891-1903* (2006), *Performing Otherness: Java and Bali on International Stages, 1905-1952* (2010) dan *Inventing the Performing Arts: Modernity and Tradition in Colonial Indonesia* (2016). Dia juga mahir mendalang dan berpentas di berbagai nagara.

DJOKO MARIHANDONO, Prof. Dr. adalah Guru Besar Sejarah di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Dia mendapatkan gelar doktoralnya dari Universitas Indonesia dengan disertasi berjudul “*Sentralisme Kekuasaan Pemerintahan Herman Willem Daendels di Jawa 1800-1811: Penerapan Instruksi Napoléon Bonaparte*”. Hingga saat ini, beliau berperan aktif dalam kegiatan penelitian dan beberapa karyanya telah dibukukan seperti *Sri Sultan Hamengku Buwono II: Pembela Tradisi dan Kekuasaan Jawa*.

DJOKO SURYO, Prof. Dr. adalah Guru Besar Sejarah di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Gadjah Mada. Dia menempuh pendidikan master dan doktornya di Monash University dengan disertasi yang kemudian diterbitkan berjudul *Sejarah Sosial Pedesaan Karesidenan Semarang, 1830-1900* (1988). Dia mengembangkan perspektif tentang pengaruh ekonomi modern dan modus kapital masuk dan berperan dalam mengubah sebuah wilayah penduduk dan kehidupan sosial-ekonominya. Atas kontribusinya, Kraton Yogyakarta menganugerahkan nama KRT Suryohadibroto.

EDITOR

REVIANTO BUDI SANTOSA, Dr. adalah dosen di Jurusan Arsitektur Universitas Islam Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Ketua Program Studi Magister Arsitektur. Dia mengkaji sejarah dan teori arsitektur serta konservasi warisan dan studi budaya pada umumnya. Di antara buku yang dipublikasikan adalah *Omah: Membaca Makna Rumah Jawa* (2000), *Kudus - Sepenggal Yerusalem di Tanah Jawa* (2019) dan *Kotagede: Life between Walls* (2007) dan *Keistimewaan Yogyakarta dalam Perspektif Arsitektur* (2022). Dia dipercaya sebagai Ketua Dewan Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2019-2022.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Reviewer dan Editor	v
Daftar Isi	vi
Selokan Mataram: Pergulatan Kuasa Jepang dan Sri Sultan Hamengku Buwono IX (1942-1945) dari Perspektif Teori Akses	1
<i>Muhamad Alnoza</i>	
Tugu Yogyakarta Merentang Masa: Transformasi Bentuk dan Makna Golong-Gilig dan Pal Putih	2
<i>Rizki Dwika Aprilian dan Muhammad Naufal Fadhil</i>	
Transformation of Heritage Architecture in Saujana Jeron Beteng, Yogyakarta	3
<i>Dina Shafira Irawan dan Laretna T. Adishakti</i>	
Bagongan Dialect in Social Media and its Position in the Society: A Sociolinguistic Study	28
<i>Nurvita Wijayanti dan Panggio Restu Wilujeng</i>	
Keraton dan Rekonsiliasi ‘65: Kontribusi Masjid Soko Tunggal Terhadap Perdamaian Bangsa (1972-1999)	38
<i>Erik Muhammad R, S.S.</i>	
Tradisi Penyambutan dan Penghormatan Tamu di Keraton Yogyakarta sebagai Bentuk Pola Relasi pada Masa Pemerintahan Hamengku Buwana VII dalam Naskah <i>Koepija Djendralan</i>.....	54
<i>Clara Shinta Anindita Apriyadi dan Mamlahatun Buduroh</i>	
Eksistensi Tari Srimpi Pandhelori Gaya Yogyakarta di DKI Jakarta.....	70
<i>Sulistiani</i>	
Gamelan Kangjeng Kyai Sekati Kasultanan Yogyakarta Dalam Perbandingan	71
<i>Sumarsam</i>	
Gamelan Instruments from Kasultanan Yogyakarta to Japan in 1940	72
<i>Masami Okabe</i>	
<i>Tĕdhak Loji</i>: Praktik ‘Konsolidasi’ Politik Hingga Eskalasi Ekonomi Pada Pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono VII	88
<i>Fajar Wijanarko dan Tepas Tandha Yekti</i>	
Diplomasi Sang Raja: Kontribusi Kasultanan Yogyakarta Dalam Periode Awal Kemerdekaan Indonesia	104
<i>Pratika Rizki Dewi</i>	
The Role of Kraton Yogyakarta to Local Wisdom Improvement During Nationalism Movement	120
<i>R.M. Pramutomo</i>	
Analisis Wacana Keteladanan Sikap Putri Keraton Yogyakarta: Keraton Inklusif Bukan Eksklusif	121
<i>Endang Tri Irianingsih dan W. Hendro Saputro</i>	
Peran Dan Sumbangsih Kraton Yogyakarta Terhadap Lembaga Pendidikan Musik Di Indonesia	137
<i>R.M. Surtihadi</i>	
Ajaran Filsafat Moral Tari Srimpi Pandhelori dan Joged Mataram sebagai Pendidikan Olah Rasa Dan Etika	145
<i>Risa Kaizuka dan Titik Agustin</i>	

SELOKAN MATARAM: PERGULATAN KUASA JEPANG DAN SRI SULTAN HAMENGKU BUWONO IX (1942-1945) DARI PERSPEKTIF TEORI AKSES

Muhamad Alnoza

Program Pascasarjana Antropologi, Universitas Gadjah Mada

Abstrak

Selokan Mataram (dalam Bahasa Jepang disebut sebagai Kanal Yoshiro) dibangun di antara tahun 1942 sampai dengan 1945. Kanal ini mengalirkan air dari Sungai Progo di barat menuju Sungai Opak di timur ini. Selokan Mataram membentang sepanjang 31.2 km di atas lahan-lahan pertanian di Sleman, Yogyakarta. Pembangunan Selokan Mataram secara historis tidak dapat dilepaskan dari peristiwa pendudukan Jepang di Yogyakarta serta peran penting Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang berkuasa ketika pembangunan kanal tersebut berlangsung. Peneliti-peneliti terdahulu yang mengkaji soal Selokan Mataram, menjelaskan beberapa informasi penting terkait kanal ini. Dikatakan bahwa Selokan Mataram yang dibangun atas adanya dorongan ekonomi yang kuat, dalam hal ini berkaitan dengan kebijakan pengairan lahan pertanian di daerah Sleman. Pembangunan Selokan Mataram juga disebut-sebut sebagai strategi yang digunakan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX, dalam mengatasi permintaan pemerintahan kolonial Jepang atas dukungan sumber daya manusia (romusha) untuk keperluan kebutuhan perang Asia Timur Raya. Kajian sebelumnya juga menyebut bahwa Selokan Mataram di masa kini merupakan lanskap budaya yang berpotensi di bidang pariwisata, mengingat nilai sejarah yang dikandungnya. Berdasarkan pertimbangan dari riwayat penelitian terhadap Selokan Mataram, kajian mengenai Selokan Mataram dengan menggunakan pisau analisis arkeologi (khususnya arkeologi pemaknaan) belum pernah dilakukan. Oleh karena itu, kajian ini secara mendalam membahas makna dari Selokan Mataram dengan menggunakan perspektif arkeologi. Asumsi dasar dilakukannya penelitian ini terdiri dari dua poin penting, antara lain 1) Selokan Mataram merupakan datum arkeologi yang dibangun oleh suatu masyarakat pendukung atas budaya tertentu, dan 2) Selokan Mataram sebagai datum arkeologi sifatnya merupakan simbol yang memiliki makna akan suatu konsep. Penelitian ini secara lebih sempit dikaji dengan fokus pembahasan makna politis, melalui pengaplikasian Teori Akses dari Jesse C. Ribot dan Nancy L. Peluso.

Kata kunci: Selokan, Mataram, Sejarah, Jepang, Sri Sultan, Kanal, colonial

***Full Paper dari judul dan abstrak ini terdapat pada Book Chapter yang diproduksi pada Simposium 2022**

Tugu Yogyakarta Merentang Masa: Transformasi Bentuk dan Makna Golong-Gilig dan Pal Putih

Rizki Dwika Aprilian¹, Muhammad Naufal Fadhil²

¹Departemen Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia

²Fakultas Seni Rupa dan Desain, Institut Seni Budaya Indonesia Aceh

rizki.dwika@gmail.com

Abstrak

Tugu Golong-Gilig merupakan perlambang manunggalnya rakyat dengan Sultan Ngayogyakarta Hadiningrat yang disimbolkan dalam wujud suatu tugu di tengah Kota Yogyakarta. Tugu Golong-Gilig pertama dibangun oleh Sri Sultan Hamengkubuwana I pada tahun 1756, setahun setelah pembangunan keraton yang baru. Akibat gempa besar 1867, tugu tersebut hancur dan kemudian dibangun kembali dengan bentuk baru yang diresmikan pada 1889. Melalui penelusuran arsip, dokumentasi, dan sumber sejarah, penelitian ini hendak mengidentifikasi transformasi bentuk dan makna Tugu Golong-gilig (Pal Putih) dari masa lalu hingga masa sekarang. Dari penelitian ini, ditemukan bahwa tugu peninggalan Kasultanan Ngayogyakarta tersebut tidak hanya menyimpan fungsi simbolis seperti pada masa silam semata, tetapi juga dapat dirasakan pergeseran pemaknaannya secara signifikan dalam aspek pariwisata, perekonomian, dan pembangunan identitas wilayah yang berubah-ubah pada setiap masa.

Kata kunci: *golong-gilig, landmark, transformasi, Yogyakarta*

***Full Paper dari judul dan abstrak ini terdapat pada Book Chapter yang diproduksi pada Simposium 2022**

Transformation of Heritage Architecture in Saujana Jeron Beteng, Yogyakarta

Dina Shafira Irawan¹ Laretna T. Adishakti²

^{1,2} Architecture Master Program, Department of Architecture and Planning, Gadjah Mada University
dinashafira98@mail.ugm.ac.id

Abstract

Jeron Beteng is a historic center of Yogyakarta and considered as saujana, as it is result of human creativity in shaping a living environment inside Baluwarti fortress by adapting traditional Javanese culture and philosophy. Heritage architecture is part of tangible heritage that forms identity, memory, and sense of place of saujana Jeron Beteng and needs to be conserved. Conservation should be done by managing changes to retain the cultural significance of Jeron Beteng. This research uses historic study to identify the transformation of four elements that began shaping Jeron Beteng as a living environment, which are the living quarter for Sultan and the nobles, administrative headquarters for Keraton Yogyakarta, the settlement of the *abdi dalem* and the *pandais*, as well as the fortification system. This research found that the transformation of those components is affected by crisis and disaster, and the other factor is financial capability. Not all transformations were done according to conservation measure. The conservation of heritage architecture in saujana Jeron Beteng was done by adaptation, reconstruction, and maintenance

Keywords: transformation, heritage architecture, saujana, Jeron Beteng | olah desain, arsitektur pusaka, saujana, Jeron Beteng

INTRODUCTION

The heritage of Indonesia is the legacy of nature, culture, and saujana. Saujana refers to the inextricable unity between nature and manmade heritage in space and time (JPPI & ICOMOS, 2003). The formation of saujana city center of Yogyakarta began in 1756 AD by the establishment of royal palace known as Keraton that is encircled by fortification system. The built environment inside the fort is referred in Javanese language as “Jeron Beteng” which means “inside the fort”. Later, the fort would be reinforced with mason structure and known as Baluwarti fort. For 256 years since its formation, the cultivation of saujana Jeron Beteng is an on-going creative process resulting tangible and intangible heritage that forms the identity, memory and ‘sense of place’ of historic city center of Yogyakarta. The heritage of saujana Jeron Beteng is nonrenewable, and it should be passed to future generation. Hence, conservation of Jeron Beteng should be taken as a measure to manage the heritage, to maintain sustainability and harmony, to develop a better quality of life so as to retain its cultural significance (JPPI & ICOMOS, 2003; The Burra Charter, 2013). Conservation is also a management of change (Ashworth, 1991; UNESCO, 2011; Wijesuriya et al., 2013). It should have capacity to respond to the dynamic nature of saujana Jeron Beteng, as it is an urban landscape that undergoes perpetual change caused by urban developments, the interests of the authorities, natural phenomena, and the needs of space users.

Conservation is the management of heritage through research, planning, preservation, maintenance, reuse, protection, and/or selected development (JPPI & ICOMOS, 2003). According to Burra charter, preservation is an action to maintain a place in its existing state and retarding deterioration. Maintenance is a continuous protective care of a place and its setting. Maintenance is to be distinguished from repair which involves restoration or reconstruction. Restoration means

returning a place to a known earlier state by removing accretions or by reassembling existing elements without the introduction of new material, while reconstruction means returning a place to a known earlier state and is distinguished from restoration by the introduction of new material. According to Burra Charter and Ministerial Regulations of Ministry of Public Works and Housing Indonesia Number 19 Year 2021, adaptation refers to:

“(an action of) changing a place to suit the existing use or a proposed use without reducing or damaging its cultural significance “.

In Indonesia, the concept of adaptation is known as *Olah Desain Arsitektur Pusaka (ODAP)*². The act of adaptation could be carried out by infill strategy by constructing new building in an established and valued historic context. Good infill is building that is sympathetic to the surrounding buildings and historic context and creates new structures that enhance and complement the existing urban character. Infill buildings can provide functions and services that adjacent heritage buildings may find difficulty in accommodating without major change. It is a creative leap in its architectural, cultural and economic context (Adishakti, 2017; New South Wales Heritage Office, 2005)

METHOD

This research is done to know how conservation measure is implemented in saujana Jeron Beteng by analyzing the transformation of its heritage architecture. Saujana Jeron Beteng is the result of a historic layering of cultural and natural values and attributes. Therefore, this study is history research because it wants to bring into view the changes in saujana Jeron Beteng that had happened since its formation in 1765 AD until today. Researcher would unearth the changes from each historic layers through archival study of scientific articles, magazine and news, maps, satellite images and photographs. Then, researcher would analyze the manifest and latent content of the data. This method is known as content analysis (Krippendorff, 2004). The analysis is classified

into eight periods that brought the most significant change in saujana Jeron Beteng through notable and best recorded response by architecture transformation. These periods are the early sultanate, Sepahi riot, 1867 earthquake, the reign of Sri Sultan Hamengkubuwono VIII, Indonesian revolution, New Order, Indonesian reformation, 2006 earthquake and Post Specialty Law of Special Region of Yogyakarta.

RESULTS AND DISCUSSION

Early Sultanate (1765 AD-1821 AD)

In the Kingdom of Mataram, a civil war broke out between Pakubuwono II, the last ruler of Kartasura, and Prince Mangkubumi, his younger brother and heir to the throne. During the war, Prince Mangkubumi proclaimed sovereignty over the Sultan family by defeating Pakubuwono II's army and occupying the southern part of the former Mataram Kingdom. The civil war was concluded by the Treaty of Giyanti, in which, Mangkubumi established Yogyakarta Sultanate and ascended to the throne as Sultan Hamengkubuwono I. Sultan decided to build his palace in a swampy banyan forest as he believed that it was a fertile land. He commanded his engineers to cut down the forest, layered the swamp with soil and rechanneled the rivers to dry the swamp and built the Keraton (royal palace) complex on top of it from 1755 AD to 1756 AD. The construction of the Keraton Yogyakarta complex is well documented. It was known that the construction was carried out in stages since Sri Sultan Hamengkubuwono I entered Keraton on October 7, 1756 (Sumalyo, 2021). In this early period of Yogyakarta sultanate, Keraton buildings were built with non-permanent construction, using accessible natural material such as timbers and rattans. For example, wide wooden structure roofed with rattan plaited mats was constructed to shelter the

king's throne. This structure was constructed on an elevated ground. Hence, it is known as "Siti Hinggil" which means "raised ground" in Javanese.

Two squares were built on the south and the north of Keraton as the representation of *segara* (ocean). Therefore, these squares were referred as *Alun-Alun* which means "rolling wave". Series of building known as *pekapalan* was constructed on the perimeter of northern Alun-alun. It was used to accommodate royal officials who appeared before the king when attending important events and ceremonies (Ikaputra, 1996). Fortification system made of *gelugu* (coconut timber) was built encircling Keraton as protective measure from outside threat (Wardani & Soedarsono, 2013). The construction of the fort created a spatial division between *jeron* (inside) and *jaban* (outside). The terms "Jeron Beteng" than used to refer a built environment inside the fort that occupied by the state officials, high rank nobles, *abdi dalem* (servants of Keraton and the nobles) and the *pandai* (royal engineers and technicians) (the Study Team of the Faculty of Cultural Sciences UGM 2003 in Arthasari, 2014). The settlement would later develop into *kampung* (village) that retains the toponym of its original settlers until this day. The scenery of Jeron Beteng is captured on 1771 AD painting by A.Nelly, in which the landscape consisted of Keraton, surrounded by few buildings and trees, and surrounded by guarded wooden gate.



Fig 1. Map of Jeron Beteng in 1765
Source: Image courtesy of Kasto, 2020

Three years after Giyanti treaty, Sultan Hamengkubuwono I built Tamansari. The name "Tamansari"³ refers to its literal meaning as beautiful garden decorated with flowers. Tamansari was designed to as resort for Sultan after many years of wars that he had just experienced. The complex was built on the Pacethokan spring, which had been a notorious bathing place since the reign of Sunan Amangkurat IV (1719 AD–1726 AD)(Oey, 2001). This complex was consisted of pavilions and gardens which are surrounded by *segaran*, man-made lake representing the ocean. The water flow for *segaran* was following the natural inclination of the slope, from the northeast to the southeast, through vaulted brick canals (Dumarçay, 1978). Aside from its purpose as recreational garden, Tamansari was also designed as defensive measure. Older articles described Tamansari as "water castle" (Dutch: waterkasteel); as the water gates is closed, the complex would be completely submerged and revealing pavilions with multi-story construction which has no equivalent model in Java. Its architectural program has unique characteristics, which at first glance seem to isolate it from the urban landscape context of Java in the 18th century. (Njoto-Feillard, 2003). The construction of the garden is the prelude to a period animated by intrigue at the court, but nonetheless peaceful and prosperous, mediated by the Dutch East India Company (VOC), then masters of the main trading posts of the archipelago (Njoto-Feillard, 2003).

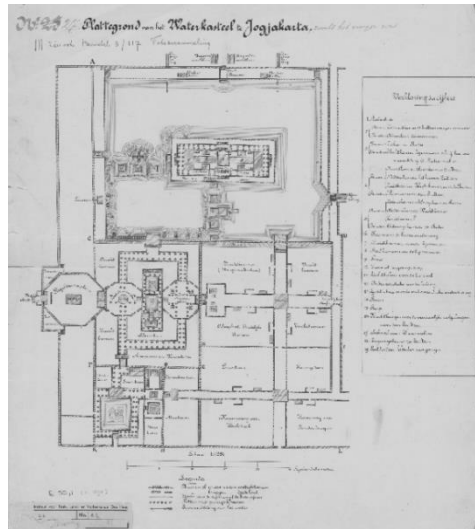


Fig 3. Plan of the western segaran Source: (Leiden, 1890)

The crown prince Adipati Anom resided on a complex known as Kadipaten, located on the north-east of Keraton. Plengkung Tarunasura, one out of five entrance gates to Jeron Beteng, was once especially constructed as the entrance gate of Kadipaten (Carey, 2004). The long boulevard to Kadipaten was known as *gledhegan* and lined by Sawo tree on its side. This boulevard protruding to the north is the reason why Baluwarti fort does not encircle the palace in a perfect rectangular shape. The name *Sawojajar* which means “rows of Sawo tree” is used as the name for the road that pass through the former Kadipaten complex today. As the living quarter of the crown prince’s, this complex did not only serve domestic purpose. It also functioned as administrative headquarter where official guests should follow strict protocols before meeting the prince which result spatial stratification. The frontal part of Kadipaten was functioned as public space, in which *Banjar Andhap* was constructed as temporary waiting place for prince’s guest. A public mosque was erected on the west of *banjar andhap*. A *pendhopo*⁴ functioned as barrier from public space to the Kadipaten’s private compound. Notable royal affairs such as wedding ceremony and even secret meeting held in the Kadipaten defined the importance of this complex (Retnaningtiyas, 2018). On the east of *pendhopo*, stand a mosque with masonry construction known as Selo⁵ mosque. The architecture style of Masjid Selo resembled Tamansari as they were constructed on the same period (Bonneff, 1985).

Aside from Selo Mosque, there are two other important mosques that were constructed in Jeron Beteng and had special ties to Keraton. Panepen mosque is erected on *keputren* (concubine’s ward) inside Keraton. The name “Panepen” related to its role as the sultan’s place for *nenepi* (an act of solitude) and did spiritual practice of *taqarrub* (get closer to the Almighty). Panepen mosque was relatively small and humble due to its lack of decoration, because it was reserved only for Sultan, his male relatives, and occasional royal guests. Male descendants of Sultan who have not yet reached puberty would study religion in this mosque and continued their education outside the palace in Pathok Negara mosque (Zakaria, 2011). On the other hand, Rotowijayan Mosque was constructed outside Keraton complec in 1790 AD. This mosque is also known as the Suranatan mosque because it was formerly inhabited by *abdi dalem* Suranatan, who is trusted to manage religious affairs of Keraton. One of its main responsibility is to *meruwat* (taking care) all the heirlooms belonging to the Keraton (Adham, 2020)



Fig 4. The Kadipaten Complex
Source: (Situatie Der Ommestreeken van Djocjakarta, 1833)

Sepehi riot

By 1800 AD, the Dutch had colonized almost all of Java except for the hinterland of Mataram Sultanate. However, six years later Netherland had to hand over East Indies as French colony as the aftermath of Napoleon war. King Lodewijk Napoleon then dispatched general Herman Willem Daendels to strengthen Java's defenses against a possible British invasion. Crown prince Adipati Anom who had ascended to the throne as Sultan Hamengkubuwono II commanded the reinforcement of Baluwarti as a response to Daendels's arrival (Poespaningrat, 2008). The timber fort was replaced by thick brick walls and surrounded by *jagang* (moat)(Artha, 2000). Four bastions were constructed in each corner of the fort, while the access to the fort was controlled through five *plengkung* (arched entrance gate).

Britain managed to seize East Indies by 1810 and ruled over Java. Rumors of the Yogyakarta Court's plan to launch an attack on the British caused discomfort among the Britons stationed in Java. On 19-20 June 1812 1.200 British soldiers and *Sepoy* (Indian soldiers employed by the British. Hence the name *geger sepehi* or *sepehi* riot), assisted by 800 soldiers of the Mangkunegaran Legion stormed Keraton Yogyakarta. Surprised by the attack, the Yogyakarta army was easily defeated. The Keraton fell in a day and was then looted and burned (Hannigan, 2011). The north-eastern area of Jeron Beteng suffered the most damage, including its fort, bastion and the Kadipaten complex. This riot also caused *plengkung* Madyasura to be permanently closed as part of a defense strategy, after previously Keraton had heard that enemy troops were planning to enter through this *plengkung* (*Benteng Keraton Yogyakarta*, 2017). A year after the riot at the time of the reign of Sultan Hamengku Buwana III, *plêngkung* Madyasura is demolished as its existence was considered to cause misfortune (Hermanu, 2012) . The British invasion to Keraton Yogyakarta also destroyed considerable parts of the Tamansari complex (Panular et al., 1992).

1867 Earthquake

Historical records indicate that Yogyakarta's 1867 earthquake damaged 372 houses and killed five people (Nizam, 2009). As the result, Sri Sultan Hamengkubuwono VI allowed the refugees to occupy the open space on the sides of the fort as a temporary residence. The earthquake also badly damaged Taman Sari complex (Tjahjani, 2005). Rather than rebuilding the Tamansari, the Sultan allowed his *abdi dalem* who had lost their homes to settle in the ruins of Tamansari. This earthquake also damaged many buildings in the Kraton complex, such as *Tratag* Pagelaran, Bangsal Mangunturtangkal, Bangsal Witana and Tarub Agung (*Management Plan - The Cosmological Axis of Yogyakarta and Its Historic Landmarks*, n.d.).



Fig 5. Gedung Panggung, part of Tamansari water castle before damaged by 1867 earthquake.
Source: (Camerik, 1864)



Fig 6. Ruins of Gedhong Panggung
Source: (Cephas, 1890)

Reign of HB VIII (1921 AD – 1939 AD)

Sri Sultan Hamengku Buwono VII, the predecessor of HB VIII acquired notorious wealth from the industrialization of agriculture⁶ and land rent. Therefore, by the reign of HB VIII, the Keraton had sufficient fund to carried out renovation for its building as well as number of other structures in the spirit of modernity. From 1921 AD to 1934 AD, the renovation of Keraton buildings mostly replaced the non-permanent materials with industrial construction imported from Europe. One of the traditional construction typologies that underwent this renovation are the *tratag*. It mainly refers to temporary buildings that can be dismantled after the activities (such as celebrations or funerals) taking place in them are completed (Sumalyo, 2021). In Keraton complex, *Tratag* construction were notably used for Pagelaran and Sitihinggil. Photograph taken around 1890 AD-1935 AD also showed that Bangsal Gajahan, the elephant stable of Sultan was also use *tratag* construction⁷. *Tratag* in Keraton was wide span wooden structure with roof of woven rattan and not enclosed by any walls. *Tratag* Pagelaran was even propagated by vine plants as it's shading (Sumalyo, 2021), and was named *tratag rambat*, as "*rambat*" means "vine" in Javanese. In the time of HB VIII, the humble wooden structure of Sitihinggil and Pagelaran was replaced by luxurious steel frames and cast-iron pillars. The buildings were decorated with intricate floral ornament, combining traditional Javanese artistry with art deco style which is popular at the time. While *tratag* of Bangsal Gajahan was replaced by mason wall topped with *joglo* roof.



Fig 7. Pagelaran before renovation.
Source: (Cephas, 1888)



Fig 8. Pagelaran after renovation with added pediment
(white line). Sumber: (Zindler, 1939)



Fig 9. Pagelaran floor plan before renovation
Sumber: (Plattegrond van Het Noordelijk Deel van Het
Middenvak van de Kraton, 1890)

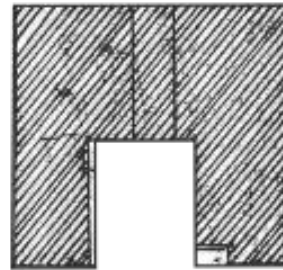


Fig10. Pagelaran floor plan after renovation as drawn
in Yogyakarta maps of 1941
Source: Image courtesy of Ikaputra, 2021

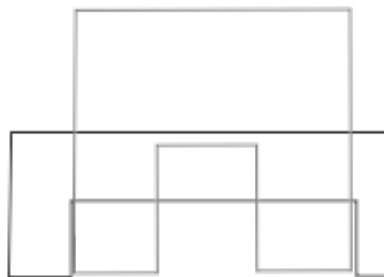


Fig.11. Overlay of Pagelaran's floor plan before renovation (black line) and after renovation (red line) shows the
addition of building mass to the north while reducing of building's width
Source: Author, 2021



Fig 12. Sitihiinggil before renovation.
Source: (Kraton Te Jogjakarta, circa 1920)



Fig 13. Sitihiinggil before renovation.
Source: (De Kraton Te Jogjakarta, circa 1935)



Fig 14. Sitinggil before renovation.
Source: (Cephas, 1888)



Fig 15. Sitinggil after renovation
Source: (Zindler, circa 1930)

HB VIII also renovated *Gedhong Jene*, the king's residence inside Keraton. Photo taken by Kassian Cephas at the end of the 19th century shows that *Gedhong Jene* was a one-story building, and its facade was dominated by a two-story shingle roof. It had a low porch facing east, lined with a wrought-iron fence decorated with potted plants. The focal point of the façade was an iron-cast gate decorated with floral ornaments and a Keraton plaque with the inscription of “HB VII” in Latin. The renovations carried out by HB VIII completely changed the old building. *Gedhong Jene* was renovated to a two-story building. The fence was removed so that the building's facade could be seen clearly. The entrance gate is replaced by a *kuncung*, which is the part of the hallway that protrudes forward as a place for guests to get off their vehicles. It was decorated with a pediment with the symbol of Keraton Yogyakarta. The facade of *Gedhong Jene* was no longer dominated by its roof as in the time of HB VII. Gold-plated ornaments resembling European palaces that adorned the mirrors, three doors, and the eaves of the building were the dominant elements instead. At the same time, *Regol Danapartapa* was also renovated in a Javanese-colonial architectural style like *Gedhong Jene*. Before the renovation, the *regol* (gate) was shaded by a simple gable roof (Sumalyo, 2021). The renovation was carried out by adding a carved pediment with *candrasengkala*⁸ supported by two dashing pillars. In the period of HB VIII, it seems that the beautification of some Keraton building by combining Javanese-European styles which are not at all similar to other buildings in Keraton, and introducing industrial materials is intended to reflect modernization and the wealth of Keraton, as well as its close relationship with the Dutch.



Fig 16. *Gedhong Jene* before renovation.
Source: (Cephas, 1896)



Fig 17. *Gedhong Jene* after renovation
Source: (Gottschalk, 2018)

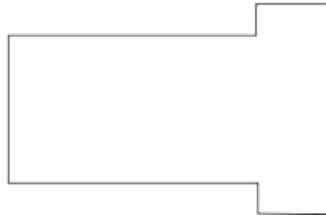


Fig.18 Gedhong Jene's floor plan before renovation
 Souce: (Plattegrond van Het Noordelijk Deel van
 Het Middenvak van de Kraton, 1890)

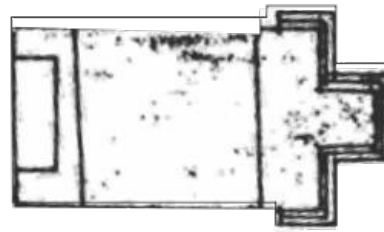


Fig.19 Gedhong Jene's floor plan after renovation
 depicted the addition of 'kuncung on the eastern
 part of the building
 Source: Courtesy of Ikaputra, 2021

In this period, numbers of noble's residence known as *dalem* were already constructed. Ikaputra described *dalem* in his research about the historicity of Yogyakarta as:

(usually) a complex of buildings which is surrounded by high wall. To enter the complex, one passes through a gate or sometimes, two gates. The orientation of the *dalem* is always north or south. The noble lends land within his *dalem*'s wall to the *abdi dalems*, the servant of the noble family who worked there to studied etiquette and practice high Javanese culture as well as seeking for good fortune of *berkah* (blessing). The right of *abdi dalems* to occupy this land is known as *magersari* (Ikaputra, 1996).

In Ikaputra's research, Gunawan Cahyono suggested that the *dalem*'s complex can be classified as bigger than the ideal house of Javanese dwelling. It also has relatively complete version of roof types, which is considered as a key element in the Javanese built environment. The frontal yard is functioned to welcome guest, in which *pendopo* is constructed as the place to perform traditional arts to comfort the guests. While the back yard is private living domain for the nobles. In general, *dalem* is named after the name of the priyayi who inhabits it or based on the title/attribute of nobility(Ikaputra, 1996).

One of which is Dalem Pakuningratan. It was nicknamed "*keraton cilik* (little Keraton)" by local residents because of its proximity to Keraton (Pramudito & Ida Cahyandari, 2018). The *dalem* was firstly occupied by prince Purboyo, and he ordered the renovation of Dalem Pakuningratan in 1926. The first phase was the construction of a porch to connect *pendhopo* with *pringgitan*. Cast iron construction which was not widely available at that time was chosen for its construction, showing the financial ability of the building patron and the spirit of modernization. Later, renovation carried out in 1928 added *cekokan* (back porch), and 1939's renovation replaced the stucco floors of the main palace complex with patterned tiled floors (Pramudito & Ida Cahyandari, 2018)



Fig 20. Maps of Dalem's distribution in Jeron Benteng
 Source: Author, 2021

The newly emerged automotive industry of 20th century revolutionized the urban planning of Yogyakarta. Motorized vehicle demanded wider and more connected roads. As the result, Sultan HB VIII renovated Plengkung Jagasura (Plengkung Ngasem) and Plengkung Jagabaya (Plengkung Tamansari) by changing its narrow-arched gate into *bentar* (split gate) to provide wider space for vehicles between the gates. From maps and photos from the 1920s to 1940s, it is also known that there was a three-way street that divides the northern square. This road is paved so that it can be used by motorized vehicles.

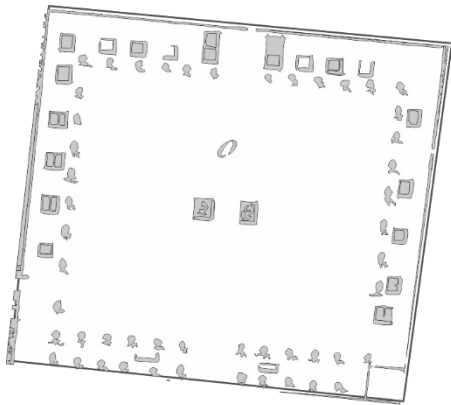


Fig 21. Northern Alun-alun in 1833
Source: (*Situatie Der Ommestreeken van Djocjakarta, 1833b*)



Fig 22. Northern Alun-alun in 1925
Source: (*Batavia, 1925*)

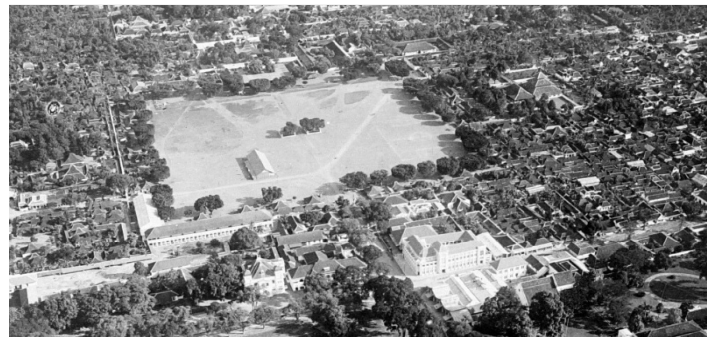


Fig 23. Aerial view of Northern Alun-alun Source: (*Djogja in Vogelvlucht, n.d. circa 1900-1940*)
<https://hdl.handle.net/20.500.11840/232603>

Indonesian Revolution (1940s-1950s)

On the time of Indonesian revolution, Keraton Yogyakarta was also widely used for activities in the struggle for the independence of the Republic of Indonesia. Gêdhong Jêne, apart from being the residence of the sultan, was also to receive important guests. Meanwhile, Siti Hinggil is used for political activities involving large numbers of guests, such as the coronation of Ir. Soekarno as president of Republic of the United States of Indonesia; (Wardani & Soedarsono, 2013). In 1956, the southern Siti Hinggil was renovated to commemorate the 200th anniversary of Yogyakarta sultanate. Southern Siti Hinggil was constituted of a *pendhopo* that sheltered *selo gilang*, the Sultan throne (Wardani & Soedarsono, 2013). The renovation replaced the *pendhopo* with brick-and-mortar structure but still using the *joglo* roof. Sultan also lent several Keraton buildings for educational purposes, such as Siti Hinggil and Pagelaran complexes that were loaned to Gadjah Mada University from 1949 to 1960. The nobles also allowed educational institution to use their Dalem. Dalem Yudanegaran was used by faculty of literature of UGM until the 1960s, while Dalem Mangkubumen was loaned to the Faculty of Medicine Gadjah Mada University from 1949 to 1975. This institution chose to construct a semi-permanent building around the Mangkubumen courtyard and occupy a small part of the supporting buildings rather than using the main Dalem building.

Yogyakarta was also an essential base in the Indonesia's struggle for Independence, so there was a need to build new military and defense facility. Dalem Ngadikusuman was purchased by the State Safety Supervisory Service on July 28, 1952, and new police dormitory was built around the

Dalem. Since it was inhabited by GPH Suryoputra, son of Sultan Hamengku Buwana VI, it had already often been used as studio to practice Javanese arts. Later, the Dalem was often used for sports and youth arts activities during the Japanese occupation. Meanwhile, Dalem Mangkubumen was used by General Sudirman as a temporary residence with the permission of Sultan Hamengku Buwono IX. These cases show that adaptive use of heritage architecture could solve the need for temporary facilities in the time of crisis. However, not all measure is taken appropriately from conservation perspective. In the case of Baluwarti fort, the revolution affected it's destruction as people who lived inside the fort suffered economy crisis and took the brick apart from the fortress wall to sell (Sektiadi, 2007).

During the independence period, Yogyakarta was once the capital of the Republic of Indonesia. The ministers and dignitaries often prayed in Margoyuwono Mosque, located on the east of southern Alun-alun. The construction of the Margoyuwono mosque was initiated by Pawiro Yuwono, a successful batik trader and it was inaugurated on August 29, 1943. The Margoyuwono Mosque consists of a mosque building and an open terrace that are supported by beautiful teak wood arches. The arch modules were also implemented on the design of mosque's doors and window, while floral-ornamented tiles were installed on the floor.



Fig 24. Gadjah Mada State University Campus at the Yogyakarta Palace Performance Source: Khazanah Arsip UGM.

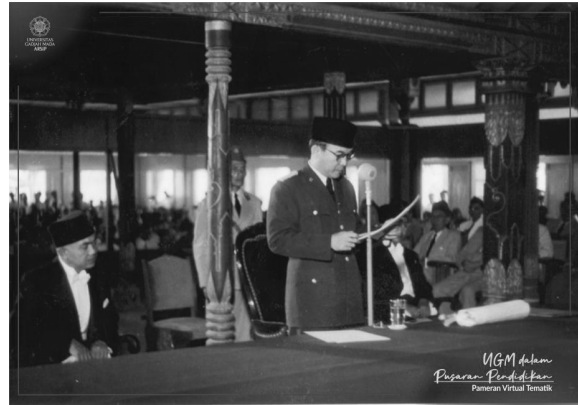


Fig 25. HC Doctoral Award Ceremony to Ir. Soekarno took place in Sitihiinggil on September 19, 1951, Source: Khazanah Arsip UGM.



Fig 26. Faculty of Medicine at Dalem Mangkubumen Complex in the 1950s. Source: Khazanah Arsip UGM.



Fig 27. Faculty of Medicine at Dalem Mangkubumen complex in the 1950s Source: Khazanah Arsip UGM.

New Order (1960s-1998)

At this period, most of the Baluwarti fort had been ruined and the *jagang* that once surrounded it had completely dried out. Keraton then issued a policy that allowed the space of the former fort to be rented out to the public at the suggestion of the mayor who served at that time. The land use right was known as *ngindung*, and residents were given *Serat Kekancingan* as permission license from the Keraton to occupy Sultan's ground in the former fort. The licensing board was formed in the 1970s and public and commercial buildings began to be built in the former fort area in 1971 (Arthasari, 2014). Meanwhile, more educational institution took place in Dalem complex. *pendhopo* of Dalem Padmokusuman was used by STM Nasional from 1975 to 1976 and Academy of Finance and Banking in 1980. The *pendhopo* and the side house were later used by Gajah Mada High School in 1990 until now. Meanwhile, Dalem Benawan was used as an SD Ngampilan I and II From 1960 to 1980. The regime of New Order repressed freedom of expression through censorship, *pembredelan* (newspaper theft), intimidation and violence. Hence, many arts institution carried their activities underground, including Academy of Dramatic and Film Arts (ASDRAFI). In the 1950s, ASDRAFI had its campus in Dalem Pakuningratan. However, after the communist massacre in 1965 known as G-30S/PKI, ASDRAFI was no longer an institution. It became a community instead, and still used the spaces in the Pakuningratan palace to gather and work.

Starting from this era, public are allowed to access most of the buildings inside Keraton Yogyakarta. Keraton were committed to promote its tangible and intangible heritage for education. After the death of HB IX, HB X inaugurated the HB IX Museum which was established in the Ksatriyan complex. The new museum appropriated traditional Javanese style. Despite of the use of *Joglo* roof blends with Keraton setting, the rest of the structure adopted non-traditional building technology. Air conditioning system is installed on the interior and the glass panels are applied on its façade. It seems like HB X wanted to state an appreciation to Javanese culture and spirit of nationalism, a different design approach compared to the industrialization and fusion architecture in the time of HB VIII. In addition to responding to educational and tourism activities, spatial changes also occurred in the profane field of the Yogyakarta Palace as the residence of the Sultan. The Sultan moved his residence from Gedhong Jene to the Keraton Kilen, the Palace that was once reserved for the Sultan's Queen Mother. The Sultan moved his residence so that he could interact with his family without being restrained by strict Keraton protocols (Wardani & Soedarsono, 2013) and Gedhong Jene is now used to receive only official guests.

Beside Keraton, Dalem Kaneman also open its door for tourism. This Dalem was established by KRT. Wiraguna, a *patih* and infamous *gamelan* and dance composer during the reign of HB VIII. Later, the Dalem would also be used by his sister which created a spatial division on dalem based on the gender of its user. Wiraguna resided the western part of *dalem* while his sister used eastern wing as her domain (R. B. Santosa, 2019). Before ascended to the throne as HB IX, Darajatun was often visit this dalem and stayed in the front eastern room of the Dalem. In 1989, the dalem was occupied by Ratu Anom, the sister of HB X who drove away the descendant of Wiraguna from the Dalem. When Ratu Anom resided this Dalem, she would use western wings and her son use eastern wing as his domain, which was an opposing spatial division compared to the time of Wiraguna. (R. B. Santosa, 2019) Ratu Anom also opened her Dalem for tourism activity and so she renovated some part of Dalem. For example, she added garden around *pendopo* to beautify its yard. However, it also limited outer visual access toward the *pendhopo* itself. Ratu Anom also turned Darajatun's bedroom into a museum to paid respect for his late father. She also opened the *gadri*, private terrace located on the back of *dalem*, as a dining hall for tourist who wanted to experience a royal banquet

Soko Tunggal Mosque was completed in 1973 and it is one of modern heritage architecture other than Margoyuwono mosque. The outstanding value of Soko Tunggal mosque is composed by its unique structure, where a single column known as *soko tunggal* erected on the center of

the mosque to support the entire *limasan* roof. The ingenious construction is also embedded with meanings, as the *soko tunggal* represented the first principle of Pancasila⁹, that is “Belief in the Almighty God”. Aside from the construction of new mosque, there was also a design intervention in historic Selo mosque. In the courtyard of Selo mosque, there used to be a small pool for cleaning the feet. However, this pool was filled by soil in 1955-1956 to provide extra space for more prayers. In 1962, above this pool was erected a library and extension of the mosque space to reduce the mystical image of the Sela mosque, because at that time this mosque was used as a place for storing coffins (*bandosa*). During this period, a loudspeaker tower was erected in the Sela mosque complex. In addition, at least in 1979 the floor of the Sela mosque was replaced with ceramic material (Bonneff, 1985).

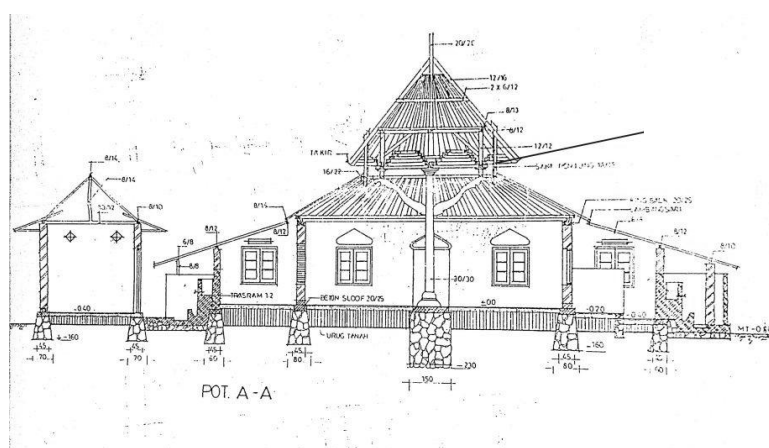


Fig 28. Section of Soko Tunggal Mosque Source: Courtesy of Arsip Masjid Kraton Saka Tunggal

Reformation (1998-2005)

During the national reform period, on May 20, 1998, Sultan Hamengku Buwana X allowed the northern square and Pagelaran to be used for peaceful, orderly, and non-destructive demonstration. More than a million people poured into Alun-alun. A wave of peaceful protest led by students demanding national reforms and demanded President Suharto to step down as President of the Republic of Indonesia¹⁰

In the time of reformation, Dalem Condokiranan was purchased by the government and became Museum Sonobudoyo Unit II since 1998. New building for office and warehouse was constructed around Dalem courtyard, surrounding the original *pendhopo* and Dalem. Although the eastern wing of the new building has two floors, its height does not exceed the roof of the pavilion. In addition, the new building used *limasan* roof so the overall architectural expression is still in harmony with the original Dalem complex. Inside the Keraton, four other museums were inaugurated in Ksatriyan complex. The Maduretna building, which was used as a school for the princes, and the Pringgadani building, which was used as the residence of the crown prince during the reign of HB VIII, have been converted into painting museums. Furthermore, the stables of the princes' horses are now used as a crystal and souvenir museum. In addition, the inn of the sultan's relatives in the Ksatriyan complex is now used as a batik museum, where batik activities are shown to palace visitors in the front hall of the museum. These museums display their collections in cabinets and display tables.

The restoration of Taman Sari began On January 12, 2004. The process is archived in the writing by Elanto Wijoyono, an archeologist who was involved in this project. According to his writing, the first phase of rehabilitation was to restore water to three ponds in the Taman Sari, as well as planning a dewatering system and planning a better lighting system. PThe second phases

included the renovation of Gedong Temanten, Gedong Pangunjukan, Gapura Panggung, Gedong Sekawan, and Gapura Agung and their courtyards. As well as landscape, lighting, and drainage arrangement. There was also an identification process to determine the condition of the existing buildings, which was then used as the basis for determining the conservation strategy to be carried out. In addition, some parts of the site were excavated to determine the authenticity of the site, the level of the building, and to look for the possibility of finding new finds.

Buildings that were heavily damaged in the Umbul Binangun complex were retrofitted with steel construction, while those that were less damaged were reinforced by using wooden constructions. Sumur Gumuling was reinforced with steel columns and tensile steel as the renovation was carried out by different contractor, and other part of the complex, such as the Ledok Sari complex, are only reinforced with cement. No rehabilitation was carried out in the ruin of Pulo Kenongo. The restoration of Taman Sari included plastering work with *bligon*, a traditional coating method consisting of a mixture of sand, lime, and red cement. This plaster resulted a reddish hue to Tamansari building. Wooden elements such as frames and doors and windows are furnished with traditional method by using mixture of tobacco water, *gedebog* (banana tree trunk). This method preserves the original wood and intensify its original color and texture at the same time. Because most of the wooden constructions in Taman Sari have already been painted several times before, the paint must be peeled off to reveal its original the texture before furnished with the tobacco mixture. (Wijoyono, 2005).

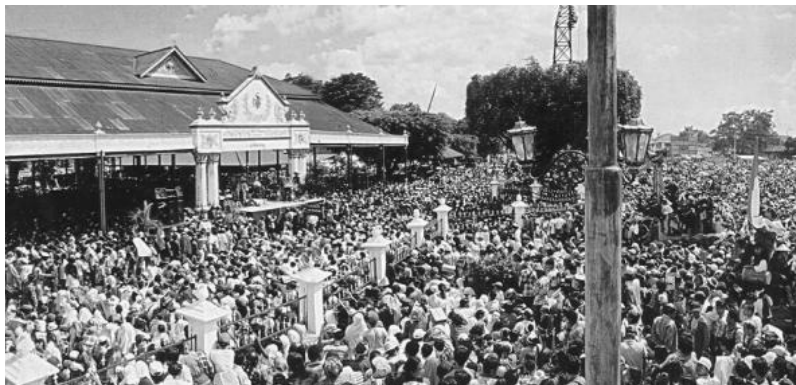


Fig 29. 1998's Demonstration on Pagelaran and northern Alun-alun Source: (Dean, 1998)
<https://garydean.id/works/journal1998>



Fig 30. Bangsal Gajahan before renovation.
 Source: (Kurkdjian, n.d.)



Fig 31. Bangsal Gajahan after renovation
 Source: Courtesy of Sistem Informasi Nama Rupa Bumi <https://sinar.big.go.id/>

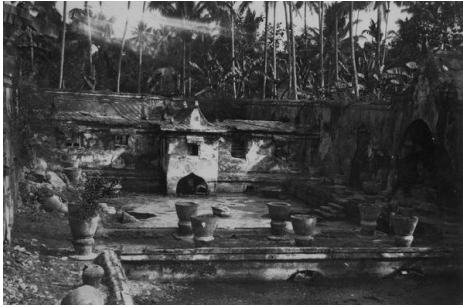


Fig 32. Ruins of Tamansari.

Source: (Waterkasteel Taman Sari Te Jogjakarta, 1932) <http://hdl.handle.net/1887.1/item:838314> 2015



Fig 33. Tamansari after restoration
Source: Courtesy of Adishakti, 2005

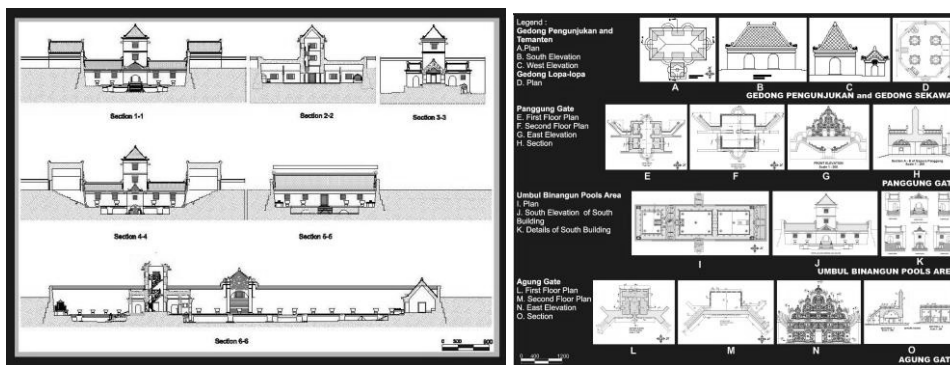


Fig 34. Technical drawing used as guidance for Tamansari restoration in 2004.
Source: Courtesy of Adishakti, 2005

2006 Earthquake

Yogyakarta earthquake in 2006 damaged the buildings inside Keraton including Bangsal Trajumas that completely collapsed. The structure of Bangsal Trajumas was unable to sustain the earthquake because the previous conservation was done haphazardly weakened many of its construction joints (R. Santosa & Prihatmaji, 2011). Learning from this mistake, the reconstruction process carried out in 2009 carefully studied and implemented traditional carpentry methods for Bangsal Trajumas.

Post Specialty Law of Special Region of Yogyakarta (2012-

According to the laws of the Republic of Indonesia Number 13 Year 2012, Special Region of Yogyakarta is privileged to accept funding from central government for administering special affairs of Yogyakarta. Part of the special funding was used for cultural affair, including design projects in historic architecture in Jeron Beteng. One of these projects is the fencing of northern Alun-alun carried out in 2020. According to Sri Sultan Hamengkubuwono X the fence constructed to restore the original form of the square (Kusuma, 2020). He referred to Atmotjendono's writing in Serat Tuntunan Padalangan, which stated that formerly, the square was fenced with sharp wooden stake (known as *pinatjak sutji*) (Nojowirongko, 1954). In fact, the restoration of the northern Alun-alun according to its original function is part of the management plan for Keraton Yogyakarta¹¹. However, the new fence was made of cast iron that is not in accordance with the references. It causes a misunderstanding of historical developments (Morton et al., 2017) and violates the principles of rehabilitation. Meanwhile, the *pekapalan* around the northern Alun-alun has undergone

a change in function into government agency offices, meeting buildings, art galleries and especially food stalls, which are growing rapidly as a response to recreational and tourism activities that occur in the northern square. These buildings retain the traditional Javanese roof typology such *joglo* and *kampung* roof. The large yard between *pekapalan* is used as an extension of the dining area, music stage and street vendor which effectively attracts customers.

In 2011, Yogyakarta City General Government Service held competition for the development of southern Alun-alun. The winning design was incorporated in the Building & Environmental Planning (RTBL) for the Yogyakarta Keraton Area and the design was realized soon after. One of the developments is the construction information board on the southeast and northwest corners of the square. The design was intended to create attraction in the corners of the square because it was considered as a dead space. Another development in southern Alun-alun is construction of security post and underground toilet in the southeast corner. Even though the design was not planned on RTBL, the construction carried out in 2017. The special fund was also used for reconstruction of northeast bastion of Baluwarti fortress (Gatra.com, n.d.), which was ruined in Sepahi riot in 1811 AD. However, the project caused controversies as heritage practitioners claimed that there were no documents for the original plan of the bastion¹². Hence, the reconstructed bastion was considered as a “fake” imitation among heritage experts. The construction was done by demolishing buildings that occupied the ruins of northeast bastion. One of the interesting buildings that had been demolished is a mobile phone shop. Google street view camera captured the change of façade of this shop from 2015 to 2018. The façade was used to advertise phone provider, and every year it was painted differently after the color of the advertised brand before it was demolished



Fig 35. Panoramic view of of Pekapalan area Source: Google street view, 2021



Fig 36. The design proposal of education corner (left) and the realization (right) Source: Courtesy of Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan Kawasan Kraton Yogyakarta, 2013 and Google street view, 2021



Fig 37. Public toilet on Southern Alun-alun Source: Google Street view, 2021

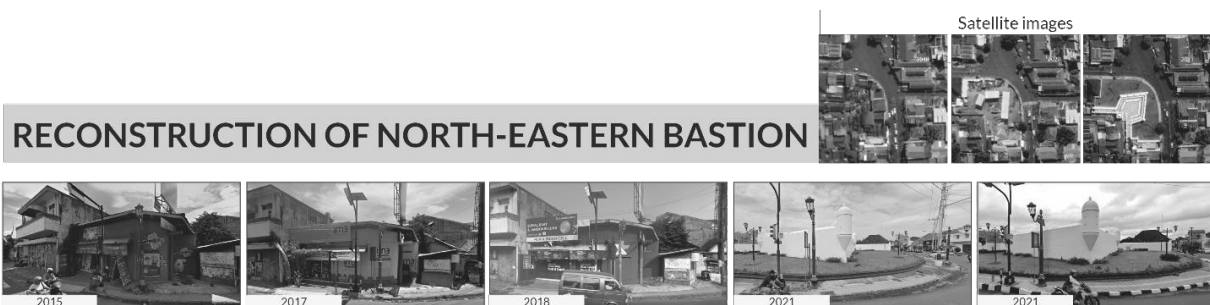


Fig 38. Reconstruction of nort-eastern bastion Source: Google Street View and Google Earth, 2021

Photo dated to 1905 AD shows that traders used to open their stall in front of plengkung Nirbaya. Perhaps, it was considered as strategic place to trade at the time as the Plengkung was one of the entrance gates to Keraton. However, today it would be unsafe for traders to open their stall in the same location because the plengkung has been bustling with traffic. The stalls are now replaced by small garden to beautify the plengkung. In addition, photo taken by the end of 19th century shows that the road on the north of plengkung Nirbaya was rowed by large trees and split gates. However, the gate has been replaced by commercial and residential buildings and the tree is not as lush as it was. Special fund was use in 2013 to excavate the *jagang* of Plengkung Nirbaya as a part of *jagang* revitalization plan. It was planned that 10 meters of land from the east and west of Plengkung Gading will be sterilized from the building (Suryanto, 2013). After series of vandalism report in plengkung Nirabaya, the access to the top platform of plengkung were closed with a cast iron fence. Although the measure was intended to protect the plengkung, the new fence also reduce the authenticity of plengkung itself. Could it also be seen as an act of vandalism? Meanwhile, the ruins of plengkung Madyasura was attached by mix use buildings and public infrastructure, such as streetlamps and utility pole. As one of former defense system of Keraton along with *plengkung*. the surviving Baluwarti fort walls suffer damage from buildings attached to its walls. Some of the building hollows out the fort wall to add more space for access¹³.



Fig 39. Plengkung Nirbaya then
Source: (*Vrouwen Met Koopwaar Langs de Weg Die Leidt Naar de Poort van de Kraton in Jogjakarta, 1905*)



Fig 40. Plengkung Nirbaya now
Source: Google Street View, 2021

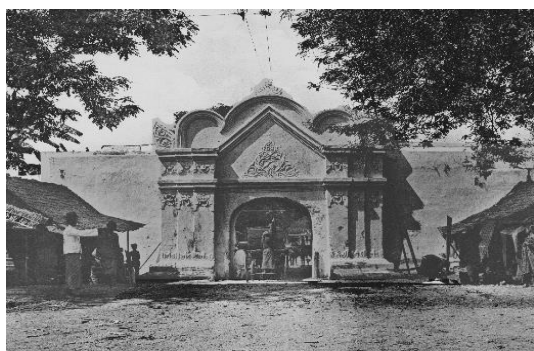


Fig 41. Plengkung Jagasura (Ngasem) before renovated into split gate (*bentar*)
Source: (*Een van de Poorten van de Kraton Te Jogjakarta, 1910*)



Fig 42. Plengkung Jagasura now
Source: Google Street View, 2021



Fig 43. Street on the north of Plengkung Nirbaya then
Source : (De Zuidelijke Uitgang van de Aloen-Aloen Te
Jogjakarta | Digital Collections, 1900)



Fig 44. Street on the north of Plengkung Nirbaya now
Source: Google Street View, 2021



Fig 45. Infilled building (blue) in the ruin
of Plengkung Madyasura (red)
Source: Google Street view, 2021



Fig 46. Infilled building on top of jagang
Source: Google Street view, 2021

Inside Keraton complex, the special fund was used to renovate the existing painting museum¹⁴. In the time of Covid-19 Keraton Yogyakarta was closed for visitors. This moment was used to maintain and revitalize some buildings inside Keraton, including the Pagelaran, Srimanganti Ward, Painting Museum, and Pareden Panti.



Fig 47. The existing condition of Keraton's painting museum. Source: Courtesy of GKR.Bendoro, 2021



Fig 48. The proposal for Keraton's painting museum
Source: Courtesy of GKR.Bendoro, 2021

CONCLUSION

Jeron Beteng is a saujana, a result of human creativity in shaping a complex living environment inside Baluwati fortress by adapting Javanese culture and philosophy for 256 years since its formation. Heritage architecture is one of the tangible heritages that forms the identity, memory, and sense of place of saujana Jeron Beteng. However, Jeron Beteng face perpetual change as an urban saujana and its heritage architecture had transformed throughout the time. This study found

that there are two major factors that heritage architecture responds to. The first factor are crisis and disaster. Earthquake that hit Yogyakarta in 1867 and 2006, Sepehi riot in 1812, as well as economy crisis during Indonesia revolution in 1940's to early 1960's cause damage to heritage architecture in Jeron Beteng. As the result, buildings that were damaged were left in ruin, demolished for new construction, or filled with new construction and/or function. And after 2006's earthquake, reconstruction that are followed by in-depth study of heritage architecture were done to return the collapsed Bangsal Trajumas, that had been renovated several times prior the earthquake, to its original state. It shows that response to crisis and disaster is an overlapping process throughout the time. The second factor that are greatly responded by heritage architecture is financial capability, in the time of HB VIII, freedom of investment during the reign of New Order, and during special fund policy. The fund was used to renovate and/or beautify heritage architecture, adding new construction and/or function, reconstruction, and maintenance. Among all these actions, only adaptation, reconstruction, and maintenance are considered as part of conservation.

Originally, Jeron Beteng was planned as the living quarter for Sultan and the nobles, cultural and spiritual center of the cosmological axis of Yogyakarta, as well as administrative headquarters for Keraton Yogyakarta. This system was supported by the role of *abdi dalem* and the *pandais* who built settlement in Jeron Beteng. The administrative offices of Keraton are still functioning today although it has been restructured. Some councils such as royal court that took place inside Keraton had been disbanded today. Sultan still lived in Keraton although his private domain, including Tamansari bathing complex, has been rearranged and greatly reduced as it is opened to visitors. The remaining private space of Keraton is still also used to conduct Keraton affairs, such as receiving royal guests and storing family heirloom. Most of the component of Keraton complex is well preserved. The *dalem*, living complex of the nobles has also opened its door for educational purpose and commercial activity. So does the *kampung* of *abdi dalem* and the *pandais* that are now also occupied by outsiders¹⁵ and completed with public service facilities. Building constructed in various time could be found inside *dalem* complex as well as the *kampung*s indicating its rapid change. However, most of the *dalem* still retain their original architecture, especially *dalem* that still occupied by the noble's descendant. Although Jeron Beteng was once defined by the fortification system that surrounds it, the remains of it only serves as landmark today. While most of the system had been damaged and replaced by housings and commercial buildings.

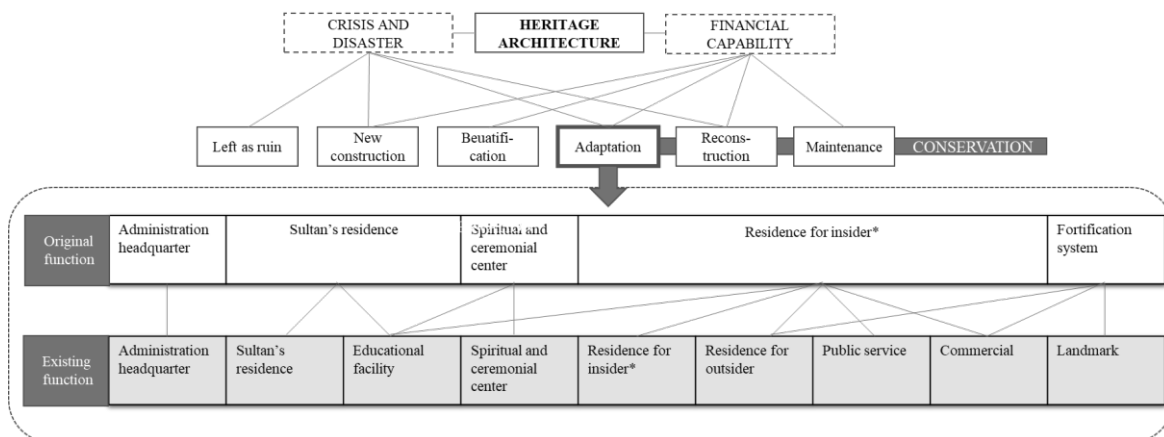


Fig 49. Transformation of heritage architecture in Saujana Jeron Beteng Source: Authors, 2021

Bibliography or References

- (Batavia), T. dienst in N.-I. (1925). *Jogjakarta en omstreken*. Weltevreden : Topografische Dienst. <https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/view/item/2012431>
- Adham, A. S. (2020). *Peran Penting Masjid Rotowijayan dalam Perjalanan Sejarah Kraton Mataram - telisik.id*. Telisik Indonesia. <https://telisik.id/news/peran-penting-masjid-rotowijayan-dalam-perjalanan-sejarah-kraton-mataram>
- Adishakti, L. (2017). *PELESTARIAN BANGUNAN GEDUNG CAGAR BUDAYA, TONGGAK KEBERLANJUTAN KOTA PUSAKA*.
- Allen, S., Barros, V., (Canada, I., (UK, D., Cardona, O., Cutter, S., Dube, O. P., Ebi, K., (USA, C., Handmer, J., (Australia, P., Lavell, A., (USA, K., Mastrandrea, M., Mcbean, G., Mechler, R., (UK, T., Nicholls, N., (Norway, K., & (USA, T. (2012). *Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation. Special Report of Working Groups I and II of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. <https://doi.org/10.13140/2.1.3117.9529>
- Artha, A. T. (2000). *Yogyakarta Tempo doeloe : sepanjang catatan pariwisata* (Y. de Wiryo (Ed.)). BIGRAF.
- Arthasari, A. H. (2014). *PERKEMBANGAN FUNGSI DAN FISIK BANGUNAN DI AREA BEKAS BENTENG KRATON YOGYAKARTA*. UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA.
- Ashworth, G. J. (1991). *Heritage Planning: Conservation as the Management of Urban Change*. Geo Pers. <https://books.google.co.id/books?id=w3luQgAACAAJ>
- Benteng Keraton Rp4,8 M Dinilai Jadi Cagar Budaya Palsu*. (2020). Gatra .Com. https://www.gatra.com/detail/news/485639/gaya_hidup/benteng-keraton-rp48-m-dinilai-jadi-cagar-budaya-palsu-
- Benteng Keraton Yogyakarta*. (2017). Tata Rakiting Wewangunan. Kratonjogja.Id. <https://www.kratonjogja.id/tata-rakiting-wewangunan/5/benteng-keraton-yogyakarta>
- Bonneff, M. (1985). La « Mosquée de pierre » (Masjid Sélo) de Yogyakarta. *Archipel, Volume 30, 1985. L'Islam En Indonésie II*. <https://doi.org/10.3406/arch.1985.2237>
- Budi, B. S. (2006). A Study on the History and Development of the Javanese Mosque Part 3: Typology of the Plan and Structure of the Javanese Mosque and Its Distribution. *Journal of Asian Architecture and Building Engineering*, 5(2), 229–236. <https://doi.org/10.3130/jaabe.5.229>
- Camerik. (1864). *Waterkasteel Taman Sari te Jogjakarta*. KITLV. https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/view/item/818448?solr_nav%5Bid%5D=c8114b7c3196ff9e3e4e&solr_nav%5Bpage%5D=1&solr_nav%5Boffset%5D=1
- Carey, P. (2004). *Asal Usul Perang Jawa: Pemberontakan Sepoy dan Lukisan Raden Saleh* (Edisi terj). PT LKiS Pelangi Aksara.
- Cephas, K. (1888). *The Wirobrodjo Corps during the Garebeg celebrations in the Kraton of Yogyakarta*. Weereld Museum. <https://collectie.weereldculture.nl/#/query/284c12ca-923b-4abc-a17a-ae17b00c7d1f>
- Cephas, K. (1890). *Waterkasteel Taman Sari te Jogjakarta- Gedong panggoeng*. Weereld Museum. <https://collectie.weereldculture.nl/#/query/6c69acdd-adc8-4ff5-bce1-2b609d25ca23>

- Cephas, K. (1896). *Gedong Koenig, woning van de sultan, in de kraton te Jogjakarta*. KITLV. https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/view/item/916243?solr_nav%5Bid%5D=44009fe1066448780000&solr_nav%5Bpage%5D=1&solr_nav%5Boffset%5D=11
- De kraton te Jogjakarta*. (1935). KITLV. https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/view/item/709849?solr_nav%5Bid%5D=0ebfb34643f6e55f3fa2&solr_nav%5Bpage%5D=0&solr_nav%5Boffset%5D=6
- De zuidelijke uitgang van de aloen-aloen te Jogjakarta | Digital Collections*. (1900). KITLV. https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/view/item/786625?solr_nav%5Bid%5D=f3b86c046d9675806b9d&solr_nav%5Bpage%5D=1&solr_nav%5Boffset%5D=4
- Dean, G. (1998). *A few notes on my life in Yogyakarta, March-May 1998*. <https://garydean.id/works/journal1998>
- Djogja in vogelvlucht*. (n.d.). Weereld Museum. Retrieved October 8, 2021, from https://collectie.wereldculturen.nl/?query=search=*=TM-10014980#/query/d8bd1938-14c8-4cc3-a46b-d8ce70dd1477
- Dumarçay, J. (1978). Le Taman Sari. Étude architecturale. *Bulletin de l'Ecole Française d'Extrême-Orient.*, 65(2), 589–624. <https://doi.org/10.3406/befeo.1978.3916>
- Een van de poorten van de kraton te Jogjakarta*. (1910). KITLV. https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/view/item/928348?solr_nav%5Bid%5D=e02ae5c9748afb465e14&solr_nav%5Bpage%5D=6&solr_nav%5Boffset%5D=0
- Gatra.com. (n.d.). *Keraton Yogya Bangun Benteng Baru Rp4,8 M Setelah Dua Abad | Gaya Hidup*. Retrieved October 10, 2021, from <https://www.gatra.com/detail/news/485638/gaya-hidup/keraton-yogya-bangun-benteng-baru-rp48-m-setelah-dua-abad>
- Gottschalk, M. (2018). *The palace of the Sultan of Yogyakarta, known as the Kraton*. Getty Images. <https://www.abc.net.au/news/2018-07-06/the-sultan-of-yogyakartas-palace/9945504?nw=0>
- Hannigan, T. (2011). *When Raffles Ran Java*. History Today. <https://www.historytoday.com/archive/when-raffles-ran-java>
- Hermanu. (2012). *Ngayogyakarta*. Bentara Budaya.
- Ikaputra. (1996). *A Study on the Contemporary Utilization of the Javanese Urban Heritage and its Effect on Historicity* [大阪大学]. <http://id.ndl.go.jp/bib/000000294813>
- Jigyasu, R. (2010). Urban Cultural Heritage for Sustainable Resilience: Case of Patan in Kathmandu Valley, Nepal. In *Urban Risk Management South Asia – Launch of Global Campaign on Making Cities Resilient* (pp. 120–130). New Delhi: SAARC Disaster Management Centre.
- JPPI & ICOMOS. (2003). *Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia - Indonesian Charter for Heritage Conservation*. 1–4.
- Kraton te Jogjakarta*. (1920). KITLV. https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/view/item/908038?solr_nav%5Bid%5D=0ebfb34643f6e55f3fa2&solr_nav%5Bpage%5D=0&solr_nav%5Boffset%5D=5
- Krippendorff, K. (2004). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (Second edi). Sage. <https://books.google.co.id/books?id=q657o3M3C8cC>
- Kurkdjian, P. A. (n.d.). *Olifant van de sultan van Jogjakarta*. Weereld Museum. Retrieved November

7, 2021, from https://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:Collectie_NMvWereldculturen,_TM-60041581,_Foto,_%27Olifant_van_de_sultan_van_Yogyakarta%27,_fotograaf_N.V._Photografisch_Atelier_Kurkdjian,_1890-1935.jpg

Kusuma, Y. W. (2020). *Dikembalikan ke Bentuk Asli, Alun-alun Utara Yogyakarta Dibangun Pagar Besi*. Kompas.Com. <https://regional.kompas.com/read/2020/06/08/18160731/dikembalikan-ke-bentuk-asli-alun-alun-utara-yogyakarta-dibangun-pagar-besi?page=all>

LAPORAN AKHIR. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Kraton Yogyakarta. (2013).

Leiden, U. B. (1890). *Plattegrond van het Waterkasteel te Jogjakarta*. <https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/view/item/811966>

Management Plan - The Cosmological Axis of Yogyakarta and its Historic Landmarks. (n.d.). Retrieved September 14, 2021, from <https://whc.unesco.org/en/tentativelists/6206/>

Morton, W. B., Grimmer, A. E., & Weeks, K. D. (2017). *THE SECRETARY OF THE INTERIOR'S STANDARDS FOR THE TREATMENT OF HISTORIC PROPERTIES WITH GUIDELINES FOR PRESERVING, REHABILITATING, RESTORING & RECONSTRUCTING HISTORIC BUILDINGS*. U.S. Department of the Interior National Park Service Technical Preservation Services.

Murthy, M. (2013). *HERITAGE AND RESILIENCE Issues and Opportunities for Reducing Disaster Risks*.

New South Wales Heritage Office. (2005). *Design in Context : Guidelines for Infill Development in the Historic Environment* (R. A. I. of A. N. S. W. C. I. G. W. Party (Ed.)). NSW Heritage Office.

Nizam. (2009). The Role of Universities in Recovery Programs. In *RECOVERY STATUS REPORT. The Yogyakarta and Central Java Earthquake 2006*. Gadjah Mada University and International Recovery Platform.

Njoto-Feillard, H. (2003). Notes sur l'identité des modèles architecturaux du Taman Sari de Yogyakarta (1758-1765). *Architecture et Urbanisme En Asie*, 1–14.

Nojowirongko, M. N. (1954). *Serat tuntunan pedalangan: tjaking pakeliran lampahan irawan rabi*. Tjabang Bagian Bahasa, Djawatan Kebudayaan, Departemen P.P. dan K. <https://books.google.co.id/books?id=zgQzzgEACAAJ>

Oey, E. (2001). *Java: Indonesia*. Periplus Editions. <https://books.google.co.id/books?id=YA3TNeNUfkAC>

Panular, P. A., Carey, P. B. R., Library, B., & Academy, B. (1992). *Babad Bědhah Ing Ngayogyakarta: . British Academy*. <https://books.google.co.id/books?id=IytwAAAAMAAJ>

Plattegrond van het noordelijk deel van het middenvak van de Kraton. (1890). Universitaire Bibliotheken Leiden. <https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/view/item/815910>

Poespaningrat, P. (2008). *Kisah Para Leluhur dan yang Diluhurkan dari Mataram Kuno sampai Mataram Baru*. Kedaulatan Rakyat.

Pramudito, S., & Ida Cahyandari, G. O. (2018). Transformasi Fungsi dan Bentuk Ndalem Pakuningratan sebagai Bagian dari Pelestarian Bangunan Tradisional Yogyakarta. *Temu Ilmiah Ikatan Peneliti Lingkungan Binaan Indonesia (IPLBI)*, C114–C122. <https://doi.org/10.32315/ti.7.c114>

Retnaningtiyas, W. (2018). REKONSTRUKSI ARSITEKTUR KOMPLEKS KADIPATEN DI

- KAMPUNG PANEMBAHAN, KECAMATAN KRATON, YOGYAKARTA. *PURBAWIDYA: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Arkeologi*, 7(1 SE-Article), 35–52. <https://doi.org/10.24164/pw.v7i1.255>
- Santosa, R. B. (2019). *Omah. Membaca Makna Rumah Jawa* (2019th ed.). RAW Press.
- Santosa, R., & Prihatmaji, Y. (2011). Investigations on Earthquake Damages of Trajumas Hall in the Sultan's Palace Yogyakarta. *Procedia Engineering*, 14, 2692–2698. <https://doi.org/10.1016/j.proeng.2011.07.338>
- Sektiadi. (2007). *NJERON BETENG KONSTRUKSI CITRA KAWASAN WARISAN BUDAYA*. Universitas Gadjah Mada.
- Situatie der Ommestreeken van Djocjakarta*. (1833a). Universitaire Bibliotheken Leiden. <https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/view/item/817475>
- Situatie der Ommestreeken van Djocjakarta*. (1833b). Universitaire Bibliotheken Leiden. <https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/view/item/817475>
- Sultan HB X Ajak Rakyat Dukung Reformasi*. (1998). Kompas Online. <http://www.seasite.niu.edu/indonesian/reformasi/Chronicle/Kompas/May21/sult01.htm>
- Sumalyo, Y. (2021). *Sejarah, Arsitektur dan Tata Ruang Keraton Yogyakarta* (2021st ed.). RAW Press.
- Suryanto, D. (2013). *Jagang Benteng Kraton Direncanakan Dibangun 10 Meter*. Harian Jogja. <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2013/06/04/510/412722/seputar-jogja-jagang-benteng-kraton-direncanakan-dibangun-10-meter>
- The Burra Charter*. (2013). (The Australia ICOMOS Charter for Places of Cultural Significance). Australia ICOMOS Incorporated.
- The Cosmological Axis of Yogyakarta and its Historic Landmarks Management Plan* (Issue January). (2021).
- Tjahjani, I. (2005). *Taman Sari Yogyakarta : a cultural perspective in landscape design*. University of Canberra.
- UK National Commission for UNESCO. (2021). *HERITAGE, DISASTER RESPONSE AND RESILIENCE*.
- UNESCO. (2011). *Recommendation on the Historic Urban Landscape*. <https://doi.org/10.1002/9781119968115.app3>
- Vrouwen met koopwaar langs de weg die leidt naar de poort van de kraton in Jogjakarta*. (1905). KITLV. https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/view/item/824657?solr_nav%5Bid%5D=f638a8164f2c15f230e0&solr_nav%5Bpage%5D=0&solr_nav%5Boffset%5D=11
- Wardani, L. K., & Soedarsono, R. . (2013). *ESTETIKA TATA RUANG INTERIOR KERATON YOGYAKARTA (Masa Pemerintahan Sultan Hamengku Buwona VII sampai dengan Sultan Hamengku Buwana X)*. Universitas Gadjah Mada.
- Waterkasteel Taman Sari te Jogjakarta*. (1932). KITLV. https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/view/item/838314?solr_nav%5Bid%5D=d84b293a336b1c1fbdc1&solr_nav%5Bpage%5D=0&solr_nav%5Boffset%5D=6
- Wijesuriya, G., Thompson, J., & Young, C. (2013). *Managing Cultural World Heritage*. United

Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

- Wijoyono, E. (2005). Taman Sari “Baru”, (Mencoba) Bukan Sekedar Polesan. *Majalah ARTEFAK. Himpunan Mahasiswa Arkeologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, XXVIII.*
- Zakaria, A. (2011). *Masjid Panepen, dari Ijab Kabul Sampai Tempat “Nyepi” Raja - Nasional Tempo.co.* Tempo.Co. <https://nasional.tempo.co/read/361915/masjid-panepen-dari-ijab-kabul-sampai-tempat-nyepi-raja/full&view=ok>
- Zindler. (1930). *Optocht ter gelegenheid van Garebeg in de kraton te Jogjakarta.* KITLV. https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/view/item/825108?solr_nav%5Bid%5D=b13d03c2aaddfc958e42&solr_nav%5Bpage%5D=6&solr_nav%5Boffset%5D=10
- Zindler. (1939). *De kraton van de sultan te Jogjakarta.* KITLV. https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/view/item/695731?solr_nav%5Bid%5D=ede52891de70bbd58809&solr_nav%5Bpage%5D=11&solr_nav%5Boffset%5D=18

Endnotes

(Endnotes)

- 1 Saujana is an Indonesian vocabulary that means “as far as eye can see”. The terms “saujana” has been agreed on the Indonesia Charter for Heritage Conservation to refer the concept below: “ The heritage of Indonesia is the legacy of nature, culture, and *saujana*, the weave of the two. Natural heritage is the construct of nature. Manmade heritage is the legacy of thought, emotion, intentions, and works that spring from over 500 ethnic groups in Tanah Air Indonesia, singularly, and together as one nation, and from the interactions with other cultures throughout its length of history. Saujana heritage is the inextricable unity between nature and manmade heritage in space and time” (JPPI & ICOMOS, 2003) For this reason, in this writing author would leave the terms “saujana” untranslated.
- 2 *Olah Disain Arsitektur Pusaka* (ODAP) is a heritage architecture conservation method. Various literatures are still textually and contextually reviewed to strengthen the diversity of ODAP methods. Hence, ODAP also includes adaptive architecture/adaptive reuse and infill design for its method. ODAP can be carried out with several possibilities such as inserting new activities into building, addition of new buildings, constructive and minor interior change, roof utilization, constructive roofing, ground floor design and stacking new and old activities (Adishakti, 2017).
- 3 *taman* means “garden”, while *sari* means “beautiful” or “flower” in Javanese.
- 4 *Pendhapa* is the main hall of traditional Javanese housing compound. It is a standalone structure located on the front. It has rectangular plan and open on all side.
- 5 *Selo* is Javanese word for “stone”. However, as has been noted by Budi in his research about typology of Javanese mosque, the material of Selo Mosque is not stone. Probably, people said it as stone because of the thickness of the wall (Budi, 2006)
- 6 Especially from the emergence of sugar industry
- 7 See figure 29
- 8 carving of years where the renovation took place
- 9 the official, foundational philosophical theory of Indonesia.
- 10 Cited from (*Sultan HB X Ajak Rakyat Dukung Reformasi*, 1998)
- 11 For further reading, see (*The Cosmological Axis of Yogyakarta and Its Historic Landmarks Management Plan*, 2021)
- 12 See (*Benteng Keraton Rp4,8 M Dinilai Jadi Cagar Budaya Palsu*, 2020)
- 13 Cited from (*Benteng Keraton Yogyakarta*, 2017)
- 14 GKR.Bendoro On her presentation in Museum Planning and Design class, Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, September 2021
- 15 The context of “outside” could be understood literally as people who came from outside, but also has no intention to pay service to Keraton.

Bagongan Dialect in Social Media and its Position in the Society: A Sociolinguistic Study

**Nurvita Wijayanti
Panggio Restu Wilujeng**

Faculty of Social and Political Science
University of Bangka Belitung
Email: wijayavita88@gmail.com

Abstrak

Javanese language is known as having a speech level therefore the various studies have been pro and contra whether it symbolizes power relation or the politeness. Not enough with the knowledge of it, the Yogyakarta Palace has its own dialect to distinguish it to their common people. This dialect is spoken by all the members of the Yogyakarta's Palace. However lately, the Yogyakarta Palace spreads the knowledge of Bagongan dialect in their social medias. The information contain the morphological study such as the different part of suffix between the common Javanese dialect and Bagongan dialect that is resulted in the different nuance. The Bagongan dialect can sound rather 'harsh' or unpolite however it is the opposite. It is because of the suffix -ke that sounds like 'ngoko' level of Javanese language. As it is assumed to be spoken exclusively within the palace, the study tries to find out if there is a possibility the common people speak Bagongan dialect. If yes, do they use the dialect only to the palace people or to their community as well. If not, why do the social media share the information about the Bagongan dialect. This study aims to observe the sustainability of Bagongan dialect both in inside and outside the palace. It also try to analyze the effort of Yogyakarta Palace to continue its dialect in the (post)-modern culture by maximizing the use of social medias such as Instagram, YouTube, and Facebook administered by Tepas Tandha Yekti account. The authors use the descriptive qualitative research by interviewing the participants both from the common people and the people who serve in Yogyakarta Palace as an 'abdi dalem'. The variables can be based on the age, the gender, the duration living near the palace or working in the palace, and the educational background. Based on the study, the authors find that the use of Bagongan dialect is exclusively spoken by the *priyayi* (the noble people) and *abdi dalem* (the servant) to dismiss the gap level between them. The use of social medias is purely to educate the people and to archive it into the digital tracking. However, because of the advance of social media, it is highly possible that people also imitate the use of Bagongan dialect to create another discourse among them.

Keywords: Bagongan dialect, Tepas Tandha Yekti, Social Media, Yogyakarta Palace

INTRODUCTION

The speech level used in Javanese language confirms the action of politeness in Javanese society. It is supported by Poedjosoedarmo stating that the politeness in Javanese language shows the proper degree of respect in a formal circumstances (1968). The politeness is between the older and younger generation, between the higher and the lower rank, among the non intimate relationship, and the intimate yet having a certain respect. This speech level has been being applied for centuries, yet the center of Javanese society, Kraton Ngayogyakarta also known as Jogjakarta Palace does the opposite.

Jogjakarta Palace as the centre of Javanese civilization becomes the most respected place and values among Jogjakarta's society. The people call the king as 'Sinuhun' and 'ngarsa dalem' that

seems the only term of addressing used him. It is also known as ‘Your Highness’ as referred to British Palace. The common people also value the speech level by using it in their daily conversation among others inspired by the Jogjakarta Palace manner of speaking that is respecting the higher rank and age. However it turns out that the Jogjakarta Palace does not implement the speech level comprehensively. It seems that it tries to equal the position between the titled and the maid (*abdi dalem*). It is shown in the use of Bahasa Bagongan as a non formal language used in The Palace circumstance to merge the position between the noblemen inside the palace and the maids.

This language gets along with the other diction of Javanese but in a slight different way that exclusively spoken by the palace society. It has certain rules such as the formation of verbs and nouns that are differed with the usual Javanese speech level (Poedjosoedarmo: 2014). Bagongan language is hoped to create the democratization between the noblemen and *abdi dalem*, therefore there are eleven (11) diction only used in Bagongan language that is mingled with the common Javanese. The eleven terms as follows:

1. *Henggeh* commonly stated as *hinggi* means yes.
2. *Mboya* commonly known as *mboten* or *ora* means no.
3. *Manira* atau *menira* commonly stated as *kula* or *aku* means I.
4. *Pakenira* or *pekenira* commonly stated as *sampeyan* or *kowe* means you.
5. *Penapi* or *punapi* commonly known as *punapa* or *menapa* means why.
6. *Puniki* commonly known as *punika* or *menika* or *iki* means this.
7. *Puniku* commonly known as *punika* or *menika* or *iku* means that.
8. *Wenten* commonly known as *wonten* or *ana* means exist.
9. *Nedha* commonly known as *suwawi* or *sumangga* means please.
10. *Besaos* commonly known as *kemawon* or *wae* means only.
11. *Seyos* commonly known as *sanes* or *seje* means no or different. (Retnaningtyas, Nababan, & Purnanto: 2019).

The term Bagongan Language is used in Jogjakarta Palace while Kedhaton Language is in Surakarta Palace. Both languages are spoken by the *abdi dalem* and the noblemen inside the palace. This language was emerged by Sultan Agung the previous ruler in Mataram Palace that is the previous palace before Jogjakarta and Surakarta Palace were divided. Sultan Agung was the first ruler who constructs Javanese language into speech level dividing its people and the noblemen in using the language outside the palace. So, in the application, commoners use the *krama hinggil* the highest level in Javanese Language to speak especially for the higher ranks in the society (Wilujeng & Hanneman: 2018). On the other hands, Sultan Agung confirmed that the language between the noblemen and the *abdi dalem* should be equal therefore he offered Bagongan Language to be spoken in the palace circumstances (Sulistiyawati, Emzir, & Akhadiah: 2021). In other words, Bagongan Language is a part of exclusive language accommodating the people in the palace community.

Nowadays, Jogjakarta Palace promotes its customs in their social media names Instagram and YouTube administered by Tepas Tandha Yekti titled ‘kraton Jogja’. it assumes that the palace has no longer kept it exclusive but instead it followe the popular culture. Jogjakarta Palace has promoted Bagongan Language in several feeds of their social media such as the use of suffix - *e* compared to the *krama hinggi* suffix - *ken*. On the other occasion, YouTube is used to promote the short movie titled ‘*Marak*’ telling about the life of *abdi dalem* and its relation with the resident outside the palace. In the story, the *abdi dalem* shows the commoner on how to dress, behave, and speak using Bagongan Language.

The Bagongan dialect can sound rather ‘harsh’ or unpolite however it is the opposite. It is because of the suffix -*e* that sounds like ‘ngoko’ level of Javanese language. Suffix - *e* can be combined with the eleven (11) vocabularies as stated above. The example is in the utterance ‘*menira nepangake kanca*’ (I introduce you a friend) in which the use ‘nepangake’ sounds *ngoko*

the lower Javanese speech level. The other variable is the use of pronoun that is 'menira' as I compared to 'kula' in *krama hinggil*. This is the beginning of the authors' curiosity on how this exclusive language can be introduced publicly using social media by the Jogjakarta Palace.

This study aims to observe the sustainability of Bagongan dialect both inside and outside the palace. It also tries to analyze the effort of Yogyakarta Palace to continue its dialect in the (post)-modern culture by maximizing the use of social medias such as Instagram, YouTube, and Facebook administered by Tepas Tandha Yekti account. There are two research questions that guide the authors to focus on the research namely (1) How is Bagongan Dialect used in the Jogjakarta Palace and its surrounding? (2) How does Popular Culture in the form of Social Media maximize the use of Bagongan Dialect?

LITERATURE REVIEW

Previous researches in Bagongan Dialects are various especially about the existence and sustainability of its language. There are some journal articles studying the Bagongan dialect in their own perspectives. The articles are as follows.

The first is a study by Kenfitria Diah Wijayanti titled '*Bahasa Bagongan dan Kedudukannya dalam Perkembangan Bahasa Jawa*' emphasizes the position of Bagongan dialect and the supporting factors of the emergence of Bagongan dialect. It uses the Bagongan lexicon as the main data. The research finds the forms of Bagongan dialect that changes phonemes, the function of Bagongan dialect is to communicate and to be equal, and the emergence of Bagongan dialect is because of the influence of rooted culture and its surrounding to build the equality (Wijayanti: 2018).

The second is a research titled '*Bagongan Language Representation in Abdi Dalem Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat Daily Life*' by Retnaningtyas, et al (2019) that studies on Bagongan Language that is used exclusively by the *abdi dalem*. The study finds that Bagongan dialect is barely used as the *abdi dalem* prefers to speak in *krama inggil* or *krama alus* among them. It is especially because they argue that the Bagongan dialect sounds a bit rude if spoken to the higher rank and older or respected people (Retnaningtyas, et al: 2019).

Journal titled '*The Maintenance of Bagongan Language in Yogyakarta Palace*' written by Sulistyawati, et al (2021) is the newest article found by the authors. It tries to hold the Bagongan language by studying the process of language maintenance done by the palace. Some of the efforts are by having the language course namely '*Pawiyatan Course*' for *abdi dalem*, by holding Bagongan Language Festival, by fostering a sense of pride in *abdi dalem*, and by transforming the language to the younger generation (Sulistyawati, et al: 2021).

Although the research on Bagongan dialect is still few, the authors find research gaps that are relatively compatible. The pattern is on the existence of the Bagongan dialect. In this study the variable is quite different as the authors offer the existence of Kraton Yogyakarta's social media as the secondary data and the interview with the *abdi dalem* as the main data. The position in the society refers to the society in general while a research done by Wijayanti (2018) shows the position of Bagongan dialect inside the palace.

The main theories used in this study are the theory of sociolinguistics and the theory of popular culture. Sociolinguistics is used to show the relevance of Bagongan dialect spoken inside the palace and its possibility spoken by the commoner near the palace. Moreover, the popular culture is shown to know the relation between the Bagongan dialect and the social media owned by Kraton Yogyakarta to promote the Bagongan dialect via Instagram, Facebook, and YouTube.

Sociolinguistics as a branch of linguistic study and its merger with sociology is the study of language and society (Holmes: 2013). It studies on the difference of social context and the reason people speak differently and the way it is used to unravel the meaning. Bagongan dialect is part of

language belonging to the Jogjakarta Palace community therefore it has a limited meaning for the limited community. The communal language makes Bagongan dialect become an exclusive dialect only for *the abdi dalem* and the noblemen inside the palace. Bagongan dialect is part of the social group or community as it has social history (Britain & Matsumoto: 2020).

Social media such as Instagram, YouTube, and Facebook is the media that is popular in the cyber community in the Internet that is used by Jogjakarta Palace. They have differed characteristics and varied audience. It can be seen that Facebook is still widely used by the age of 25-34 years old that is around 58.3%, followed by 35-44 years old that is 42.4%, 55-64 years old that is 26.5%, and 65+ that is 21.1% (statista.com: 2022). The percentage shows that Facebook users are dominated by the group of older generation. While Instagram as the newcomer after Facebook has 36.4% users in Indonesia between the age of 18 and 24 years old (statista.com: 2022), YouTube has around 94% that is the most dominant users. It can be understood that Jogjakarta Palace under the name of Kraton Jogja administered by Tepas Tandha Yekti tries to persuade the audience to follow the account and be a part of the events.

Popular culture theory becomes the supporting theory in this study. It helps to confirm the palace position when promoting the Bagongan dialect through the social media. Cultural reproduction by Bourdieu is used to show the relevance between the use of social media and the palace strategy to continue its existence. When the High Culture is no longer significant, the palace tries to return their existence by entering the popular culture so that more people get in touch with Yogyakarta Palace as in the past time.

METHODOLOGY

The authors use the descriptive qualitative research by interviewing the participants both from the common people and the people who serve in Yogyakarta Palace as an 'abdi dalem'. The variables can be based on the age, the gender, the duration living near the palace or working in the palace, and the educational background. The descriptive qualitative research is to analyze deeper by looking at the data interviewing and comparing it with the secondary data. It refers to the purposive sampling and semi structured, open ended interviews (Mohajan: 2018). The qualitative research focuses on the interpretation of the social reality. The interpretation is purely the description about how and why a certain social phenomenon can happen.

This study uses the *abdi dalem* to become the main participants and the people surrounding the palace as well. The main data is the social media own by Tepas Tandha Yekti such as YouTube, Instagram, and Facebook. The people known as commoners are to make another perspective on how the Bagongan language is familiarized in the community outside Jogjakarta Palace. The variables taken from the participants are their job, the age range, the gender, and the duration of the living. The secondary data is the social media handled by Kraton Jogja administered by Tepas Tandha Yekti.

The data collection is taken by checking the Instagram, YouTube, and Facebook account that each of them has the same content by describing the Bagongan Language. The Instagram and Facebook were viewed several times to see the likers and the sharers that might give the information of society interest toward Jogjakarta palace. YouTube was accessed to watch the short movie titled *Marak* and the authors tried to find the scene of Bagongan dialect was applied and the contribution of the actresses. The interview was done by asking the several questions to the *abdi dalem* and the people living near the palace. They were taken to confirm the possibility of Kraton Jogja account to promote the life of inside the palace. The data analysis was done by finding the discourse between Jogjakarta Palace and the society in the perspective of popular culture.

FINDING AND DISCUSSION

Language, Community, and Identity

Instagram, Facebook, and YouTube account under the name of Kraton Jogja administered by Tepas Tandha Yekti have different purposes especially for the audience. Although Instagram and Facebook have the same *feed*, the audience target is different. Instagram is for younger generation around 17 - 35 years old while Facebook is for older audience around 35 - 65 years old. Meanwhile, Instagram and Facebook have each content containing the same feed but different target of audience. This data shows the significant of the followers, likers, and sharers.

The feed on Instagram and Facebook is dominantly talk about the tradition, custom, and value inside the palace. Therefore, one of the feed dated October, 10th 2021 was about the Bagongan dialect. It shows the description on eleven vocabularies and the explanation of different suffix used in this dialect such as suffix -nipun, -dipun becoming -aken. It states as follow:

*In Bagongan dialect, the suffix in a passive voice - **dipun** (krama inggil) is changed into **ka-** that sounds **ngoko/krama madya**. The suffix of nouns that usually uses **-ipun** in krama inggil should be spoken in **-ě** in Bagongan dialect. This case is exactly similar to the suffix in **ngoko**. The suffix of verb **-aken** in **krama inggil** is not allowed to be used. As in exchange, they use the suffix **-ake** that once again sounds like **ngoko**. If combined with the **krama inggil**, it will sound like **krama madya** (Kraton Jogja Facebook Account: 2021; Kraton Jogja Instagram Account: 2021)*

The explanation above is the principal of the Bagongan dialect use. Although it sounds rather impolite, it has a purpose to erase the gap between the noblemen and the *abdi dalem*. The unique thing about Facebook is that this application has a feature to share the feed and those who share are visible in the Kraton Jogja feed. It turns out that 106 Facebook users and friends of Kraton Jogja account sharing Kraton Jogja's feed. It indicates that still people join and acknowledge the existence of Jogjakarta palace, although the sharing feature cannot trace back the other accounts who are sharing.

YouTube is also used by the palace to promote the palace values via videos and short movies. The palace even creates a short movie to show what happens inside the palace and what kind of custom and language being used inside the palace. Millions viewers have watched the movies but some argue the audience internalizes it into their thought and criticism.

Language and community become one entity that cannot be separated. Jogjakarta palace has its own way to standardized the language or dialect used inside the palace. It can be claimed as an exclusive language that commoners cannot join or even use the language. It feels awkward when the commoners use the language outside the palace although it is only just for fun. However, the exposure of Bagongan dialect is quite strong to people who live near the palace. They are familiar when somebody talks using Bagongan dialect and can suddenly guesses that that somebody must be an *abdi dalem* or one of the palace members. In other words, Bagongan dialect also shows identity toward its speaker. The social media that exposes the exclusiveness of the dialect must have something in common with the goal of the palace ruler.

According to one of the participants that is an *abdi dalem* states that Bagongan dialect is still used and spoken inside the palace. He highlights that this dialect is only used inside the palace but not the outside of the palace. On the other hands he does not know at all about what happens to the social media as his age reaching 75 years old. (BK: 75 years old).

"Bagongan is only for abdi dalem...it has eleven vocabularies to be used when abdi dalem talk to the Sultan and the princes inside the palace. The dialect is only when we say "I" becomes "menira". I, myself, use Bagongan dialect when I was at first joining the palace as the abdi dalem. My family and I do not use Bagongan dialect because it sounds not proper (BK: 75 years old).

Another testimonial comes from DW as she says that she is not comfortable using the dialect inside the palace. It is because she is part of the younger generation and it does not proper to talk with Bagongan dialect to the elder. Therefore, she uses *krama inggil* to speak with other *abdi dalem* especially the one who are the elders. Relating to the social media she is one of the followers of Kraton Jogja account and feels glad to find such account as according to her, it maintains the relationship between Jogjakarta Palace and its people. (DW: 28 years old).

“I feel not comfortable enough when using Bagongan dialect to the elderly inside the palace, so I choose krama inggil when talking with them. It feels so weird, right, when at home you talk to your father and mother using krama inggil. I still feel itchy in my mouth. My friends inside the palace do the same although yes some elderly criticize us nit to use the Bagongan dialect. ... We are just so stubborn when one day there is a course provided by the palace for us to learn the language. It is probably one of the palace effort to make us speak so that the language is not dead inside” (DW: 28 years old).

The other participants comes from the commoner who lives near the palace quite nearby. He says that he is familiar with the Bagongan dialect but he cannot use it freely. He also thinks that social media administered by Tepas Tandha Yekti is one of the reason Jogjakarta Palace wants to only introduce the values inside the palace but not expecting its people to join technically (AD: 34 years old).

“I am familiar with the Bagongan dialect but it is not obligatory to use it. I have many neighbors who work as abdi dalem and they still speak Bagongan when meeting each other even in the social meeting such as ‘ronda’ or ‘doa lingkungan’ . So I little bit understand what they are talking about. Somehow I do the conversation using Bagongan to my neighbors (who are abdi dalem) just to show some respects as they are mostly elderly. They are not angry or what. They just let me use the language and I don’t feel regret” (AD: 34 years old).

In another case, YouTube as a video platform provides knowledge that is formed in the short movie, titled *Marak*. The special thing about it is that it is played by the viral actresses, Bu Tedjo (Siti Fauziah) and Yu Ning (Brilliani Desi) from the previous short story called *Tilik*. YouTube is a medium that makes it easy for every person, group, organization, and institution to become a video content creator. In addition, YouTube is the easiest medium for broadcasting in order to reach a wider public. This YouTube media is a means for Tepas Tandha Yekti to publish the Bagongan language with content of the palace atmosphere which is presented illustratively and involves popular figures. This became a cultural reproduction strategy of the Yogyakarta Palace to spread the Bagongan language outside the palace walls. Cultural reproduction is a concept from Bourdieu where agents or institutions seek to symbolically maintain power through their cultural capitals. The cultural capital in question is the legitimacy of the Yogyakarta Palace as the heir to Javanese culture. Language is one of the cultural capitals as well as a form of symbolic power from the Kraton to its people.

The knowledge of High Culture through Popular Culture

The use of social media is a form of transformation of the palace culture from “folk” to “pop”. The transition from what was once the palace culture as a form of “High Culture” which is exclusive and difficult to access by the public is now becoming more popular and can be internalized by the community. Difficult to access means that it is not only due to restrictions, sacredness, traditions and all the details of the rules applied in the Kraton related to public accessibility, but also from the interests of the community itself which has a change in orientation. Niels Mulder’s research in *Social Change in Java* explains that all Javanese traditions that are considered too rigid and out of date are now being abandoned.

“During the New Order era, most of the youth in Indonesia did not care about the life of the Palace and all the rituals, ceremonies, etiquette and language. They grew up in a different environment and dislike hierarchical relationships and cautious behavior that they perceive as anti-democratic and out-of-date. This is the type of Java they are happy to leave behind (Mulder, 2005, p. 146)”.

Mulder explains that the openness of local life to the outside world is one of the characteristics of modern times, so that in third world countries, high-cultural heritage is eroded by the onslaught of consumption culture that is continuously produced by foreign companies, offering high-class status as in the west. The ancient upper classes, such as the Yogyakarta Palace, who carried high culture, lost the prestige and influence they used to have. The emergence of the middle class is seen in its ambition for modern education and economic change. The orientation of the community has also changed in the pursuit of social status, so that social stratification has also changed.

YouTube is a form of popular culture, which means it is a culture that is easy to follow and enjoy by the wider community. The challenge faced by the Kraton in this cultural reproduction strategy is whether the content presented on YouTube is in accordance with the interests of today's society. KPH Notonegoro and GKR Hayu as the producers of the short movie, *Marak*, have Siti Fauziah and Brilliani Desi as the viral actresses since their nearby debut in a short movie titled *Tilik*. In this case, the producers who are as well known as the second daughter and son-in-law of the King of Yogyakarta Palace are also concern with the decrease of the palace culture value in the society. One of the way is to have the two viral actresses to join the movie as if it is hoped to get wider attention from the society especially for the younger generation.

Geertz has found cultural distinctions in Asia, especially in Java in his versions which are referred to as “high” and “low” art. Sometimes appears as “sophisticated” and “folk”, “elite” and “popular culture”, “kingdom” with “country”, “big tradition” versus “small tradition” or “civilization” vs. “culture”, “art” vs. “craft” and “literature” vs. “custom”. Geertz gave an empirical example in the tradition of the release ceremony of students from a high school in Pare in East Java, in 1986 which featured a blend of high Javanese culture (Javanism high culture) through Islamic traditions dealing with modern culture of Pancasila as popular culture influenced by the development of political ideology. growing in the region (Geertz, 1990: 83).

One of the prominent examples of this distinction is the inclusion of pop music, dangdut then jaipong, tayuban, wayang and jaran kepong as popular culture that shifts traditional Javanese music such as gamelan which was once considered highly regarded. Initially, the arts that became popular culture were played by the elite for political purposes (Pemberton, 1987, p. 20-22), thus giving rise to a distinction between the Javanese people's taste for music itself.

The arena entered by the Yogyakarta Palace via YouTube, Instagram, dan Facebook administered by Tepas Tandha Yekti is a Popular Culture Arena where this Arena is dominated by modern cultures brought about by globalization. Popular cultures are closer to today's society, especially the younger generation, as the next generation. Popular in today's terms are experiences born of a consumption culture supported by information technology. Popular art is reproduced, sustainable and survives not because of the will of the people who maintain traditions, but survives because of the will of the media industry (Strinati, 2007). This arena tests the cultural reproduction strategy of the Yogyakarta Palace in cultural contestation and identity negotiations, where the Bagongan language content on Tepas Tandha Yekti's youtube will be intertwined with new cultural content that is more dynamic and acculturative. If the presentation of Youtube, Instagram, and Facebook content is not adaptive to popular cultures, so that it is less attractive to the wider community, the Kraton could again be trapped in the placement of the “High Culture” Bagongan Language.

By producing the movie as the means of the popular culture, KPH Notonegoro and GKR Hayu want to share the value of inside Jogjakarta Palace to the wider audience. The movie titled *Marak* is about the introduction to the use of Bagongan dialect inside the palace. The main actresses are exposed to gain the society's interest after they watch *Tilik*, and it is hoped that they can continue to watch any movies that use Siti Fauziah and Berlliana Desi as the main actresses. In *Marak*, Berlliana Desi roles as the *abdi dalem* who is about to go to the palace inside. The commoner acted by Siti Fauziah is described as an inquisitive person who wants to know what happens inside the palace therefore she follows the *abdi dalem*. She is surprised that the inside is completely different to the outside the palace. Inside, she witnesses that the *abdi dalem* should dress up properly and what most outstanding is that the language that they use is also different. The other scene shows that the commoner meets the Sultan's daughter and she speak using Krama Hinggil, but turning out that the terms of addressing can be distinguished. They use Bagongan dialect inside the palace to talk to other *abdi dalem* as well as to the noble people.

In Bourdieu's theory, the dominant class is able to determine the value of culture, then marginalize subordinate classes such as the high class classifying the upper class and low class tastes towards culture (Back, 2012, p.57) 57). The proposition in this theory emphasizes that the dominance of a social class can strengthen the legitimacy of the culture they form, and can get rid of the culture of other social classes. This legitimacy is currently being attacked by cultures from outside Kraton. To win the heart of society, Jogjakarta palace uses the social media to ask its people to come and love them back. It is easier for the palace to use social media and claims many followers as possible. Although in other parts, the purpose is only to introduce the values inside the palace not asking the society to join. Teh evidence is when the commoner is actually familiar with the dialect but he feels awkward to speak it.

In Bourdieu's concept of capital, language is categorized as Symbolic Capital. This symbolic capital will be fought in the field or arena, together with social, economic and cultural capital that can be exchanged. Symbolic capital arises from a person's self-esteem or prestige which can be used as a form of self-image in the social sphere which can be a strategy when fighting in the arena, including through language (Bourdieu, 1989, p. 14-25). Symbolists can strengthen their legitimacy as guardians and stakeholders of Javanese culture by fighting in the arena of popular culture. Bagongan dialect can be the one that is claimed as a symbolic capital used by the noble people so that they use it exclusively to speak to the *abdi dalem*. Therefore, Yogyakarta palace tries to legitimate the use of the language inside the palace.

However as nowadays people live in the modern era, the traditional culture is barely valued anymore. The younger generation tends to choose the popular culture that is so into them. The environment and the genre are so various and up-to-dated. The difficulty of traditional cultures with all their local wisdom to survive the onslaught of the hetero-doxa of popular culture is the internalization of culture in society itself. Many people outside the Kraton, especially the younger generation, show their love for local wisdom and Javanese cultural heritage only temporally when there are only cultural events. If Bagongan dialect is possible to be used by the commoners, the best thing to do is to mingle it with other discourse of popular culture. When looking back to the previous testimonial, even the younger generation of *abdi dalem* does not want to use the Bagongan dialect unless it can be combined with the popular culture.

As long as the Javanese people still maintain traditions and local wisdom that are in line with the Kraton culture, then the position of the Kraton in maintaining the culture will be legitimized stronger. The identity built in the Kraton is attitude and character through the Bagongan language which shows a subtle, respectful and humble attitude. This is a form of new habitus in the Surakarta Palace arena which is followed by the habits of the people who are "expected" to be in the same corridor. This habit is in line with Bourdieu's concept of a "mental or cognitive structure" by which a person relates to the social world. People are provided with a set of internalized schemes that they use to perceive, understand, appreciate and evaluate the social world. The palace has

standardization in the formation of a more constructive identity, in contrast to the Javanese identity that exists outside the palace walls. In accordance with the concept of identity proposed by Jenkins (2004) that social identity is a matter of how a person knows who he is and how other people identify or recognize him then who a person is or wants to look like who they are (Jenkins, 2004, p. 17). This traditional Javanese Keraton identity is being contested with other identities out there brought about by globalization.

The Kraton instills habitus in behaving to the community so that it can be applied in their daily lives when talking to other people. If we look at Bourdieu's thoughts on habitus, it means that the community as the audience for the YouTube, Instagram, and handout of Kraton Jogja "externalizes the structure". The habitus is formed to show the symbol of the Jogja Palace which was embedded in the community which was then developed out to the wider community so that it could attract people to join in spreading the Bagongan language. YouTube finally is used by the Yogyakarta Palace as a means to claim back the legitimization by attaching the popular culture via social media and short movie.

CONCLUSION

Bagongan dialect is one of the dialect used inside the Jogjakarta palace that sounds like *ngoko/krama madya*, the third higher language status in Jogjakarta Palace. The use of suffix *-dipun*, and *-nipun* is changed into *-aken*, *ě* that sound a bit harsh if spoken to the elderly. Therefore most of the younger generation of *abdi dalem* does not feel comfortable when speaking Bagongan dialect. However, the older generation give suggestion that talking Bagongan dialect should be maintained. Meanwhile, the well-known High Culture should use Social Media to keep the existence especially to take an interest from the younger generation. Bourdieu's thought toward symbolic capital shows that Kraton Jogja has lost its charisma as a lot of challenging thing happens. As a popular culture, media sosial such as Instagram, Youtube, and Facebook are used to find more followers. The palace, at last, has standardization in the formation of a more constructive identity, in contrast to the Javanese identity that exists outside the palace walls. If Bagongan dialect is possible to be used by the commoners, the best thing to do is to mingle it with other discourse of popular culture. When looking back to the previous testimonial, even the younger generation of *abdi dalem* does not want to use the Bagongan dialect unless it can be combined with the popular culture. At the end, the Jogjakarta palace needs the popular culture to reconnect with their people. As long as the Javanese people still maintain traditions and local wisdom that are in line with the Kraton culture, then the position of the Kraton in maintaining the culture will be legitimized stronger.

At the same time, Kraton Jogja account is part of the learning media for the people who look for learning activity in social media. The good part is that by having social media and not too much attaching of the High Culture, the Jogjakarta palace has lots of opportunity to introduce the values worldwide not only is Yogyakarta's society. It is part of the palace contribution toward nation.

ABOUT THE AUTHORS

Nurvita Wijayanti born in Yogyakarta is an English Literature lecturer in Universitas Bangka Belitung. She is interested in a research on linguistics especially Sociolinguistics and Javanese language. She knows Javanese, Bahasa Indonesia, English, and passive Bangkanese. She lives in Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung but her heart is still in Yogyakarta.

Panggio Restu Wilujeng born in Solo is a Sociology lecturer in Universitas Bangka Belitung. His graduate thesis talks about the reproduction of *Krama Hinggil* in the *Pambiwara* course. His interest of research is in popular culture and post-modernism. He knows Javanese, Bahasa Indonesia, English, and active Bangkanese. He lives in Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung but his heart goes to Javanese culture.

ACKNOWLEDGMENT

The authors would like to truly thanks to Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat that has given them an opportunity to study their hometown by joining this International Symposium. The authors would also like to show gratitude to the participants, both the *abdi dalem* and the people who live near the palace.

References:

- Asih, M. B. (2015). *Basa-basi berbahasa Abdi dalem Kasultanan Yogyakarta*. Yogyakarta: PBSI Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
- Back, Les et.al. (2012). *Cultural Sociology an Introduction*. UK : WileyBlackwell
- Bourdieu, Pierre (1977). *Outline of a Theory of Practice*. London : Cambridge University Press.
- _____ (1989). *Social Space and Symbolic Power.*” *Sociological Theory* 7 :14 - 25
- Britain, David & Matsumoto, Kazuko. (2005). *Language, Communities, Networks and Practices*. 10.1002/9780470754856.ch1.
- Geertz, Clifford. (1990). “Popular Art “ and The Javanese Tradition. *Media Indonesia Cornell Vol. 50*
- Jenkins, Richard. (2004). *Social Identity, Second Edition*. London : Routledge
- Mohajan, Haradhan Kumar. (2018). Qualitative research methodology in social sciences and related subjects. *Journal of Economic Development, Environment, and People*. Vol 7. Issue 01. pp 23-48.
- Mulder, Niels. 2005. *Inside Indonesian Society : Cultural Change in Java*. Yogyakarta :Kanisius
- Pemberton, John.(1987). *Musical Politics in CentralJava (Or How Not to Listen a Javanese Gamelan*. *Media IndonesiaCornell Vol.4*
- Poedjasoedarma, Soepomo, dkk. 1979. *Tingkat Tutur Bahasa Jawa*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Poedjasoedarma, Soepomo dan Laginem. (2014). *Bahasa Bagongan*. Yogyakarta: Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Retnaningtyas, H. R. E., Nababan, M.R., Purnanto, D. (2019). Language code choice of male abdi dalem of kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. *Lingua Cultura Journal*. Vol 13. No 2. DOI: <https://doi.org/10.21512/lc.v13i1.5326>
- Strinati, Dominic. (2016). *Popular Culture: Pengantar Menuju Teori Budaya*. Yogyakarta : Narasi
- Statista Research Department. (2022). Number of U.S. Facebook users 2018, by age. Statista.com. Accessed on February 7, 2022.
- Sudaryanto. 2015. *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa*. Yogyakarta: Sanata Dharma University Press.
- Sulistiyawati, S., Emzir, E., & Akhadiah , S. (2021). The Maintenance of Bagongan Language in Yogyakarta Palace. *Basic and Applied Education Research Journal*, 2(1), 9-15. <https://doi.org/10.11594/baerj.02.01.02>
- Wilujeng, Panggio Restu., Samuel, Hanneman. (2018). Reproduksi bahasa krama inggil melalui kursus pamiwara di keraton surakarta (studi kasus tentang strategi keraton surakarta dalam upaya mempertahankan legitimasi kekuasaan atas kebudayaan jawa). *Jurnal Society Vol 6 No 2 pp 65-73*. DOI : <https://doi.org/10.33019/society.v6i2.66>

Keraton dan Rekonsiliasi '65: Kontribusi Masjid Soko Tunggal Terhadap Perdamaian Bangsa (1972-1999)

)* **Erik Muhammad R, S.S.**

Pascasarjana Departemen Sejarah, Universitas Indonesia

Abstrak

Keraton Yogyakarta merupakan salah satu peninggalan kerajaan Mataram yang hingga saat ini masih terawat dengan baik. Dalam perjalanannya banyak sekali kontribusi yang diberikan. Salah satu yang paling menarik dan jarang dibahas yaitu, Keraton dan rekonsiliasi '65. Apabila kita bahas secara lebih dalam kontribusi Keraton untuk perdamaian bangsa pernah terwujud dalam bentuk rekonsiliasi pasca meletusnya Gerakan 30 September 1965, dengan cara membangun sebuah tempat peribadatan umat Islam bernama Masjid Soko Tunggal. Tempat peribadatan umat Islam ini dipercaya sebagai bangunan sakral yang didirikan diatas tanah bekas makam kuda Keraton. Masjid ini digunakan sebagai media pemersatu bangsa di tengah kerusuhan sosial pasca terjadinya peristiwa G30S/PKI 1965. Kebanyakan orang akan bertanya mengapa hal ini bisa terjadi, menurut hipotesa awal penelitian ini, fenomena tersebut bisa terjadi karena pada tahun 1965 lingkungan sebelah barat Keraton merupakan basis dari orang-orang kiri (istilah akrab untuk menyebut orang-orang komunis). Pada tahun 1966 orang-orang tersebut masuk dalam daftar pencarian orang operasi militer Kostrad. Banyak diantara masyarakat disekitar lingkungan Tamansari Yogyakarta kemudian ditangkap dengan tuduhan mereka adalah masyarakat simpatisan komunisme di Yogyakarta. Seiring dengan penangkapan itu terdapat satu dorongan yang berangkat dari keprihatinan salah satu tokoh berpikiran maju, yang berasal dari masyarakat di Tamansari bernama Drs. H. Hadjir Digdo Darmodjo. Beliau memberikan gagasan kepada Keraton untuk mendirikan sebuah pusat peribadatan umat Islam yang kemudian diberi nama Masjid Soko Tunggal. Adapun dari pernyataan ini penulis bertujuan untuk meneliti bagaimana peran keraton dalam pembangunan keagamaan untuk masyarakat di Tamansari.

Sementara metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, memakai metode penelitian sejarah kritis menurut Prof. Sartono Kartodirdjo, antara lain terdiri dari (1) Heuristik (Pencarian Sumber), (2) Kritik (kritik atau verifikasi data), (3) Interpretasi (Kemampuan menafsirkan sejarah yang berlandaskan pada teknik (*Accepted History*)), (4) Historiografi (Rekonstruksi/ penulisan sejarah). Adapun sumber yang kami peroleh merupakan sumber primer dan sekunder yang termuat dalam buku, jurnal, majalah dan arsip.

Sedangkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah, (1) Masjid Soko Tunggal didirikan oleh keraton dan digagas oleh Drs. H. Hadjir Dagdo Darmodjo, dengan tujuan membangun rekonsiliasi pasca terjadinya peristiwa G30S/PKI 1965 melalui pendekatan keagamaan, dan (2) Keraton memberikan akomodasi, untuk memfasilitasi perdamaian bangsa pasca peristiwa G30S/PKI terjadi berupa sebidang tanah, dan bangunan di area destinasi wisata konservasi, (3) Masyarakat yang ada di Tamansari pada tahun 1972 terlindungi dan mampu melakukan rekonsiliasi terhadap masyarakat yang terlibat PKI dengan cara yang relatif sederhana; (basis ekonomi pariwisata).

Atas dasar penemuan diatas, kiranya dapat dibuka beberapa isu, pertanyaan, dan tambahan dari para *audience*/ pembaca sekalian untuk berdiskusi. Adapun antara lain yang menarik untuk didiskusikan disini bisa kita pahami melalui beberapa pandangan secara khusus. Seperti, bagaimana cara kita untuk lebih dalam melihat peran Keraton dalam membangun relasi keagamaan yang kuat di luar lingkungan istana. Sebab beberapa kajian tentang Keraton dan relasi agama di luar lingkungannya jarang sekali dibahas. Padahal secara struktur birokrasi yang berlandaskan pada unsur-unsur

feodalisme, Sultan atau raja itu sendiri merupakan wakil dari pada penguasa dunia dari tanah Jawa, oleh karena itu diberi gelar *Khalifatullah ing Tanah Jawi*. Namun kebanyakan penelitian saat ini yang sering dilakukan yaitu, hanya peran Sultan dalam pembangunan keagamaan yang ada dilingkungan kerajaannya saja. Seperti kajian sejarah tentang masjid *gedhe* kauman di seberang alun-alun Keraton, dan masjid *gedhe* petilasan istana Mataram tatkala masih berdiri kokoh di daerah Plered.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa Keraton Yogyakarta di era kepemimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono IX telah melakukan upaya rekonsiliasi pasca tragedi 1965. Keraton telah memberikan peran untuk mendamaikan masyarakat di Tamansari pasca terjadinya peristiwa G30S/PKI tahun 1965. Mengingat jika Tamansari pada tahun 1965 teridentifikasi sebagai basis PKI di salah satu wilayah yang dekat sekali dengan lingkungan Keraton. Dengan dibangunnya Masjid bernama Masjid Soko Tunggal, pasca terjadinya peristiwa G30S/PKI sedikit banyak para simpatisan PKI yang berada di Tamansari bisa dikendalikan. Selain menjadi penganut agama Islam masyarakat disana juga diajarkan sebagai penduduk yang bisa mematuhi, dan mengamalkan butir-butir Pancasila sebagai suatu pedoman hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Kata Kunci: Keraton, Rekonsiliasi, Masjid Soko Tunggal, PKI, Tamansari, Perdamaian Bangsa.

A. PENDAHULUAN

Ketika kita membicarakan peran Keraton Yogyakarta dalam kontribusi kebangsaan, kiranya akan terlihat saat kita membahas mengenai keraton dalam lingkaran keagamaan. Terlebih akan tepat sekali apabila kita mengusung pembahasan mengenai sejarah pembangunan Masjid Soko Tunggal di lingkungan Tamansari. Menurut berbagai referensi yang tersedia, masjid ini dibangun atas kuasa Sri Sultan Hamengkubuwono ke IX. Adapun secara khusus tempat peribadatan umat Islam ini dibangun karena desakan dari masyarakat sekitar Tamansari yang membutuhkan masjid. Salah satu tokoh agama yang begitu berarti bagi pembangunan ini bernama Drs. H. Hadjir Digo Darmodjo. Beliau adalah seorang guru kesenian di salah satu sekolah Muhammadiyah Yogyakarta. Sementara referensi lain mengatakan beliau merupakan pentolan veteran pada masa agresi militer Belanda di Yogyakarta, (Kompas, 2021).

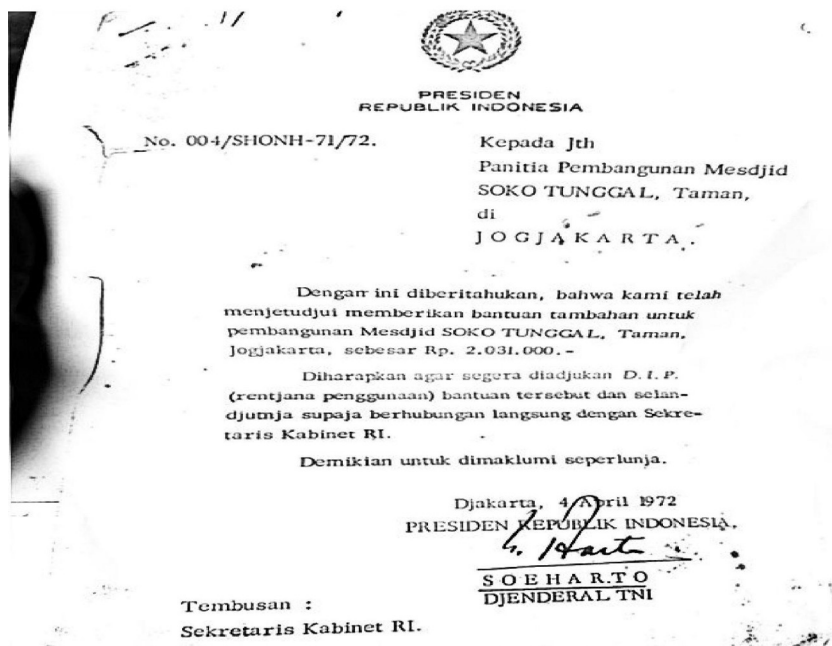
Sebelum membahas lebih dalam mengenai pembangunan Masjid Soko Tunggal, alangkah lebih baiknya kita membahas terlebih dahulu sisi lain dari seorang Hamengkubuwono IX. Menurut berbagai catatan sejarah yang ada, beliau adalah seorang tokoh nasionalis yang lahir dari seorang rahim perempuan bernama R.A. Kustilah, yaitu puteri seorang Pangeran Mangkubumi yang kemudian menyandang gelar Kanjeng Raden Ayu Adipati Anom. Wanita ini adalah satu-satunya *garwo padmi*¹ dari sang Pangeran, atau istilah ini bisa dikatakan sebagai istri utama Sultan, sebab Raja Jawa biasanya memiliki banyak istri di Istana. Semasa kecil HB IX bernama Dorajatun, beliau dilahirkan pada hari Sabtu Pahing, tanggal 12 April tahun 1912, atau menurut hitungan kalender Jawa jatuh pada 25 *Rabingul Akhir* tahun *Jimakir* 1842. Sejak ayahnya dinobatkan menjadi Raja, beliau tidak kurang berumur tiga tahun. Semenjak kecil Dorajatun dikenal sebagai anak yang sopan, santun, dan cerdas. Ia pun tidak bermasalah tinggal dengan saudara se-ayah yang beda ibu di *Purbayan*. Baginya kerukunan dalam kekeluargaan adalah hal yang selalu diutamakan, (Dwiyanto, 2009: 492).

Semenjak belia, Sri Sultan Hamengku Buwono IX adalah anak yang cerdas dan berbudi pekerti luhur. Ayahnya Sri Sultan Hamengku Buwono VIII sudah mempercayai anaknya tersebut suatu kelak akan menjadi orang yang besar, dan hal ini terbukti ketika beliau memberikan tahta kepadanya

1 *Garwo Padmi* adalah istilah dalam bahasa Jawa untuk menyebut istri utama dari seorang Raja. Pembagian nama ini diberikan supaya orang mengenal kedudukan istri raja yang satu dengan yang lainnya, sebab secara umum raja memiliki jumlah istri lebih dari satu, dan biasa disebut dengan selir.

untuk menjadi Sultan ke IX untuk rakyat Yogyakarta pada tanggal 18 Maret 1940. Hamengku Buwono IX diidentikan dengan sosok raja yang banyak diagungkan oleh banyak figur tradisional keraton. Salah satunya oleh dalang pewayangan keraton setempat, sebagaimana pendapat Ki Dalang, “tabiat raja merupakan pribadi yang adil, *Hamemayu Hayuning Bawana*”. Selain itu, ia juga digariskan sebagai pemimpin yang mencintai kawulunya, murah hati berwibawa, dan kerap memberi dana bantuan setiap hari pada rakyatnya. Kepercayaan Sri Sultan Hamengkubuwono VIII terhadap anaknya Raden Mas Dorodjatun (Kelak menjadi Sultan Yogyakarta ke IX) ditangkap oleh rekam tulisan Aan Ratmanto yang menegaskan, sejak kecil Dorodjatun memang sudah dianggap sebagai sosok pengganti raja. Kecerdasan dan perilaku yang mandiri sudah mencerminkan sosok *leadership* yang kuat sekali, (*Ibid*, 2009: 493).

Hingga pada akhirnya memang Hamengkubuwono ke IX menggantikan ayahnya HB VIII bertahta setelah dipanggil pulang tatkala sedang menyelesaikan studinya di negeri Belanda. Figur HB IX sangat dicintai oleh rakyat Yogyakarta, terlebih beliau dianggap sebagai pemimpin yang berkharismatik, pandai bergaul dengan bangsa asing, dan peka terhadap kebutuhan rakyatnya. Hal ini tercermin saat masyarakat di Tamansari membutuhkan tempat peribadatan umat Islam berupa Masjid. Sri Sultan Hamengkubuwono IX sendiri yang memerintahkan perwakilan Keraton untuk segera memberikan akomodasi pembangunan Masjid. Hamengkubuwono IX kemudian memerintahkan seorang arsitek Keraton bernama R.Ng. Mintobudoyo sebagai perancang pembangunan masjid untuk masyarakat di Tamansari.



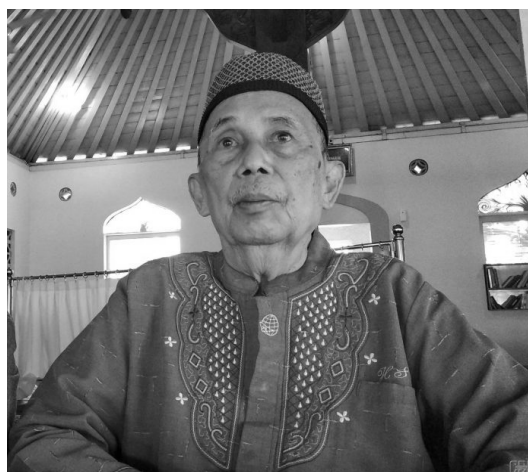
Surat dari Presiden Suharto yang berisi bantuan dana untuk membangun masjid Soko Tunggal. Sumber: Arsip Takmir Masjid Soko Tunggal

Figur Sri Sultan Hamengkubuwono dalam lingkaran keagamaan nampaknya sudah banyak dirasakan oleh rakyatnya. Ia juga pandai membuat sesuatu yang sarat dengan nilai dan filosofi Jawa, seperti halnya pada saat proses pembangunan masjid yang cenderung unik dan mengandung unsur filosofis yang tinggi. Sebab makna yang terkandung dari konstruk pembangunan masjid menjadi sarat akan unsur nilai-nilai kebudayaan Jawa. Misalnya masjid ini ditopang dengan soko guru yang berjumlah satu (tunggal), jumlah tunggal ini dipahami dengan penafsiran makna dan

keterkaitannya dengan sila pertama Pancasila yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sementara pilar penopang di atas tiang yang tunggal ini berjumlah empat, menggambarkan pelengkap sila-sila selanjutnya dari butir Pancasila, (Dina Astuti, n.d., 34).

Hal ini menjadi daya tarik penulis untuk meneliti lebih dalam dari latar belakang dibangunnya masjid Soko Tunggal ini. Tidak saja hanya dalam unsur lingkaran keagamaan di Keraton, tetapi juga apa yang menjadi alasan mengapa seorang arsitektur membangun Masjid Soko Tunggal dengan menggunakan kriteria filosofis yang cenderung nasionalis. Sedangkan menurut Panofsky, dalam mengkaji suatu karya seni yang menempel di dalam ornamen-ornamen bangunan bersejarah, kita harus meneliti dengan menggunakan perspektif, dan pendekatan yang bersifat pra-ikonografi, analisis ikonografis, dan interpretasi ikonologis. Tiga perspektif ini kemudian berguna untuk menemukan titik terang, dari latar belakang seorang arsitek/ seniman (pencipta karya); mengapa membangun karya sedemikian rupa, apa ekspresi maknanya, dan untuk apa fungsinya, (Panofsky, 1955: 26-40).

Sedangkan menurut beberapa referensi lain, pembangunan Masjid Soko Tunggal ini karena desakan dari masyarakat di Tamansari yang diwakili oleh salah satu tokoh agama dari Muhammadiyah bernama Drs. H. Hadjir Dagdo Darmodjo. Beliau secara langsung bertemu dengan *sinuwun* untuk memohon pihak Keraton bisa membantu pembangunan sarana ibadah umat Islam di sekitar Tamansari. Adapun yang paling mendesak untuk segera dibangun masjid disana antara lain disebabkan oleh peristiwa G30S/PKI tahun 1965. Sebab di Tamansari diketahui sebagai salah satu basis komunis yang ada di Yogyakarta, maka pasca meletusnya peristiwa tersebut, banyak diantara orang-orang Tamansari yang terlibat menjadi simpatisan PKI ditangkap. Nahas operasi militer PKI di Yogyakarta juga pernah melakukan penangkapan yang membabi buta. Alhasil ada beberapa warga sekitar Tamansari yang tidak memiliki salah apa-apa kemudian ditangkap karena fitnah, dan prasangka buruk dari orang tidak bertanggung jawab. Hadjir selaku mantan veteran yang juga seorang pendidik yang berasal dari sekolah Muhammadiyah merespon hal ini dengan cara yang relatif sederhana namun tepat. Beliau mendesak Sultan untuk segera dibuatkan Masjid guna tempat ibadah orang-orang yang sudah jauh dari ajaran agama. Berangkat dari keprihatinan tersebut akhirnya Masjid Soko Tunggal diresmikan oleh Hamengkubuwono IX pada tanggal 28 Februari 1973, (Rizkia: 2021).



Potret Hadjir Digdo Darmodjo, salah seorang yang mendukung didirikannya masjid Soko Tunggal sebagai tempat peribadatan umat Islam di Tamansari. Sumber: <https://www.cendananews.com/2019/05/keistimewaan-masjid-soko-tunggal-dibuat-tanpa-paku.html>

Adapun dari pernyataan diatas maka penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai peran Keraton Yogyakarta yang dipimpin Sri Sultan Hamengkubuwono IX, dalam lingkaran keagamaan. Dengan mempertanyakan beberapa hal di bawah ini sebagai upaya untuk membantu

menerangkan pertanyaan diatas; (1) bagaimana keadaan sosial di Keraton Yogyakarta pada tahun 1965, (2) bagaimana proses Keraton memperhatikan lingkaran keagamaan di dalam masyarakat, (3) apa dampak yang ditimbulkan setelah Keraton melakukan pembangunan dalam lingkaran keagamaan masyarakat di lingkungan Tamansari.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini yaitu, metode penelitian sejarah kritis menurut Kuntowijoyo. Terdiri dari lima tahapan; pertama menentukan topik/tema yang didasarkan pada kedekatan intelektual penulis yang disebut sebagai *accepted history*. Kedua baru menggunakan heuristik yaitu mencari, dan mengumpulkan data dari berbagai sumber tulisan yang ada. Bisa diperoleh buku, arsip dokumen, foto, majalah, surat kabar, dan lain sebagainya. Sementara yang ketiga yaitu tahap verifikasi sumber, atau biasa juga disebut dengan kritik sumber. Cara ini berfungsi untuk memilah data yang sudah diperoleh sebelumnya, sehingga dapat diketahui data yang relevan (benar) dengan data yang kurang relevan (cocok) dengan apa yang sedang diinginkan. Selanjutnya tahapan keempat yaitu interpretasi. Langkah ini berfungsi untuk melakukan imajinasi dari seorang peneliti sejarah guna memetakan masa lampau untuk bisa ditulis kemudian, dengan tahapan terakhir yaitu historiography (rekonstruksi sejarah), (Kuntowijoyo, 2005: 14- 17).

Sedangkan data-data yang digunakan dalam tulisan ini kebanyakan bersumber dari bahan-bahan berbentuk buku, jurnal ilmiah, website internet, arsip foto, majalah, surat kabar, dan wawancara yang dilakukan secara langsung dengan takmir Masjid Soko Tunggal bernama Drs. H. Suprpto, M.Pd. di lingkungan Tamansari, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam proses ini penulis banyak menemukan data-data baru dan relatif bisa digunakan sebagai sumber tulisan yang bersifat primer. Selain itu data-data yang sekunder juga tidak kurang sudah bisa dikumpulkan, dan ditulis dalam *paper* ini.

C. PEMBAHASAN

A. Keadaan Sosial di Yogyakarta Tahun 1965 -1972

Menurut Selo Soemardjan keadaan sosial di Yogyakarta bisa dilihat dari perspektif politik. Beliau menyatakan jika aspek perspektif masyarakat terhadap politik di Yogyakarta merupakan sebuah warisan dari pemerintah kolonial Belanda (telah ternodai oleh konotasi yang negatif), sebab sejak tahun 1960-1965 karena kebanyakan partai yang mendominasi di Yogyakarta adalah Partai komunis Indonesia (PKI) maka tak heran disana diidentikan dengan salah satu basis politik merah. Dalam kacamata Belanda komunisme merupakan satu ideologi yang buruk, ideologi yang tidak bisa ditolerir, dan gagasan yang bisa merusak moral. *Image* seperti ini dibentuk hingga pertengahan tahun 1960-an, hingga masyarakat di Yogyakarta menyadarinya pasca meletus pemberontakan G30S/PKI 1965 bahwa komunisme adalah ideologi yang gagal. Sebagian rakyat disana pada tahun 1965 mengancam ideologi komunisme dengan menyatakan sebagai gagasan bersifat destruktif. Gagasan tersebut apabila dibiarkan akan menyebabkan kisruh perdamaian dan ketertiban. Perspektif semacam ini kemudian menjalar hingga ke tokoh-tokoh berhaluan nasionalis, pada hakikatnya rakyat saat itu tidak bisa membedakan mana yang nasionalis dan mana yang komunis, sebab sedikit banyak diantara mereka memiliki karakteristik yang sama. Padahal jika kita lihat lebih jauh lagi, sama sekali gagasan mereka sangat berbeda, bahkan golongan nasionalis bertentangan langsung dengan ideologi komunisme, (Soemardjan, 2009: 22- 30)

Pada saat meletus peristiwa G30S/PKI 1965, banyak diantara simpatisan komunisme yang ditangkap oleh operasi militer di beberapa sudut kota Yogyakarta. Seperti di bagian Timur Yogyakarta yaitu, daerah Gunung Kidul terutama di kecamatan Ponjong dan Karangmojo. Masyarakat disana cenderung mempersilahkan gagasan komunisme hadir dan berkembang, sebab partai merah tersebut memiliki peran aktif di sana sejak tahun 1926. PKI pernah mengusung pemberontakan

pertama kali untuk melawan pemerintah Hindia Belanda hingga pengaruhnya sampai ke wilayah Ponjong, dan Karangmojo. Selain itu para anggota komunis juga diduga merupakan tokoh-tokoh komunis yang menyebarkan paham radikal revolusioner di Jawa dan Sumatera. Peranannya dalam melawan Belanda itulah yang kemudian menjadi salah satu daya tarik bagi masyarakat di Gunung Kidul untuk tetap merangkul dan mempersilahkan PKI berkembang hingga tahun 1965, (*Ibid*, 2009: 194).

Akan tetapi berbicara tentang pola persebaran ideologi komunis di Yogyakarta, tak lepas dari aspek teknis penyebarannya yang cenderung strategis. Seperti halnya persebaran PKI di perkotaan Yogyakarta. Disana pola persebaran cenderung lebih menarik daripada yang terjadi di Gunung Kidul. PKI menyebar di perkotaan dengan cara yang lebih intelektual, salah satu yang menariknya yaitu dengan cara pengkaderan (sekolah politik partai). Partai merah ini memiliki kelas pengkaderan dengan mendirikan lembaga bernama Marx house. Bertempat di lingkungan perumahan manajer pabrik gula di Padokan (sekarang di Madukismo). Dalam pengkaderannya itu sedikit banyak membicarakan tentang hukum-hukum ekonomi yang dikemukakan oleh Marx, dan kawan-kawannya. Sementara itu lembaga tersebut bersifat terbuka untuk para anggota, dan simpatisan PKI, BTI, dan SOBSI, akan tetapi juga kepada setiap orang yang berminat. Selama dua bulan berjalan diketahui lembaga ini sudah melahirkan simpatisan komunis yang baru dan mengalami jumlah pertambahan anggota dari masyarakat Yogyakarta, (*Ibid*, 2009: 202).

Selain dengan menggunakan lembaga Marx house, kebanyakan gerakan PKI untuk menghimpun massa di Yogyakarta berbeda dengan kebanyakan orang-orang komunis yang ada di daerah Jawa Tengah pada umumnya. Barangkali PKI memperkirakan keadaan sosial masyarakat di Yogyakarta sudah berpikiran maju, sehingga harus ada semacam pendekatan yang bisa membawa massa kepada apa yang sedang diinginkan oleh kebutuhan partai secara intelektual. Akan tetapi beberapa referensi lain mengatakan ini dengan cara yang bersifat membangun kebersamaan. PKI pernah melakukan musyawarah dengan organisasi massa berbasis pendidikan terkenal di Yogyakarta bernama Tamansiswa. PKI melakukan kamufase, seolah-olah mendukung apa yang sedang dikerjakan oleh Tamansiswa waktu itu. PKI dengan percaya diri menyatakan berada di belakang Tamansiswa yang berarti siap bekerjasama. PKI pernah mengambil posisi dalam hari perayaan musyawarah besar Tamansiswa yang diadakan di Pendopo Tamansiswa Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 8 Maret 1960. Dalam acara ini Tamansiswa bertujuan untuk membangun jaringan kepada sesama alumni supaya tidak melupakan riwayat sekolahnya sepeninggal Ki Hajar Dewantara. Pidato pembukaan ini dibuka oleh Nyi Hadjar Dewantara selaku istri sang pemimpin Tamansiswa. Sementara ornamen PKI yang mengambil posisi dalam acara ini diketahui berasal dari Barisan Tani Indonesia (BTI) yang merupakan organisasi petani onderbouw PKI. Meskipun secara kedudukan tidak begitu prestisius dalam acara tersebut, akan tetapi PKI dicurigai memiliki kepentingan politik didalamnya, tidak lain yaitu ingin menarik sebagian massa Tamansiswa agar setidaknya bergabung dengan organisasi onderbouw PKI, (*Harian Rakjat*, Tahun Ke X No. 2569, II).

Keadaan sosial masyarakat di Yogyakarta pada tahun 1960-1965 banyak diwarnai dengan tarik ulur Partai Komunis Indonesia (PKI). Selain pandai berkamufase dan berada pada kekuatan-kekuatan politik tertentu seperti di atas tadi, PKI juga ternyata memiliki cara yang lebih jitu untuk menarik massa di Yogyakarta dengan cara memanfaatkan peluang kemiskinan rakyat. Sebagaimana sejarah mencatat di salah satu daerah di Yogyakarta sekitar tahun 1960-an mengalami bencana kelaparan. Gunung Kidul dan wilayah Yogyakarta selatan diketahui mengalami kemunduran pangan yang disebabkan oleh berbagai penyebab tak terkecuali dengan kekeringan panjang. Alhasil dari peristiwa ini banyak diantara para pedagang beras yang menimbun padi dan menjualnya di tengah suasana serba kesulitan. PKI hadir dan merespon hal ini sebagai tindakan yang tidak bisa ditoleransi. Harus ada pergerakan massa guna mencegah merajalelanya kaum borjuasi lokal.

Dengan memanfaatkan situasi yang serba sulit ini kemudian PKI melayangkan sebuah program aksi sepihak.²

Program PKI ini dinilai berhasil di wilayah Wonosari-Gunung Kidul, dan sekitarnya. Massa disana bergabung aktif dengan PKI karena tergiur oleh hadiah-hadiah yang dijanjikan. Sementara itu pemerintah Yogyakarta merespon hal ini supaya tidak bisa dibiarkan begitu saja. Sebab akan memicu lahirnya pergolakan politik yang memanas, mengingat Yogyakarta merupakan ex- wilayah swapraja memiliki warisan politik feodal di masa lalu yang kuat. Adapun pemerintah kemudian menerapkan semacam peraturan pajak bagi mereka yang menimbun beras di pasaran, peraturan itu dinamakan dengan *Stamvergunning*. Adapun yang wajib memiliki sertifikat tersebut adalah para penimbun beras dengan jumlah satu ton keatas untuk keperluan sosial. Sejak diterapkannya peraturan ini kemudian banyak orang-orang yang tertangkap sebagai tersangka penimbun beras. Upaya pemerintah di Yogyakarta dalam melakukan penangkapan para penimbun diakui serius dalam pelaksanaannya. Dengan demikian dapat dikatakan pemerintah berhasil menekan laju kelaparan yang meluas di Gunung Kidul, dan kondisi politik yang diperkirakan memanas dan akan muncul bersama PKI itu tidak begitu terasa kuat menjalar hingga ke wilayah perkotaan Yogyakarta, (*Kedaulatan Rakyat*, 1960, I).

B. Pembangunan Hingga Peresmian Masjid Soko Tunggal Tahun 1973-1990

Berawal dari terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 1965/ PKI, Yogyakarta dalam keadaan yang genting terhitung dari tanggal 1 Oktober 1965. Hal ini ditandai dengan diumumkannya melalui Radio Republik Indonesia (RRI) oleh Mayor Mulyono bahwasanya di Yogyakarta sudah dibentuk Dewan Revolusi. Akan tetapi seiring dengan klarifikasi Soeharto yang kala itu berada di Kostrad, akhirnya bisa menguasai kembali Yogyakarta dalam waktu yang relatif singkat. Keadaan saat itu juga merubah masyarakat di Yogyakarta dalam hal ketajaman politik. Masyarakat sekitar sudah memiliki keyakinan yang kuat jika terjadinya klaim oleh Mayor Mulyono malam itu, tidak lain disebabkan oleh gerakan-gerakan PKI. (Soemardjan, 2009: 10-15).

Kekacauan muncul tatkala operasi militer dilaksanakan. Hal ini bermula sejak Mayor Mulyono seorang angkatan yang disinyalir bergabung dan pro pada PKI melarikan diri dari Yogyakarta karena kurang mendapatkan dukungan massa. Ini menjadi penyebab anggota PKI menjadi kebingungan tanpa memiliki komando. Akhirnya isu mengenai pembasmian orang-orang PKI di Yogyakarta kini bukan hanya wacana, sebab orang-orang kiri itu kini sudah lemah tidak berdaya. Para senior mereka justru melarikan diri dan lari dari tanggung jawabnya sebagai pengendali partai. Pemberantasan terhadap orang-orang PKI diawali oleh tokoh-tokoh agama yang terdiri dari H. Saebani, H.M Jamhari, H.A Basuni, Muhadi Zaenal, dan lain-lain, (Yudhastawa Mangunsarkoro, 2000: 20-22).

Tindakan “mengganyang PKI” dilanjutkan sejak datangnya pasukan RPKAD yang dipimpin oleh Kolonel Sarwo Edi. Massa di bawah kendali para tokoh agama dan RPKAD ini semakin melejit untuk segera memusnahkan PKI dari bumi Yogyakarta. Antara lain untuk kali pertama datang disana RPKAD merancang rapat akbar guna bersama-sama dengan masyarakat dalam hal mengganyang seluruh elemen yang berbau komunisme. Pertemuan ini dilakukan di rumah H. Saebani di daerah Sentul, dan menghasilkan mufakat bahwa pada 20 Oktober 1965 akan diadakan kebulatan tekad umat Islam dan kelompok masyarakat yang tergabung dalam kelompok nasionalis, untuk mengutuk para simpatisan PKI dan ormas-ormas yang membelakanginya, (*Ibid*, 2000: 35).

2 Program Aksi Sepihak merupakan sebuah istilah untuk menyebut gerakan PKI pada tahun 1960-an menarik massa miskin dengan mengiming-imingi lahan, sawah, atau kebun milik orang-orang Kapitalis. Atau mereka biasa menyebutnya dengan istilah Kabir (Kapitalis Birokrat). Sebutan itu dilekatkan oleh PKI untuk menyebut orang-orang pegawai negeri, pejabat, atau aparatur negara yang memiliki kekayaan diatas rata-rata profesinya. Dengan kata lain PKI selalu berburuk sangka pada mereka, dengan menuduhnya membeli tanah, ladang, kebun, dan lain-lain diperoleh dari hasil uang rakyat (Korupsi).

Dari kejadian ini kemudian banyak diantara orang-orang yang dahulu terlibat dengan PKI dilakukan penangkapan secara besar-besaran. Terkadang mereka dikumpulkan dalam satu kelompok di halaman depan Koramil, atau tempat-tempat instansi lain yang berbasis militeristik. Salah satu diantara daerah yang banyak ditangkap orang-orang PKI di Yogyakarta berada di sebelah barat Keraton yaitu, sekitar wilayah Tamansari. Penangkapan PKI disana bergerak secara membabi buta. Sebab beberapa di antara aparat menangkap orang-orang yang terkadang tidak tahu mengenai PKI. Akan tetapi karena di waktu penangkapan mereka sedang berada dalam lingkungan PKI, maka secara tidak langsung orang tersebut diidentikan dengan kelompok kiri yang meresahkan, (Mark Woodward, 2011, 43).

Selain mereka ditangkap dengan alasan yang tidak masuk akal sebagaimana pernyataan diatas, masyarakat di sebelah barat Keraton juga dianggap sebagai golongan sosial yang tidak memeluk agama layaknya kelompok masyarakat di lingkungan Kauman yang letaknya tidak begitu jauh dari Tamansari. Gerakan-gerakan militer dan masyarakat pendukung, kemudian dianggap oleh salah seorang tokoh masyarakat di Tamansari bernama Drs. H. Hadjir Dagdo Darmodjo sebagai tindakan-tindakan yang merugikan, dan menyengsarakan orang tidak bersalah. Akhirnya pada tanggal 21 Agustus 1967 Hadjir bersama masyarakat yang berada pada pihaknya mengadakan pembentukan panitia pembangunan Masjid di kampung Taman, percis depan Tamansari saat ini. Diketahui untuk pertama kalinya panitia masjid ini diketuai oleh Imam Suhadi ³



Kiri: pelataran Masjid Soko Tunggal Yogyakarta, kanan: meja mengaji, dan guci penampung air wudhu, (2021).
Sumber: Potret pribadi

Karena panitia ini memiliki banyak kesibukan, maka seiring dengan pembentukan panitia diatas, masjid Soko Tunggal mendapatkan *palirah ndalem* atau wakaf dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Adapun tanah yang diwakafkan keraton untuk membangun masjid tersebut antara lain seluas sembilan ratus meter persegi. Ada yang unik dari tanah yang diwakafkan keraton untuk dibuatkan masjid Soko Tunggal yaitu, ternyata tanah tersebut awalnya adalah lingkungan pemakaman 10 orang pejuang kemerdekaan di sebelah barat, dan yang digunakan untuk masjid ini berasal dari tanah makam kuda keraton. Pada tahun 1970 ketua pembentukan masjid ini diketuai oleh GBPH. Prabuningrat yaitu, kakak dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Dengan seorang arsitektur bernama R. Ngabehi Mintobudoyo. Sementara menurut catatan DKM Soko Tunggal, masjid ini juga pernah secara langsung oleh presiden kedua Soeharto, dengan uang sebanyak tujuh juta, tujuh ratus satu ribu rupiah. ⁴

3 Wawancara dengan Takmir Masjid Soko Tunggal. Drs. H. Suprpto, M.Pd, pada tanggal 25/ Desember/ 2021, pukul 09:35 - 11:30 WIB.

4 Wawancara dengan Takmir Masjid Soko Tunggal. Drs. H. Suprpto, M.Pd, pada tanggal 25/ Desember/ 2021, pukul 09:35 - 11:30 WIB.



Kiri: prasasti yang menunjukkan angka tahun peresmian Masjid Soko Tunggal Yogyakarta, Kanan: pintu masuk Tamansari, sebelah kiri adalah tempat Masjid Soko Tunggal berdiri. Sumber: Potret pribadi

Hal ini yang kemudian menjadi pertanyaan besar, mengapa Soeharto saat itu memberikan dana bantuan kepada masjid Soko Tunggal yang notabene sebetulnya bisa saja didanai oleh keuangan keraton hingga selesai. Akan tetapi ini hanya penasarannya penulis secara pribadi, atau bisa dimanfaatkan untuk membuka ranah penelitian baru bagi para pembaca. Pembentukan masjid oleh keraton nampaknya sering sekali dilakukan. Hal ini tidak saja untuk kehidupan religi bagi keluarga kerajaan, melainkan juga dibentuk untuk mewedahi aspirasi beragama bagi masyarakat yang ada di Yogyakarta. Atau bisa jadi dibangunnya masjid Soko Tunggal ini merupakan peluang keraton untuk menghindari labelisasi keraton sebagai penyebar ajaran Islam kejawaan, Islam abangan, dan seterusnya. Sebab jika kita kaitkan dengan konteks awal dibangunnya masjid ini adalah, sebagai akomodasi masyarakat yang terdampak peristiwa G 30 S/PKI, dan kebetulan mereka tergolong dari orang-orang yang ragu untuk beragama Islam, (Chamamah, 2001: 209).



Kiri: Tiang yang disebut Soko Tunggal, dan kanan: potret narasumber Drs. H. Suprpto, M.Pd selaku takmir dan saksi sejarah pembangunan masjid. Sumber: Potret pribadi

Nama Sri Sultan Hamengkubuwono IX nampaknya tidak hanya harum untuk rakyat Yogyakarta saja, melainkan pula bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan. Jika di Yogyakarta kita bisa melihat kontribusi Sultan untuk membangun rakyatnya dalam berbagai bidang, salah satunya dalam bidang keagamaan sebagai juru selamat dari kerusuhan 65', namun pada tahun 1978, Sri

Sultan Hamengkubuwono IX juga telah menjadi juru selamat bangsa Indonesia dari ancaman kelaparan, dan kemiskinan. Hal ini bermula saat Sukarno yang terlalu fokus mencari keadilan dunia dengan menjual istilah imperialisme, dan kolonialisme Barat. Sehingga saking gencarnya itu ia bahkan memberanikan diri untuk keluar dari Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Sedangkan pada awal Orde Baru, Indonesia mulai menata perekonomian tatkala di era Sukarno rakyat menderita banyak kemiskinan, negara Indonesia mengalami inflasi besar-besaran, sedangkan hutang negara tidak bisa terbayar secara cepat. alhasil negara kita dioyak oleh negara-negara besar peminjam dana yaitu, Jerman, dan beberapa negara barat lainnya. Mereka akan segera menuntut Indonesia di meja pengadilan Internasional terkait utang piutang yang lama tidak dibayarkan. Negara yang saat itu dipimpin oleh Suharto dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX akhirnya memperbaiki kerusakan ekonomi yang begitu berarti. Karena kredibilitas dan kapasitas Sri Sultan Hamengkubuwono IX diakui oleh dunia, dan oleh karena itulah dunia kembali mempercayai Indonesia, dan tergerak memberi bantuan, (Baskoro, 2010: 81).

Begitu juga dengan pembangunan beberapa akomodasi tempat ibadah di Yogyakarta. Sri Sultan Hamengkubuwono sangat mengapresiasi kerja masyarakat yang berkaitan dengan unsur-unsur keagamaan. Sebab dengan seperti ini Sri Sultan Hamengkubuwono IX bisa menjadi jembatan yang mampu menciptakan terjaganya hubungan tradisi, agama, dan modernitas, agar selalu seimbang. Dalam perkembangannya, Yogyakarta hingga detik ini merupakan sebuah kota yang “Istimewa”. Tidak saja dalam bentuk subjektivitas penulis, akan tetapi bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan pendapat yang lainnya. Tidak hanya Masjid Soko Tunggal dibuat dengan gaya arsitektur Jawa klasik, mendirikan hanya satu tiang dengan umpak di bawahnya berasal dari kerajaan mataram kuno di istana Pleret. Tetapi juga tata letak kota yang cenderung penuh makna filosofis yang mendalam. Sebut saja jalan Malioboro, menurut penelitian koronomastik (dari bahasa Yunani *choros* yang berarti daerah dan *onomasticos* yang artinya berkaitan dengan sebuah nama) jalan Malioboro merupakan jalan utama yang menghubungkan Keraton dengan Tugu, Gunung Merapi, yang dimaknai secara filosofis sebagai poros sumbu kekuatan kerajaan Mataram. Sementara penamaan jalan ini dipercaya diambil dari istilah klasik dalam sastra Jawa kuno yang berarti nama dari ibu kota negara *Rama* dalam bahasa sansekerta. Akan tetapi karena pengaruh kolonial yang begitu kuat di Yogyakarta, masyarakat sekitar justru mempercayai penamaan jalan tersebut berasal dari sebuah nama seorang Jenderal Inggris, (Carey, 2015: 25).

Kembali lagi pada pembahasan pembangunan masjid Soko Tunggal Yogyakarta, sejak diresmikan pada hari Rabu pon tanggal 28 Februari 1973 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Masjid ini mulai digunakan untuk masyarakat sekitar umumnya, sementara untuk melakukan pembinaan secara tidak langsung dengan menggunakan pendekatan personal terhadap mantan PKI yang ada di daerah Tamansari waktu itu. Dengan kata lain masjid ini digunakan oleh para pemuka agama yang moderat untuk melakukan *re-Islamisasi* masyarakat di kampung Taman yang dahulu masih ragu dengan Islam, ditambah berafiliasi dengan PKI. Selain itu Suharto melakukan pembentukan semacam undang-undang yang mengatur tentang kepemilikan agama yang sah, dan diakui oleh negara. Bagi mereka yang tidak mencantumkan apa agama seseorang di Kartu Tanda Penduduk (KTP), maka dengan mudahnya undang-undang itu mengidentikan mereka dengan PKI. Sebab partai kiri dimana-mana ragu dalam memilih agama, atau secara kasar mereka dipercaya tidak beragama (*Ateisme*), (Mark Woodward, 2011: 43).

Dalam perkembangannya masjid Soko Tunggal menjadi salah satu destinasi religi berbasis kebudayaan Jawa yang terkenal dengan filosofis Pancasila. Dari tahun 1973 hingga tahun 1990 masjid ini sering disambangi oleh berbagai wisatawan religi domestik yang datang dari berbagai pelosok pulau. Kebanyakan diantara wisatawan terkagum-kagum dengan material culture yang masih dipertahankan orisinalitasnya. Adapun bentuk bangunan yang sarat dengan kandungan nilai-nilai Pancasila, antara lain seperti keberadaan soko guru tunggal. Jumlah yang tunggal ini dipahami

serta dikaji dengan penafsiran makna sebagai Sila pertama dalam Pancasila yaitu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara empat penopang berikutnya adalah sila-sila berikutnya dari butir-butir Pancasila. Sementara dari sudut pandang agamis Jawa, masjid Soko Tunggal (Penyangga yang satu) diartikan sebagai “satu” tanpa ada jumlah yang lainnya, seperti hanya ada Allah SWT itu satu, satu itu Allah SWT, dan satu itu mutlak hanya milik Allah dalam surat Al-Ikhlas, dan Allah SWT itu Maha Esa. Sokoguru yang dihadirkan dengan jumlah satu (tunggal) bertujuan agar manusia senantiasa mengingat akan adanya Allah SWT yang satu itu, (Astuti, 2019, : 23-32).

C. Kehidupan Sosial di Tamansari Tahun 1990-1999

Keberadaan Masjid Soko Tunggal yang terletak di Jalan Kampung Taman KTI/ 309 Daerah Istimewa Yogyakarta ini, secara tidak langsung telah mengubah struktur sosial masyarakat. Terutama dalam rentang tahun 1965-1990, sebagaimana penjelasan yang sudah diuraikan di atas, peristiwa 1965 telah memporak porandakan masyarakat di Tamansari khususnya bagi yang pernah terlibat hubungan dengan PKI. Para tokoh pemuka agama yang hidup pada tahun 1965 di kampung Taman, nampaknya menyadari betul cara menyelamatkan bangsa yang sedang “diadu” ini dengan cara yang netral. Begitu pun keraton sudah merespon aspirasi ini sebagai sebuah alternatif menyelamatkan rakyatnya dari segala bentuk kriminalisasi. Selain dari itu PKI yang dahulu menjadi salah satu partai pesohor di Yogyakarta, akhirnya dijadikan sebuah contoh kegagalan. Mengingat peristiwa dengan struktur semacam ini mengingatkan pada pendapat Riyadi Goenawan dan Darto Harnoko tentang bagaimana cara Islam berkembang di Jawa dengan cara yang mudah dan sederhana. Antara lain yaitu dengan menggunakan pendekatan yang sinkretis, sebab beberapa penyebar agama layaknya Walisongo sudah menyadari jika struktur masyarakat di Jawa terbentuk dari ajaran para leluhur. Bahkan hingga masa awal kolonial juga orang Jawa masih kentara mengembangkan pola kehidupan agama yang lebih bersifat kejawen daripada menjadi santri seutuhnya, (Goenawan, 2012: 65-66).

Dalam arti lain, konteks pendekatan personal semacam itu ditiru oleh para tokoh masyarakat di lingkungan Tamansari untuk menuntaskan kekisruhan yang pernah terjadi pasca tahun 1965, khususnya yang ada di Yogyakarta. Sementara keraton merespon itu sebab telah memahami struktur pengendalian budaya dari jaman ke jaman, sehingga perpaduan aspirasi ini berjalan dengan begitu baik, dan hasilnya bisa kita lihat dalam rentang 1973-1999. Masyarakat di sebelah Barat Tamansari telah damai dengan keadaan. Bentrokan yang pernah terjadi dengan militer pasca 65’ meletus kian membaik. Mereka terlindungi dengan adanya struktur agama yang dibangun disana. Para tokoh masyarakat di Tamansari, termasuk dengan Takmir Masjid Soko Tunggal saat ini mempercayai rukunnya tetangga yang dahulu pernah berafiliasi dengan komunis dan anti komunis sebetulnya sudah selesai sejak berdirinya Masjid Soko Tunggal. Tidak perlu lagi bermusuhan, bentrok, dan mencurigai satu sama lainnya, sebab masjid ini telah menjadi sumbu bertemunya perdamaian yang disesuaikan dengan nilai-nilai budaya, tradisi, dan agama.⁵

Keraton secara langsung sudah berkontribusi terhadap penyelesaian tragedi 1965, di Yogyakarta sendiri keadaan cukup membaik pasca diberlakukan reorganisasi penangkapan terlibat PKI di perkantoran negara. Seperti halnya pihak militer telah membuat klasifikasi terhadap orang-orang PKI sebagai berikut: Golongan A adalah tokoh PKI serta anggota PKI dan pengurus organisasi *mantel* yang berafiliasi langsung dengan PKI; Golongan B adalah anggota organisasi *mantel* yang berafiliasi dengan PKI dan simpatisan PKI; Golongan C adalah simpatisan organisasi *mantel* PKI; dan Golongan D ialah orang-orang yang terseret dalam operasi pembersihan, tetapi ternyata salah tangkap, karena tidak adanya fakta sebagai bukti terlibat. Aturannya Golongan A

5 *Op.cit.*, wawancara dengan Takmir Masjid Soko Tunggal. Drs. H. Suprpto, M.Pd, pada tanggal 25/ Desember/ 2021, pukul 09:35 - 11:30 WIB.

dikarantina, sementara Golongan B dikenakan tahanan rumah sesuai dengan situasi setempat, dan Golongan C dilepaskan tahap demi tahap, serta Golongan D dapat dilepaskan dengan larangan meninggalkan kota, (Suwarno, 1994: 342).

Dengan adanya upaya seperti ini nampaknya telah membantu berlakunya hukuman yang menimbulkan efek jera. Upaya-upaya diberlakukannya peraturan penangkapan terlibat Gerakan 30 September 1965/ PKI tidak lain adalah untuk menjaga keseimbangan sosial supaya ideologi komunis tidak kembali menyeluruh di dalam sanubari bangsa. Saat itu peran Hamengkubuwono IX dinilai efektif dalam meluruskan kembali kiblat bangsa yang pernah melenceng pada pedoman komunisme menjadi nasionalisme Pancasila. Meskipun demikian negara justru melakukan reorganisasi politik besar-besaran di bawah kepemimpinan Soeharto era Orde Baru. Saat itu partai Golongan Karya menjadi parpol prioritas yang eksistensinya harus terus di depan. Hal ini diakui oleh beberapa peneliti termasuk P.J Suwarno; sebagai upaya pemerintah Orde Baru menceraabut PKI hingga pada akar-akarnya. Jika pada waktu itu PKI adalah partai besar yang pernah diidolakan oleh massa, kini giliran Golkar yang harus terbit layaknya PKI dengan cara memanfaatkan peluang isu-isu 1965 sebagai partai pembawa kebenaran. Di Yogyakarta sendiri didirikan sebuah pembentukan Sekretariat Bersama Golongan Karya (Golkar) Cabang Sleman, dilakukan di aula Kodim 0732 Sleman di Medari pada tanggal 15 Oktober 1966, (*Ibid*, 1994: 346).

Pola struktur sosial yang terbentuk ini jarang dikaji oleh banyak peneliti, padahal beberapa penelitian yang didanai oleh pemerintah daerah sudah membuka data mengenai potensi-potensi wisata yang berdampak pada segala aspek, termasuk ekonomi, sosial, dan budaya. Adapun dalam penelitian ini mencoba untuk mengelaborasi data-data tersebut kaitannya dengan keraton, pariwisata dan perdamaian bangsa. Dengan istilah lain pariwisata telah membentuk upaya penyelesaian atas terjadinya konflik di masa lalu. Atau bisa sebenarnya bisa kita ajukan sebagai pola penelitian yang akan datang, seperti bagaimana peran pariwisata dalam menuntaskan masalah, konflik, perdebatan dan lain sebagainya dalam kehidupan bermasyarakat, atau jika perlu lebih luasnya lagi dalam kehidupan berbangsa, dan bertanah air, (*Ibid*, 1994: 348).

Kehidupan sosial masyarakat Tamansari sejak tahun 1990 telah menjadi figur sosial yang maju. Banyak diantara kelompok masyarakat wisata justru meniru pola-pola kerukunan antar tetangga disana. Hal ini disebabkan karena di Tamansari telah menjadi desa berbasis wisata. Tentunya faktor ekonomi juga bisa menjadi faktor penunjang terbentuknya struktur masyarakat disana. Hal ini karena faktor ekonomi mampu memperbaiki hubungan diantara para tetangga yang pernah berbeda pandangan pada tahun 1965. Mereka saling berupaya untuk bisa menciptakan suasana wisatawan yang nyaman, damai, dan sejuk. Pola ketergantungan pun kian hari muncul sebagai respon dari upaya masyarakat disana menjadi masyarakat sadar wisata. Dalam hal ini struktur sosial masyarakat yang damai, dan sejuk itu selain didorong oleh dibangunnya sarana peribadatan Masjid Soko Tunggal, juga terjadi karena akibat dari lahirnya ladang usaha baru yang timbul karena Tamansari dijadikan sebagai kampung wisata. Melihat potensi yang ada di Tamansari sebagai desa wisata, direspon baik oleh semua orang yang tinggal disana. Mereka secara *automatically* akan mengkaji lebih dalam tentang apa yang ada di sana. Sehingga pada akhirnya bagi masyarakat disana, hal ini akan menambah pengetahuan dan wawasan mengenai budaya yang kita miliki, sehingga akan timbul rasa bangga kepada bangsa dan negara. Dengan kata lain akan menambah rasa cinta kepada bangsa sehingga mempertebal rasa persatuan dan kesatuan bangsa, (Budhi, 1999: 31).

Jika kita tinjau literasi yang terbit pada tahun 1960, banyak di antara isi-isi tulisan bersinggungan langsung dengan ekonomi berbasis pariwisata di Yogyakarta. Literasi yang kita anggap kurang eksis ternyata begitu luas untuk diutarakan, dan dikutip guna kepentingan penelitian. Sebut saja buku yang berjudul “Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1960”, dalam tulisannya banyak sekali menyinggung persoalan pengembangan potensi wisata dari berbagai aspek, seperti

sosial, budaya, dan kuliner. Sejak tahun 1960 masyarakat di Yogyakarta bisa kita katakan sudah sadar wisata, hal ini ditandai dengan respon yang ada. Di kabupaten Bantul misalnya, telah ada sekumpulan masyarakat yang memiliki usaha *Cendol*. Tepatnya berada di desa Karang Bajang, Kelurahan Sumbermulyo, Kapanewon Bambanglipuro, Kabupaten bantul. Desa tersebut tersohor dengan produksi es cendolnya. Menurut pengakuan salah seorang pembuat kudapan yang terbuat dari tepung beras ini, latar belakang masyarakat di sana berprofesi sebagai penjual es cendol disebabkan karena kurangnya pendapatan sehari-hari dengan bermodal hanya menjadi petani. Karena masyarakat sudah mengetahui Yogyakarta sebagai salah satu kota tempat berwisata banyak orang, akhirnya mereka membuat kudapan yang ringan yaitu es dawet, atau cendol dan ternyata laku di pasaran. Selain pembeli yang berasal dari daerah sekitar, ternyata banyak juga pelanggan yang sedang berwisata di Yogyakarta dan berlangganan cendol. Melihat fenomena yang muncul seperti ini nampaknya menjadi salah satu tolok ukur untuk memahami lebih jelas, ternyata pariwisata bisa mengubah struktur masyarakat di sana menjadi lebih baik, damai, sejuk, dan sejahtera, (Soetardjo, 1960: 17).

Lingkungan Tamansari nampaknya sudah lebih awal menjadi tempat datangnya para wisatawan lokal maupun mancanegara. Hal ini yang membuat warga masyarakat disana cenderung memiliki prinsip yang “lentur”, fleksibel, dan pastinya teratur serta mampu menjaga kondisi sosial agar tetap sejuk dan nyaman. Adapun masalah sejarah pada masa lalu yang dinilai kelam akan menjadi damai setelah perkembangan pariwisata semakin pesat. Tentu upaya untuk mengkondisikan massa yang saling bertentangan saat itu dipantau pula oleh Keraton, supaya perseteruan ini tidak menjadi konflik yang berkepanjangan. Terlihat dalam bidang pengelolaan dan perizinan berbagai kegiatan di lingkungan Tamansari yang langsung dikelola oleh Keraton, dengan mempekerjakan *Tepas Kaprajuritan* Keraton. Mereka ditugasi pihak Keraton untuk melakukan pengontrolan bangunan secara keseluruhan. Sementara menurut analisa yang ada, secara umum kerusakan yang terjadi pada bangunan Tamansari disebabkan oleh karena pelapukan, rusak karena pertumbuhan rumah penduduk yang pesat, dan bencana alam berupa gempa bumi, (Stein A Shasmaya, 2018: 7-8).

Dari rentang tahun 1990 sampai dengan 1999 perkembangan sosial di Tamansari semakin membentuk pola yang berkemajuan. Hal ini juga didorong dengan adanya beberapa pengelolaan tentang peraturan konservasi dan kepariwisataan. Sebagai sebuah subyek, masyarakat sebagai komunitas yang berinteraksi langsung dengan kawasan merupakan pelaku dan pelaksana konservasi. Adapun peran serta mereka dalam program berkelanjutan kawasan ini sangat diperlukan. Peran serta itu diwujudkan dengan pemahaman yang jelas mengenai apa saja yang dikonservasi di tempat tersebut, sehingga masyarakat mengerti makna benda cagar budaya tersebut dan merasa memiliki sesuatu yang dapat dibanggakan bersama-sama, (N. W, (ed), 1993: 161).

D. Kesimpulan

Yogyakarta diidentikan dengan sebuah wilayah mantan swapraja; memiliki otonomi pemerintahan jauh sebelum Indonesia menjadi negara yang merdeka. Namun pasca kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Yogyakarta memilih meleburkan diri menjadi bagian dari Republik Indonesia, dan ini adalah satu hal luar biasa yang patut kita banggakan dari Yogyakarta. Pasca kemerdekaan berlangsung Indonesia kembali mengalami kekisruhan yang begitu mendalam. Bangsa ini diadu domba oleh politik komunis yang mengakibatkan banyaknya korban berjatuh. Peristiwa ini bermula pada tanggal 1 Oktober 1965 di Jakarta, terbunuhnya tujuh angkatan bersenjata Republik diduga erat kaitannya dengan politik PKI. Hingga pada tahun 1966 PKI menjadi partai yang banyak ditentang oleh masyarakat luas di seluruh Indonesia, tak terkecuali dengan masyarakat yang ada di Yogyakarta.

Pasca meletusnya G30S/PKI 1965 bangsa ini mengalami kekacauan sosial yang luar biasa. Saudara jadi musuh, teman dekat jadi benci, dan penangkapan militer adalah sebuah akhir dari

mereka yang terindikasi pernah melakukan keterlibatan dengan PKI. Atas kejadian ini beberapa tokoh masyarakat Tamansari berinisiatif untuk memohon tanah pada keraton untuk didirikan sebuah tempat pembinaan masyarakat disana berupa masjid. Sebab tokoh-tokoh yang ada di daerah itu secara kebetulan berasal dari Muhammadiyah. Pihak keraton pun menyetujui apa yang telah dimohon oleh tokoh masyarakat di sana, bahkan secara langsung diberikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dengan beberapa diantaranya ditugaskan sebagai arsitektur masjid dari keraton Kasultanan. Sedangkan beberapa bahan baku masjid juga didatangkan langsung dari istana Plered lama, dan kayu penyangga yang besar dari Cepu Jawa Tengah.

Adapun dibangunnya masjid ini bertujuan untuk melakukan *re-Islamisasi* bagi masyarakat sekitar yang kebetulan waktu itu masih kurang memperhatikan agama Islam. Hal ini juga yang menjadi salah satu penyebab mereka ditangkap meskipun tidak bersalah. Sebab waktu itu Suharto dan angkatan operasi militer PKI 1965 mengidentikan orang yang tidak memiliki agama (atheis) sebagai PKI. Dengan demikian mereka sering diidentikan dengan hal seperti itu, padahal ini adalah merugikan. Bayangkan saja, mereka adalah kelompok masyarakat yang tidak tahu menahu apa itu PKI namun sewaktu operasi militer dilaksanakan mereka mengalami penangkapan. Kasus tragis semacam ini akhirnya bisa diselesaikan di Tamansari dengan pembangunan sarana peribadatan umat Islam bernama Masjid Soko Tunggal. Karena masjid ini diorientasikan sebagai tempat pembinaan mantan PKI, maka ornamen-ornamen yang menghiasi masjid ini juga diidentikan dengan nilai-nilai filosofis Pancasila.

Selain itu ternyata keadaan sosial masyarakat di Tamansari yang awalnya sering bergesekan karena PKI dan Non-PKI bisa damai dengan cara yang begitu sederhana. Selain didirikan masjid sebagai *space of reconciliation* rupa-rupanya aspek perkembangan pariwisata yang semakin pesat menimbulkan dampak yang positif. Secara tidak langsung keraton sudah mempertimbangkan ini sebagai sebuah upaya melakukan perdamaian bangsa, akan tetapi disisi lain memang pola semacam ini sangat efektif untuk menyembuhkan luka lama berkaitan dengan sejarah buruk di masa lalu. Pariwisata membutuhkan masyarakat disana untuk bersatu padu, sehingga keteraturan ekonomi, sosial, dan budaya terus tetap terjaga. Akhirnya penemuan ini menjadi salah satu kunci menarik untuk bisa dikembangkan ke ranah penelitian yang lebih lanjut, sebab dampak positif pariwisata bisa mengubah pola sosial masyarakat dengan masa lalu yang buruk mampu kembali rukun dan teratur oleh karena faktor ekonomi yang melatar belakangnya. Selain mengkaji dalam aspek historis, isu-isu ini juga bisa membuka cakrawala penelitian dalam rumpun ilmu sosial, dan ekonomi. Itulah kesimpulan yang bisa disampaikan dalam artikel ini. Tanpa mengurangi rasa hormat, penelitian ini kami persembahkan untuk *International Symposium on Javanese Culture 2022: Kasultanan Yogyakarta and Its Contribution for The Nation*.

E. Discussions

Adapun beberapa hal yang menarik untuk didiskusikan antara lain dalam penelitian ini yaitu, bagaimana kita mengerti cara untuk mengetahui pola-pola rekonsiliasi tragedi 1965 yang pernah terjadi di Yogyakarta. Sebab sebelumnya kita hanya mengerti jika rekonsiliasi itu hanya teori pada praktiknya kurang dilakukan. Keraton Yogyakarta pernah melakukan praktik langsung mengenai cara rekonsiliasi secara sederhana, lentur, dan fleksibel. Selain itu sebagaimana yang sudah disampaikan sebelumnya, ternyata faktor ekonomi (perdagangan) juga bisa menjadi salah satu pola rekonsiliasi.

Misalnya di daerah Tamansari merupakan area pariwisata, secara otomatis maka penduduk setempat akan memanfaatkan peluang untuk mencari sumber pendapatan dengan mengandalkan tamu/wisatawan. Mereka yang dahulu pernah mengalami perseteruan hebat antara simpatisan komunisme, dan anti komunisme kembali rukun dalam masyarakat, sebab mereka sadar bahwa

dalam kondisi saat ini masyarakat sekitar harus bersatu padu guna membentuk pola ekonomi yang kuat dan seimbang.

F. Conclusive Implications (theoretical/practical)

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori kekuasaan yang dicetuskan oleh Michel Foucault yang menyebutkan jika kekuasaan akan muncul dan menjalar dari atas ke bawah. Teori ini merepresentasikan jika peristiwa penangkapan tragedi 1965 di Indonesia itu dimanfaatkan oleh penguasa Orde Baru untuk melanggengkan kekuasaannya dari era awal menjabat hingga terbitnya reformasi tahun 1998. Praktik teori dalam penelitian ini yaitu mampu menyumbangkan alur pemahaman mengenai bagaimana peristiwa 1965 di Yogyakarta dimanfaatkan oleh kepentingan Orde Baru, selain itu bagaimana pula respon keraton kasultanan Yogyakarta.

References

- Astuti, D. (2019). Kajian Ikonografi dan Ikonologi Soko Guru Tunggal Pada Masjid Soko Tunggal Tamansari Yogyakarta. *Jurnal Desain Komunikasi Visual dan Media Baru*, Vol. 1(No. 2), Pp. 23-32.
- Baskoro, H. (2010). *Catatan Perjalanan Keistimewaan Yogya: Merunut Sejarah, Mencermati Perubahan, Menggagas Masa Depan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Budhi, A. (1999). *Laporan Kerja Praktek: Perkembangan dan Perubahan Fungsi Kawasan Tamansari Yogyakarta*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Carey, P. (2015). *Asal Usul Nama Yogyakarta dan Malioboro*. Depok: Komunitas Bambu.
- Chamamah, S. (2001). *Khasanah Budaya Kraton Yogyakarta II*. Yogyakarta: Yayasan Kebudayaan Islam.
- Dina Astuti. (n.d.). (2019, Februari). Kajian Ikonografi dan Ikonologi Soko Guru Tunggal pada Masjid Soko Tunggal Tamansari Yogyakarta. *Jurnal Desain Komunikasi Visual dan Media Baru: Tujur Rupa*, Vol. 1(No. 2), Pp. 34.
- Dwiyanto, D. (2009). *Kraton Yogyakarta: Sejarah, Nasionalisme, dan Teladan Perjuangan*. Jakarta: Paradigma Indonesia.
- (ed), N. W. (1993). *Universal Tourism: Enriching or Degrading Culture. Proceeding on The International Conference on Cultural Tourism*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Erik Muhammad. (2021, November Senin). *Masjid Soko Tunggal, Dibangun dari Tanah Bekas Makam Kuda Keraton*. Harapanrakyat.com. <https://www.harapanrakyat.com/2021/11/masjid-soko-tunggal-dibangun-dari-tanah-bekas-makam-kuda-keraton/>
- Goenawan, R. (2012). *Mobilitas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta: Periode awal abad ke-20, suatu kajian sejarah sosial*. Yogyakarta: Ombak.
- Kuntowijoyo. (2005). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Panofsky. (1955). *Meaning in The Visual Arts*. New York: Doubleday.
- Redaksi. (1960, Maret Selasa 8). Musyawarah Besar Taman Siswa dibuka. *Harian Rakyat*, hlm. 2.
- Redaksi. (1960, Agustus Rabu). Jogjakarta: “Simpan beras lebih 1 ton harus punja Steam Vergunning”. *Kedaulatan Rakyat*, hlm. 1.
- Redaksi. (2021, Desember Selasa). *Merunduk bersama sejarah kehidupan*. merunduk-bersama-sejarah-kehidupan. https://www.kompasiana.com/deanisaputri/54f77657a33311c4_668b4578/merunduk-bersama-sejarah-kehidupan
- Soemardjan, S. (2009). *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. Depok: Komunitas Bambu.
- Soetardjo, R. (1960). *Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1960*. Yogyakarta: Djawatan Penerangan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Stein A Shasmaya. (2018). *Tamansari Sebagai Objek Wisata di Yogyakarta*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta.

- Suwarno, P.J. (1994). *Hamengku Buwono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1942-1974: Sebuah tinjauan historis*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Woodward, M. (2011). Only Now Can We Speak: Remembering Politicide in Yogyakarta. *Journal of Social Issue in Southeast Asia*, Vol. 26(No.1), Pp. 43.
- Yudhastawa Mangunsarkoro. (2000). *Pemberontakan G 30 S/PKI 1965 di Yogyakarta dan Sekitarnya*. Yogyakarta: Penerbitan Dinas Sosial.

Tradisi Penyambutan dan Penghormatan Tamu di Keraton Yogyakarta sebagai Bentuk Pola Relasi pada Masa Pemerintahan Hamengku Buwana VII dalam Naskah *Koepija Djendralan*

Clara Shinta Anindita Apriyadi^a, Mamlahatun Buduroh^b

Universitas Indonesia

Jl. Margonda Raya, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424
clarashintanindita@gmail.com
mamlahfuadi@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas teks Kangjeng Tuan Inggang Wicaksana Gupernur Jendral Otto van Rees (KTIWGJO) salah satu teks yang berada di dalam naskah arsip *Koepija Djendralan* (KD) koleksi KHP Widya Budaya Keraton Yogyakarta. Teks KTIWGJO tertulis dalam bahasa Jawa dan berbentuk prosa. Teks ini dikaji dengan metode filologi dan dianalisis menggunakan teori poskolonialisme serta teori hegemoni. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyajikan suntingan dan terjemahan teks KTIWGJO agar mudah dibaca dan dipahami oleh masyarakat kini dan menjelaskan prosesi penyambutan serta penghormatan tamu di Keraton Yogyakarta pada masa pemerintahan Sultan Hamengku Buwana VII. Analisis isi teks KTIWGJO, antara lain analisis latar belakang historis yang tercermin dalam teks KTIWGJO; analisis struktur naskah KD; analisis penyambutan dan penghormatan pada saat kedatangan Gubernur Jenderal Otto van Rees; dan analisis kegiatan Gubernur Jenderal Otto van Rees selama tujuh hari di Yogyakarta. Pola relasi yang dianalisis menggunakan teori poskolonialisme akan memunculkan relasi hegemoni di antara prosesi-prosesi yang terjadi. Melalui pola relasi ini pula, dapat menambah wawasan baru mengenai pola hegemoni yang dilakukan oleh pihak pribumi pada masa itu dan membuktikan bahwa pihak terjajah tidak semuanya adalah pihak terbelakang dan pihak yang bodoh.

The Tradition of Welcoming and Respecting Guests at the Yogyakarta Palace as a Form of Relationship Patterns during the reign of Hamengku Buwana VII in the *Koepija Djendralan* Manuscript

Abstract

This research was discussed the text of Kangjeng Tuan Inggang Wicaksana Governor General Otto van Rees (KTIWGJO), it is one of the texts in the archive manuscript of *Koepija Djendralan* (KD) the collection of KHP Widya Budaya Keraton Yogyakarta. The text of KTIWGJO was written in Javanese and in the form of prose. This text was studied with philology analysis. Furthermore, the analysis of the content text used the theory of postcolonialism and the theory of hegemony. The purpose of this study was to present the edits and translations of the KTIWGJO text, so that it was easily to read and understood by today's society and to explain the procession of welcoming and honoring guests at the Yogyakarta Palace during the reign of Sultan Hamengku Buwana VII. Analysis of the content of the KTIWGJO text, including analysis of the historical background

reflected in the KTIWGJO text; analysis of the structure of the KD script; analysis of welcome and respect upon arrival of Governor General Otto van Rees; and an analysis of the activities of Governor General Otto van Rees for seven days in Yogyakarta. The pattern of relations analyzed using the theory of postcolonialism will create a hegemonic relationship between the processions that occur. Through this pattern of relations, it can add new insights about the pattern of hegemony carried out by the natives at that time and prove that not all of the colonized were backward and ignorant parties.

Keywords: *Kangjeng Tuan Inggang Wicaksana Governor General Otto van Rees, Koepija Djendralan, postcolonial, hegemony, relationship patterns*

PENDAHULUAN

Keraton Yogyakarta adalah wilayah hasil perpecahan dari Kerajaan Mataram. Berawal dari adanya perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755 yang menyatakan bahwa Kerajaan Mataram dibagi menjadi dua, yaitu Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. pada tanggal 13 Maret 1755 proklamasi atau Hadeging Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat dikumandangkan. Segala aktivitas dengan pemerintahan baru mulai dilaksanakan. Selain Keraton Yogyakarta, wilayah Yogyakarta juga memiliki pemerintahan yang bernama Kadipaten Pakualaman. Kadipaten Pakualaman didirikan pada tanggal 17 Maret 1813, ketika Pangeran Notokusumo, putra dari Sultan Hamengku Buwono I dengan Selir Srenggorowati dinobatkan oleh Gubernur Jenderal Sir Thomas Raffles (Gubernur Jenderal Britania Raya yang memerintah saat itu) sebagai Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Paku Alam.

Menurut Syauckani, dkk. (dalam Laely, 2018: 9-10), pada masa kolonialisasi terutama fase pendudukan Belanda, pemerintah kolonial menerapkan desentralisasi yang sentralistis, birokrasi, dan feodalistis untuk kepentingan kolonial. Menurut Carey (2019), Keraton Yogyakarta adalah ancaman terbesar yang diwaspadai oleh pemerintah kolonial Belanda, karena adanya sumber daya militer dan cadangan keuangan yang kuat. Hal tersebut ialah hasil pemikiran dari Daendels dari awal masa pemerintahannya. Salah satu pertimbangan dari Gubernur Jenderal dalam merancang pertahanan Jawa adalah posisi dari istana-istana Jawa yang selama ini mandiri. Ia meragukan loyalitasnya dalam menghadapi serangan musuh, disebabkan dengan adanya kekuatan dan pengaruh keraton yang dianggap dapat menjadi pesaing potensial pemerintahan Eropa.

Daendels membentuk sikap pemerintahan baru terhadap keraton, dengan cara penghapusan jabatan Gubernur Pantai Timur Laut Jawa. Ia menginginkan untuk berhubungan langsung dengan para Residen yang bertugas di wilayah keraton-keraton Jawa, tanpa harus melalui Semarang. Daendels juga memberhentikan semua bupati yang ditunjuk oleh pihak keraton dan digantikan dengan mereka yang memiliki hubungan kekerabatan dengan para penguasa Jawa tengah selatan. Menurut Valck (1844) dan Chijs (1895), kedatangannya sebagai Gubernur Jenderal tidak hanya merubah sikap pemerintahan terhadap keraton, namun juga mengubah maklumat mengenai upacara seremonial dan etiket.

Maklumat ini akhirnya tercipta dengan adanya beberapa penghapusan fungsi-fungsi seremonial yang wajib dilakukan oleh para Residen terhadap raja-raja, hal yang dianggap merendahkan pemerintah kolonial. Para Residen tersebut mendapat hak-hak istimewa yang lebih cocok untuk posisi baru mereka, yaitu dengan mendapat gelar menteri dengan seragam baru dan memiliki hak untuk menggunakan payung kerajaan yang berlambangkan Kerajaan Belanda. Selanjutnya, ketika para Residen bertemu para raja pada kesempatan khusus mereka tidak perlu menanggalkan topi, justru para rajalah yang harus berdiri menyambut mereka dan langsung mempersilakan mereka mengambil tempat duduk di sebelah kiri singgasana.

Pembentukan sikap baru yang dilakukan Daendels berada pada masa pemerintahan Sultan Hamengku Buwana II, sebelum Yogyakarta dikuasai oleh Inggris. Sultan Hamengku Buwana II adalah sosok yang menentang keras segala tatanan baru yang dibentuk oleh Pemerintah Hindia Belanda. Sifat kerasnya tersebut juga dibawa pada masa pendudukan Inggris pada waktu itu, sehingga mengakibatkan peristiwa Geger Sepoy. Geger Sepoy atau yang dikenal pula dengan nama Geger Sepehi terjadi pada tahun 1812, berawal dari keinginan Sultan Hamengku Buwana II untuk melawan Inggris. Hal tersebut menyebabkan Raffles berpikir bahwa Sultan Hamengku Buwana II adalah ancaman untuk Inggris. Peristiwa Geger Sepehi ini berakibat pada pelucutan kekuasaan militer dan politik keraton-keraton Jawa serta menjadikan para raja harus tunduk pada kekuasaan kolonial (Irawan, 2018: 3).

Masa pendudukan Belanda di Yogyakarta dimulai kembali pada masa pemerintahan Hamengku Buwana IV. Akan tetapi, tidak lama beliau meninggal dan digantikan dengan Hamengku Buwana V. Pada masa pemerintahan HB V ini, terjadi peristiwa perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro merasa terusik dengan semakin banyak tanah-tanah keraton yang disewakan kepada orang Eropa, tingginya pajak yang ditarik dari masyarakat, munculnya wabah kolera, dan kondisi gagal panen yang dipandang sangat menyengsarakan. Ditambah sikap pegawai-pegawai Belanda banyak yang melecehkan keraton dengan memasukkan adat istiadat dan gaya hidup Eropa.

Perang Jawa ini terjadi pada tahun 1825-1830, menurut Zuhdi, dkk. salah satu alasan Pangeran Diponegoro tersulut amarahnya dan memutuskan mengangkat senjata melawan Belanda dikarenakan pada masa itu Belanda tengah giat-giatnya membangun rel kereta api yang melewati daerah Tegalrejo di Jawa Tengah. Akan tetapi, salah satu sektor rel kereta api yang dibangun akan melintasi makam dari leluhur Pangeran Diponegoro. Selain itu, kemarahan Pangeran Diponegoro juga merupakan akumulasi dari penyesalan-penyesalan kepada pihak Belanda mengenai sikap mereka pada Jawa (2010: 21).

Setelah Sultan HB V mangkat, Gusti Raden Mas Mustojo atau Pangeran Adipati Mangkubumi diangkat menjadi Sultan Hamengku Buwana VI pada tahun 1855. Setelah Sultan Hamengku Buwana VI mangkat, digantikan oleh Gusti Raden Mas Murtejo yang kemudian menjadi Sultan Hamengku Buwana VII. GRM Murtejo adalah anak dari permaisuri kedua Sultan Hamengku Buwana VI yang diangkat dari seorang selir, karena permaisuri pertama tidak memiliki putra. Pada masa pemerintahan Sultan Hamengku Buwana VII terdapat 17 pabrik gula yang didirikan di Yogyakarta. Hal tersebut membuat Sultan Hamengku Buwana VII sering dijuluki dengan Sultan *Sugih* (kaya), karena penghasilan yang beliau terima dari pabrik gula tersebut (Moedjanto, 1994: 20-21). Terdapat beberapa catatan penting yang berhubungan dengan kedatangan Pemerintah Hindia Belanda ke Keraton Yogyakarta pada masa pemerintahan Sultan Hamengku Buwana VI sampai dengan masa pemerintahan Sultan Hamengku Buwana VII. Catatan tersebut dapat ditemukan dalam salah satu bendel naskah arsip dengan judul *Koepija Djendralan* yang kemudian disebut dengan naskah KD. Naskah KD ialah salah satu naskah arsip milik Keraton Yogyakarta, yang masih tersimpan rapi di bagian arsip Keraton Yogyakarta di bawah KHP Widya Budaya. Naskah ini tercantum di dalam Daftar Arsip Keraton Yogyakarta tahun 2019 dengan nomor 541, dalam kategorisasi masa pemerintahan HB VI. Pada sampul kertas bendel naskah KD tertulis nomor koleksi WB 541. Naskah ini terdiri atas 148 lembar dan 219 halaman serta ditulis secara recto-verso. Kondisi fisik naskah sebagian sudah rusak, terutama pada bagian jilid naskah yang sudah lepas. Kondisi kertas sudah menguning, rapuh, dan terdapat lubang kecil di tengah-tengah teks. Jenis kertas yang digunakan dalam penulisan naskah ini ialah kertas dengan ukuran folio tanpa garis. Garis bantu dibuat oleh penulis menggunakan pensil. Menurut tahun yang tertera pada daftar arsip, naskah ini dituliskan pada tahun 1879.

Berdasarkan isi teks, naskah ini memuat memori masa lalu mengenai catatan peristiwa kedatangan dari Pemerintah Hindia Belanda pada saat masa kolonial di wilayah Yogyakarta. Naskah KD ialah kronik yang merekam kejadian pada masa lampau. Keberadaan kronik tersebut dapat mengungkap berbagai peristiwa masa lalu yang dapat menjadi sumbangan sejarah dan ilmu pengetahuan baik bagi para peneliti, akademisi, maupun para masyarakat awam. Naskah ini juga salah satu bentuk dokumentasi dari masa itu yang terekam melalui tulisan. Naskah terdiri dari 14 judul teks yang tertulis di bagian daftar isi naskah. Judul teks tersebut akan dijelaskan di bawah ini.

- 1) Kangjeng Tuan Inkgang Wicaksana Gupernur Jendral Dhei Marfantuwis;
- 2) Kangjeng Tuan Inkgang Wicaksana Gupernur Jendral Faud;
- 3) KangjengTuan Inkgang Ideler Dhuwi;
- 4) Kangjeng Tuwan Litnan Jendral Sêhif;
- 5) Kangjeng Tuwan Komasaris Fandêrwèk;
- 6) KangjengTuan Inkgang Wicaksana Gupernur Jendral Otofannris,
- 7) Dhawuh badhe nampènni pisungsung;
- 8) Pranatan agem dalem Bintang Kumendur;
- 9) Pranatan agem dalem Bintang Kumendur;
- 10) Pranatan agem dalem Bintang Oppisir;
- 11) Dhawuh pista wonten ing Kadhaton;
- 12) Pangkat Oppisir Kangjeng Putra Dalem;
- 13) Kupiya rawuhipun tamu KangjengPangeran Agung; dan
- 14) Pranatan jumeneng dalem, Sampeyan Dalem Inkgang Sinuwun, kaping 7.

Berdasarkan 14 judul teks tersebut, hanya satu teks yang dijadikan objek penelitian. Teks nomor enam dengan judul *Kangjeng Tuwan Inkgang Wicaksana Gupernur Jendral Otto van Rees* (yang kemudian disingkat teks KTIWGJO) dipilih menjadi objek penelitian dengan beberapa alasan. Adapun beberapa alasan yang melandasi pemilihan teks tersebut dijelaskan di bawah ini.

- 1) Teks nomor enam memuat isi yang lebih lengkap, yaitu mengenai penyambutan serta penghormatan kedatangan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, dilengkapi dengan tokoh-tokoh yang terlibat, cara penghormatan, alat dan pakaian yang digunakan.
- 2) Teks nomor enam memuat peristiwa yang dapat menggambarkan masanya. Terdapat peristiwa di luar penyambutan dan penghormatan sebagai topik utama dalam naskah tersebut. Melalui catatan peristiwa tersebut, penelitian pada teks ini diharapkan dapat memperluas konteks pembahasan dan membuktikan bahwa kajian filologi tidak hanya berhenti pada masa lalu saja.
- 3) Pada teks ini, terdapat salinan surat perintah sebelum kedatangan Gubernur Jenderal di Yogyakarta. Secara unsur atau konteks pembahasan teks ini dianggap paling lengkap dibanding teks lainnya.

Teks KTIWGJO sebagai suatu kronik juga hidup dari suatu masyarakat dan menyerap aspek-aspek kehidupan dalam masyarakat. Citra hidup masyarakat dapat ditemukan melalui sebuah teks kronik. Pada teks ini, masyarakat yang terekam di dalamnya ialah masyarakat Yogyakarta khususnya yang berada di wilayah Keraton Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman. Sebagai sebuah pusat pemerintahan, baik Keraton Yogyakarta maupun Pakualaman memiliki struktur sosial yang tersusun secara sistematis. Begitu pula dengan Pemerintah Hindia Belanda sebagai salah satu subjek dalam teks yang berperan penting dalam pemerintahan pada masa itu. Dengan demikian, masyarakat atau pelaku dalam teks kronik ini memiliki hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi satu sama lain.

Teks sebagai rekaman dari memori masa lalu, memuat berbagai unsur antara lain unsur sosial, budaya, politik, dan ideologi pada masa itu. Teks ini adalah teks yang diproduksi pada masa

kolonialisme Belanda. Dengan demikian, teks ini akan memperlihatkan mengenai rekam jejak dari kolonialisme yang terjadi di wilayah Yogyakarta. Rekam jejak tersebut dapat menjadi titik balik dari masa sekarang, masa yang sudah terbebas dari adanya kolonial dengan segala kemajuan zaman. Oleh karena itu, teks ini perlu untuk dianalisis berdasarkan teori poskolonialisme.

Selain itu, naskah arsip di Keraton Yogyakarta belum banyak diteliti, hal tersebut dikarenakan keterbatasan akses untuk mendapatkan arsip tersebut. Naskah *Koepija Djendralan* ialah naskah arsip yang termasuk pada kategori naskah kuno, diperkirakan umurnya sekitar kurang lebih 150 tahun atau 1,5 abad. Di antara berbagai genre naskah kuno, naskah arsip-khususnya naskah arsip di Keraton Yogyakarta belum banyak mendapat perhatian. Padahal menurut Mahmudah (2016), naskah arsip memiliki peran penting dalam penulisan sejarah dan pemerintahan. Hal ini disadari oleh masyarakat, bahwa arsip ini merupakan memori kolektif sebagai jati diri warga negara bahkan bangsa, warisan, dan aset bagi bangsa yang bernilai tinggi. Selain itu, menurut Christomy, melalui teks dalam naskah-naskah kuno dapat dirajut kembali benang-benang sejarah leluhur yang tercermin di dalam teks tersebut. Begitu juga menurut Searle (dalam Christomy, 2017: 169), bahwa peristiwa sosial dan fakta sosial yang telah lalu tidak bisa diulang, tapi masih dapat “diziarahi” melalui jejak-jejaknya.

TINJAUAN TEORITIS

Penelitian ini menggunakan teori filologi, yaitu ilmu yang mempelajari hasil kebudayaan zaman dahulu yang berkaitan dengan bab bahasa, kesusastraan, dan kebudayaan (Baroroh-Baried dkk., 1985: 1). Menurut Robson (1994: 24), tugas dari seorang filolog adalah membuat teks tersebut dapat terbaca dan dapat dimengerti oleh pembaca, sehingga penting dilakukan proses transliterasi dan interpretasi. Terdapat tiga metode dalam penyuntingan naskah, antara lain metode stemmatik atau metode Lachmann, metode diplomatis, dan metode kritis (Robson, 1994: 21). Metode penyuntingan naskah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode kritis.

Selanjutnya, penelitian ini dianalisis menggunakan teori poskolonialisme milik Edward Said. Teori poskolonial Edward Said pertama kali dipaparkan dalam bukunya yang berjudul “*Orientalism*”. Buku tersebut berisi kritik serta gagasan Said mengenai kontruksi ideologi Barat kepada Timur. Menurut Said (1979:2-3), orientalisme adalah gaya berpikir yang didasarkan pada perbedaan pada aspek ontologis dan epistemologis yang dibuat antara “Timur” (*The Orient*) dan “Barat” (*The Occident*). Selain itu, Said juga menjelaskan bahwa Orientalisme adalah sebuah wacana atau diskursus bahwa budaya Eropa mampu mengelola bahkan memproduksi Timur secara politis, sosiologis, militer, secara ilmiah, dan secara imajinatif dalam periode pasca Pencerahan. Selanjutnya, melalui kolonisasi budaya Eropa juga memperoleh kekuatan dan identitas dengan menempatkan dirinya melawan “Timur” sebagai semacam pengganti atau alternatif dan bahkan pribadi rendah.

Teori kedua yang digunakan untuk membahas isi teks ialah teori hegemoni Gramsci. Teori hegemoni Gramsci merupakan penyempurnaan teori kelas Marx yang belum berhasil merumuskan teori politik yang memadai. Titik awal konsep Gramsci tentang hegemoni ialah bahwa suatu kelas dan anggotanya menjalankan kekuasaan terhadap kelas-kelas di bawahnya dengan cara kekerasan dan persuasi (Simon, 2004). Bagi Gramsci (dalam Faruk, 2003), hegemoni merupakan sesuatu yang kompleks, yang digunakan untuk meneliti bentuk-bentuk politis, kultural, dan ideologis tertentu, dalam suatu masyarakat yang berada di suatu kelas fundamental, dan dapat membangun kepemimpinannya menjadi sesuatu yang berbeda dari dominasi yang bersifat memaksa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan langkah penelitian filologi, dengan tahapan yang pertama adalah inventarisasi naskah. Inventarisasi naskah dilakukan dengan studi pustaka menggunakan katalog-

katalog naskah dan studi lapangan dengan mengunjungi sumber-sumber yang diduga menyimpan varian naskah KD. Hal ini dilakukan karena keberadaan naskah yang bersifat pribadi. Melalui inventarisasi, didapatkan bahwa naskah KD ini adalah salah satu varian naskah arsip jenis “*Koepiya*”. Selanjutnya, tahapan kedua adalah deskripsi naskah dengan menjelaskan bagaimana keadaan fisik naskah yang menjadi objek penelitian (Saputra, 2013: 82-83). Atas dasar pertimbangan hasil inventarisasi, maka penelitian filologis pada naskah KD menggunakan metode landasan.

Berdasarkan 82 varian naskah dalam jenis naskah arsip “*Koepiya*”, naskah KD dijadikan sebagai landasan untuk melakukan langkah kerja filologi selanjutnya. Robson (1994) menyebutkan mengenai metode diplomatis atau edisi diplomatis dan metode kritis atau edisi kritis. Berdasarkan kedua metode tersebut, penelitian ini menggunakan edisi kritis dengan alasan bahwa teks menggunakan aksara dan bahasa yang sudah tidak lazim digunakan di zaman sekarang. Kedua, teks belum tersaji dengan baik, maka dibutuhkan suntingan untuk menyajikan teks agar mudah dibaca dan dipahami. Langkah penelitian filologi selanjutnya adalah penerjemahan. Penerjemahan dilakukan untuk memastikan bahwa teks ini dapat terbaca oleh pembaca yang sudah terbatas dalam penguasaan bahasa daerah atau bahasa kuno. Penerjemahan dilakukan dengan cara merubah bahasa dari bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran dan disesuaikan dengan tujuannya (Mulyani, 2012: 21).

Penelitian ini menggunakan metode gabungan, yaitu antara metode metode penerjemahan setia dan metode penerjemahan semantis. Penerjemahan setia diharapkan mampu mengupayakan terjemahan yang sedekat mungkin sesuai dengan teks aslinya, sedangkan penerjemahan semantis bertujuan untuk menghasilkan terjemahan yang tidak menghilangkan istilah-istilah tertentu pada teks KD. Langkah selanjutnya adalah menganalisis teks KD menggunakan teori poskolonial untuk menjelaskan mengenai tradisi penyambutan dan penghormatan tamu di Keraton Yogyakarta pada masa pemerintahan Sultan HB VII. Teori poskolonial ini digunakan untuk menjelaskan prosesi penyambutan serta penghormatan tamu yang berlaku pada masa itu, antara lain yang berhubungan dengan aspek sosial, politik, budaya, dan ideologi yang terjadi dan melatarbelakangi adanya teks KD tersebut.

HASIL PENELITIAN

A. Inventarisasi Naskah *Koepija Djendralan*

Naskah jenis *Koepiya* terdapat di dalam tiga katalog arsip Keraton Yogyakarta, yaitu *Daftar Arsip Statis Kraton Yogyakarta KHP Widya Budaya kurun waktu 1772-1989 nomor arsip 507-2011* (2019), *Daftar Arsip Statis Kraton Yogyakarta KHP Widya Budaya kurun waktu 1922-1941 nomor arsip 1-508* (2018), dan *Daftar Arsip Statis Kraton Yogyakarta Tepas Halpitapura kurun waktu 1921-1987 nomor arsip 7538-8488* (2017). Melalui inventarisasi naskah arsip jenis *koepiya* dari ketiga katalog tersebut ditemukan sebanyak 82 naskah arsip di koleksi milik Perpustakaan KHP Widya Budaya. Naskah arsip jenis *koepiya* berisi mengenai catatan-catatan peristiwa dan surat.

Berdasarkan inventarisasi dan deskripsi jenis naskah *koepiya* koleksi Perpustakaan KHP Widya Budaya, didapatkan 29 naskah telah rusak, 15 naskah sebagian beraksara Latin serta yang lainnya sudah diterjemahkan, dan 38 naskah memiliki keadaan yang baik. Dari 38 naskah tersebut penulis memilih naskah *Koepija Djendralan* yang kemudian disebut naskah KD untuk dijadikan sebagai objek penelitian ini. Faktor-faktor yang menentukan naskah KD menjadi objek penelitian, antara lain (1) naskah KD adalah satu-satunya naskah yang berisi mengenai kedatangan Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke wilayah Yogyakarta; (2) naskah arsip jenis *koepiya* yang lainnya memuat catatan serta surat-menyurat yang dilakukan di dalam intern Keraton Yogyakarta serta Kadipaten Pakualaman; (3) secara fisik, naskah ini memiliki keadaan fisik yang baik, keadaan dari awal sampai akhir fisik naskah masih baik dan dapat terbaca dengan jelas; dan (4) naskah arsip

jenis koepiya yang memiliki jumlah lembar sedikit, kurang dari 50 lembar sedang dalam proses transliterasi oleh tim di KHP Widya Budaya.

B. Deskripsi Naskah *Koepija Djendralan*

Bendel naskah KD memiliki sampul dengan ukuran panjang 20,5 cm dan lebar 33,5 cm, berbahan kulit binatang dengan tekstur tebal, sedikit kasar, dan kuat. Sampul berwarna hitam kecoklatan, bermotif timbul dengan empat bingkai yang memiliki motif berbeda. Penjilidan bendel naskah KD menggunakan metode jahit dengan tali. Keadaan sampul sudah terdapat beberapa lubang yang disebabkan oleh serangga, namun dilihat dari umur naskah keadaan sampul naskah KD secara umum terlihat masih baik dan kokoh. Kertas yang digunakan pada bendel naskah KD adalah jenis kertas Eropa dengan ukuran folio tanpa garis. Kertas Eropa pada naskah KD memiliki *countermark* dan *watermark* yang berada di setiap lembar kertasnya.

Countermark bertuliskan VdL, sedangkan *watermark* bergambar medalion bermahkota dengan gambar singa membawa pedang menghadap ke kiri atau ke kanan, bertuliskan "CONCORDIA RESPARVE CRESCENT". Menurut Churchill, dalam daftar kertas, gambar seperti ini termasuk ke dalam kelompok gambar lions atau concordia, yang tergambar seekor singa bermahkota berdiri menghadap ke arah kanan dengan satu kaki sambil membawa pedang. Gambar singa tersebut berada dalam lingkaran yang bertuliskan CONCORDIA (sebelah kanan atas), CRESCENT (sebelah kiri bawah), dan RESPARVAE (sebelah bawah). Gambar cap kertas seperti ini adalah produksi Firma Van Der Ley, nama salah satu firma pembuat kertas terbesar di Belanda, yang berproduksi sejak akhir abad ke-17 sampai paruh pertama abad ke-19 (Churchill, 1935).

Berdasarkan deskripsi naskah, naskah KD terdiri dari 14 teks. Akan tetapi, penulis hanya mengambil satu teks yang digunakan sebagai bahan edisi teks pada pembahasan berikutnya. Teks tersebut adalah teks nomor enam dengan judul teks *Kangjeng Tuwan Inggang Wicaksana Gupernur Jendral Otto van Rees*. Adapun beberapa alasan yang melandasi pemilihan teks tersebut, antara lain (1) teks ini memuat isi yang lebih lengkap, yaitu mengenai penyambutan serta penghormatan kedatangan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, dilengkapi dengan tokoh-tokoh yang terlibat, cara penghormatan, alat serta pakaian yang digunakan; (2) teks ini memuat peristiwa yang dapat menggambarkan masanya, terdapat peristiwa di luar penyambutan dan penghormatan sebagai topik utama dalam naskah tersebut; dan (3) pada teks ini, terdapat salinan surat perintah sebelum kedatangan Gubernur Jenderal di Yogyakarta dan secara unsur atau konteks pembahasan teks ini dianggap paling lengkap dibanding teks lainnya.

C. Edisi Teks *Kangjeng Tuwan Inggang Wicaksana Gupernur Jendral Otto van Rees*

Pembuatan transliterasi teks KTIWGJO didahului dengan pembuatan pertanggungjawaban transliterasi. Pembuatan pertanggungjawaban transliterasi ini berdasarkan dengan metode yang digunakan dalam edisi teks. Pertanggungjawaban transliterasi pada teks KTIWGJO didasarkan pada ejaan yang benar dan tepat atau disesuaikan dengan peraturan yang berlaku, yaitu EYD (Ejaan Yang Disempurnakan). Ejaan yang digunakan dalam pertanggungjawaban transliterasi teks KTIWGJO adalah ejaan bahasa Jawa yang berlaku, hal ini didasarkan dengan menggunakan aksara serta bahasa dalam teks tersebut. Selain itu, transliterasi teks KTIWGJO juga didasarkan pada Kamus *Baoesastra Djawa* karya W.J.S. Poerwadarminta (1939).

Berdasarkan transliterasi teks KTIWGJO, dihasilkan 38 kata yang dijelaskan dalam aparat kritik. Aparat kritik ini memuat keterangan mengenai penyuntingan teks, yang menjelaskan mengenai pengurangan huruf atau suku kata, penambahan huruf atau suku kata, dan pergantian huruf atau suku kata, maupun campuran dua di antara ketiga perubahan tersebut. Selanjutnya, hasil dari terjemahan teks yang dilakukan terdapat catatan terjemahan yang menjelaskan beberapa kata yang sulit untuk diartikan. Oleh karena itu, catatan terjemahan ini dapat digunakan untuk

menjelaskan arti dari kata-kata tersebut dengan menambahkan keterangan. Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan membaca dalam memaknai isi teks KTIWGJO. Terdapat 59 kata dalam catatan terjemahan teks *Kanjeng Tuwan Inkgang Wicaksana Gupernur Jendral Otto van Rees*.

D. Analisis Teks *Kanjeng Tuwan Inkgang Wicaksana Gupernur Jendral Otto van Rees*

a) Latar Belakang Historis

Teks *Kanjeng Tuan Inkgang Wicaksana Gubernur Jendral Otto Van Rees* berisi peristiwa sejarah yang penting untuk diketahui sebagai tambahan ilmu serta wawasan mengenai peristiwa pada masa kolonialisme Belanda. Teks ini menceritakan kisah kedatangan seorang Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang bernama Otto van Rees di wilayah Yogyakarta. Hal tersebut tercermin dalam kutipan teks di bawah ini.

Punika serat pranatan bab pakurmataning rawuhipun Kanjeng Tuwan Inkgang Wicaksana Gupernur Jendral ing Nederlan Hindiya, ing Nagari Ngayogyakarta (Naskah KD: 76).

Ini adalah surat peraturan mengenai penghormatan kedatangan Kanjeng Tuan Inkgang Wicaksana Gubernur Jenderal Hindia Belanda, di Negara Yogyakarta.

Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang datang di wilayah Yogyakarta ini menurut teks KTIWGJO bernama Gubernur Jenderal Otto van Rees. Selain itu, kegiatannya selama berada di Yogyakarta tidak hanya berkaitan dengan Keraton Yogyakarta saja, namun juga dengan Pura Pakualaman. Pernyataan-pernyataan ini sesuai dengan kutipan teks berikut.

/o/ Punika mémuti, ingkang kalampahan. Sakalanipun Kanjeng Tuwan Inkgang Wicaksana Gupernur Jendral Otopanris ing Nederlan Hindia, wonten Nagari Dalem ing Ngayogyakarta Adiningrat (Naskah KD: 108).

Inilah pengingat, yang dilakukan ketika Kanjeng Tuan Inkgang Wicaksana Gubernur Jenderal Otto van Rees di Hindia Belanda, datang di Negara Ngayogyakarta Adiningrat.

Nyaosi wilujeng rawuhipun, Kanjeng Tuwan Inkgang Wicaksana utawi nyaosaken tabé pakurmatanipun Inkgang Sinuwun Kanjeng Sultan, utawi Kanjeng Tuwan Residhen.

1. *Tuwan Asisten Risidhen.*

2. ***Kanjeng Pangeran Adipati Kolonel Komandhan Pakualaman*** (Naskah KD: 76).

Memberikan ucapan kedatangan kepada Kanjeng Tuan Inkgang Wicaksana atau memberikan salam penghormatan dari Inkgang Sinuwun Kanjeng Sultan atau Tuan Residen.

1. Tuan Asisten Residen

2. Kanjeng Pangeran Adipati Kolonel Komandan Pakualaman

Berdasarkan kutipan-kutipan di atas, dapat diketahui bahwa pihak dari Pakualaman ikut serta dalam proses kegiatan Gubernur Jenderal Otto van Rees selama di Yogyakarta. Pakualaman pada masa pemerintahan Hamengku Buwana VII ini dipimpin oleh Kanjeng Pangeran Adipati Pakualaman yang ke V atau dapat disebut dengan Pakualam V. Pakualam V bertahta dari tahun 1878 sampai dengan 1900. Menurut Moedjanto, Pakualaman ini adalah hadiah dari pemerintah Inggris pimpinan Letnan Gubernur Raffles (1811-1815) yang diberikan kepada Pangeran Notokusumo (putra dari HB I) atas dukungannya kepada Inggris, kemudian Pangeran Notokusumo diangkat menjadi Pangeran Adipati Pakualam pertama (1994: 30).

Selanjutnya, pihak Belanda yang berkaitan dengan prosesi kedatangan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Otto van Rees, dua di antaranya adalah Kanjeng Tuan Residen dan Tuan Asisten

Residen. Kanjeng Tuan Residen dan Tuan Asisten Residen pertama kali disebutkan dalam teks KTIWGJO adalah pada saat menjemput serta menyambut kedatangan Gubernur Jenderal Otto van Rees di Prambanan. Adapun Kanjeng Tuan Sekretaris Jenderal datang bersama dengan Gubernur Jenderal. Berikut kutipan teks yang menjelaskan pernyataan tersebut.

*Sarawuhipun Kanjeng Tuwan Inggang Wicaksana ing setatsiyun, kagunganipun gamelan Inggang Sinuwun mungel. Manawi Kanjeng Tuwan Inggang Wicaksana tedhak saking kareta api Inggang Sinuwun Kanjeng Sultan sarta **Kanjeng Tuwan Residhen**, sami abagèkaken Kanjeng Tuwan Inggang Wicaksana, lajeng..... (Naskah KD: 78).*

Setelah kedatangan Kanjeng Tuan Inggang Wicaksana di stasiun, gamelan milik Inggang Sinuwun dibunyikan. Jika Kanjeng Tuan Inggang Wicaksana turun dari kereta api Inggang Sinuwun Kanjeng Sultan dan Kanjeng Tuan Residen menyambut kedatangan Kanjeng Tuan Inggang Wicaksana, kemudian.....

..... inggang sami methuk wonten setatsiyun ing prambanan. Nyaosi wilujeng rawuhipun, Kanjeng Tuwan Inggang Wicaksana utawi nyaosaken tabé pakurmatanipun Inggang Sinuwun Kanjeng Sultan, utawi Kanjeng Tuwan Residhen.

1. Tuwan Asisten Residhen.

2. *Kanjeng Pangeran Adipati Kolonel Komandhan Pakualaman (Naskah KD: 76).*

..... beberapa yang menjemput kedatangannya di stasiun Prambanan memberikan ucapan kedatangan kepada Kanjeng Tuan Inggang Wicaksana atau memberikan salam penghormatan dari Inggang Sinuwun Kanjeng Sultan atau Tuan Residen.

1. Tuan Asisten Residen
2. Kanjeng Pangeran Adipati Kolonel Komandan Pakualaman

Kanjeng Tuan Residen pada masa pemerintahan dalam teks KTIWGJO sesuai dengan catatan sejarah yang ada bernama Bastiaan van Baak. Menurut Tashadi, dkk., Bastiaan van Baak menjadi Residen di Yogyakarta sejak 20 April 1878 sampai dengan 12 Mei 1889 (1985: 40). Menurut Nieuwenhuys, Bastiaan van Baak pernah menjabat sebagai Asisten Residen Lebak dari tahun 1864 sampai 1868 (1960: 415).

b) Struktur Naskah Koepiya

Struktur naskah *Koepiya* koleksi KHP Widya Budaya memiliki struktur pada bagian awal naskah adalah daftar isi, yang berisi judul teks dan letak halaman. Selanjutnya, pada awal teks terdapat eksordium. Eksordium berada di setiap awal teks sebagai kalimat pembuka yang berisikan mengenai penjelasan teks di bawahnya. Eksordium yang dituliskan pada setiap teks tersebut memiliki gaya penulisan atau gaya bahasa yang sama. Bagian selanjutnya adalah isi, pada jenis naskah *Koepiya* koleksi KHP Widya Budaya, isi dapat berupa salinan surat perintah ataupun tata cara sebuah prosesi. Jika isi teks berupa salinan surat, maka struktur teks sesuai dengan struktur surat pada umumnya, yaitu berisi tujuan surat (penerima); pembuka; isi; penutup; tanggal surat; dan nama penulis surat. Adapun teks yang berisi sebuah tata cara prosesi struktur teks seperti yang tertulis dalam teks KTIWGJO. Isi teks surat ataupun tata cara tidak terlepas dari adanya eksordium yang mengawali penulisan isi teks. Struktur akhir naskah *Koepiya* pada sebagian naskah terdapat catatan-catatan penting yang berkaitan dengan isi naskah maupun catatan koreksi dari penulisan-penulisan sebelumnya. Sementara itu, pada bagian akhir naskah *Koepiya* lainnya tidak terdapat struktur khusus.

c) Prosesi Penyambutan

Penyambutan tamu dalam teks KTIWGJO hanya terdapat pada bagian awal teks, pada saat Kanjeng Tuan Inggang Wicaksana pertama kali datang ke wilayah Yogyakarta pada tanggal 10 Juli 1887. Penyambutan sudah dilakukan sebelum Gubernur Jenderal Hindia Belanda tiba di stasiun Prambanan. Beberapa tokoh yang ikut menyambut di stasiun Prambanan adalah Inggang Sinuwun Kanjeng Sultan, Kanjeng Tuan Residen, Tuan Asisten Residen, Kanjeng Pangeran Adipati Kolonel Komandan Pakualaman, Bendara Pangeran Ngabehi, Raden Adipati, Raden Tumenggung Sindureja, Bupati Kalasan. Hal tersebut sesuai dengan kutipan di bawah ini.

Ing dinten rawuhipun, Kangjeng Tuwan Inggang Wicaksana, inggang sami methuk wonten setatsiyun ing prambanan. Nyaosi wilujeng rawuhipun, Kangjeng Tuwan Inggang Wicaksana utawi nyaosaken tabé pakurmatanipun Inggang Sinuwun Kangjeng Sultan, utawi Kangjeng Tuwan Residhen.

1. Tuwan Asisten Residhen.
2. Kangjeng Pangeran Adipati Kolonel Komandhan Pakualaman. [77]
3. Bendara Pangeran Ngabehi, Litnan Kolonel Pansetap.
4. Raden Adipati,
5. Raden Tumenggung Sindurêja, Mayor Komandhan.
6. Bupati ing Kalasan (Naskah KD: 76-77).

Pada hari kedatangan Kanjeng Tuan Inggang Wicaksana, beberapa yang menjemput kedatangannya di stasiun Prambanan memberikan ucapan kedatangan kepada Kanjeng Tuan Inggang Wicaksana atau memberikan salam penghormatan dari Inggang Sinuwun Kanjeng Sultan atau Tuan Residen.

1. Tuan Asisten Residen
2. Kanjeng Pangeran Adipati Kolonel Komandan Pakualaman [77]
3. Bendara Pangeran Hangabehi, Letnan Kolonel van staff
4. Raden Adipati
5. Raden Tumenggung Sindureja, Mayor Komandan
6. Bupati di Kalasan

d) Prosesi Penghormatan

Pada hari kedua Kanjeng Sultan dan Kanjeng Pangeran Adipati Pakualaman berkunjung ke Karesidenan. Kanjeng Pangeran Adipati Pakualaman dijemput oleh Tuan Kapten Komandan Schutterij serta diantarkan oleh Para Pangeran Pakualaman. Penghormatan kepada Kanjeng Pangeran Adipati Pakualaman ketika melewati Loji Besar adalah dengan dibunyikannya meriam sebanyak sembilan kali. Hal tersebut sesuai dengan kutipan teks di bawah ini.

Pukul sadasa kirang saprapatan Kangjeng Pangeran Adipati Pakualaman tindak ing Dalem Karesidhenan, inggang methuk Tuwan Kaptin Komandhanipun sêkèteré, sarta kadherekaken para Pangeran ing Pakualaman. Salangkungipun ing lo[85]ji ageng Kangjeng Pangeran Adipati kaurmatan mriyem saking Loji Ageng mungel kaping sanga (Naskah KD:84-85).

Pukul sepuluh kurang seperempat Kanjeng Pangeran Adipati Pakualaman pergi ke rumah Karesidenan, yang menjemput adalah Tuan Kapten Komandan schutterij, dan diikuti oleh para Pangeran Pakualaman. Setelah melewati Loji [85] Besar Kanjeng Pangeran Adipati diberikan penghormatan meriam dari Loji Besar berbunyi sebanyak sembilan kali.

Sementara itu, Kanjeng Sultan dijemput oleh Kanjeng Tuan Residen dan Tuan Asisten Residen. Pada saat mereka melewati Loji Besar, Kanjeng Sultan mendapat penghormatan berupa

bunyi meriam dari Loji Besar sebanyak 21 kali. Sesampainya di Karesidenan, Kanjeng Sultan bergandengan tangan dengan Kanjeng Tuan Residen sampai di pintu pelataran bagian depan, kemudian Kanjeng Tuan berjabat tangan dengan Kanjeng Tuan Inkgang Wicaksana sebagai bentuk penghormatannya. Peristiwa tersebut tercermin melalui kutipan teks di bawah ini.

Inkgang Sinuwun kapethuk Kangjeng Tuwan Residhen sarta Tuwan Asisten Residhen. Dumugenipun ngajengan Loji Ageng Inkgang Sinuwun Kangjeng Sultan kaurmatan mriyem mungel kaping selikur, dumugenipun ing Dalem Karesidhenan Inkgang Sinuwun Kangjeng Sultan akanthen asta akaliyan Kangjeng Tuwan Residhen dumugi korènipun jladri ngajeng, lajeng nyaosi urmat tabean dhumateng Kangjeng Tuwan Inkgang Wicaksana Guprenur Jendral..... (Naskah KD: 85).

Inkgang Sinuwun dijemput oleh Kanjeng Tuan Residen dan Tuan Asisten Residen. Sesampainya di depan Loji Besar, Inkgang Sinuwun Kanjeng Sultan diberi penghormatan meriam yang dibunyikan sebanyak 21 kali. Setelah sampai di rumah Karesidenan, Inkgang Sinuwun Kanjeng Sultan bergandengan tangan dengan Kanjeng Tuan Residen sampai di korènipun gladri depan. Selanjutnya, memberikan penghormatan kepada Kanjeng Tuan Inkgang Wicaksana Gubernur Jenderal,.....

Setelah semua sampai di Karesidenan, kemudian Kanjeng Sultan duduk di sebelah kiri Kanjeng Tuan Inkgang Wicaksana. Pada kesempatan itu, terdapat pula Kanjeng Tuan Residen yang berdiri di sebelah kanan tempat duduk Kanjeng Tuan Inkgang Wicaksana, kemudian terdapat pula Kanjeng Tuan Sekretaris Jenderal, Kanjeng Pangeran Adipati Kolonel Komandan Pakualam, dan Para Tuan lainnya. Sementara itu, yang berdiri di kiri tempat duduk Kanjeng Sultan adalah Para Pangeran dari Kedaton. Peristiwa tersebut tercermin melalui kutipan teks di bawah ini.

..... Tumunten Kangjeng Tuwan Inkgang Wicaksana sarta Inkgang Sinuwun Kangjeng Sultan sami lenggah wonten ing palenggahan. Inkgang Sinuwun lenggah wonten kiwanipun Kangjeng Tuwan Inkgang Wicaksana inkgang jumeneng wonten tengenipun palenggahan Kangjeng Tuwan Residhen Kangjeng Tuwan Sekrètaris Jendral, Kangjeng Pangeran Adipati Kolonel Komandhan Pakualam, sarta para Tuwan sanes-sanesipu[86]pun, dene inkgang jumeneng wonten ing kiwanipun palenggahan para Pangeran saking Kadhaton (Naskah KD: 85-86).

..... kemudian Kanjeng Tuan Inkgang Wicaksana serta Inkgang Sinuwun Kanjeng Sultan duduk di tempat duduknya. Inkgang Sinuwun duduk di sebelah kiri Kanjeng Tuan Inkgang Wicaksana, yang berdiri di sebelah kanan tempat duduk adalah Kanjeng Tuan Residen, Kanjeng Tuan Sekretaris Jenderal, Kanjeng Pangeran Adipati, Kolonel Komandan Pakualaman, dan para Tuan lainnya. [86] Sementara itu, terdapat beberapa yang berdiri di sebelah kiri tempat duduk yaitu para Pangeran dari Kedaton.

e) Kegiatan-Kegiatan Kanjeng Tuan Inkgang Wicaksana Selama Berada di Yogyakarta

Kegiatan yang disampaikan pada bagian ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh Kanjeng Tuan Inkgang Wicaksana selama berada di Yogyakarta dari tanggal 10 Juli 1887 sampai dengan 16 Juli 1887, kecuali kegiatan kunjungan yang telah disampaikan di atas. Beberapa kegiatan yang dilakukan Kanjeng Tuan Inkgang Wicaksana selama di Yogyakarta, antara lain 1) *pista dhahar* di Karesidenan pada hari pertama; 2) pesta dansa di Karesidenan pada hari kedua; 3) *pista dhahar* di Karesidenan pada hari ketiga; 4) pesta dansa di Keraton pada hari kelima; 5) pergi ke Pabrik Rewulu pada hari keenam; dan 6) pembukaan jalur kereta api pada hari ketujuh.

Kegiatan pertama Kanjeng Tuan Inggang Wicaksana adalah mengadakan *pista dhahar* di Karesidenan. *Pista dhahar* dilakukan pada hari pertama kedatangannya, yaitu pada tanggal 10 Juli 1887 pada pukul setengah delapan malam. Kegiatan *pista dhahar* ini sesuai dengan kutipan teks, yaitu “*Sontenipun wanci pukul satengah wolu pista dhahar ing Dalem Karesidhenan....* (Naskah KD: 84)”, terjemahannya adalah “Sorenya, pukul setengah delapan *pista dhahar* di Rumah Karesidenan”.

Kegiatan terakhir di Yogyakarta berada di hari terakhir Kanjeng Tuan Inggang Wicaksana berada di Yogyakarta. Kegiatan keenam ini adalah melakukan pembukaan jalur kereta api Yogyakarta-Cilacap bersama dengan Kanjeng Sultan. Kegiatan ini dilakukan pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 1887. Keterangan ini tercermin dalam kutipan teks berikut.

Pitung dintenipun utawi ing dinten Sêptu tanggal [103] kaping 16 wulan Juli, pambikakipun margi kareta api awit Ngayugya dumugi Cilacap. Sarta konduripun Kangjeng Tuwan Inggang Wicaksana ing Purwarêja (Naskah KD: 102-103).

Tujuh harinya atau pada dari Sabtu tanggal [103] 16 bulan Juli,

Pembukaan jalan kereta api mulai dari Yogyakarta sampai di Cilacap serta kepulangan Kanjeng Tuan Inggang Wicaksana di Purworejo,

PEMBAHASAN

Berdasarkan isi teks KTIWGJO, pola relasi antara pemerintahan pribumi dengan pemerintahan Hindia Belanda tidak hanya menunjukkan adanya dominasi atau kekuasaan dari pihak penjajah kepada yang terjajah. Akan tetapi, teks KTIWGJO menunjukkan adanya kekuatan serta dominasi yang ditunjukkan para kaum elite pribumi kepada para penjajah melalui bahasa yang digunakan sebagai nama julukan untuk para pejabat pemerintah Hindia Belanda. Teks KTIWGJO menjelaskan bahwa julukan “*Kanjeng Tuwan Inggang Wicaksana*” dan “*Tuwan Besar*” adalah julukan yang diberikan kepada Gubernur Jenderal Belanda yang bertahta pada masa itu. Nama julukan tersebut sesuai dengan kutipan di bawah ini.

Inggang ndherekaken numpak kapal wonten sapêngkêripun titihan kareta para ajudanipun Kangjeng Tuwan Inggang Wicaksana Guprenur Jendral sarta para Pangeran inggang pênah nèm (Naskah KD: 80).

Sementara itu, yang mengikuti menggunakan kuda di sebelah belakang kereta adalah para ajudan Kanjeng Tuan Inggang Wicaksana Gubernur Jenderal. Selanjutnya, Para Pangeran yang lebih muda

Sarawuhipun Kangjeng Tuwan Inggang Wicaksana ing setatsiyun, kagunganipun gamelan Inggang Sinuwun mungel. Manawi Kangjeng Tuwan Inggang Wicaksana tedhak saking kareta api Inggang Sinuwun Kangjeng Sultan sarta Kangjeng Tuwan Residhen, sami abagèkaken Kangjeng Tuwan Inggang Wicaksana, lajeng Kangjeng Tuwan Inggang Wicaksana kaurmatan, drel rambah kaping tiga dening para prajurit (Naskah KD: 78).

Setelah kedatangan Kanjeng Tuan Inggang Wicaksana di stasiun, gamelan milik Inggang Sinuwun dibunyikan. Jika Kanjeng Tuan Inggang Wicaksana turun dari kereta api Inggang Sinuwun Kanjeng Sultan dan Kanjeng Tuan Residen menyambut kedatangan Kanjeng Tuan Inggang Wicaksana, kemudian Kanjeng Tuan Inggang Wicaksana diberi penghormatan, drel dibunyikan ulang sebanyak tiga kali oleh para prajurit.

Marêngi ing dinten Sênèn Kliwon wanci jam 10 enjing Ingkêng Sinuwun miyos Kaprabon, dhumateng Loji Karesidhenan, tetuwi Kangjeng Tuwan Besar, agem-ageman dalem kados garebegan, ngagem kampuh parang rusak, ngagem sikepan Ontra Kusuma (Naskah KD: 110).

Bersamaan di hari Senin Kliwon, pukul 10 pagi, Ingkang Sinuwun miyos Keprabon menuju ke Karesidenan untuk menjenguk Kanjeng Tuan Besar. Pakaian yang digunakan seperti ketika garebek, mengenakan kampuh parang rusak, serta mengenakan sikepan antrakusuma.

Berdasarkan kutipan pertama di atas, jelas dituliskan "*Kanjeng Tuwan Ingkang Wicaksana Guprenur Jendral*", yang berarti bahwa Kanjeng Tuan Ingkang Wicaksana tersebut yang dimaksud adalah seorang Gubernur Jenderal. Nama julukan ini selalu digunakan disetiap penyebutan Gubernur Jenderal. Nama julukan ini digunakan sebagai nama pengganti serta nama penyerta yang diletakkan di awal sebelum penyebutan "*Guprenur Jendral*" atau "*Guprenur Jendral ing Hindia Belanda*". Selanjutnya, pada kutipan teks kedua terdapat keterangan bahwa *Kanjeng Tuan Ingkang Wicaksana* datang di stasiun. Pada kalimat tersebut, nama julukan Kanjeng Tuan Ingkang Wicaksana digunakan untuk mewakili nama atau penyebutan untuk seorang tokoh, yaitu Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang bertahta pada masa itu, Otto van Rees.

Selain nama julukan tersebut terdapat nama julukan lain yang diberikan kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda dan tercantum dalam teks KTIWGJO. Nama julukan tersebut adakah "*Tuwan Besar*". Penyebutan nama julukan "*Tuwan Besar*" ini tercantum dalam salinan surat ketiga, yang berisi mengenai pemberitahuan dan pengingat tentang tata cara penyambutan dan penghormatan yang dilakukan ketika Gubernur Jenderal Hindia Belanda datang ke Yogyakarta. Jika dilihat dari makna secara harfiah, *Kanjeng Tuan Ingkang Wicaksana* diartikan sebagai "seorang Tuan yang bijaksana". Sesuai dengan *Baoesastra Djawa* yang menyatakan bahwa *wicaksana* memiliki arti *waskitha, bisa nganggo budine kalawan bener* (bijaksana) (Poerwadarminta, 1939: 666).

Berdasarkan nama julukan yang tertulis dalam teks KTIWGJO dapat disimpulkan, bahwa pemberian nama tersebut adalah salah satu cara pemerintahan pribumi mendominasi pihak terjajah. Pihak pribumi sebagai tuan rumah berhak untuk mengatur tatanan pemerintahannya sendiri, baik yang berkaitan dengan sektor sosial, budaya, ekonomi, dan lain-lain. Melalui teks KTIWGJO ini penulis melihat bahwa pihak pribumi melakukan perlawanan secara halus. Pihak pribumi memiliki kekuatan dan mendominasi pihak Belanda melalui penamaan yang diberikan kepada para Pemerintah Hindia Belanda. Sebutan "*Kanjeng Tuwan Ingkang Wicaksana*" adalah nama julukan untuk Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang memiliki arti dan makna yang baik. Berdasarkan etika Jawa, orang yang bijaksana adalah orang yang dapat menangkap bahwa yang baik baginya adalah hidup yang sesuai dengan peraturan-peraturan moral dan harus dapat melawan nafsu-nafsunya. Selain itu, orang yang bijaksana adalah orang yang dapat mengikuti nasihat-nasihat, sedangkan orang yang tidak dapat mengikutinya adalah orang yang bodoh (Suseno, 1985: 214-219).

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa nama julukan yang diberikan oleh pemerintah pribumi kepada pemerintah Hindia Belanda adalah wujud dominasi. Melalui pengagungan tersebut, maka seorang Gubernur Jenderal seharusnya menjadi seorang pemimpin yang bijaksana. Pemimpin yang dapat melawan hawa nafsunya, dapat sesuai dengan peraturan-peraturan moral, dan dapat mendengarkan nasihat-nasihat. Seorang Gubernur Jenderal tidak seharusnya bertindak sesuai dengan kemauannya sendiri, tidak mau menerima masukan, dan tidak mengikuti peraturan-peraturan moral yang ada di wilayah Yogyakarta.

Pemberian nama julukan ini dimaksudkan sebagai cara pemerintah pribumi untuk menyanjung dan mengagungkan keberadaan Gubernur Jenderal. Biasanya, pada kehidupan sehari-hari sebuah sanjungan dapat menjadikan seseorang menjadi besar hati, sehingga setiap kali mendengar kata

sanjungan tersebut perasaannya akan merasa baik dan merasa sangat berterima kasih kepada orang yang menyanjungnya. Pada keadaan ini, orang akan merasa senang, bangga, gembira sehingga akan berusaha melakukan sesuatu untuk membalas sanjungan tersebut. Menurut Holmes (dalam Susanti, 2020: 2), pujian atau sanjungan adalah tindak tutur yang secara langsung atau tidak langsung dengan memberikan penghargaan kepada seseorang orang lain mengenai beberapa “kelebihan” yang dimilikinya, yang memiliki nilai positif.

Akan tetapi, maksud dari bentuk sanjungan atau pujian tersebut bukan semata-mata untuk memberikan sebuah penghargaan yang ada di dalam diri Gubernur Jenderal, melainkan sebagai bentuk dominasi atau penguasaan dari pihak pribumi untuk mengambil hati Gubernur Jenderal sehingga melalui makna kata tersebut pribumi dapat mengatur dan mengendalikannya. Hal tersebut tentunya dapat berkaitan terhadap sistem politik, ekonomi, budaya, dan sosial yang berlangsung pada masa itu. Teks KTIWGJO ini menjadi salah satu bukti bahwa pihak terjajah, yaitu pribumi di Yogyakarta tidak menjadi pihak pasif yang begitu mudahnya diatur dan dikuasai oleh pihak kolonial. Akan tetapi, pribumi juga memiliki cara untuk mengeluarkan kuasanya melalui cara mereka sendiri. Selain penguasaannya yang ditunjukkan melalui penamaan tersebut, tidak secara langsung pihak pribumi juga menunjukkan kuasanya terhadap budaya dan adat istiadat yang dimilikinya, yaitu berupa *tata krama* (sopan santun).

Pembangunan jalur kereta api di Yogyakarta digunakan untuk alat transportasi sebagai alat untuk mengangkut produksi gula. Pabrik-pabrik gula banyak terdapat di wilayah Yogyakarta, pada masa Sultan Hamengku Buwana VII terdapat sekitar 17 pabrik gula di Yogyakarta, salah satunya adalah pabrik gula rewulu seperti yang disebutkan dalam teks KTIWGJO. Dalam buku *Sejarah Kereta Api Yogyakarta 1917-1942*, dijelaskan bahwa terdapat perluasan jalur kereta api di Yogyakarta ke wilayah perkebunan, terutama di Regentschap Bantul. Jalur ini dibangun untuk memenuhi permintaan jasa pengiriman komoditas perkebunan yang lebih cepat dan efisien. Wilayah Yogyakarta adalah penghasil tebu yang besar, begitu juga dengan hasil-hasil perkebunan lainnya. Kebutuhan lalu lintas barang dan penumpang meningkat setelah cultuur stelsel diubah menjadi Agrarische Wet tahun 1870. Hal ini menyebabkan wilayah Hindia Belanda lebih terbuka untuk penanaman modal asing, sehingga mengakibatkan jumlah produksi yang semakin meningkat (Setiawan, 2020: 3-6).

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa latar belakang pembangunan jalur kereta api adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah kolonial untuk kepentingannya. Akan tetapi, menariknya dalam teks KTIWGJO penulis menemukan satu persepsi yang berbeda dari referensi-referensi yang ada. Teks KTIWGJO menyebutkan bahwa stasiun kereta api ialah milik Negara Ngayogyakarta, bukan milik kolonial. Hal tersebut sesuai dengan kutipan teks di bawah ini.

Wonten ing setatsiyunipun setat sepur wèhing Nagari Ngayogyakarta, ingkang bagèkaken Kangjeng Tuwan Inggang Wicaksana, Inggang Sinuwun Kangjeng Sultan sarta Kangjeng Tuwan Residhen, dene Tuwan Militèr Komandhan ing Loji Ageng ugi wonten ing setatsiyun wau (Naskah KD: 77).

Di stasiun staatsspoor pemberian Negara Yogyakarta, yang menyambut kedatangan Kanjeng Tuan Inggang Wicaksana ialah Inggang Sinuwun Kanjeng Sultan serta Kanjeng Tuan Residen. Sementara itu, Tuan Komandan Militer di Loji Ageng juga berada di stasiun tersebut.

Berdasarkan kutipan di atas, dapat disimpulkan bahwa stasiun kereta api di wilayah Yogyakarta adalah pemberian dari Yogyakarta, bukan pemberian dari kolonial seperti yang berada di referensi-referensi sejarah pada umumnya. Pernyataan tersebut berada pada halaman kedua teks KTIWGJO pada saat menjelaskan kedatangan Gubernur Jenderal Otto van Rees di Stasiun

Prambanan. Jadi, yang dimaksudkan dalam kutipan tersebut ialah kedatangan Kanjeng Tuan Inggang Wicaksana di stasiun Prambanan yang merupakan stasiun pemberian Negara Yogyakarta, di sanalah beliau pertama kali diberi penghormatan oleh Kanjeng Sultan dan jajarannya.

Penekanan pada kalimat “*setatsiyunipun setat sepur wèhing Nagari Ngayogyakarta*” memberikan wawasan baru, bahwa teks KTIWGJO ini menunjukkan adanya pertahanan penguasaan dari efek kolonisasi yang terjadi pada masa pemerintahan Hindia Belanda di Yogyakarta. Pihak pribumi seakan tidak ingin menjadi pihak yang tertindas dan terbelakang mengenai adanya inovasi transportasi di wilayahnya ialah hasil dari pemberian kolonial. Melalui teks KTIWGJO ini, pemerintah pribumi ingin menyampaikan bahwa tempat kedatangan Gubernur Jenderal Otto van Rees di Yogyakarta pada tahun 1887 pertama kali adalah di Stasiun Prambanan, stasiun pemberian Negara Yogyakarta yang digunakan untuk alat transportasi datangnya Gubernur Jenderal ke Yogyakarta.

Pernyataan ini menunjukkan adanya dominasi yang menunjukkan pola relasi antara pribumi dengan kolonial. Pribumi tidak ingin menjadi gambaran dari sebuah kebodohan yang ditunjukkan melalui penguasaan kolonial lewat inovasinya dalam bidang transportasi. Faktanya, segala bentuk pembangunan tersebut tidak serta-merta dari hasil pengorbanan kolonial. Akan tetapi, adanya jalur kereta api ini pribumi lebih banyak berkorban baik dari materi, sumber daya alam, dan sumber daya manusianya. Dengan demikian, dengan keinginan untuk mendominasi wilayahnya sendiri pemerintah pribumi menekankan bahwa adanya stasiun tersebut ialah pemberian dari pihak pribumi kepada kolonial untuk digunakan secara bersama-sama.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa melalui teks KTIWGJO dapat diungkap beberapa bukti adanya keinginan serta wujud dari pemerintah pribumi untuk menjadi penguasa dan dominan ketika berada di wilayahnya sendiri. Hal ini menjadi sebuah wawasan baru yang unik mengenai masa kolonialisasi Hindia Belanda di Yogyakarta. Kaum-kaum intelektual yang memiliki struktur dan peran dalam pemerintahan di Negara Yogyakarta menjadikan sistem tersebut sebagai bentuk hegemoni dan alat untuk mendominasi wilayahnya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa kaum terjajah tidak berarti kaum yang tertindas dan terbelakang. Pola relasi yang terjadi antara penjajah dan yang terjajah tidak selalu menunjukkan bahwa pola hegemoni hanya berada di pihak penjajah. Melalui tekanan yang diberikan dari pihak penjajah, pihak terjajah atau para pribumi juga dapat memunculkan pola hegemoninya melalui cara masing-masing yang dipengaruhi dengan budaya atau pola masyarakat masing-masing.

SARAN

Penelitian mengenai naskah arsip koleksi KHP Widya Budaya Keraton Yogyakarta masih sangat minim. Pada saat ini, pihak KHP Widya Budaya sedang melakukan pembaruan katalogisasi dan restorasi naskah-naskah arsip yang jumlahnya sangat banyak. Beberapa waktu kemudian, pencarian naskah arsip di Keraton Yogyakarta akan semakin mudah dan dapat terbuka lebih luas lagi. Penelitian pada Naskah KD ini juga belum selesai, belum dilakukan secara menyeluruh pada ke-13 teks yang lainnya. Transliterasi sudah dilakukan pada seluruh teks, namun pembahasan secara tekstual belum dilakukan. Diharapkan adanya penelitian lanjutan mengenai naskah arsip Keraton Yogyakarta, sehingga dapat menghasilkan pengetahuan baru atau justru meluruskan hal yang selama ini keliru. Bagaimanapun naskah arsip ini adalah bukti otentik peristiwa masa lalu.

KEPUSTAKAAN

- Baried, S.B, dkk. (1985). *Pengantar Teori Filologi*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Carey, P. (2019). *Takdir: Riwayat Pangeran Diponegoro (1785-1855)*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Churchill, W. A. (1935). *Watermarks in Paper : in Holland, England, France etc, in the XVII and XVIII Centuries and Their Interconnection*. Amsterdam: Menno Hertzberger and Co.
- Christomy, T. (2017). “Menziarahi Masa Lalu untuk Masa Kini melalui Naskah Pakualaman II”. *Book Review. Manuskripta* 7 (1), 169-173.
- Faruk. (2003). *Pengantar Sosiologi Sastra*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Irawan, Y. (2018). *Babad Sepehi*. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI.
- Laely, N. (2018). “Sistem Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda Di Onderafdeling Bonthain 1905-1942”. Diakses melalui <http://eprints.unm.ac.id>.
- Magnis-Suseno, F.(1985). *Etika Jawa*. Jakarta: Gramedia.
- Mahmudah, A. R. & Lailatur R. (2016). “Urgensi dan Integritas Arsip dalam Konteks Kebangsaan dan Kesadaran Sejarah”. *Lentera Pustaka* 2(1), 1-8.
- Mulyani, H. (2012). *Membaca Manuskrip Jawa*. Yogyakarta: Kanwa Publisher.
- Moedjanto, G. (1994). *Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman*. Yogyakarta: Kanisius.
- Nieuwenhuys.(1960). “Rouffaer en Multatuli”. *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* 116, no: 4, Leiden, 408-423.
- Poerwadarminta, W.J.S. (1939). *Baoesastra Djawa*. Groningen, Batavia: J.B.Wolters Uitgevers–Maatschappij N.V.
- Robson, S.O. (1994). *Prinsip-Prinsip Filologi Indonesia*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Universitas Leiden. Diterjemahkan oleh Kentjanawati Gunawan. Dari aslinya *Principles of Indonesian Philology*, Leiden: Foris Publication, 1988.
- Said, E.W. (1979). *Orientalism*. New York: Vintage Books.
- Saputra, K. H. (2008). *Pengantar Filologi Jawa*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.
- Setiawan, N. (2020). *Sejarah Kereta Api Yogyakarta 1917-1942*. Temanggung: Kendi.
- Simon, R. (2004). *Gagasan-Gagasan Politik Gramsci*. Yogyakarta: INSIST.
- Susanti, R. (2020). “Tuturan Memuji Dan Responsi Pujian Dalam Masyarakat Jepang: Telaah Buku Speaking Skills Learned Through Listening Japanese Live”. Diakses melalui <http://repository.unas.ac.id>.
- Tashadi, dkk. (1985). *Gedung Agung Yogyakarta (Istana Kepresidenan di Yogyakarta)*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional.
- Zuhdi, U., dkk. (2010). “Aplikasi GMCR Untuk Resolusi Konflik (Studi Kasus: Perang Diponegoro (The Java War / De Java Oorlog))”. *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik*, 02 (02), diakses melalui <http://journal.uniga.ac.id>.

Eksistensi Tari Srimpi Pandhelori Gaya Yogyakarta di DKI Jakarta

Sulistiani

Alumni Magister Pengkajian Seni Pertunjukan dan Seni Rupa, Universitas Gadjah Mada
email: sulis@sucitta.art

Abstrak

Tari Srimpi Pandhelori merupakan salah satu dari produk kesenian Keraton Yogyakarta. Tari ini telah ada sejak masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono VII dan berkembang terus menerus dari masa ke masa. Sejak tahun 2020 tari Srimpi Pandhelori telah tercatat sebagai Warisan Budaya Tak Benda Indonesia oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tari Srimpi Pandhelori tidak hanya berkembang di Yogyakarta namun juga berkembang di tempat lain. DKI Jakarta sebagai provinsi yang diakui menjadi Ibukota Negara Republik Indonesia menjadi salah satu tempat berkembangnya tari Srimpi Pandhelori. Perjalanan tari Srimpi Pandhelori hingga dapat diakui sebagai bagian dari Warisan Budaya Tak Benda tentu melewati berbagai kejadian. Perkembangan di luar tembok keraton bahkan DKI Jakarta menjadi tolak ukur bahwa tari ini dapat dikenal dan dipelajari oleh berbagai pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengulas eksistensi tari Srimpi Pandhelori di DKI Jakarta dilihat dari bentuk tari dan perkembangannya. Eksistensi tari Srimpi Pandhelori di DKI Jakarta menunjukkan bahwa produk kesenian yang berasal dari dalam keraton Yogyakarta dan masih senantiasa ditampilkan di dalam keraton tidak selalu eksklusif bagi kalangan tertentu saja. Hal ini membuktikan bahwa inklusifitas kesenian keraton Yogyakarta turut serta berperan pada kontribusi terhadap kekayaan budaya Indonesia.

Kata kunci: eksistensi, tari, Srimpi, Yogyakarta, Indonesia

***Full Paper dari judul dan abstrak ini terdapat pada Book Chapter yang diproduksi pada Simposium 2022**

GAMELAN KANGJENG KYAI SEKATI KASULTANAN YOGYAKARTA DALAM PERBANDINGAN

Sumarsam

Winslow-Kaplan Professor of Music
Wesleyan University

Abstrak

Artikel ini mengkaji gamelan Sekaten dari sudut pandang sejarah dan mitologi dalam membentuk persepsi, ideologi, dan konsepsi manusia terhadap tradisi kebudayaan. Menurut tradisi, sepasang gamelan Sekaten dicipta oleh wali Sunan Kalijaga pada periode kerajaan Demak di sekitar abad ke-16. Pada waktu periode kekuasaan beralih ke kerajaan Mataram, gamelan Sekaten berlanjut di pusat kekuasaan baru tersebut. Selanjutnya, akibat dari peristiwa partisi kerajaan Mataram pada pertengahan abad ke-18, gamelan dibagi dua, di kraton Kasunanan Surakarta dan kraton Yogyakarta. Partisi itu juga berdampak pada setiap kraton merasa perlu membedakan satu sama lain dalam hal adat-istiadat, ritual, pakaian, kesusastraan, dan keseniannya. Pada umumnya disetujui bahwa Kasunanan Surakarta mengembangkan ekspresi kebudayaan gaya “modern,” sedangkan Kasultanan Yogyakarta melanjutkan gaya tradisional yang mengekspresikan kegagahan dan spirit kepahlawanan (Carey 1986, Sumarsam 1995).

Kata Kunci: Gamelan, Kasultanan, Yogyakarta

***Full Paper dari judul dan abstrak ini terdapat pada Book Chapter yang diproduksi pada Simposium 2022**

Gamelan Instruments from Kasultanan Yogyakarta to Japan in 1940

Masami Okabe (Japan)

International Research Center for Intangible Cultural Heritage
in the Asia-Pacific Region

1. Introduction

Currently, Japan-Indonesia relationships are extremely good. The leaders of both Indonesia and Japan attach great importance to their relationships to each other, as President Joko Widodo visited Japan in 2015 as his first trip official overseas, and former Japanese Prime Minister Suga also visited Indonesia as his first trip official overseas. We have eight sister cities. Yogyakarta has sister city agreement with Kyoto and sends an art delegation every five years for performances. Both cities are similar too, they have a court, and have been prospered as a center of culture.

The number of Indonesians living in Japan is 66,084 (as of June 2020: Japan Immigration Statistics)¹, which is the seventh largest number of foreigners living in Japan, and the number of Indonesian students studying in Japan is 6,279, the fifth highest (as of 2020, Immigration Statistics)². There are also 19,612 Japanese living in Indonesia (as of 2019: based on the notification of residence)³.

The number of Indonesian tourists visiting Japan was 291.532 in 2017 and 120.535 in 2014, an increase of about 2.4 times in three years⁴. The number of people studying Japanese language at a secondary education schooling in Indonesia is 703,774, which is the largest in the world⁵. The Japanese government has dispatched Japanese language teachers to Southeast Asia countries in order to strengthen cultural exchanges since 2014. The number of Japanese language teachers dispatched to Indonesia is by far the largest, a total of 610 Japanese had dispatched to 825 schools throughout Indonesia since 2014 as of 2019, they were also enthusiastic about introducing Japanese culture in many events.

The brief history of cultural exchange above would have played a great role in the current closeness of bilateral relations. In general, understanding of Indonesian culture among Japanese began in the 1970s. Indonesian art delegation, including dance master Rama Sas, performed Yogyakarta court dance such as Golek Ayun-ayun, and wayang kulit craftsman Pak Sagio gave demonstration for crafting its puppets at the Indonesian Pavilion in the Osaka Expo held from March 15th to September 13th in 1970. The Indonesian government began a scholarship program named *Darma Siswa* specializing in culture in 1974, and many Japanese scholarship students learned Indonesian culture. About 30 young Japanese get *Darma Siswa* every year and learn at many university in Indonesia.

On the other hand, in academic context, Indonesian culture, especially music, introduced first in Japan was gamelan music in the 1970's. Fumio Koizumi (1927-1983, Professor at Tokyo University of the Arts) purchased a set of gamelan instruments in 1973, began teaching in class in 1974, and invited a gamelan player from Surakarta to teach for five years in 1979. Some students who studied there became researchers of Indonesian music or formed a gamelan group. The oldest Javanese gamelan group in Japan, Lambang Sari, was formed in 1976 by mainly students from Tokyo University of the Arts, while in Kansai area, west part of Japan, Darma Budaya was formed by students from Osaka University in 1979. Gamelan class for children was also held at "Children's Castle" (1985-2015, founded by Ministry of Health, Labor and Welfare) in Tokyo. Currently, many music colleges and foreign language colleges own a set of gamelan instruments (Java, Bali), Balinese gamelan group are also many. In addition, Kecak dance in Bali is taught in music class in public education, and if you travel to Indonesia, you will probably listen to gamelan

music a lot for tourists. For these reasons, not a few Japanese have image of “gamelan music” when it comes to Indonesian music. However, it is almost unknown in both Japan and Indonesia that a set of gamelan instruments was brought from Kasultanan Yogyakarta to Japan in 1940 by Ichizo Kobayashi, Minister of Commerce and Industry at that time, about 30 years before Rama Sas and others introduced Javanese music and dance in Osaka. Kobayashi got the gamelan instruments when he was dispatched to Java as a head of special envoy of second economic negotiations group, and after returning to Japan, he used its instruments in his own professional theater company named *Takarazuka Revue* in 1941, 1952 and 1982, and it were also exhibited at a special exhibition at the National Museum of Ethnology in Osaka in 1999.

The purpose of this paper is to clarify the history of the gamelan instruments, how and whose gamelan instruments were brought to Japan in 1940 for the first time, through analyzing some articles at that time. This can contribute to clarifying the history of the introduction of gamelan instruments, prior to the introduction of gamelan music to Japan by Fumio Koizumi’s academic context from 1973. At the same time, I will mention the role that gamelan instruments played in deepening mutual understanding between the two countries, through analyzing how the gamelan instruments were used in the revue of *Takarazuka Revue* in 1941 and 1952, and how those instruments were introduced at the special exhibition of the National Museum of Ethnology in 1999.

2. Whose gamelan instruments were brought to Japan, and how was the process?

Ichizo Kobayashi (1873-1957) was born in Yamanashi Prefecture, near Tokyo, in 1873 and died at the age of 84. Kobayashi is known as the founder of *Hankyu Railway Corporation* (1907~) in Kansai centered in Osaka. The company has grown into the *Hankyu Hanshin Toho Group*, which own real estate, entertainment, department stores, hotels, etc., and very famous to this day. At the age of 67, Kobayashi was appointed as a special envoy of second economic negotiations named *Second Nichirankaisyo* by the Japanese government and went to Java in 1940.

The *Second Nichirankaisyo* was a delegation dispatched to Java in August 1940 to negotiate ask oil exports during the WWII. Although Kobayashi was not an official, but the Minister of Commerce and Industry at that time proposed to the Prime Minister to dispatch a private influential person, and Kobayashi was appointed as the Minister of Commerce and Industry of the Second Konoe Cabinet, and as the head of the *Second Nichirankaisyo* at the same time(□ 2012:37-38). At this time, Java was still in Dutch colonial era.

We could know about Kobayashi’s activities in Java through two books written by him, i.e. his private diary “Diary of delegation in the Netherland Indies” (later this diary was collected and published in *Diary of Kobayashi Ichizou* in 1991) and “*Looking at the Netherland Indies*” (published by *Tonan Shoin* in 1941).

“Diary of delegation in the Netherland Indies” was written from receiving a send-off ceremony at Tokyo on 30 August and left by ship from Moji Port (Kyusyu Island) on 2 September 1940, arrived in Batavia on 12 September, until returning to Japan on 1 November (Kobayashi 1940 : 474-482). However, this diary was mainly about Kobayashi’s analysis of the war situation, the stories of the people he met, and the personal letter addressed to the Japanese Foreign Minister. He wrote about the music and dance only in diary on 16 October below this.

“Receiving invitation by Japanese, from 7 pm at his house, I enjoyed famous Balinese dance, a song of Sunda singing by beautiful woman, a local orchestra and an old story. I am grateful that I was given the opportunity to enjoy music and dance. It was the first time that I enjoy such an interesting music and dance since I came to Java, and it’s probably the last time to enjoy them” (Kobayashi 1940 : 511-512).

Kobayashi seemed to listen to a local orchestra, but it was not written which region the orchestra was, and if the music was gamelan music.

On the other hand, in “*Looking at the Netherland Indies*” he wrote about Java by theme such as local customs, climate and rice cultivation, Japanese government’s attitude toward the Netherland Indies, but there was no description about music and dance. However, I suppose that Kobayashi made high evaluation about Java, because he praised the railways for being more comfortable to ride than in Japan, and for the development of Buitenzorg (now Bogor), and he wrote “Java is a paradise in the south, ...I’m ashamed of myself that I didn’t know such a paradise was in Asia until today (Kobayashi 1941 : 102) “

Although two of the writing above by Kobayashi did not mention both the gamelan instruments and gamelan music, I could find some descriptions of the gamelan instruments on newspapers and magazines at that time.

How did Kobayashi get and bring the gamelan instruments to Japan? First, I would like to clarify the original owner of the gamelan instruments. The following description was in the magazine at that time.

“This is beloved and treasured musical instruments possessed by son of the 6th King of Yogyakarta named Gusti Pangeran Hajipate Harijyopher, and it inherited by late King, Kanjeng Sultan”. (Katei Seikathu, published by Osaka Mainichi Newspapers in January 1941, pp. 58-59)

It was written that this is a beloved musical instruments of the 6th King of Yogyakarta’s son named Gusti Pangeran Hajipate Harijyopher (probably not an accurate spelling because I translate original Japanese character to Roman letters), and it was handed down to late Sultan. The prince of HBVI, that was HBVII, so it sure that the gamelan instruments were the property of HBVII.

I also found following some newspaper articles :

“The beloved musical instruments of King Spar VII of Java were sent to Takarazuka Revue as a souvenir of the South Sea from Ichizo Kobayashi, a special envoy of economic negotiations...”(Osaka Asahi Newspaper, 20 November 1940)
(King Spar is also not an accurate spelling)

“On the 19 morning, the beloved orchestral instruments of the King Spar VII of Java were delivered to the Takarazuka Revue as a souvenir from the Netherland Indies by Ichizou Kobayashi”. (Osaka Mainichi Newspaper, 20 November 1940)

The above two articles clearly states the original owner of the gamelan instruments was Sultan VII (although *Sultan* was written *Spar*). However, since HBVII passed away in 1921, I could suppose that the gamelan instruments were placed in the court or was in the descendants, but there was no articles to reveal it.

Then, how was the process Kobayashi got the gamelan instruments? I could find following description in the newspaper.

“(a set of musical instruments) were presented by Tokushichi Nomura, founder of Nomura East India Co., Ltd.” (Osaka Mainichi Newspaper, 20 November 1940)

Currently, “Nomura East India Co., Ltd” has developed as a big group company centered on Nomura Securities, and Tokushichi Nomura (1878-1945) is its founder. From above, we know

that Nomura mediated the gamelan instruments to Kobayashi, but it is still not clear how Nomura obtained the gamelan instruments. In the newspaper above, the word “endow” (*kizou* in Japanese) was used, which means “to give a relatively high valued item” in Japanese, and if this is accurate information, Nomura gave the gamelan instruments to Kobayashi, that is, Kobayashi was given it but did not buy it.

Nomura ran a farm and rubber refinery in Borneo, and a palm and coffee plantation in Sumatra in the 1920s. I could suppose that Nomura either purchased, or was given the gamelan instruments from a descendant of HBVII or from a close person with royal family, but no other material was found to reveal the details. The above are the existing newspapers and magazine articles about the gamelan instruments.

Regarding the type and number of the gamelan instruments, I could find a picture of the gamelan instruments when it just arrived in Japan in the magazine “Home and Life” (picture 1). According to that picture, the gamelan instruments are Slendro set, there are 1 gong, 3 kempul, 5 kenong, 3 bonang, 5 saron, 1 slenthem, 1 gender, 2 gendang, 1 gambang and 1 suling (maybe some instruments were not took in the photo).



picture 1

(*Home and Life*, Osaka Mainichi Newspaper company, January 1941, pp.58-59)

Then, when was the production time of the gamelan instruments? There was no description in the Japanese article. I asked my friend of gamelan player (graduated ISI Yogyakarta, born in Yogyakarta) if the photo shows the production time of the gamelan instruments, from the shape of the instruments or the decoration of the wooden frame. He answered it was unknown (5 February 2022, my personal mail). However, I think the gamelan instruments are of fairly good quality in my experience of playing it at National Museum of Ethnology from 1999 to 2000 (I will describe about this later).

From this chapter, I could say that the gamelan instruments brought to Japan in 1940 was a slendro set, original owner was HBVII and was obtained by Ichizo Kobayashi through Tokushichi Nomura.

3. Using the gamelan instruments in *Takarazuka Revue* in 1941

Kobayashi presented the gamelan instruments to the *Takarazuka Revue*. *Takarazuka Revue* is a professional theater company founded by Kobayashi in 1914 as a “theater company that the whole

family can enjoy with peace of mind,” and is still very popular and has many enthusiastic fans. The uniqueness of *Takarazuka Revue* is a theater company consisting of only unmarried women, and women play the role of men. Playing a male role by women is exactly opposite of Wayang Wong in the colonial era. The motto of *Takarazuka Revue* is “Modesty, Fairness and Grace”, which means “take lessons diligently, fill the beautiful stage with beautiful songs and dances, always don’t forget to be polite as a woman and as a member of society”. According to the *Takarazuka Revue*’s official website, this motto was given by Kobayashi⁶.

Then, what was the reaction of the Japanese who saw the gamelan instruments for the first time, and was it possible to play the gamelan for them? Their reaction was described in some newspaper article as follows.

“gorgeous instruments that are not only rare as instruments but also have antique value... You will be able to enjoy some tropical high-pitched Javanese music, and South Sea rhythms similar to Japanese gagaku and noh”. (Osaka Mainichi Newspaper, 20 November 1940)

“Many musicians and actresses of Takarazuka Revue visited the second floor of the sales department where the instruments are displayed one after another, and they enjoyed trying to hit and play it, but no one knows what is a name of each instrument and how to play it. They are waiting for a letter which will teach how to play it” (Osaka Asahi Newspaper, 20 November 1940)

It seems that the Japanese found the gamelan instruments as “rare thing”, “antique”, “luxury” and “tropical”. However, no one knew how to play it, as the picture 1 above (upper right) shows an actress standing in front of bonang with the pluck of the saron. But, it seems they intended to play the gamelan instruments on stage, as the following article shows.

“The musicians of *Takarazuka Revue* have plan to learn how to play the gamelan instruments by dancer Teiko Ito, in order to introduce the gamelan instruments and the Netherland Indies” (Osaka Mainichi Shimbun, 20 November 1940).

Teiko Ito is a Japanese dancer born in New York, who stayed in India, Thailand, and Indonesia (Java, Sumatra) for about half a year on her way back to Japan in 1937 and learned dance in each places (Umeda 1997 : 11). But it is impossible for her to learn gamelan music in a such short period of time.

Takatomo Kurosawa(1895-1987), a musicologist who studied at the Tokyo Music School (later Tokyo University of the Arts), was the first researcher to introduce Southeast Asian music including gamelan music in Japan. According to his diary, he visited Southeast Asia (Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia) from February to June 1939. The following is his diary in Yogyakarta on 11 to 13 May (Umeda 1997 : 104- 107).

“At 4:30, I visited Mr. RM Soesjodiningrat’s spacious house, who was introduced by Mr. Saito’s clerk in Batavia. He came out friendly and told me that he stayed in Japan for about 4 months, and you can see the dance and music rehearsal at the dance school on Saturdays and Sundays, but no rehearsal today. Then, I went to the dance school at Mr. GP Haris Tedjokoesoemo’s house where a set of gamelan instruments are located. There, I listened explanation, i.e. about many musical instruments, Javanese music have two scales, slendro (major key) and pelog (minor key), and other things (7:30) “

According to his diary, Kurosawa was in Surabaya on the next Sunday, so he did not listen to gamelan music nor watch dance rehearsal. That diary during his stay in Yogyakarta are only the above, and neither how to play gamelan nor dance were written.

As I mentioned above, Teiko Ito could not master gamelan music and dance because her stay in Java was short, and Kurosawa's diary did not mention how to play gamelan music and dance, I suppose that the musicians of *Takarazuka Revue* could not play gamelan music as it were in Java at their revue performance in 1941.

Then, for what purpose did the *Takarazuka Revue* use the gamelan instruments in 1941? In *Takarazuka Revue*, a revue titled "*Onna hachimansen*" (means Woman *Hachimansen*) was performed in 1941, and they used gamelan instruments at that time. I found the following newspaper articles.

"Lyrics in memory of Netherland Indies written by Ichizo Kobayashi, and the musical instruments from the Kingdom of Java will be performed at *Takarazuka Revue* on October ("Song written by Kobayashi and a set of musical instruments play a role for *Nanshin-ron*", Osaka Asahi Newspaper, 25 September 1941)

"(*Onna Hachimansen* is) a story of a naval female soldier aiming for the south" (*Toho*, January 1941, pp. 28-31)

"Ichizo Kobayashi support *Nanshin-ron* policy by playing "*Onna Hachimansen*" that depicts the pioneers of naval women who aims to south" (Osaka Asahi Newspaper, 25 September 1941)

From the above, I suppose that *Takarazuka Revue* performed "*Onna Hachimansen*" in order to support the *Nanshin-ron* policy. *Nanshin-ron* policy is pre-WWII idea that Japan should take a leadership in economic, political, and military power in the Asia area including Southeast Asia, and Kobayashi's visit to Java in 1940 was a part of this policy. I could not find the libretto of "*Onna Hachimansen*", however I strongly suppose that it was likely to describe brave woman who made a foray to south. The title of above article "Lyric written by Kobayashi and a set of instruments play a role for *Nanshin-ron* policy" would support my supposition. Therefore, it is presumed that the purpose of using the gamelan instruments in the *Takarazuka Revue* in 1941 was merely to create a tropical atmosphere to support *Nanshin-ron* policy, not for making friendship or understanding Javanese culture, but reflecting the political situation at that time.

However, I add that Kobayashi did not seem to actively support *Nanshin-ron* policy in personal, because he wrote that it was possible and necessary to keep good relationship between the Netherland Indies and Japan by conducting economic activities in "*Looking at the Netherland Indies*" (Kobayashi 1941 : 155).

4. "Penari Melati ; Penari Java" in *Takarazuka Revue* in 1952

4.1. The story of "Penari Melati ; Penari Java"

After the WWII, using of the gamelan instruments in *Takarazuka Revue* changed, they attempted to understand Javanese culture, gamelan music and dance. We could see this change in Grand scale revue "Penari Melati - Penari Java" in October 1952, which took four hours to perform. The story depicts some dancers in a court in Java (fictional court, not Yogyakarta court nor Surakarta court), trying to attain independence from the colonial government. As many as 85 actresses played the revue including Hanayo Sumi, Hitomi Kuroki, and Kaoru Yachigusa. Later, they were very active on other theater company or TV and became famous as successful actresses.

I will briefly introduce the story of “Penari Melati - Penari Java” published in the magazine *Kageki* (December 1952 pp.27-54) .

“Penari Melati – Penari Java”

Main characters;

Adinan (court dancer)

Arvia (court dancer, Adinan and Arvia are couple)

Tamron (Javanese Dutch detective)

Queen

Osman(Arvia’s younger brother)

Amina(Tamron’s younger sister)

scene 1

prologue; performed srimpi dance

scene 2

Bedhaya and srimpi dance are danced to gamelan music at a certain court in Java. After dancing, two of the dancers ask for funding for Indonesian independent movement. Suddenly, Paul, Dutch colonial police chief, and Tamron entered the court and arrest the two dancers. Tamron is Javanese, so he feels depressed to arrest his compatriots. The king tells Paul that he is happy with the protection of the Dutch colonial government, but the queen disagrees internally. Adinan and Arvia start dancing to gamelan music. Paul is fascinated by the beauty of Arvia.

scene 3

Tamron stops the queen to tell that Adinan is the leader of nationalists, and he is dangerous to the court. Adinan, who pass by chance, argues to Tamron that he is not such a person. The queen tells Adinan that she shares his desire to be independent, but refrains from acting lightly and endure.

scene 4

Several couples are dancing at a square in front of a waterfall. When Adinan and Arvia are bathing in the waterfall, Adinan is called by his compatriots who want independence. Although Arvia stops Adinan, he leaves with them. Arvia feels uneasy and crying, and tells the queen the situation about him just happening. They both pray to God that nothing will happen on him in front of a waterfall.

scene 5

Some nationalists ask for funding for Indonesian independence movement in a city at night. Osman, Arvia’s younger brother, and Amina, Osman’s girlfriend, appear. And then, some police officers come in and the crowd disappears quickly. Osman tells Amina that I am nationalist and you will be in dangerous if you are close to me, so you have to keep distant from me.

scene 6

Some nationalists are holding meeting, both Osman and Amina also join late. Adinan asks Amina to go to see Arvia and come together to the festival at the forest tomorrow.

scene 7 and 8

In the morning, at the forest. Arvia and Amina leave from the court and head to the forest. Tamron and some policemen follow them silently.

scene 9

At the festival in the forest, a meeting is held by nationalists behind the festival secretly.

People are enjoying their favorite dances to gamelan music, including Balinese dance. At the climax of the festival, Tamron and the policemen honk and fire suddenly, and some people fall down.

scene10

Adinan and Arvia are hiding in the shadows. Some people, perhaps who do not know the incident, are still dancing to gamelan music.

scene 11

Osman and Amin are dancing at a pub.

scene 12

The king and queen are forced by the Dutch colonial police chief to summon nationalists and persuade them to be arrested without resistance, and finally the king and queen obey orders as their heart were about to tear.

scene 13

Meanwhile, Adinan and Arvia are fleeing to the southern island made of coral reefs. However, Tamron finds their place. Suddenly, a big storm hits them and Tamron falls into the sea. Adinan jumps into the sea and saves Tamron.

scene 14 and 15

Tamron is being cared for by Arvia. Tamron tells Arvia, while catching back a sob, that Adinan is my lifesaver but I have to arrest him because I am a detective on the colonial government side. Listening to that, Arvia try to kill Tamron, but Adinan stops her. Tamron is torn between debt to Adinan and his duty as a colonial detective, and cry loudly.

scene16

Wayang kulit and Wayang Wong are playing as if express Tamron's feeling of bitterness.

scene 17

Amina helps Osman in prison. Meanwhile, Kartini, Tamron's sister, visits the southern island. She had got engaged but didn't have the money to buy her bridal dress. Tamron wants to buy a bridal dress for her with bounty for arresting Adinan, but even divulges he wants to quit the detective if he hands over his compatriots to the colonial government. Kartini tells him to quit detective, she doesn't want to bridal dress. Tamron feels more pitiful about her.

(scene 18 is not written)

scene 19

Osman goes to help Adinan, who was deceived by a spy and taken away. Paul has long loved Arvia, and Arvia agrees to become Paul's local wife in exchange for helping Adinan.

scene 20

Suddenly, Adinan appears at the wedding ceremony of Paul and Arvia and takes Arvia (the bride) away. At that time, on a sudden, the news came in that people won Indonesian independence. The queen demands the police chief to unprison the nationalists.

scene 21

Tamron chases Adinan and Arvia. They still do not know the sudden news, Indonesian independence.

scene22

Adinan and Arvia try to escape to a consulate in a certain country, but Arvia is shot by Tamron, who received repeated order by his boss, just before rush to the consulate. Adinan try to run up the stairs to the consulate with fallen Arvia. Tamron begs his boss not to shoot them again, but Adinan and Arvia are shot by him. At the end, they die after hearing the news of Indonesian independence.

scene 23

People are celebrating Indonesian independence in the square.

~Fin.~

4.2. Understanding of Japanese about Indonesian culture

The playwright of “Penari Melati ; Penari Java” is Kazuo Kikuta(1908-1973), who is famous for writing more than 1,000 screenplays in his lifetime. Kikuta explained why he picked up Java as theme in *Takarazuka Revue* as follows;

“We Japanese do not know much Asian countries even though Japan is in Asia. We were interested in Asian countries during the WWII, but lost interest after the war. I don’t think it’s good. I covered Java in *Takarazuka Revue*, because I wanted to introduce manners and customs of the southern peoples as a same Asian people, without thinking of the idea of Great East Asia Mutual Prosperity Area during the WWII. Recently, more and more rich people are travelling to America and Europe. However, if I earn a lot of money, I would like to go to the southern country first to get to know Asia”. (*Kageki* No. 10, 1952, pp.46)

Kikuta states that Japanese should know the manners and customs of Asian peoples, changing from *nanshin-ron* policy. However, at that time, Japanese had little knowledge of Javanese culture. Therefore, Kikuta held a roundtable discussion to learn Indonesian culture from Indonesians. We could know how Kikuta tried to create the revue by arranging Javanese culture so that Japanese people could easily understand it from the content discussed at the roundtable discussion published in a magazine (*Kageki* October 1952, pp.46-53). The participants in the roundtable discussion were the following people.

(Indonesian)

Siti Norari: Former Bintang Surabaya troupe singer

Mohammed Amin: Husband of Siti Norari

Sharif A. Sagara: Kyoto University graduate, office worker

Burkadan: Kyoto University graduate, company owner

Kikuta: Scriptwriter

(Japanese)

Ogawa: Company owner

Yamane: Composer

Nakai: Composer

Tamada: Choreographer

Deguchi: Choreographer

(Indonesian names are not accurate because I translate Japanese characters into the alphabet)

The above participants had the following discussions about music and dance.

Interviewer : Will Javanese dance and music be played just as it is play in Java?

Tamada : We will not show the music and dance for Javanese, so we learn the Javanese dance and music as reference, but we will make it into a revue.

Nakai : The music is not a gamelan music in Western music style version, but a style like Ravel and Stravinsky based on Javanese folk songs (p59).

- Kikuta : I expect that we learn Javanese music and dance from Javanese, and then arrange it into a revue(P60).
- Nakai : If the Javanese music and dance are played as it is in Java, Japanese get bored, so we use music and dance to create a Javanese atmosphere.
- Kikuta : I got tired of listening to half of the gamelan music on vinyl(p60) (omission)
- Kikuta : Let's use Javanese classical dances as accurately as possible(p61)

From some part of the discussion above, we could understand that the composers and choreographers intended to try to create a review in the style of the *Takarazuka Revue* based on their learning on Javanese gamelan music and classical dance. Kikuta listened to Gamelan music on vinyl, and Siti (the former Bintan Surabaya singer) also participated in the revue as a singer, so I could suppose that Javanese culture reproduced in no small measure. According to the rough story introduced above, music and dance were used at least in the following scenes.

- scene 1 : using srimpi dance
- scene 2 : srimpi and budhaya dance are performed to gamelan music
Adinan and Arvia start dancing to gamelan music at the command of the king
- scene 9 : people enjoy dancing their favorite dances, including Balinese dance, to gamelan music.
- scene 10 : some people are dancing to the loud gamelan
- scene 16 : play wayang wong and shadow play depicting Tamron's sufferance
(I think Javanese music and dance were also used other than the above scenes, because the story I introduced above is not a script for actress but rough story to introduce story for audience in magazine "*Takarazuka Revue's fan*")

Although Kikuta told that they would arrange gamelan music, I think that the music played in the stage in 1952 could not be called "Javanese gamelan music", but it is definitely that the audience could feel a part of true Javanese culture because "true sound" were produced by playing the gamelan instruments from Kasultanan Yogyakarta. According to the roundtable discussion above (pp.58-59), Kroncong seemed to be sung, but the title of the song and the lyric were not mentioned. (There is a possibility that Bengawan Solo was sung, because it was sung by professional singer Toshi Matsuda and became very popular in 1947 in Japan, but I don't know exactly)

About costumes, seeing the picture (in *Kageki*, October 1952), we can see that the Javanese traditional clothes were used and brilliantly recreated in line with *Takarazuka Revue's* art style (see picture 2 and 3). The actresses, who played Javanese, wear *kain batik* around their waists. Since it is a black-and-white picture, I do not know exactly, but I could suppose they wore Yogyakarta style batik because Sagara (Javanese singer) told that "The characteristic of Javanese batik is to use white and brown color" at the roundtable discussion(p.62). Also, in the picture of the scene 3(see picture 4), we can see that the queen wore Javanese *kebaya*, the queen and Arvina wore *sanggul*, Javanese wig for a court, and Adinan wore a costume of warlord in Wayang Wong. Borobudur Temple was used as a stage backdrop (see picture 2), which made us feel strange, but I suppose the backdrop of Borobudur Temple was used just to create Javanese atmosphere.



Picture 2 (*Kageki*, October 1952, pp.95-96)



Picture 3 (*Kageki*, October 1952, pp.97-98)



Picture 4 (*Kageki*, October 1952, pp.103-104)

I don't think Kikuta knew the Javanese literary taste, but interestingly, "Penari Melati - Penari Java" depict the complex relationships and affections that Javanese people like, like Mahabarata and Ramayana, and we could say that the story closely resembles Javanese literary tastes. For example, the king and queen take the strong order from the Dutch police, and with anguish, they persuaded Adinan to be arrested in the scene 12, or Tamron has to arrest Adinan even though he

was saved by Adinan in the scene 13, and Tamron sobs because he has to arrest his lifesaver Adinan in the scene 14 and 15.

Then, how was the Japanese reaction to the “Penari Melati - Penari Java”, which suffers from such complicated relationships and affection? The following diary, published in the magazine *KAGEKI*, of an actress who took part in the revue shows that both the audience and the actress were emotionally empathize this tearful story (*Kageki*, October 1952 pp.58-66).

“In the scene where the Dutch police officer and his three subordinates shoot Adinan and Arvia, some audience cried from the center of the audience seat, “aiiiee, how cruel they are”, “don’t shoot, don’t shoot, please don’t shoooot!”. Takarazuka actresses of my friend also said to me with sob, red crying eyes and tears, “I hate you, I really hate you for doing such a cruel things”. I was really in trouble.”(p59)

“(When I look at the stage) I’m getting sad and tears come out. Even at the rehearsal, Mr. Kikuta repeatedly told us that you do not cry, but everyone cried and spilled tears when the rehearsal finished. Some actress did rehearsal while crying(p64).

In the same diary (p65), she wrote that the actresses did rehearsal very hard for “Penari Melati” after finishing the other revue on the stage, and they did rehearsal from 6 o’clock in the evening to the next morning on September 23 when just before the first day for “Penari Melati”, and they did rehearsal almost all night on 26.

From the description above, we could see that when “Penari Melati - Penari Java” was performed at the *Takarazuka Revue* in 1952, Kikuta, composers, choreographers, and other performers actively tried to understand Indonesian culture, especially Javanese culture and reflect it on the revue. And also from the diary of the actress *Takarazuka Revue*, both the audience and the actress were absorbed in the grand revue of about 4 hours, or and the actresses were very enthusiastic about the revue, like did rehearsal almost all night. Of course, the revue on the stage of *Takarazuka Revue* was not expression of true Javanese culture, however the audience were able to listen to the true sound of the gamelan instruments and absorbed in the story that express suffering from complicated relationships and affections like Javanese people feel. Therefore, we could say that playing “Penari Melati - Penari Java” was the earliest event when Japanese people (although not many Japanese) began to understand Indonesian culture, and the gamelan instruments from Kasultanan Yogyakarta contributed it so much.

5. The Gamelan Instruments at the special exhibition in the National Museum of Ethnology

After using by Takarazuka Revue, the gamelan instruments had been stored at the treasure house in Hankyu Culture Foundation, cultural division of the Hankyu Group mainly run by the descendants of Kobayashi, and Professor Nakagawa took it back to Java to repair and tuning in 1997. After coming back to Japan, soon the gamelan instruments were exhibited at the special exhibition “Cross-border Ethnic Culture” (9 September 1999 - 11 January 2000) in the National Museum of Ethnology founded in 1970 in Osaka. At first, the exhibits in the museum were collecting of exhibited item at the Osaka Expo in 1970, they continue to collect exhibits related to ethnic culture from all over the world, and now they have 345,000 collections. The number of this collections is the largest ethnographic collections in the world since the late 20th century. In 1970, the art delegation from Indonesia performed various Indonesian culture in the large park where the National Museum of Ethnology is currently located.

The purpose of the special exhibition was to introduce that ethnic culture will not disappear due to globalization, but those culture have certain hidden power and are alive actively beyond the

border. There, various ethnic culture exhibited, for example, indigenous ethnic art living in the far north, tropics and deserts, Japanese traditional drums in the United States, Indian movies produced more than in Hollywood, various types of calendars from all over the world, and various languages. The Gamelan instruments from Kasultanan Yogyakarta were also exhibited. Although there are no captions left, I found the picture of gamelan instruments used on the cover page of monthly magazine *Gekkann Minpaku* published by the National Museum of Ethnology during the special exhibition(see picture 5).



Picture 5 (*Gekkann Minpaku*, October 1999, cover page)

The following explanation was on the second page.

“Gamelan is a traditional ensemble of Java and Bali in Indonesia, consisting of a set of gongs in various sizes, metallophone with metal keyboards, xylophone, fiddle, drum, flute, and *koto*. Songs by women and men, shouts and clapping are also important elements of gamelan music”

After the exhibition began, some staff of the museum thought “it’s waste if the gamelan instruments are just exhibited, how about we play gamelan music, and have visitors listen to the sound of the instruments”. Then in November 1999, gamelan group named “Kembang Sari” was formed consisting of about 8 museum staff who like music. There were one researcher and graduate student studying gamelan music at the Tokyo University of the Arts, and they taught the members how to play gamelan music. I happened to be working in the museum, and joined a member of Kembang Sari.

Here, for the first time, the gamelan instruments Kobayashi brought and the knowledge of gamelan music that has spread in an academic context since 1970s’ had contact. With these two leaders, thSe members of Kembang Sari practiced gamelan music during lunch break and after working hours, and mastered *Cita-cita* and *Kebo Gira* piece. We were immediately fascinated by gamelan music, because the sound were very brilliant and profound, also the high quality bronze

instruments was looked very gorgeous. After some practice, we began workshop for visitors during the lunch break from 12:30 to 13:00 at the exhibition hall. There, the member of Kembang Sari played gamelan music first, and then they taught the visitors how to play the gamelan, finally played a music together.

After the closing of the special exhibition, the gamelan instruments were entrusted to Marga Sari (gamelan music group in Osaka), however Kembang Sari continued the workshop using other gamelan instruments in the museum every Wednesday during lunch break. In addition to workshop, Kembang Sari made uniform for *kebaya* and *salon*, participated in various activities inside and outside the museum. For example, inside the museum, Kembang Sari played gamelan music or held workshop to teach how to play gamelan at various events, such as events for children on summer and winter holidays, Christmas parties and “World Music Day”. On the other hands, outside the museum, Kembang Sari also participated in the following events.

“Mobile Museum” at Notogawa town (2 August 2000)

The National Museum of Ethnology held a mobile museum in Notogawa-cho, Shiga Prefecture (near Osaka), Kembang Sari held a gamelan workshop there. Participants were in various age groups including many children.

“*Sacred Sound, Gamelan*” by HEP Cram School (cultural event, at HEP Hall in Osaka 26 September 2001)

HEP Cram School was a cultural event hold regularly by HEP Hall, which was located in the center of Osaka and attracted many young people. At the event titled “Sacred Sound, Gamelan”, researcher at the National Museum of Ethnology introduced Indonesia and gamelan music, Kembang Sari played gamelan music. Many of the participants were adults. Special lecture in Kyoto Bunkyo University (no record of date, circa 2001)

Researcher at the National Museum of Ethnology gave a special lecture on Indonesian culture and gamelan music, and Kembang Sari played gamelan music.

From the description above, it could be said that when the gamelan instruments were used by *Takarazuka Revue*, the audience only listens to gamelan music that was arranged for audience in distance, while at the special exhibition of the National Museum of Ethnology, visitors could feel more familiar with gamelan music, because they could see and hear the sound of the gamelan instruments from very close, also visitors who attend the workshop could enjoy playing gamelan music. Above all, the visitors were very fortunate to hear the sound of very good gamelan instruments from Kasultanan Yogyakarta. Furthermore, the activities of Kembang Sari and the lectures about Indonesia and Gamelan music by a researcher provided an opportunity for the general public to understand Indonesian culture.

I was fascinated gamelan music by playing HBVII’s beloved gamelan instruments through activities of Kembang Sari, and went on to graduate school to research Yogyakarta court dance. I had lived in Yogyakarta for a total of about 5 years since 2003, and have been studying Javanese dance, music and culture. Now, the achievement of my research are utilized, for example I teach Indonesian language and culture at a university and show Yogyakarta court dance to my students. When my college student played Indonesian language drama “Calon Arang” in 2018 and “Telaga Bidadari” in 2019 at school festival, I taught them Javanese agreeable manners which I learned through life and dance lessons in Yogyakarta. It may not have been a coincidence that I learned Javanese culture while staying at the home of HBVII’s descendants.

6. Conclusion

In this paper, showing existing newspapers and magazine articles, I described that 1) Ichizo Kobayashi got a set of gamelan instruments through Nomura and brought it to Japan from Java in 1940, which was considered to be the first gamelan instruments to enter Japan, and it was HBVII's beloved gamelan instruments, 2) how to use the gamelan instruments *Takarazuka Revue* in before and after WW II, exhibition at special exhibition in the National Museum of Ethnology and the activities of Kembang Sari that was born there. The use of the gamelan instruments in "*Onna Hachimannsenn*" in *Takarazuka Revue* before WWII was not friendly to Indonesia, reflecting the political situation at that time. However, after WWII, in the "Penari Melati - Penari Java" performed in *Takarazuka Revue* in 1952, attitude of Japanese toward Asian countries before WWII changed completely, and Japanese actively tried to understand Indonesia and its culture, especially Javanese culture. As a result, the Javanese culture presented brilliantly, arranged as a review to make it easier for the Japanese to understand. Nevertheless, I think it was the first step for Japanese to know and understand Indonesian culture. And at the special exhibition at the National Museum of Ethnology in 1999, directly Japanese were able to see, hear and touch the gamelan instruments from Kasultanan Yogyakarta. Activities of Kembang Sari, such as weekly workshops and many performance in various events, would have been of great significance in that they provided an opportunity for the general public to get to know Indonesian culture.

I couldn't reveal the details of why the gamelan instruments were gave to Kobayashi and production time of it, because there was no articles left. I imagine, perhaps the motto of *Takarazuka Revue* "Modesty, Fairness and Grace" and the *irama* that is the essence of Javanese culture, connected the two in the invisible part. Kobayashi is also famous for his love of Japanese culture, especially the tea ceremony, Japanese culture respect for others like as Javanese culture. Is this also a coincidence? There is nothing to reveal this supposition, but it is certain that the gamelan instruments from Kasultanan Yogyakarta contributed to first understand of Japanese to Indonesian culture, which led to the strong friendship between Japan and Indonesia today.

- 1 Japanese government website, <https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/indonesia/data.html> (access on 14 December)
- 2 Japanese government website, https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/nyuukokukan_ri04_00018.html (access on 14 December)
- 3 Japanese government website, <https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/indonesia/data.html> (access on 14 December)
- 4 Japan Foundation website, https://jfac.jp/partners_kiseki/np.pdf (access on 28 December 2021)
- 5 Japan Foundation website, https://jfac.jp/partners_kiseki/np.pdf (access on 28 December 2021)
- 6 *Takarazuka Revue* official website https://kageki.hankyu.co.jp/fun/about_takarazuka.html (access 15 December 2021)

Reference material

[book]

Umeda Hideharu 1997

Tounan Ajia Ongakukikou (Southeast Asian music travelogue), Kurosawa Takatomo's diary edited by Umeda Hideharu, *Taikusya* Publishing, Japan

Kobayashi Ichizou 1940 (published 1991)

Diary of delegation in the Netherland Indies, in *Diary of Kobayashi Ichizou*, pp.473—520,
Hankyu Railway publishing, Japan

Kobayashi Ichizou 1941

Looking at the Netherland Indies, Tonan Shoin publisher, Japan

[magazine]

Katei Seikathu, January 1941, Osaka Mainichi Newspapers, pp. 58-59 *Toho*, January 1941,
Toho Co., Ltd. Division Publishing, Japan *Kageki*, November 1952, Takarazuka Creative
Arts publishing *Kageki*, October 1952, Takarazuka Creative Arts publishing
Kageki, December 1952, Takarazuka Creative Arts publishing
Gekkann Minpaku, October 1999, National Museum of Ethnology

張允貞 2012

「戦前期日本の海外資源確保と蘭領東インド石油—1940年の日蘭石油交渉と蘭印の対日
石油輸出方針を中心に—」社会経済史学 78-3, pp.29-45

[newspaper]

Osaka Asahi Newspaper, 20 November 1940

Osaka Asahi Newspaper, 25 September 1941

Osaka Mainichi Newspaper, 20 November 1940

TĒDHAK LOJI: PRAKTIK ‘KONSOLIDASI’ POLITIK HINGGA ESKALASI EKONOMI PADA PEMERINTAHAN SRI SULTAN HAMENGKU BUWONO VII

Fajar Wijanarko

Tepas Tandha Yekti | Keraton Yogyakarta

Widjanarko.fajar@gmail.com

Abstrak

Penghujung abad ke-19 menjadi periode emas dari Keraton Yogyakarta. Pasalnya, kala itu keraton yang berada di bawah pemerintahan Sultan Hamengku Buwana VII (1877-1921) membuka luas kesempatan investasi industri. Sosok sultan dengan pemikiran moderen menerjemahkan komunikasi politik sebagai bentuk kompromi-kompromi taktis dalam menentukan kebijakan. Hal ini ditunjukkan dengan kebijakan sewa tanah lungguh dengan sistem verklaring kepada para pengusana perkebunan. Tahun-tahun 1900an, pengusaha Eropa membidik komoditi unggulan dunia seperti kopi, indigo, tebu, hingga tembakau untuk dikembangkan di Yogyakarta. Hasilnya, di tanah kerajaan berdiri 33 perusahaan perkebunan dan 17 pabrik gula yang mendongkrak perekonomian berbagai pihak saat itu. Perkembangan ini kemudian menarik minat sultan untuk menanamkan modal dalam industri tersebut. Dari investasi yang ditanamkan sultan, keraton memperoleh keuntungan ekonomi yang mengalir ke dalam kas kerajaan. Dari keuntungan ini, sultan membangun akses bisnis dengan membuat jalur kereta api beserta stasiun-stasiun pemberhentiannya. Di bidang pendidikan, sultan membangun banyak sekolah partikelir sekaligus memasok pendanaannya. Pada abad ini, kota kerajaan disulap menjadi metropolis didukung dengan kehadiran masyarakat multi etnis.

Interaksi sultan dengan Pemerintah Kolonial tidak semata-mata ditunjukkan dengan kesepakatan politik. Hubungan yang terjalin antar 2 penguasa tersebut diwujudkan melalui kegiatan kunjungan kenegaraan yang dikenal dengan istilah tĒdhak loji atau berkunjung ke kediaman residen. Momentum ini sejatinya telah dilakukan sejak pemerintahan sultan-sultan sebelumnya. Akan tetapi, momentum tĒdhak loji menjadi istimewa sebab Sultan Hamengku Buwana VII menempatkan peristiwa ini sebagai bagian dari upacara negara. Pada tanggal 1 Januari dan 31 Agustus, sultan melakukan pahargyan untuk hadir dan melakukan seremoni panjang menuju kediaman residen. Tanggal 1 Januari bertepatan dengan perayaan tahun baru, sementara tanggal 31 Agustus bertepatan dengan hari ulang tahun Ratu Wilhelmina.

Keteraturan dari peristiwa tersebut melahirkan protokol kenegaraan yang disusun antar kedua belah pihak. Di dalam catatan Pramutomo, peristiwa tĒdhak loji merupakan drama yang dikonstruksi melalui panggung negara, namun nuansa politis yang dihadirkan sangat kuat. Iring-iringan yang panjang disusun sedemikian rupa dengan melibatkan sejumlah elit istana seperti halnya para pangeran, patih, dan pejabat-pejabat di bawahnya. Tidak hanya para elit istana, tetapi seperangkat gamelan hingga para penari bedaya turut dalam rombongan ini.

Di dalam kompendium kekuasaan Jawa, peristiwa tĒdhak loji dimaknai sebagai abstraksi dari rumusan pola interaksi sosial antar penguasa. Geertz menjabarkan bahwa dalam konsep politik Barat, interaksi antar penguasa menjadi upaya dalam meneguhkan kekuasaan secara konkrit. Pada tahap ini, tidak mengherankan apabila dalam peristiwa tĒdhak loji, sultan memerintahkan seluruh elemen kenegaraannya untuk turut serta bahkan menjadikan momentum ini bagian dari pisowanan ageng Agustusan. Elemen-elemen kenegaraan inilah yang mengamini kedaulatan Yogyakarta sebagai pemerintahan sekaligus potret sultan sebagai raja yang sah. Barthes melihat momentum

tédhak loji sebagai bagian dari status displai seorang sultan. Di sini, titik poin yang ditinjau adalah atribut kebesaran yang dibawa saat mengiringi sultan. Hampir semua elemen kekuasaan yang menyertai keabsahan seorang sultan dihadirkan pada momen tersebut. Potret ini begitu nyata ketika merujuk pada arsip litografi tédhak loji koleksi dari Museum Sonobudoyo.

Dari uraian singkat tersebut, tulisan ini selanjutnya akan memberi gambaran rinci mengenai kilas balik *tedhak loji* dari berbagai sumber babad. Di sisi lain konsolidasi politik yang dilakukan antara sultan dengan pemerintah Kolonial dipaparkan berdasarkan sumber arsip melalui metode penulisan sejarah dan filologi. Potret dari eskalasi ekonomi di Yogyakarta pada akhir abad ke-19 hingga paruh abad ke-20 turut menjadi pembahasan pada tulisan ini.

Kata Kunci: Tedhak Loji, Eskalasi Ekonomi, Keraton Yogyakarta, Kekuasaan Jawa.

A. PENDAHULUAN

Tédhak loji ‘*tédhak*: turun, melawat; *loji*: rumah besar, kediaman bangsa Walanda¹’ atau kunjungan ke kediaman residen bukan merupakan hal baru dalam hubungan politik antara keraton dengan Pemerintah Kolonial. Pasalnya dalam Babad Ngayogyakarta² (SK169) disebutkan bahwa Pangeran Adipati Anom, kelak Sultan Hamengku Buwana IV sudah terbiasa mengunjungi loji dengan rentetan upacara yang menyertainya.

Tambur suling salumpret munyatri, pra sěntana ngrumiyini lampah, Jěng Pangran Dipati Anom, ing ngloji sampun rawuh, kurmat mriyěm ping sanga muni, juměgur kadi gėlap, sing kreta wus tumrun, Jěng Tuwan Ministěr Garnam, tansah kanthen asta lawan Kanjěng Gusti, měthuk kang pra sěntana (Dhandhanggula: 24).

Terjemahan:

Tambur, seruling, dan terompet berbunyi tiga kali. Para sentana mendahului perjalanan. Kanjeng Adipati Anom sudah tiba di loji, hormat meriam berbunyi sembilan kali, menggeleгар sebagai halilintar. Dari kereta sudah turun, Kanjeng Minister Garnam selalu bergandeng tangan dengan Kanjeng Gusti. Yang menjemput adalah para sentana.

Di dalam kunjungan tersebut, Tuan Garnam sebagai residen di Yogyakarta mengumumkan maklumat dari Gubernur Jenderal Sir Thomas Raffles di Batavia. Maklumat tersebut berisi arahan Raffles agar setelah Sultan Hamengku Buwono III wafat, maka Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Mangkunegara yang akan menggantikannya dan bergelar Sultan Hamengku Buwana senapati perang Sayidina Panatagama, Kalifatollah yang bertakhta keempat ‘*Sultan Měngkubuwana Senapati Ngapupuh Sayiddina Panatagami Kalipaholah ingkang juměněng ping catur ngrěnggani Ngayogyakarta*’ (Dhandhanggula: 33). Pada akhir maklumat Tuan Garnam menekankan bahwa bagi yang tidak menuruti maklumat ini akan menjadi musuh dari pemerintahan Gubernur Jendral Raffles.

Kedekatan Sultan Hamengku Buwana IV dengan Pemerintah Kolonial nampak terjalin begitu apik. Perihal ini tidak hanya mewujud dalam komunikasi politik yang berbuah aturan serta kebijakan, melainkan pada berbagai atribut simbol yang menyertai. Persoalan simbol ini kemudian

1 Poerwadarminta mendefinisikan peristiwa tédhak loji sebagai seremoni kunjungan sultan ke kediaman Gubernur ‘Gupernuran’ saat peristiwa ulang tahun Srimaharaja Putri Wilhelmina (Poerwadarminta, 1939: 598).
2 Sěrat Babad kawiwitan djuměngipoen Kanjeng Sultan kaping 4 dumugi Kanjeng Sultan kaping 5 ing Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat. Babad Ngayogyakarta (SK 169) Koleksi Museum Sonobudoyo Yogyakarta.

berelasi dengan simbol-simbol kekuasaan yang menandai sebuah status. Sunardi (2004: 45) melihat hubungan simbol dengan kekuasaan tidak direkonstruksi secara kasat mata, melainkan melalui hubungan metafisika yang dekat dengan konteks sosial-budaya. Konteks simbol yang merupakan pengaruh Kolonial dalam atribut sultan salah satunya terlihat pada tata busana. Kenyataan ini ditunjukkan langsung oleh Sultan Hamengku Buwana IV yang lebih sering menggunakan busana *cara wĕlanda* dari pada busana *kĕprabon* kecuali saat *siniwaka* atau saat menggelar upacara besar di Bangsal Manguntur Tangkil, sebuah bangunan yang berada di kompleks Siti Hinggil³. Sementara itu, busana *cara wĕlanda* yang dimaksud dalam informasi babad merujuk pada busana seperti yang dikenakan oleh Marsekal Daendels, sebuah busana *montering* yang merupakan hadiah dari negara. Di dalam Babad Ngayogyakarta (PBA 280) diuraikan bahwa busana tersebut berwarna senada, dilengkapi dengan topi hitam dengan border emas serta berkancing emas pekat yang menjadi ciri khas busana Maharaja Nederlan⁴ (Sinom: 12-13)⁵.

Konteks saling mempengaruhi dalam wujud budaya material kemudian berkembang pada praktik-praktik politik. *Tĕdhak loji* yang semula sebagai praktik anjangsana kenegaraan lantas berubah menjadi komunikasi kenegaraan yang saling berbalas, dengan berbagai kesepakatan yang dihasilkan. Kondisi ini diperkuat pada periode Sultan Hamengku Buwono VI ketika pertanian komersial dan ekonomi di Yogyakarta mengalami peningkatan. Di samping komoditi kopi, nila, tebu, dan tembakau yang menjadi primadona di tanah kerajaan, praktik persewaan tanah menjadi salah satu pemasukan bagi kas kerajaan. Pada kasus kopi, Yogyakarta mampu memasok sebanyak 1.362 pikul pada Pemerintah Kolonial tahun 1837. Pasokan tersebut mengalami peningkatan pada tahun 1860 menjadi 1500 pikul (Houben, 2002b: 557). Dari total pikulan tersebut, setidaknya *f.* 7.34 – *f.* 10.34 diterima sultan sebagai hasil dari penjualan kopi, sesuai dengan fluktuasi harga kopi di pasar dunia (Houben, 2002b: 555). Melihat potensi lahan dan pertumbuhan komoditi komersil, praktik persewaan tanah selanjutnya masif terjadi di Yogyakarta. Pada tahun 1870, hubungan sosial di tingkat pedesaan yang sermula dari sistem sosial agraris-feodalistik berubah menjadi hubungan sosial agraris-kapotalistik. Tuan-tuan tanah di desa menyewakan tanah *lungguh* untuk kepentingan kapital. Perubahan sistem sosial ini rupanya diimbangi dengan data bahwa 381 *jung* di Yogyakarta telah disewa oleh 115 penyewa tanah Eropa untuk membudidayakan tanaman tembakau, kopi, dan produk perkebunan lainnya (Margana, dkk. 2018: 89-90).

Melihat data sejarah-sosial tersebut, upaya keraton dan Pemerintah Kolonial dalam membangun ekonomi sosial di Yogyakarta dapat dikatakan berhasil. Dampak praktis yang diperoleh antara sultan dengan residen adalah terisinya kas negara, selain pertumbuhan sosial dan masyarakat yang semakin kompleks, industrialisasi kota, hingga terbukanya berbagai akses pendidikan. Situasi ini kemudian menjadi kerangka yang jelas untuk menggelar seremoni seremoni *tĕdhak loji* tidak hanya pada agenda-agenda khusus. Di luar hubungan bilateral antara sultan dengan Pemerintah Kolonial, rupanya kunjungan ke kediaman residen juga menjadi ajang sultan untuk menunjukkan posisi strategis sebagai kepala negara. Pramutomo (2009) dalam pembacaannya atas Tari, Seremoni, dan Politik Kolonial memaknai *tĕdhak loji* sebagai drama yang dikonstruksi melalui panggung negara dengan nuansa politis yang kuat. Pada seremoni ini, kehadiran sultan sebagai raja sekaligus simbol negara erat dengan status displai. Bagian ini berasosiasi pada status puncak dari sultan dengan berbagai hiasan penuh makna yang melekat. Di sisi lain, Margana, dkk

3 dereng wonten Narendra, pra sobat trus galihipun, gejawĕ Sultan kaping pat. sangking seneng penggaliye, malah krep ngagem busana, iya cara Wĕlanda, awis busana keprabon, gejawĕ yen siniwaka.

4 Ministĕr kĕdah busana, angagĕma kang monterĕng, sangking Nagri Wĕlandi, punika pĕparingipun, Maharaja Nedĕrlan, dene warnine monterĕng, topi cĕmĕng binaludir ing kĕncana. Lan rasukan kang rinĕngga, baludir mas pinalisir, ing jangga dumugi jaja, lambung asta kanan kering, kancing kru mas ciniri, agĕmanira Jĕng Sang Prabu/ Maharaja Nedĕrlan (Sinom I: 12-13)

5 Pola aturan busana ini kemudian menjadi aturan baku dalam tata aturan *tĕdhak loji* hingga pemerintahan Sultan Hamengku Buwono IX. Pada arsip aturan upacara *tĕdhak loji* KRT Wiroguno berjudul pranatan lampah-lampah Wijos Dalem Doemateng Lodji Goepernoeran (Openbaar Gehoor), 1 September 1941 dicatat bahwa apabila seorang pangeran belum memiliki busana jendralan atau cara wlandi, maka dapat mengenakan busana sikepan bludiran dengan kampuh dan berbagai kelengkapan busana kebesaran (Pramutomo, 2009: 158).

(2018) dalam pendekatannya terhadap Sultan Hamengku Buwono VII dan Kedhaton Ambarrukmo memberi gambaran jelas mengenai perubahan pola sosial-politik yang terjadi pada paruh abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Di buku ini, potret gesekan politik di istana, alih fungsi tanah-tanah kas desa, hingga pertumbuhan ekonomi begitu kentara dipaparkan. Puncak pertumbuhan ekonomi ditandai dengan adanya 33 perusahaan perkebunan, 17 pabrik gula, dan dibangunnya jalur kereta api sebagai sarana pendukung industri.

Apriyadi (2021) turut hadir dalam penelitian mengenai Sultan Hamengku Buwana VII dalam kerangka protokol tata negara. Ulasannya mengenai Protokol Penyambutan dan Penghormatan Tamu di Keraton Yogyakarta pada periode tersebut membawa data penting mengenai keabsahan raja sebagai representasi negara. Penelitian ini secara praktis merujuk pada sumber primer berupa naskah berjudul *Koepija Djendralan*. Beberapa penelitian terdahulu rupanya tidak menyoroti peristiwa *têdhak loji* sebagai media konsolidasi sultan terhadap kekuasaan Kolonial. Padahal jika merujuk pada definisi leksikal Poerwadarminta (1939: 598), momentum *têdhak loji* digelar atas diinisiasi sultan sebagai bentuk perayaan kelahiran Ratu Wilhelmina ‘*miyos mênyang Gupênuran (yên kabênêr wiyosan dalêm Srimaharaja Putri)*. Akan tetapi, peristiwa tersebut dibarengi dengan upaya mempererat ikatan sosial politik. Muara dari rentetan peristiwa ini adalah eskalasi ekonomi di Yogyakarta.

B. METODE DAN HASIL PENELITIAN

Praktik penelitian sejarah seperti halnya diungkapkan oleh Kuntowijoyo (2005: 91) dilakukan melalui 5 tahapan. Berawal dari pemilihan topik, pengumpulan sumber, verifikasi (kritik sejarah dan keabsahan sumber), verifikasi (analisa) dan historiografi atau penulisan sejarah. Ismaun (1992: 40) sedikit berbeda dengan Kuntowijoyo dalam melakukan tahapan penelitian sejarah. Tahapan yang dilakukan oleh Ismaun bermula dari pembacaan heuristik sumber, kemudian kritik dan analisis, interpretasi data serta fakta, dan diakhiri dengan historiografi atau penulisan sejarah.

Pada kasus membaca peristiwa *têdhak loji* sebagai momentum sejarah, tahap interpretasi menjadi begitu penting dan krusial. Pasalnya, kunjungan sultan ke kediaman residen mengandung berbagai maksud serta simbol-simbol yang harus dibaca sebagai bagian dari penafsiran sejarah. Sementara itu, pada praktik industrialisasi akhir abad ke-19 hingga abad ke-20, lawatan kenegaraan memiliki multi-tujuan. Di samping sebagai bagian dari hubungan antar-penguasa, momen-momen penting seperti ini menjadi ruang dalam memperteguh masing-masing kekuasaan di berbagai sektor. Dengan kata lain, interpretasi terhadap momen sejarah tidak semata-mata dibaca secara lugas dan kasat mata. Di tahap ini, penafsiran terhadap variabel data sejarah yang berupa sumber arsip, manuskrip, maupun sumber-sumber visual menjadi penting, Tahapan interpretasi ini menekankan pada berbagai prespektif, mulai dari importasi kultural berupa akulturasi budaya hingga pemaknaan simbol kekuasaan dari prespektif Geertz (1980) dan semiotika kekuasaan dengan pendekatan Ronald Barthes (1968).

Berdasarkan pembacaan dan penafsiran atas arsip-arsip primer periode 1900-an, diperoleh fakta bahwa Sultan Hamengku Buwono VII menjalin berbagai hubungan sosial-politik dengan Pemerintah Kolonial. Keadaan ini menurut Moedjanto (1994: 21) dikarenakan periode tersebut menjadi masa transisi modernisasi Yogyakarta. Kehadiran sekolah-sekolah partikelir, berdirinya 17 pabrik gula yang memberi peluang pada sultan untuk menerima *f.* 200.000 setiap bulannya sebagai kompensasi sewa, hingga industrialisasi yang menjamur seiring dengan dibangunnya jalur kereta. Pembangunan jalur kereta ini menurut Setiawan (2020: 39-40) melewati jalur Surakarta-Yogyakarta pada tahun 1871. Kemudian, tahun 1873, dibuka jalur kereta api untuk angkutan umum sampai Stasiun Lempuyangan. Stasiun Lempuyangan adalah stasiun pertama yang dibangun di Yogyakarta sebagai stasiun pemberhentian terakhir jalur Semarang-Vorstenlanden. Perusahaan Nederlandsch Indische Spoorweg Maatschapij (NISM) mempunyai jasa dalam pembangunan jalur ini.

Keberadaan jalur kereta berbanding lurus dengan eskalasi ekonomi yang terjadi di Yogyakarta. Meski tidak dipungkiri, praktik sewa tanah *lungguh* yang dilakukan oleh para *bekel* dan *lurah* turut memberi pada menguatkan sektor ekonomi keraton. Persewaan tanah di *vorstenlanden* pada waktu-waktu tersebut juga memberi perubahan dratis pada bangsawan Jawa. Kedekatan bangsawan Jawa dan Eropa juga memberi pengaruh pada gaya hidup hedonis seiring dengan dikenalkannya monetisasi sebagai pembayaran sewa tanah oleh *onderneming* atas tanah-tanah apanage di *Vostenlanden* (Margana, dkk. 2018: 74). Paruh akhir abad ke-19 menjadi titik tolak dari kelahiran babak baru di Yogyakarta, termasuk kehadiran pabrik-pabrik perkebunan yang berdiri di atas tanah sewa.

C. PEMBAHASAN

1. *Tědhak Loji*, Sebuah Representasi Kekuasaan

Kunjungan ke kediaman residen bukan merupakan hal baru bagi bangsawan Yogyakarta. Akan tetapi, agenda berkunjung yang kemudian dinamai dengan istilah *tědhak loji* sebagai upacara kenegaraan justru menimbulkan pertanyaan. Apakah upacara ini merupakan agenda adat dari keraton atau inisiasi dari Pemerintah Belanda? Lantas bagaimana momentum ini begitu penting bagi hubungan antara keraton dan Pemerintah Kolonial? Pertanyaan ini terjawab dalam ketika membaca periode alam penjajahan baru di Yogyakarta saat Ratu Wilhelmina naik takhta pada tahun 1890. Suksesi Ratu Wilhelmina Helena Pauline Maria sebagai penguasa monarki Belanda ketika usianya baru menginjak 18 tahun memberi pengaruh besar pada kebijakan politik. Pada masa pemerintahannya, terjadi serangkaian dinamika yang membawa pengaruh bagi negeri jajahan, termasuk pada praktik kolonialisme. Ratu muda ini merupakan sosok yang menyepakati kebijakan politik etis pada awal abad ke-20. Ratu ini pula yang menandatangani pengakuan bagi kedaulatan Indonesia pada pertengahan abad yang sama (Margana, dkk. 2018: 34).

Kedekatan hubungan Yogyakarta dengan Belanda kemudian melahirkan mandat Sultan Hamengku Buwono VII untuk membuka segala kemungkinan pengaruh budaya, termasuk dalam segi perayaan hari-hari khusus. Menyoal keterbukaan ini, setidaknya ditemukan 21 arsip *sěrat-sěrat dhawuh* ‘surat perintah’ atau *kupiya Nawala dalěm* selama tahun 1874 hingga 1917. Surat perintah tersebut berkaitan dengan kenaikan pangkat, politik-pemerintahan, hingga tata aturan kunjungan sultan ke kediaman residen maupun tata cara penerimaan tamu negara di keraton (Senarai Arsip KHP Widya Budaya, 2019; Apriyadi, 2021: 22-25). Perhatian sultan terhadap agenda-agenda besar Belanda kemudian diwujudkan dalam bentuk upacara yang diikuti oleh seluruh punggawa keraton. Merujuk pada sumber majalah Hudyana-Wara, (September, 1941) disebutkan bahwa upacara *tědhak loji* merupakan *pisowanan ageng* dalam rangka *pahargyan tanggal 31 Agustus ing Praja Ngayogyakarta* ‘peringatan tanggal 31 Agustus di Negara Yogyakarta’ sebagai perayaan dari kelahiran Ratu Wilhelmina (Hudyana-Wara, 1941: 115-116). Di gambarkan dalam majalah Hudyana-Wara, (Oktober, 1941) *pěpatih dalěm*, para bupati dari manca manca negara, bupati anom, serta *wědana prajurit* lebih dahulu hadir di Bangsal Pagelaran untuk mengikuti tata aturan kunjungan kenegaraan (Hudyana-Wara, 1941: 169).

Praktik *pisowanan tědhak loji* agaknya tidak hanya digelar pada 31 Agustus, namun dilakukan pula setiap 1 Januari. Perihal ini merujuk pada arsip litografi koleksi Museum Sonobudoyo yang berjudul *Gambar djikaloe Kandjeng Sultan tedhak di Resideennan, tanggal 1 Januari en 31 Agustus, Digambar oleh abdi dalěm bėkěl punakawan midji Raden Bėkěl Djajěng Soedirdjo*⁶. Di dalam litografi tersebut, Sultan Hamengku Buwono VII dengan 113 kelompok abdi dalem melakukan arak-

6 Gambar gulung ini merupakan koleksi dari Museum Sonobudoyo. Terdapat 4 gambar gulung yang masing-masing memiliki panjang 2 meter, bahkan lebih. Pada awal gambar terdapat keterangan mengenai prosesi yang divisualkan melalui lukisan ini. Sementara di setiap gulungan terdapat gambar dan keterangan yang menjelaskan kelompok maupun golongan prajurit, abdi dalem, maupun pegawai di keraton pada masa Sultan Hamengku Buwono VII saat peristiwa *tědhak loji*.

arak-an menuju loji. Upacara ini tidak hanya bersifat seremonial, melainkan sebagai representasi kekuasaan dari sultan yang bertakhta. Pramutomo (2009) menganalogikan bahwa upacara besar seperti *garëbëg* dan *tëdhak loji* merupakan sebuah drama kenegaraan untuk menunjukkan status displai. Prosesi yang tidak sebentar, arak-arakan yang panjang, serta atraksi dari masing-masing kelompok abdi dalem seolah-olah menjadikan Alun-alun sisi utara sebagai ruang pertunjukan. Gemuruh suara kuda, derap langkah kaki prajurit, hingga iringan *gëndhing pakurmatan* dari gamelan *Kodhok Ngorek* dan *Monggang* melengkapi ruang pertunjukan kenegaraan. Data ini mengindikasikan bahwa sultan bertindak sebagai impresario sekaligus sutradara (Pramutomo, 2009: 121).

Apabila sultan bertindak sebagai impresario, maka perlu ditampilkan data tata urutan *tëdhak loji* yang disalin dari keterangan gambar pada litrografi koleksi Museum Sonobudoyo tanpa mengubah ejaannya. Kehadiran penonton sepanjang prosesi *tëdhak loji* mengamini panggung kekuasaan sultan. Di dalam hal ini, unsur pemerintahan yang berdaulat dimiliki oleh sultan secara utuh (Pramutomo, 2009: 121). Greertz melihat bahwa pola mempertontonkan kekuasaan seperti ini menjadi komunikasi politik para abad-abad tersebut. Di samping mengedepankan sakralitas dari sebuah upacara, *tëdhak loji* juga menjadi drama politik dengan makna yang begitu kentara. Kekuasaan sultan diwujudkan melalui kehadiran *paloewanoe* atau kursi dan payung khusus diperuntukkan bagi raja yang tercatat berada dalam urutan ke-30. Greertz menyebut atribut kelengkapan kekuasaan dari sultan sebagai *the priest as the king's jewel'* (Geertz, 1980: 130).

Tabel 1. Urutan-urutan Prosesi *Tëdhak Loji* pada pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwana VII

No	Tata Urutan	No	Tata Urutan
1	Pangeran Djojokoesumo id Joedhonegoro	58	29 Boepati Anom dan Rio
2	Pangeran Ario Soerimentaram id Soerijodiningrat	59	4 Boepati Poelitik
3	Pangeran Ario Soerjoputro id Mangkoekoesoemo	60	4 Najoko
4	Pangeran Ario Boeminoto id Poeger	61	Raden Adipati Danoeredjo
5	Pangeran Adipati Ngabehi - Pangeran Poerbojo	62	2 Loerah Priyantoko
6	Hoepatjara Ngabejan en Poerbajan	63	2 Loerah Martalulut
7	Mas Tumenggung Mangoennegoro - Raden Rio Prawirodirdjo	64	Tombak dibawa priyantaka
8	50 sentono	65	2 senapan dibawa kemitboemi
9	100 Poenokawan	66	Mertalulut bawa tumbak bolang
10	Pangeran Adipati Mangkoeboemi dan Toewan Controkur	67	Songsong Kudurjo
11	Hoepatjara (Tempat Rokok, Sirih, Loedah)	68	Songsong Bawat
12	Raden Tumenggung Atmokoesoemo	69	22 Mantri Keparak Kiwa
13	3 Penewu Mahosjan	70	22 Mantri Keparak Tengan
14	24 Mantri Mahosjan	71	Penongsong reh Keparak Kiwa Tengan
15	80 Punakawan Sentono	72	Dampar San H den Sultan
16	12 Ronggo	73	Dampar
17	60 Poenokawan	74	38 Toekang reh Keparak Kiwa Tengan
18	40 Prajoerit Soerokarso	75	13 Hoendagi

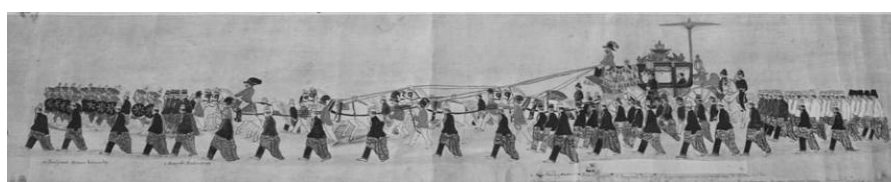
No	Tata Urutan	No	Tata Urutan
19	80 Prajurit Kawandoso	76	36 Gebajan gedong keparak kiwo tengen
20	80 Prajurit Djogokarijo	77	4 Mantri gedhong tengen
21	Songsong Bawat	78	2 Lurah Palijan
22	7 Penoerong	79	2 Mantri bawa golek, gelas
23	Ampilan Bawat	80	Penongsong Lurah dan Mantri
24	1 Songsong Soesoer	81	Soemotali
25	1 Senapan	82	Kontjo Kori
26	1 Lampit	83	2000 Magang Punakawan
27	1 Gendaga	84	900 Poenokawan
28	2 Jodhang	85	10 Poelijer
29	2 Gebayan	86	126 Bekel Poenokawan
30	Paloewanoe (Kursi dan Songsong)	87	32 Tjarik Mantri Panewoe Gedong Kiwo
31	Poenokawan	88	10 Bekel Toewo Poenokawan
32	246 Jajar	89	74 Loerah Poenokawan
33	16 Geladag	90	2 Badjoemerah Polowidjo (orang tjebol)
34	3 Poelijer	91	37 Wedono Poenokawan
35	10 Bekel Nom	92	5 Boepati Poenokawan
36	9 Bekel Toewa	93	8 Dragonder n een wacht meester
37	12 Loerah	94	10 Prajurit Soemohatmodjo
38	Wedana	95	4 Boepati Koelonprogo
39	Prajurit Miji Soemapratomo	96	Raden Toemengnung Sinduredjo, kan lijj wacht, Pangeran Hadinegoro, D operiwach mister 8 ordenas van z H den Zultan, Raden Tumengnung Notoyudo, Raden Tumengnung Brongtokusumo, Raden Tumengnung Wiryojusumo, Raden Tumengnung Wijil en 10 Bupati anom Mantri penewu gedong keparak kiwo-tengeng
40	Kroon-Prins dan Toewan Secretaris	97	15 Gandek Keparak Kiwo
41	Raden Tumengnung Kertanegoro dan 8 Boepati	98	Ampilan Penongsong, Kontjo ngampil keparak kiwo, 12 Konco ngampil reh kori, 5 konco kemas, 2 konco gemblak, 2 konco sajang, 12konco pande
42	Hoepatjara	99	Dragondor en I wach meester
43	Penewoe Tumbak	100	Manggung Kakung
44	Mantri Tjarik	101	Prajurit Mantrijero
45	Gabajan	102	Prajurit Ketanggung
46	1 Penewoe, 8 Poenakawan Manggung	103	Langenastro
47	60 Prajurit Wirobrojo	104	Serat Kondo Srimpi
48	63 Prajurit Dhaeng	105	Pasinden
49	63 Prajurit Prawirotomo	106	2 lurah tandak
50	63 Prajurit Nyoetro	107	4 tandak
51	36 Prajurit Trunojoyo	108	Kontjo Hinggil
52	Penewoe	109	Gamelan terbawa geladag
53	20 Mantri Penewoe	110	peneket gladag

No	Tata Urutan	No	Tata Urutan
54	36 Mantri Mergongso	111	2 loerah
55	5 Penewoe	112	poenakawan wiyaga
56	200 Mantri Penoemping Boemidjo, Sitisewoe, Noembakanyar, Danurejan Djekso, Goenoengkidul, 3 Mantri Poelitik	113	40 jajar
57	60 Panewoe dan Pandji distrik		

Pendekatan arsip litografi sebagai representasi kekuasaan sultan membuka peluang baru dalam membedah simbol-simbol visual melalui pendekatan Barthes. Di dalam teori semiotika Barthes disebutkan bahwa sebuah tanda hadir dari deretan gambar atau foto. Hoed menjelaskan bahwa pendekatan Barthes menitikberatkan pada visual obyek dengan tanda-tanda yang ditimbulkan di sekelilingnya. Tanda yang dimaksud begitu beragam, bergantung pada diskursus obyek dan relasi-relasi sosial yang dihasilkan dari gambar (Hoed, 2014: 57). Melalui pendekatan semiotika Barthes, maka ditinjau lebih lanjut bahwa perjalanan sultan dengan atribut kebesaran merupakan representasi kekuasaan 2 arah. Pertama, kekuasaan yang lekat dengan pribadi sultan dengan legitimasi sosial kebangsawannya, sementara yang kedua adalah kekuasaan yang ditunjukkan pada penguasa lain sebagai bentuk tandingan.



Gambar 1. Kelompok abdi dalem Priyantaka, Mertalulut, serta Mantri Keparak Kiwa serta Dampar Sultan yang dibawa oleh kelompok Narakarya. (Sumber: Lukisan Koleksi Museum Sonobudoyo).



Gambar 2. Kereta Kanjeng Kyai Garudayeksa yang dikendarai oleh Sultan Hamengku Buwana VII, dikawal oleh abdi dalem bupati. (Sumber: Lukisan Koleksi Museum Sonobudoyo).

Berdasarkan analisis semiotika Barthes, deretan tombak, kursi khusus sultan, payung kebesaran, hingga abdi dalem yang mengiringi kunjungan sultan ke kediaman residen menjadi wujud dari kekuasaan absolut raja. Pameran status ini menjadi bagian penting dari sebuah kompromi politik yang menjadi strategi kekuasaan Jawa. Di dalam istilah Pramutomo (2009: 125) momentum inilah panggung kenegaraan digelar sebagai pernyataan seni dan politik dalam satu ruang sekaligus.

2. Konsolidasi Politik hingga Praktik Sewa Tanah

Persaingan politik tidak hanya terjadi antara keraton dengan Pemerintah Kolonial, namun

juga dalam lingkup internal. Kedudukan putra mahkota selalu menjadi incaran para permaisuri bagi putra-putranya. Bukan tanpa alasan, pangeran yang bergelar *adipati anom* secara praktis akan memiliki posisi strategis dan nilai tawar dalam peta politik dengan Pemerintah Kolonial. Dari sinilah GKR Kencana dan GKR Emas berstrategi agar keturunan mereka yang mendapat posisi tersebut. Singkat cerita, keturunan GKR Emas yaitu Pangeran Juminah yang dinobatkan sebagai putra mahkota pada 11 November 1895, menggantikan kakaknya Pangeran Akhadiyah yang meninggal. Penobatan Pangeran Juminah disetujui oleh Residen Ketting Olivier (Margana, dkk. 2018: 72-74).

Kenaikan Pangeran Juminah sebagai putra mahkota kemudian melahirkan tarik ulur kepentingan, terutama kepentingan keraton dan kekuasaan Kolonial. Putra mahkota dalam hal ini bertindak sebagai obyek kunci dari ketetapan *kroonprins verklaring*. *Verklaring* merupakan kontrak politik yang ditandatangani putra mahkota setelah dinobatkan. Kontrak lain yang menyertai *verklaring* adalah *akta van verband*, sebuah kesepakatan yang harus ditandatangani setelah putra mahkota resmi naik takhta. Meski sudah menjadi ketentuan, nyatanya Pangeran Juminah bersikeras untuk tidak menyepakati *verklaring* dan mengancam pertumbuhan industri yang dibangun oleh Pemerintah Kolonial. Berbekal alasan tersebut dan didukung dengan argumen-argumen lain, Residen Ketting Olivier mengajukan pergantian putra mahkota kepada Sultan Hamengku Buwana VII. Atas berbagai pertimbangan, sultan mengganti Pangeran Juminah dengan adiknya, GRM Putro (Margana, dkk. 2018: 74-79).

Pergantian putra mahkota membawa angin segar pada Pemerintah Kolonial. Pasalnya, putra mahkota yang masih muda belum memiliki kecakapan dalam berkonsolidasi politik. Akhirnya, semua kebijakan diambil alih oleh sultan. Pada tahun 1909, Sultan Hamengku Buwana VII dengan residen baru Yogyakarta Van Andel sepakat atas perubahan dalam kebijakan agraria. Bentuk kesepakatan itu adalah penghapusan sistem *apanage* yang menaungi pengurusan tanah-tanah milik keraton. Sebagai gantinya, pegawai akan mendapatkan gaji berupa uang dan total penghasilan dari penggunaan tanah akan disimpan dalam sistem kas. Simpanan ini memang di bawah wewenang sultan, namun lalu lintas keluar masuk uang harus dalam kontrol residen. Di sisi lain sultan masih mempertahankan beberapa ketentuan yaitu 1) penghapusan kerja wajib harus mengikuti penghapusan tanah *apanage*, 2) tanah *apanage* yang dihapuskan harus dikembalikan kepada sultan, sehingga penyewaan langsung kepada sultan, 3) keraton masih memiliki hak monopoli garam di Yogyakarta (Margana, dkk, 2018: 79).

Pergantian putra mahkota membuat peran sultan menjadi bertambah. Berbagai kesepakatan politik diambil-alih langsung, termasuk persoalan persewaan tanah. Praktik persewaan tanah memang tidak bisa dipungkiri menjadi bagian dari catatan sejarah pemerintahan Sultan Hamengku Buwono VII. Dalam pandangan Jawa, sewa tanah diistilahkan dengan *amajegake* 'mengenakan pajak' serta tanah yang disewa disebut *bumi pamajegan*. Terminologi Jawa ini lahir dari konsep sistem *lungguh* atau *apanage*, yang mengukuhkan semua tanah adalah milik raja. Raja membagikan tanah kerajaan kepada para keluarga raja dan para pejabat kerajaan sebagai gaji untuk menopang kehidupan mereka. Tanah gaji itu disebut sebagai tanah *apanage*, atau tanah *lungguh*. Para pemegang tanah *lungguh* ini selanjutnya disebut *patuh*. Untuk mengolah tanah ini para *patuh* ini menyerahkan kepada para *bekel* dengan sistem bagi hasil (Margana, dkk. 2018: 87-88).

Potensi tanah dan komoditi tembakau, kopi, dan tanaman perkebunan lain membuat persewaan tanah di Yogyakarta sudah menjadi kecenderungan umum. Mode pemerintahan sosial agraris-kapitalis begitu menjamur, terutama pada sektor-sektor yang dikelola oleh swasta. Dampaknya di wilayah kerajaan terdapat 33 *ondernemingen* dari 23 *cultuur maatschaappij* atau perusahaan perkebunan. Tentu saja, sewa tanah ini menjadi hak kendali dari sultan. Berikut daftar perusahaan perkebunan yang tercatat di Yogyakarta hingga tahun 1926.

Tabel 2. Nama-nama Perusahaan atau Maskapai Perkebunan di Yogyakarta 1920 – 1926

No	Afdeeling	Nama Perkebunan atau Maskapai	Tahun Kontrak Baru	Tahun Kontrak Berakhir
1	Kalasan	N.V. Cultuur Maatschappij Randoe Goenting en Tjandie Sewoe	1 April 1920	1970
2	“	N.V. Cultuur Maatschappij Kadiradji	1 April 1920	1970
3	“	N.V. Cultuur Maatschappij tot exploitatie der suikerfabriek Tanjoeng Tirto	1 April 1920	1970
4	“	N.V. Klattensche Cultuur Maatschappij (Sorogedoeg)	1 April 1920	1970
5	“	N.V. Klattensche Cultuur Maatschappij (Wanoedjojo)	1 April 1920	1970
6	“	Cultuur Maatschappij Bandjar Ardjo	1 April 1920	1970
7	“	Cultuur Maatschappij Merapi (Bedojo)	1 April 1920	1970
8	“	Cultuur Maatschappij Gedjajan	1 April 1920	1970
9	“	Cultuur Maatschappij Gesiekan en Magoewo	1 April 1920	1970
10	“	Cultuur Maatschappij der Vorstenlanden (Wonotjatur)	1 April 1920	1970
11	“	Cultuur Maatschappij Moedja-Moedjoe	1 April 1920	1970
12	“	Cultuur Maatschappij Moedja-Moedjoe (Wioro)	1 April 1920	1970
13	“	Cultuur Maatschappij Kedaton Pleret	1 April 1920	1970
14	Sleman	Cultuur Maatschappij Wringin	1 April 1920	1971
15	“	Cultuur Maatschappij Medarie (Tempel)	1 April 1920	1971
16	“	Cultuur Maatschappij Medarie (Mlessen)	1 April 1921	1971
17	“	Cultuur Maatschappij Medarie	1 April 1921	1971
18	“	Cultuur Maatschappij Beran	1 April 1921	1971
19	“	Cultuur Maatschappij Boeloes	1 April 1921	1971
20	“	N.V. Koloniale Bank (Sendang Pitoe)	1 April 1922	1972
21	“	N.V. Cultuur Maatschappij tot der sf Tjebongan	1 April 1922	1972
22	“	N.V. Cultuur Maatschappij Padokan en Barongan (Sonosewoe)	1 April 1922	1972
23	“	Cultuur Maatschappij der Vorstenlanden (Demak Idjo)	1 April 1922	1972
24	“	Cultuur Maatschappij den Vorstenlanden (Rewoeloe)	1 April 1922	1972
25	“	Cultuur Maatschappij Vorstenlanden (Sedajoe)	1 April 1922	1972
26	Bantul	N.V. Cultuur Maatschappij Padokan en Barongan (Padokan)	1 April 1923	1973
27	“	N.V. Cultuur Maatschappij Padokan en Barongan (Barongan)	1 April 1923	1973
28	“	N.V. Cultuur Maatschappij Bantoel	1 April 1923	1973
29	“	N.V. Cultuur Maatschappij Gesiekan en Magoewo (Gesiekan)	1 April 1923	1973
30	“	N.V. Cultuur Maatschappij Gondang Lipoero	1 April 1923	1973
31	“	N.V. Poendoeng	1 April 1923	1973
32	“	N.V. Poendoeng (Siloek Lanteng)	1 April 1924	1974
33	Adikarto	Cultuur Maatschappij der Vorstenlanden (Sewoegaloer)	1 April 1925	1975

Sumber: Gegenvens over Djogjakarta, 1926.

Di samping praktik sewa tanah, sultan juga mendapat keuntungan dari pendirian pabrik gula. Setidaknya terdapat 17 pabrik gula yang beroperasi di Yogyakarta. Pada tiap pembangunan pabrik gula, Sultan HB VII memperoleh pembagian sewa tanah dan subsidi dari pemerintah kolonial

Belanda sejumlah f. 200.000 gulden (Murdijati, 2009:13). Pendapatan yang besar inilah yang kemudian oleh sultan dimanfaatkan untuk membangun sarana pendidikan di wilayah Yogyakarta pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Berikut daftar 17 pabrik gula yang pernah berdiri di Yogyakarta.

Tabel 3. Daftar Pabrik Gula semasa Sultan Hamengku Buwono VII

No	Distrik	Daftar Pabrik Gula
1	Sleman	Pabrik Gula Cebongan
2		Pabrik Gula Demak Ijo
3		Pabrik Gula Medari
4		Pabrik Gula Beran
5	Kota	Pabrik Gula Randu Gunting
6		Pabrik Gula Rewulu
7		Pabrik Gula Sendang Pitu
8		Pabrik Gula Tanjung Tirto (Kalasan)
9		Pabrik Gula Wonocatur
10	Bantul	Pabrik Gula Sewu Galur
11		Pabrik Gula Barongan
12		Pabrik Gula Kedaton Pleret
13		Pabrik Gula Madukismo (Padokan)
14		Pabrik Gula Pundong
15		Pabrik Gula Bantul (Jebugan)
16		Pabrik Gula Gondang Lipuro
17		Pabrik Gula Gesikan

Sumber: Nugroho, dkk. 2020: 128

Dari rentetan daftar perusahaan perkebunan dan pabrik gula yang berdiri di tanah kerajaan, sultan mendapat keuntungan sewa tanah yang begitu tinggi. Belum jelas berapa pendapatan yang diperoleh sultan setiap tahunnya dari praktik sewa tanah tersebut. Akan tetapi, dari keuntungan tersebut sultan dapat membangun berbagai bangunan di keraton. Di samping itu, sultan juga membangun berbagai gedung, jalan, termasuk Tugu Golong-gilig ‘*De witt paal*’. Berbagai bangunan yang rusak akibat gempa bumi yang melanda kota Yogyakarta pada tahun 1867 juga diperbaiki oleh sultan, antara lain Masjid Gedhe dan Makam raja-raja di Kotagede serta perluasan Pesanggrahan Harja Purna yang telah didirikan oleh Sultan Hamengku Buwana V dan VI (Margana, dkk. 2019: 140). Pesanggrahan inilah yang kemudian berubah nama menjadi Pesanggrahan Ambarrukmo sekaligus menjadi lokasi pensiun sultan.

3. Yogyakarta: Sebuah Periode Pembaharuan

Periode Sultan Hamengku Buwono VII menjadi warna baru bagi perubahan fasad hidup di Yogyakarta. Kemampuan sultan dalam mengelola ekonomi nyatanya memberikan dampak strategis bagi berbagai sektor. Salah satu bidang yang mendapat perhatian sultan adalah pendidikan. Pada tahun 1890, Sultan Hamengku Buwana VII mendirikan sebuah sekolah dalam lingkungan keraton. Sekolah ini diperuntukkan bagi setiap pejabat kraton yang akan menggantikan ayahnya harus memiliki sertifikat dari sekolah itu. Pada bulan Agustus, yang mendaftar sebagai murid sebanyak 100 orang. Gedung sekolah ini meminjam sebagian ruang Bangsal Trajumas (Surjomihardjo, 2008:

46). Sekolah ini biasa disebut Sekolah Kelas Satu (*Eerste Klasse School met de Basa Kedaton*) dan diperuntukkan bagi anak-anak bangsawan dan abdi dalem yang berpangkat tinggi. Bagi anak para pegawai menengah dan rendah disediakan Sekolah Kelas Dua (*Tweede Klasse School*) atau sekolah Pagelaran. Selain dua sekolah tersebut, juga terdapat sekolah-sekolah partikelir atau sekolah swasta (Margana, dkk. 2018: 47).

Antara tahun 1889- 1893, banyak bermunculan sekolah-sekolah partikelir di luar keraton. Beberapa kawasan berdirinya sekolah partikelir yaitu Kalasan, Kejambon, Jejeran, Wonogiri, Bantul, Kretek, Sleman, Klegung, dan Godean. Di dalam upaya pendirian sekolah ini, Pemerintah Kolonial membantu dengan kayu bangunan dan kapur sebagai bahan bangunan, sedangkan sultan memberi bantuan berupa uang. (Sesana, 2010: 75). Tidak bisa dipungkiri, minat masyarakat untuk bersekolah cukup tinggi. Pada tahun 1891, jumlah murid di Yogyakarta cenderung naik pesat. Kapasitas sekolah kelas satu yang hanya menampung 200 murid harus rela diisi lebih dari kapasitasnya. Begitu pula sekolah kelas dua yang terpaksa menampung lebih dari 190 murid, di luar kapasitasnya. Data tersebut terus berubah setiap bulannya (Surjomihardjo, 2008: 68).

Tabel 4. Daftar Jumlah Murid di Yogyakarta Tahun 1891

No	Tahun 1891	Sekolah Pertama (Total 200 Murid)	Sekolah Kedua (Total 190 Murid)
1	Januari	246	211
2	Februari	253	212
3	Maret	245	213
4	April	236	216
5	Mei	233	218
6	Juni	249	212
7	Agustus	249	216

Sumber: Surjomihardjo, 2008: 68.

Hingga tahun 1907, jumlah sekolah di wilayah Yogyakarta tercatat 75 sekolah. Sekolah-sekolah ini menempati beberapa lokasi, antara lain di distrik Yogyakarta terdapat 51 sekolah, di Gunungkidul terdapat 12 sekolah, dan Kulon Progo terdapat 12 sekolah. Inspektur sekolah diangkat oleh Sultan Hamengku Buwana VII, yang terdiri dari Raden Bekel Soeriodipoero, putra Raden Ayu Mangkubumi dan Raden Riyo Poerboningrat, putra Pangeran Purboyo (Sesana, 2010: 77).

Jumlah sekolah tersebut tidak lepas dari posisi *Vorstenlanden* yang tentunya lebih berkembang dibandingkan dengan daerah lainnya. Ketika kebutuhan belajar semakin meningkat maka Pemerintah Kolonial Belanda mendirikan beberapa sekolah baru antara tahun 1898-1905 yaitu *Tweede Klasse Scholen* di Margoyasan, Jetis, Ngabean, Pakualaman dan Gading (Surjomihardjo, 2008: 57). Pada tahun 1909, didirikan *Eerste Inlandsche School* di Kintelan dan di berbagai tempat lainnya. Sekitar 6 tahun sesudahnya atau tahun 1915, pemerintah memperbanyak berdirinya sekolah-sekolah rendah yang bernama HIS (*Hollandsch Inlandsche School*) dengan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Hal ini dapat terlaksana karena dorongan dari perkumpulan Budi Utomo. Gedung pertama HIS bertempat di Jetis. Pada tahun yang sama, sekolah Sri Manganti berubah menjadi sekolah HIS dengan nama *Keputran School* (Margana, dkk. 2018: 47-48).

Di wilayah Yogyakarta, pada masa itu ada dua tipe sekolah. yaitu sekolah pertama dan sekolah kedua. Sekolah pertama untuk anak-anak pejabat dan mempunyai status ekonomi yang tinggi. Sekolah kedua untuk anak orang kaum priyayi rendahan atau orang-orang biasa. Kecuali

Bahasa Jawa sebagai pengantar, Bahasa Melayu juga digunakan sebagai mata pelajaran tambahan. Di antara sekolah tersebut banyak yang kemudian diubah menjadi HIS (*Hollandsch Indlandsche Scholen*). Namun perubahan tersebut masih tetap mengenal adanya perbedaan tipe sekolah yaitu 1) HIS untuk lapisan atas, 2) Sekolah Bumiputra kelas dua untuk lapisan menengah, 3) Sekolah Bumiputra lapisan bawah (Surjomihardjo, 2008: 60). Sekolah-sekolah ini kemudian membawa peradaban baru di Yogyakarta dengan sebutan kota pelajar.

Di luar pertumbuhan sekolah, Yogyakarta pada tahun 1920 juga tumbuh sebagai kota kerajaan yang metropolis. Hampir semua sudut kota ramai interaksi sosial dan didukung dengan berbagai fasilitas. Pada saat itu di Yogyakarta telah tersedia jaringan jalan, jalur kereta api dilengkapi dengan stasiun kereta, kantor, sekolah, rumah sakit, listrik, pabrik, gedung bioskop, dan pariwisata. Transportasi menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan kota. Guna membantu kelancaran lalu lintas, jalan utama di dalam kota dan luar kota mulai diaspal pada bulan Desember tahun 1924 (Atsari. 2002: 25). Jauh sebelum dilakukan pengaspalan, hubungan dengan wilayah sekitar telah terbuka karena dibukanya jalur kereta api. Jalur kereta dibuka sejalan dengan produksi pada pabrik-pabrik gula yang pada saat itu sedang berkembang (Abbas dan Ratna Dewi, 1995: 30).

Stasiun kereta pertama didirikan di Lempuyangan oleh NISM (*Nederlandsch Indische Spoorweg Maatschappij*), sebuah perusahaan swasta, pada tahun 1872. Jalur kereta NISM menghubungkan Surakarta-Yogyakarta (Knaap, 1999: 5), stasiunnya berada di Lempuyangan. Menyusul kemudian adalah dibangunnya jalur kereta oleh SS (*Staats Spoorwegen*), sebuah perusahaan milik pemerintah (Knaap. 1999: 5). Stasiun SS adalah Tugu yang dibangun pada 2 Mei 1887 (Hardiyanto, 2003: 150). Jalur kereta api selain melayani jalur luar kota juga melayani jalur yang menghubungkan Kota Yogyakarta dengan wilayah sekitar. NISM membangun beberapa stasiun dan halte sebagai sarana penunjang jalur kereta api antar wilayah antara lain adalah Stasiun Ngabean, Halte Dongkelan, Stasiun Winongo, Halte Tjepit, dan Stasiun Bantul (Chasanah, 2005: 45-51). Stasiun Ngabean dibangun untuk kepentingan pedagang dari Pasar Beringharjo (Abbas dan Ratna Dewi, 1995: 30). Stasiun Ngabean berfungsi sebagai tempat transit jalur Djokja-Brosot dan Djokja-Pundong (Chasanah, 2005: 45).

Perkantoran muncul seiring dengan perkembangan Yogyakarta, meliputi kantor pemerintahan, bisnis, dan jasa. Kantor pertama yang didirikan adalah kantor residen (dikenal juga dengan sebutan Loji Kebon) pada tahun 1824. Perbaikan dilakukan setelah bangunan mengalami kerusakan ketika terjadi gempa pada 10 Juni 1887 (*Gegevens Over Djokjakarta* 1925, 34). Terdapat pula kantor PTT (*Post Telegraaf en Telefoon kantoor*), *Javasche Bank*, dan NILL Mij (*Nederlandsch- Indische Liff en Levenswerkering Maatschappij*). Kantor-kantor tersebut saat ini berturut-turut digunakan sebagai Istana Negara, Kantor Pos, Bank Indonesia, dan BNI '46. Kantor-kantor tersebut berada di sebelah utara alun-alun utara.

Perkembangan Yogyakarta tidak hanya dalam bidang ekonomi, namun juga mengalami perkembangan dalam bidang kesehatan. Kesehatan masyarakat mendapat perhatian dari pemerintah dan pihak swasta. Dibangunnya rumah sakit, klinik dan apotek merupakan wujud dari perhatian tersebut. Fasilitas lain yang tidak kalah penting adalah penerangan. Sebelum listrik tersedia, sejak tahun 1890 di Yogyakarta telah tersedia penerangan gas, yang berpusat di Patuk. Penerangan menggunakan gas sangat bermanfaat untuk lalu lintas karena diletakkan di tepi jalan ibukota. Listrik mulai tersedia sejak tahun 1917, dengan berdirinya ANIEM (*Algemeene Nederlandsch Indische Electriciteits Maatschappij*) (Darmosugito, 1956: 26). Satu tahun sebelumnya, ANIEM pertama kali membangun pembangkit tenaga listrik tenaga diesel di Jl. Serangan (Atsari 2002, 38).

Kemajuan Yogyakarta dapat dilihat dari berdirinya industri berupa pabrik dan perusahaan. Pabrik-pabrik yang ada meliputi pabrik limun, dua pabrik es (Mataram dan Pathook), empat pabrik

tegel (salah satunya adalah Soka), pabrik mesin, dan *zeep fabriek* (pabrik sabun mandi) “Mataram”. Pariwisata Yogyakarta berkembang sejak berdirinya stasiun, kemudian diikuti berdirinya hotel, vila, dan transportasi menuju ke tempat wisata. Pada tahun 1900, hotel telah berkembang di Yogyakarta. Hotel kelas satu pada saat itu adalah Tugu (berada di dekat stasiun Tugu), Mataram, dan Centrum di *Kampementstraat* (Knapp, 1999: 11). *Mooi Jogjakarta* yang memuat iklan mengenai Hotel Mataram, menyebut lokasi hotel “*lima menit dari stasiun*”. Pada tahun 1925, selain Hotel Toegoe, muncul juga Hotel Djokja, Grand Hotel (*Grand Hotel de Djokja*), dan Inlandsche Hotel. Tempat-tempat wisata yang terkenal pada masa itu antara lain *Waterkasteel* (Tamansari), Borobudur, Kali Urang, pantai Parangtritis dan pantai Baron (*Mooi Jogjakarta*). Kali Urang yang mendapat sebutan *Djocja Paradiso*, dilengkapi dengan fasilitas berupa hotel, salah satu yang terkenal adalah Hotel Kali Oerang, dan bungalow yang dapat disewa (*Mooi Jogjakarta*).

Melihat perubahan yang begitu signifikan terjadi awal tahun 1900, seakan memberi tamparan fakta pada sejarah Yogyakarta. Memang cukup mencengangkan, pasalnya periode pemerintahan Sultan Hamengku Buwono VII memberi kemudahan pada perubahan besar di wajah kota kerajaan. Periode ini pula yang menandai keterbukaan zaman dan kemajuan kebudayaan. Kehadiran masyarakat multi etnis hingga industri yang meningkat di berbagai sektor menjadi ciri dari pemerintahan ini.

D. KESIMPULAN

Perjalanan pemerintahan Sultan Hamengku Buwana VII (1877-1921) begitu diwarnai dengan dinamika politik. Tidak hanya berpolitik dengan Pemerintah Kolonial, melainkan intrik politik yang terjadi di dalam keraton. Komunikasi politik inilah yang diwujudkan sultan dalam upacara kenegaraan *tĕdhak loji*. Peristiwa kunjungan sultan ke kediaman residen menjadi momentum menjalin hubungan bilateral antar penguasa sekaligus menjadi ruang untuk mempertontonkan legitimasi. Kehadiran sultan sebagai simbol negara dilengkapi berbagai atribut kekuasaan merupakan wujud dari keabsahan diri seorang raja. Keadaan ini diamini secara tegas oleh Geertz yang membaca konsep kepemimpinan dari simbol-simbol kekuasaan. Sementara itu, Barthes mengamini dari prespektif visual yang hadir pada arsip litografi *tĕdhak loji*.

Kedekatan sultan dengan Pemerintah Kolonial memberi peluang pula pada kehadiran industri di Yogyakarta. Pertumbuhan industri diperkuat dengan praktik sewa tanah *lungguh* yang dilakukan sultan. Praktik sewa tanah ini kemudian berlanjut dengan berdirinya 33 perusahaan perkebunan dan 17 pabrik gula yang dibangun di atas kerajaan. Tidak dipungkiri bahwa pembangunan perusahaan perkebunan dan pabrik gula memberi keuntungan bagi kas keraton. Data yang paling kentara adalah keuntungan dari pabrik gula yang diperoleh sultan senilai *f.* 200.000 setiap bulannya. Perusahaan ini pula yang memicu pembangunan berbagai fasilitas di Yogyakarta, termasuk jalur kereta api dan stasiun. Jalur-jalur kereta api inilah yang menghubungkan antara pabrik satu dan yang lainnya.

Dampak kentara dari pertumbuhan politik di Yogyakarta ditunjukkan pula dengan lahirnya sekolah-sekolah partikelir. Munculnya sekolah partikelir tidak terlepas dari peran sultan dalam mendukung pembangunan serta menyokong pembiayaan. Pada tahun 1891, sekolah partikelir di kota kerajaan mengalami lonjakan murid di luar kapasitas pengajarannya. Pada tahun-tahun itu, masyarakat telah menaruh perhatian yang tinggi pada bidang pendidikan. Penanda keterbukaan dari kota kerajaan juga ditunjukkan dengan kemajuan kebudayaan, kehadiran masyarakat multi etnis hingga industri yang meningkat di berbagai sektor.

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, Novida., dan Ratna Dewi. 1995. “Perkembangan Kota Yogyakarta Berdasarkan Peningkatan Pemanfaatan Lahan”. *Berkala Arkeologi* XV No. 2 November.

- Apriyadi, Clara Sinta. 2021. "Tradisi Penyambutan dan Penghormatan Tamu di Keraton Yogyakarta sebagai Bentuk Pola Relasi Pada Masa Pemerintahan Hamengku Buwana VII dalam Naskah Koepija Djendralan" *Tesis* di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia, Depok.
- Atsari, Yunita Tri. 2002. "Jaringan Listrik dan Perkembangan Kota Yogyakarta Tahun 1916-1942". *Skripsi*. Yogyakarta: Jurusan Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada.
- Chasanah, Endang Uswatun. 2005. "Perkembangan Jalur Kereta Api Antar Daerah di Yogyakarta (1887-1942)". *Skripsi*. Yogyakarta: Jurusan Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada.
- Darmosugito. 1956. "Sedjarah Kota Jogjakarta". *Kota Jogjakarta 200 Tahun*. Jogjakarta: Panitia Peringatan Kota Jogjakarta 200 tahun.
- Greetz, Clifford. 1980. *Negara: The Theatre State in Nineteenth-Century Bali*. New Jersey: Princeton University Press.
- Hardiyanto, Ig. Eko. 2003. "Yogyakarta Masa Kolonial". *Mosaik Pusaka Budaya Yogyakarta*. Yogyakarta: Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala.
- Hoed, Benny H. 2014. *Semiotik dan Dinamika Sosial Budaya*. Depok: Komunitas Bambu.
- Ismaun. 1992. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Bandung: Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS IKIB Bandung.
- Knaap, Gerrit. 1999. *Cephas, Yogyakarta: Photography in the service of the Sultan*. Leiden: KITLV Press.
- Kuntowijoyo. 2005. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang.
- Margana, dkk. 2018. *Sultan Hamengku Buwono VII & Kedaton Ambarrukmo*. Yogyakarta: Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Murdijati, Gardjito (et.al). 2009. *Silsilah Keturunan Ngarso Dalem Sampeyan Dalem Inkgang Sinuhun Kanjeng Sultan Hamengku Buwana VII*. Yogyakarta: Sapta Wandana.
- Nugroho, Purwanto, dkk. 2020. "Identifikasi Pabrik Gula sebagai Industri Heritage Di Jawa" *Arsitektura*. Vol. 18. Issue 1. Hal: 119-128.
- Poerwadarminta. 1939. *Baoesastra Djawa*. Batavia: J.B. Wolters Uitgebers Maatschappij.
- Pramutomo. 2009. *Tari, Seremoni, dan Politik Kolonial (I)*. Solo: ISI Press Solo.
- Sesana, Riya. 2010. "Intrik Politik dan Pergantian Tahta di Kesultanan Yogyakarta 1877-1921", *Tesis* di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia, Depok.
- Setiawan, Nanang. 2020. *Sejarah Kereta Api Yogyakarta 1917-1942*. Temanggung: Kendi.
- Sunardi, ST. 2004. *Semiotika Negativa*. Yogyakarta: Penerbit Buku Baik.
- Surjomihardjo, Abdurrachman. 2008. *Kota Yogyakarta Tempo Doeloe: Sejarah Sosial 1880-1930*. Jakarta: Komunitas Bambu.

Arsip dan Manuskrip

- Babad Ngayogyakarta: HB II - HB V*, PBA.280, Koleksi Museum Sonobudoyo Yogyakarta.
- Babad Ngayogyakarta HB IV - HBV*, SK 169, Koleksi Museum Sonobudoyo Yogyakarta.
- Gegevens Over Djokjakarta 1925*. 1925. Djokjakarta.
- Gegevens Over Djokjakarta 1926 A*. 1926. Djokjakarta.
- Lukisan gulung litografi tedhak loji*, Koleksi Museum Sonobudoyo Yogyakarta.

Majalah

Hoedyana-wara, Dwara-warta, Keraton Yogyakarta, Tahun 1, Angka 3, September 1941.

Hoedyana-wara, Dwara-warta, Keraton Yogyakarta, Tahun 1, Angka 4, Oktober 1941.

DIPLOMASI SANG RAJA: KONTRIBUSI KASULTANAN YOGYAKARTA DALAM PERIODE AWAL KEMERDEKAAN INDONESIA

Pratika Rizki Dewi

Peneliti Lepas dan Pegiat Sejarah

pratikadewi10@gmail.com

ABSTRAK

Yogyakarta yang terdiri dari Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman menjadi salah satu wilayah penting di Indonesia. Yogyakarta yang dalam tulisan ini difokuskan pada Kasultanan Yogyakarta mempunyai peran penting bagi Indonesia. Pada 2 Januari 1946 Hamengku Buwono IX (1940-1988) yang kala itu menjadi raja di Kasultanan Yogyakarta mengirimkan kurir untuk menyampaikan pesan kepada Soekarno. Pesan itu isinya ialah menawarkan Yogyakarta untuk menjadi ibu kota sementara Indonesia. Tawaran tersebut diterima oleh Soekarno dan pada 4 Januari 1946 ibu kota Indonesia resmi dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta untuk sementara waktu. Sejak saat itulah peran Kasultanan Yogyakarta menjadi semakin nyata, baik bagi internal Indonesia maupun eksternal melalui berbagai bentuk diplomasi. Diplomasi dalam tulisan ini dimaknai sebagai tindakan yang membawa suatu kepentingan khusus dan/atau resmi untuk kebaikan posisi negara di mata dunia internasional. Tindakan di sini merujuk pada tindakan kolektif, baik yang dilakukan atas inisiatif Kasultanan Yogyakarta maupun dalam rangka membantu menyelesaikan program pemerintah. Sedikitnya ada empat diplomasi yang pernah dilakukan dan/atau didukung oleh Kasultanan Yogyakarta. *Pertama*, Serangan Umum 1 Maret 1949 yang diprakarsai oleh Hamengku Buwono IX. Serangan tersebut menjadi bentuk diplomasi bersenjata untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia sebagai sebuah negara masih ada. *Kedua*, keberadaan Hamengku Buwono IX untuk menandatangani penyerahan kedaulatan hasil dari Konferensi Meja Bundar (KMB) di Jakarta. *Ketiga*, kunjungan Perdana Menteri India, Pandit Jawaharlal Nehru ke Yogyakarta pada 1950 yang memperkuat solidaritas antar negara. *Keempat*, peran Hamengku Buwono IX sebagai pemimpin rombongan *goodwill mission* ke Burma pada 1952 yang juga memperkuat solidaritas. Keempat diplomasi tersebut sengaja dipilih untuk merepresentasikan 4 jenis yang berbeda. Keempat jenis yang bisa menunjukkan sejauh mana kontribusi Kasultanan Yogyakarta.

Tulisan ini dibuat dengan tujuan untuk menjelaskan peran Kasultanan Yogyakarta bagi Indonesia yang ditempuh melalui berbagai bentuk diplomasi. Di dalamnya juga akan diuraikan dampak dari peranan tersebut bagi posisi Indonesia dan hubungannya dengan internasional. Tokoh sentral yang diangkat adalah Hamengku Buwono IX sebagai representasi dari Kasultanan Yogyakarta, masyarakat Yogyakarta, bahkan masyarakat Indonesia. Kendati demikian, tidak menutup kemungkinan adanya penyebutan tokoh-tokoh lainnya yang juga terlibat. Tulisan ini dibuat dengan menggunakan metode penelitian sejarah yang meliputi (1) penentuan tema; (2) pengumpulan sumber (heuristik); (3) verifikasi (kritik); (4) interpretasi; dan (5) penulisan sejarah (historiografi). Pengumpulan sumber dilakukan dengan memadukan antara sumber primer dan sekunder. Sumber primer didapatkan dari arsip dan surat kabar, misalnya saja Arsip Sekretariat Negara Kabinet Perdana Menteri 1950-1959 dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) maupun surat kabar *Merdeka* dari Perpustakaan Nasional. Sedangkan, sumber sekunder diperoleh dari jurnal, buku, dan tugas akhir yang berkaitan. Keseluruhan sumber yang didapatkan, diverifikasi dan diinterpretasi menjadi fakta sejarah untuk selanjutnya disusun menjadi sebuah tulisan sejarah yang lengkap. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, dapat diperoleh kesimpulan bahwa Kasultanan Yogyakarta melalui Hamengku Buwono IX mempunyai peran yang signifikan dalam diplomasi Indonesia. Peran ini membawa dampak bagi meningkatnya nilai tawar dan kelayakan posisi Indonesia di mata dunia internasional,

mempererat solidaritas antar negara, serta memperkuat posisi Yogyakarta sebagai sebuah daerah istimewa. Daerah yang menjadi istimewa bukan sekadar karena keberadaan keraton, melainkan juga karena perannya dalam riwayat historis Indonesia.

Kata kunci: Diplomasi, Kasultanan Yogyakarta, Hamengku Buwono IX

KING'S DIPLOMACY: YOGYAKARTA SULTANATE CONTRIBUTIONS IN THE EARLY INDONESIA INDEPENDENCE PERIOD

ABSTRACT

Yogyakarta which consists of the Yogyakarta Sultanate and Pakualaman become one of the important regions in Indonesia. Yogyakarta in this paper focused on the Yogyakarta Sultanate which has important contributions for Indonesia. On 2nd January 1946 Hamengku Buwono IX (1940-1988) as a king in Yogyakarta Sultanate sent a courier to give a letter for Soekarno, Indonesia's first president. In this letter, Hamengku Buwono IX wrote that he offers Yogyakarta to be Indonesia's temporary capital. This offering was accepted by Soekarno and on 4th January 1946 officially Indonesia capital moved from Jakarta to Yogyakarta for several times. Furthermore, Yogyakarta Sultanate contributions became more real, whether for internal and external purposes through diplomacy. In this paper diplomacy means action which contains special things and/or official things to develop a country's position in the international world. The action refers to collective actions, whether done by Yogyakarta Sultanate initiative and/or to help government programs. At least, there are four diplomacy projects, whether done and/or helped by Yogyakarta Sultanate to Republic of Indonesia. *First*, 1st March 1949 General Attack which was initiated by Hamengku Buwono IX. This attack reflects weapons diplomacy to show that Indonesia as a nation still exists. *Second*, the presence of Hamengku Buwono IX to sign the Round Table Conference in Jakarta. *Third*, India Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru to Yogyakarta in 1950 which strengthened solidarity between two nations. *Fourth*, Hamengku Buwono IX roles as leader for a goodwill mission from Indonesia to Burma in 1952 which also aimed to strengthen solidarity. Those four diplomacies were chosen to represent 4 different kinds. That kinds can show the wide of Yogyakarta Sultanate contributions.

This paper aims to explain Yogyakarta Sultanate contributions for Indonesia through various kinds of diplomacies. Moreover, this paper also contains effects from those diplomacies for Indonesia position and relation to international. The main actor in this paper is Hamengku Buwono IX as representative of Yogyakarta Sultanate, Yogyakarta people, and Indonesia people. Even so, it is still possible to mention other actors who also involved diplomacies. This paper was made by historical research method with steps (1) theme determination; (2) source collections (heuristic); (3) verification (critic); (4) interpretation; and (5) historiography. The sources were collected by combining primary and secondary sources. Primary sources were gained from archives and newspapers, such as the state secretariat of the prime minister's cabinet 1950-1959 archives from Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) and *Merdeka* newspapers from the National Library. Meanwhile, secondary sources were obtained from journals, books, and final thesis. All sources next to be verificated and must be interpreted become historical facts to arrange as historiography. Based on this research the conclusion is Yogyakarta Sultanate through Hamengku Buwono IX has significant contributions in Indonesia diplomacy. These contributions give effect to Indonesia's

position in the international world, strengthen solidarity, and Yogyakarta position as a special region. The region is special not only because of the palace, but also the real contributions in Indonesia historiography.

Keywords: Diplomacy, Yogyakarta Sultanate, Hamengku Buwono IX

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perselisihan antara dua bersaudara, Paku Buwono II (1726-1749) dengan Pangeran Mangkubumi menjadi awal dari peristiwa *palihan nagari*. *Palihan nagari* atau yang biasa dikenal sebagai Perjanjian Giyanti 1755 merupakan peristiwa pembagian Mataram menjadi dua. Nicholas Hartingh selaku Gubernur Jawa menjadi saksi dari terbaginya wilayah Paku Buwono II menjadi dua yakni miliknya dan seorang lagi milik Pangeran Mangkubumi yang kelak bergelar Hamengku Buwono I (1755-1792). Wilayah yang menjadi milik Pangeran Mangkubumi menyandang nama Kasultanan Yogyakarta. Mengutip dari "*Toponim Kota Yogyakarta*" kata Yogyakarta berasal dari "*Ngayogya*" atau "*Ayoga*". Itu adalah sebuah tempat yang pernah dikunjungi oleh Pangeran Mangkubumi, bahkan oleh Gubernur Jenderal van Imhoff. Pendapat lain datang dari R.W. Pradjaradja yang menyebutkan asal nama Yogyakarta dari "*Ayudhakerta*" yang dapat dipisahkan artinya menjadi *a*=tidak; *yudha*=perang; dan *kerta*=raharja. Apabila disatukan menjadi tidak (ada) perang, (tinggal) raharja (kesejahteraan).¹

Sejak berdiri sebagai entitas wilayah yang mandiri, Kasultanan Yogyakarta terus mengalami dinamika dari berbagai segi, baik wilayah, masyarakat, sosial-ekonomi, maupun perpolitikan. Pada awal Perjanjian Giyanti 1755 wilayah Kasultanan Yogyakarta terdiri dari Mataram, Kedu, dan Bagelan sebagai *negara agung*,² sedangkan Madiun, Kediri, Surabaya, Rembang, Semarang, dan pantai utara Jawa menjadi bagian dari *mancanegara*.³ Luas dari *negara agung* ialah 5.300 karya dengan penduduk yang mendiaminya berada dalam kisaran 318.600 jiwa. Wilayah Kasultanan Yogyakarta terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Pada 1903 Pemerintah Hindia-Belanda membagi Kasultanan Yogyakarta menjadi tiga *afdeeling*.⁴ *Pertama*, *afdeeling* Mataram yang meliputi Yogyakarta, Sleman, Kalasan, Kota Gede, Imogiri, dan Bantul. *Kedua*, *afdeeling* Kulon Progo yang terdiri dari Nanggulan, Kalibawang, dan Sentolo. Terakhir alias *afdeeling ketiga* ialah Gunung Kidul yang di dalamnya ada Wonosari. Kemudian, pada 1923 Pemerintah Hindia-Belanda kembali "mengusik" wilayah Kasultanan Yogyakarta dengan menetapkan batas-batasnya. Batas utara diputuskan berada di Kampung Jetis hingga Samirono, timur di Kampung Lowano, selatan membentang dari Kampung Lowano sampai Bugisan, sementara barat berada di Kampung Bugisan sampai Tegalrejo.⁵

Selain wilayah, Kasultanan Yogyakarta juga mengalami perubahan dari segi penduduk. Data statistik menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Yogyakarta terus bertambah dari tahun ke tahun. Pada 1856 jumlah penduduk Yogyakarta berada di angka 336.481 jiwa, kemudian pada 1890 menjadi 785.473 jiwa, dan secara mengesankan pada 1930 jumlahnya melonjak naik hingga mencapai 1.558.844 jiwa.⁶ Jumlah jutaan ribu jiwa itu terdiri dari tiga golongan penduduk. Orang-

1 Nur Aini Sulistyowati dan Heri Priyatmoko, *Toponim Kota Yogyakarta*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2019), hlm. 8-9.

2 *Negara agung* adalah istilah untuk menyebut pusat (ibu kota) dari sebuah kerajaan/kasultanan.

3 *Mancanegara* merupakan istilah untuk menyebut wilayah yang jauh dari *negara agung*.

4 *Afdeeling* ialah wilayah administratif terkecil buatan Pemerintah Hindia-Belanda. Kalau menggunakan definisi sekarang, dapat disamakan dengan kabupaten.

5 *Staatsblad van Nederlandsch Indie* 1903 Nomor 134 dan *Staatsblad van Nederlandsch Indie* 1923 Nomor 377 dalam Nur Aini Sulistyowati dan Heri Priyatmoko, *op.cit.*, hlm. 6.

6 *Ibid.*, hlm. 14.

orang Jawa masuk ke dalam golongan Melayu bersama dengan orang-orang dari Madura, Bugis, Bali, Lombok, dan Sunda. Dua golongan lainnya ada Timur Asing yang di dalamnya termasuk orang Cina dan Arab, serta golongan Eropa yang mencakup mereka yang dari Belanda, Jerman, Prancis, juga Spanyol/Portugal. Setiap golongan mempunyai pola sosial-ekonomi yang tercermin dari profesinya. Golongan Eropa biasa berprofesi menjadi pegawai administrasi (pemerintahan) dan berada di sektor perkebunan. Profesi tersebut menjadikan mereka menduduki kelas sosial teratas. Selanjutnya, golongan Timur Asing biasanya menghidupi dirinya dengan bekerja sebagai pedagang, mandor, maupun penarik pajak. Sisanya yaitu golongan Melayu yang secara sederhana terdiri dari penguasa tradisional dan *kawulo alit*.⁷

Hamengku Buwono sebagai penguasa tradisional menjadi seorang Jawa yang memegang kuasa tertinggi di Kasultanan Yogyakarta. Dalam tulisan ini yang menjadi fokus adalah diplomasi yang diwakili oleh Hamengku Buwono IX (1940-1988). Kendati begitu, sejatinya sebelum periode tersebut para pendahulunya sebenarnya sudah melakukan diplomasi, walaupun dengan tindakan dan pemaknaan yang berbeda. Misalnya saja, Hamengku Buwono VIII (1921-1939) yang kerap berdiplomasi dengan orang-orang Belanda yang memegang kuasa di Pemerintahan Hindia-Belanda. Beliau lihai dalam melakukan diplomasi budaya dengan cara melakukan seremonial budaya yang melibatkan pihak Pemerintah Hindia-Belanda. Selain itu, diadakan pula jamuan makan dengan menu makanan yang menggunakan gaya barat. Seremonial dan jamuan makan menyiratkan bahwa ayah dari Hamengku Buwono IX ini mengakui dan menghormati budaya Barat. Perasaan diakui dan dihormati membuat orang-orang Belanda bersedia untuk bernegosiasi dengan sang raja. Apa yang dilakukan oleh Hamengku Buwono VIII dapat diistilahkan sebagai “melunak untuk bertahan”.⁸

Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, Hamengku Buwono IX yang kala itu menggantikan ayahnya untuk menjadi raja di Kasultanan Yogyakarta membuat keputusan yang berdampak besar bagi posisi Yogyakarta, sekaligus bagi posisi dirinya. Ada dua keputusan di awal kemerdekaan yang mencerminkan bahwa Hamengku Buwono IX berdiri di sisi Yogyakarta dan Indonesia. Satu hari setelah proklamasi (18 Agustus 1945), beliau menyatakan bahwa dirinya mendukung penuh kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, melalui Amanat 5 September 1945 Hamengku Buwono IX bersama dengan Paku Alam VIII dari Kadipaten Pakualaman menyatakan bahwa kedua kerajaan di Yogyakarta bersedia bergabung ke dalam Republik Indonesia.⁹ Kesediaan itu dapat dimaknai sebagai kepercayaan penuh atas Republik Indonesia yang baru saja berdiri, sekaligus langkah untuk mengamankan rakyat Yogyakarta di bawah payung republik.

Kesediaan Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman semakin terwujud nyata ketika mereka sepakat untuk mengirimkan surat melalui kurir kepada Presiden Soekarno. Isi suratnya adalah menawarkan Yogyakarta untuk dijadikan ibu kota sementara Indonesia, mengingat kondisi Jakarta yang kala itu sudah tidak memungkinkan. Tawaran tersebut disambut baik oleh Soekarno. Pada 3 Januari 1946 Soekarno beserta jajarannya secara diam-diam meninggalkan Jakarta dengan menggunakan kereta api yang lampunya dimatikan. Paginya, pada 4 Januari 1946 mereka sampai di Yogyakarta.¹⁰ Peristiwa itu pun menandai dimulainya suatu babak baru bagi Yogyakarta dan Indonesia.

Sebagai sebuah ibu kota sementara, Hamengku Buwono IX bersama dengan Kasultanan Yogyakarta merasa perlu untuk menjadi “tuan rumah” yang kooperatif. Kasultanan Yogyakarta membantu Republik Indonesia secara material dan non-material. Secara material, pengeluaran

7 Ryadi Goenawan dan Darto Harmoko, *Sejarah Sosial Daerah-Daerah Istimewa Yogyakarta: Mobilitas Sosial D.I. Yogyakarta Periode Awal Abad Duapuluhan*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan, 1993), hlm. 23.

8 Ayu Amalya Ma'as dan Dewi Yuliati, “Diplomasi Kebudayaan Antara Keraton Yogyakarta dan Pemerintah Kolonial Belanda Pada Masa Pemerintahan Sultan Hamengku Buwana VIII, 1921-1939” dalam *Historiografi*, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2020, hlm. 147.

9 Baha'Uddin et.al, *Masyarakat Pedesaan dan Revolusi Kemerdekaan di Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Yogyakarta: Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, 2020), hlm. 1.

10 Rhien Soemohadiwidjojo, *Bung Karno Sang Singa Podium*, (Yogyakarta: Second Hope, 2017), hlm. 18-19.

Yogyakarta menjadi meningkat drastis mencapai belasan juta. Sedangkan, pemerintah Indonesia hanya mampu mengganti pengeluaran sebesar Rp 1.250.000.¹¹ Kemudian secara non-material, berbagai tindakan dilakukan untuk membuat republik berada di posisi yang cukup baik, salah satunya melalui diplomasi. Diplomasi ini tentu dilakukan dengan tidak terlepas dari apa yang pernah dicontohkan oleh sang ayah, Hamengku Buwono VIII. Diplomasi dalam periode Hamengku Buwono IX dimaknai sebagai tindakan yang membawa suatu kepentingan khusus dan/atau resmi untuk kebaikan posisi negara di mata internasional. Tindakan di sini merujuk pada tindakan kolektif, baik yang dilakukan atas inisiatif Kasultanan Yogyakarta maupun dalam rangka membantu menyelesaikan program pemerintah. Sekalipun nantinya ibu kota kembali lagi ke Jakarta, tetapi Kasultanan Yogyakarta melalui Hamengku Buwono IX tetap membantu menyelesaikan diplomasi Indonesia. Tulisan ini memaparkan lebih jauh mengenai bentuk-bentuk diplomasi yang dilakukan oleh Kasultanan Yogyakarta melalui tokoh sentralnya, Hamengku Buwono IX. Bentuk-bentuk diplomasi inilah yang menjadi bukti adanya catatan historis atas "*Kasultanan Yogyakarta and Its Contribution for the Nation*" (Kasultanan Yogyakarta dan Kontribusinya untuk Negara).

1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup

Kontribusi Kasultanan Yogyakarta dan Hamengku Buwono IX bagi Indonesia yang diwujudkan melalui diplomasi menunjukkan suatu konsistensi untuk mendukung kemerdekaan secara nasional. Hal itu dapat ditelusuri dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan permasalahan seperti (1) bagaimana kondisi Yogyakarta sebagai ibu kota sementara Republik Indonesia?; (2) apa saja bentuk-bentuk diplomasi yang dilakukan dan/atau dibantu oleh Kasultanan Yogyakarta dan Hamengku Buwono IX?; serta (3) sejauh mana diplomasi itu memberi dampak bagi Republik Indonesia? Jawaban atas ketiga pertanyaan tersebut tentu menjadi bahan refleksi historis untuk memahami Yogyakarta sebagai daerah yang menyandang gelar "istimewa".

Tulisan ini merentang pada masa awal kemerdekaan Indonesia, sekitar 1949 sampai 1952. Angka 1949 dipilih karena merupakan tahun dimana diplomasi pertama dilakukan oleh Hamengku Buwono IX dalam kerangka Republik Indonesia melalui Serangan Umum 1 Maret 1949. Sedangkan, 1952 berpedoman pada pelaksanaan *goodwill mission* ke Burma yang dipimpin oleh sang Raja Yogyakarta. Kendati begitu, periode sebelum 1949 akan dibahas untuk memberikan gambaran kondisi Yogyakarta sebagai ibu kota sementara. Pemilihan 1952 juga bukanlah tahun yang pakem, melainkan didasarkan pada penemuan atas arsip dan/atau sumber sejarah. Alhasil, tidak menutup kemungkinan bahwa tulisan ini masih bisa dikembangkan oleh peneliti selanjutnya yang menemukan diplomasi lain yang melibatkan Kasultanan Yogyakarta pada awal kemerdekaan Indonesia. Adapun batasan spasialnya bersifat fleksibel. Hal ini disebabkan ada beberapa bagian yang tidak berlokasi di Yogyakarta dan tetap dibahas karena mempertimbangkan aspek kontribusi Hamengku Buwono IX.

1.3 Tujuan

Tulisan ini dibuat dengan tujuan untuk menjelaskan peran Kasultanan Yogyakarta bagi Indonesia melalui jalur diplomasi. Kendati yang terlihat sebagai tokoh sentral adalah Hamengku Buwono IX, tetapi sang sultan yang bernama kecil Dorodjatun ini tidak dipandang sebagai seorang individu. Ia dipandang sebagai representasi dari masyarakat Yogyakarta secara umum dan Kasultanan Yogyakarta secara khusus. Bahkan, Hamengku Buwono IX juga bisa merepresentasikan masyarakat Indonesia. Secara spesifik, diplomasi yang ditampilkan dibagi menjadi empat jenis. Diplomasi *pertama* melalui Serangan Umum 1 Maret 1949 yang menunjukkan bentuk diplomasi bersenjata. Diplomasi yang *kedua* adalah diplomasi bilateral berupa penanda tangan penyerahan

¹¹ *The Straits Times*, 27 Mei 1947 dalam Baha'Uddin et.al, *op.cit.*, hlm. 4.

kedaulatan Indonesia sebagai hasil dari Konferensi Meja Bundar (KMB). *Ketiga*, diplomasi budaya saat kunjungan Pandit Jawaharlal Nehru yang menampilkan Kasultanan Yogyakarta sebagai latar lokasi. Lalu *keempat*, saat Hamengku Buwono IX memimpin diplomasi persahabatan melalui *goodwill mission* ke Burma. Dengan demikian, tulisan ini menampilkan diplomasi dan Kasultanan Yogyakarta dari sudut pandang yang variatif.

1.4 Tinjauan Pustaka

Belum ada penelitian yang secara identik membahas diplomasi Kasultanan Yogyakarta pada awal kemerdekaan Indonesia. Kendati demikian, beberapa penelitian terdahulu bisa menjadi referensi yang patut untuk ditinjau. Tinjauan pustaka kali ini dilakukan dengan membaginya secara tematik. Perihal kondisi Yogyakarta pada awal kemerdekaan Baha'Uddin bersama dengan timnya menyebutkan bahwa masyarakat Yogyakarta sempat kesulitan dengan statusnya sebagai ibu kota sementara Republik Indonesia. Gencatan senjata yang semula berada di Jakarta menjadi berpindah pula ke Yogyakarta yang puncaknya pada rangkaian Agresi Militer Belanda (AMB) II.¹² Mengenai AMB II, Djamal Marsudi menjelaskan kronologinya secara runtut yang dimulai dengan “hujan bom” di atas Maguwo sekitar pukul 05.30 WIB pada 19 Desember 1948.¹³ Dari pemaparan Djamal Marsudi dapat dijumpai pula fakta bahwa sekalipun kesulitan, masyarakat Yogyakarta tetap kompak bersama dengan Hamengku Buwono IX untuk mendukung Indonesia.

Kekompakan Hamengku Buwono IX dengan masyarakat Yogyakarta dapat dilihat melalui Serangan Umum 1 Maret 1949 yang menjadi wujud dari diplomasi bersenjata. Batara R. Hutagalung menyampaikan bahwa Serangan Umum 1 Maret 1949 secara formal dilaksanakan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI). Tetapi secara informal, praktik di lapangan TNI dibantu oleh para laskar yang merupakan masyarakat Yogyakarta. Selain itu, Hamengku Buwono IX juga terlibat menjadi inisiator serangan bersama dengan Soeharto.¹⁴ Mengenai rincian dari Serangan Umum 1 Maret 1949 termasuk dengan segala yang melingkupinya telah dijelaskan secara lengkap dalam Seskoad.¹⁵ Meskipun begitu, analisa mendalamnya sebagai diplomasi bersenjata belum disampaikan oleh kedua buku tersebut. Lebih dari itu, Serangan Umum 1 Maret 1949 hanya menjadi sub pembahasan dalam tulisan ini, sehingga porsinya tidak mendominasi dan tidak terkesan mereplikasi.

Sedari tadi sudah disebutkan mengenai Hamengku Buwono IX dan tinjauan mengenainya dirasa juga perlu untuk melihat sejauh mana kontribusinya telah ditulis. Tim Tempo pernah merangkum kontribusi Hamengku Buwono IX yang diterbitkan menjadi sebuah buku. Kontribusi yang ditampilkan oleh Tempo menitikberatkan pada kontribusi politik dan ekonomi.¹⁶ Tetapi mengenai diplomasi yang dilakukan dan/atau diwakilinya belum banyak diperbincangkan. Berikutnya, ada buku yang merupakan kumpulan tulisan yang dihimpun oleh Mohamad Roem dan disunting oleh Atmakusumah. Dalam kumpulan tulisan ini dapat dijumpai secuplik kisah Hamengku Buwono IX dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) dan pengalaman dari orang-orang yang pernah berjejaring dengannya.¹⁷ Kumpulan tulisan tersebut bisa menjadi tinjauan untuk menganalisa sikap Kasultanan Yogyakarta dan Hamengku Buwono IX yang berkaitan dengan diplomasi. Dari kesemua karya yang telah ditinjau dapat ditegaskan bahwa bentuk-bentuk diplomasi yang hendak dibahas dalam tulisan ini belum banyak dianalisa oleh penelitian terdahulu. Dua bentuk diplomasi sudah dijelaskan dalam beberapa buku, tetapi belum dianalisa. Sementara, dua bentuk diplomasi lainnya benar-benar baru disajikan dan dianalisa dalam tulisan ini. Maka, penelitian ini dapat memperkaya khazanah historiografi mengenai Yogyakarta beserta sudut pandang yang melingkupinya.

12 Baha'Uddin et.al, *op.cit.*

13 Djamal Marsudi et.al, *Sejarah Perjuangan Yogya Benteng Proklamasi*, (Yogyakarta: Badan Musyawarah Musea, 1985).

14 Batara R. Hutagalung, *Serangan Umum 1 Maret 1949 dalam Kaleidoskop Sejarah Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia*, (Yogyakarta: LkiS, 2010).

15 Seskoad, *Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta: Latar Belakang dan Pengaruhnya*, (Jakarta: PT Citra Lamtoro Gung Persada, 1993).

16 Tim Tempo, *Seri Tempo: Hamengku Buwono IX Pengorbanan Sang Pembela Republik*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2015).

17 Atmakusumah (ed), *Takhta untuk Rakyat: Celah-Celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011).

1.5 Metode

Tulisan ini dapat digolongkan dalam studi sejarah politik. Proses penulisannya menggunakan metode penelitian sejarah. Edgar Krentz mendefinisikan metode penelitian sejarah sebagai cara untuk mengumpulkan sumber dari peristiwa masa lampau, mengevaluasinya, menghubungkan sumber untuk memperoleh pertalian terstruktur, lalu menyajikannya dalam bentuk tulisan.¹⁸ Definisi lain disampaikan oleh Daliman dalam bukunya “*Metode Penelitian Sejarah*”. Menurutnya, metode penelitian sejarah merupakan metode dan penulisan sejarah dengan menggunakan cara, prosedur, atau teknik yang sistematis sesuai dengan asas dan aturan ilmu sejarah.¹⁹ Kuntowijoyo menyebutkan bahwa metode penelitian sejarah dilakukan dengan menggunakan lima tahapan yang terdiri dari (1) pemilihan topik; (2) pengumpulan sumber (heuristik); (3) verifikasi (kritik sejarah); (4) interpretasi yang di dalamnya terdiri dari analisa dan sintesis; serta (5) penulisan sejarah (historiografi).²⁰

Pemilihan topik didasarkan pada ketersediaan sumber. Berikutnya, sumber yang dikumpulkan untuk membuat tulisan ini dapat dibagi menjadi sumber primer dan sekunder. Sumber primer dimaknai sebagai sumber sezaman yang didapatkan oleh penulis melalui peninjauan atas arsip dan surat kabar. Arsip mengenai kunjungan Nehru ke Yogyakarta didapatkan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), sedangkan berita mengenai *goodwill mission* dihimpun dari *microfilm* surat kabar yang disediakan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Sementara itu, sumber sekunder yang terdiri dari buku, jurnal, maupun tugas akhir yang berkaitan, diperoleh dari berbagai lokasi, mulai dari Perpustakaan Universitas Gadjah Mada (UGM), Perpustakaan Monumen Pers, laman *jstor*, *e-book*, hingga koleksi pribadi. Keseluruhan sumber yang sudah diperoleh, kemudian diverifikasi secara sederhana untuk selanjutnya diinterpretasi hingga menghasilkan fakta-fakta sejarah.²¹ Setelah itu, disusun dan diwujudkan menjadi tulisan sejarah (historiografi).

II. PEMBAHASAN

2.1 Yogyakarta pada Periode Awal Kemerdekaan

Proklamasi kemerdekaan Indonesia menjadi momentum yang mengukuhkan Indonesia sebagai sebuah negara republik. Dikarenakan telah menjadi republik, maka secara otomatis kerajaan-kerajaan yang ada di dalamnya perlu segera menentukan sikap. Pada 17 Agustus 1945 sore hari, Ki Hadjar Dewantara mengambil sikap dengan mengajak murid-murid Taman Siswa untuk melakukan pawai keliling Kota Yogyakarta dengan sepeda. Mereka berpawai sambil mewartakan kabar bahwa Indonesia telah merdeka.²² Sementara itu, Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII juga segera mengambil sikap. Mereka mengirimkan telegram kepada Soekarno selaku Presiden Republik Indonesia pada 18 Agustus 1945 yang isinya mereka dan seluruh rakyatnya mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sikap mereka dipertegas dengan mengeluarkan Amanat 5 September 1945 yang menyatakan bergabungnya Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman ke dalam republik. Adapun isi amanat yang ditandatangani oleh Hamengku Buwono IX itu sebagai berikut:²³

1. Bahwa Negeri Ngajogyokarto Hadiningrat jang bersifat Keradjaan adalah daerah istimewa dari Negara Republik Indonesia.
2. Bahwa Kami sebagai Kepala Daerah memegang segala kekuasaan dalam Negeri Ngajogyokarto Hadiningrat dan oleh karena itu berhubungan dengan keadaan pada dewasa ini segala urusan Pemerintahan dalam Negeri Ngajogyokarto Hadiningrat

18 Edgar Krentz, *The Historical Critical Method*, (Philadelphia: Fortress Press, 1975), hlm. 51.

19 Daliman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2012), hlm. 27.

20 Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), hlm. 69.

21 Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah: Pengantar Metode Sejarah*, (Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1975), hlm. 34.

22 Djamal Marsudi et.al, *op.cit.*, hlm. 48.

23 *Amanat Seri Paduka Ingkeng Sinuwun Kangdjeng Sultan*, Koleksi Arsip Museum Tamansiswa Dewantara Kirti Griya, Nomor 01.186.

mulai saat ini berada ditangan Kami dan kekuasaan-kekuasaan lainnja Kami pegang seluruhnja.

3. Bahwa perhubungan antara Negeri Ngajogyokarto Hadiningrat dengan Pemerintahan Pusat Negara Republik Indonesia bersifat langsung dan Kami bertanggungjawab atas Negeri kami langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Amanat tersebut kemudian direspons oleh Soekarno dengan mengeluarkan piagam yang isinya mengapresiasi sikap mereka sekaligus menyatakan bahwa Yogyakarta memiliki semangat nasionalisme yang tinggi dengan mendukung penuh Republik Indonesia sejak hari kelahirannya.²⁴

Masyarakat Yogyakarta bersukacita dengan sikap rajanya yang bersedia menggabungkan diri dengan republik. Pada 21 September 1945 serombongan masyarakat Yogyakarta mengibarkan Bendera Merah Putih di Balai Mataram. Kemudian, mereka bergerak ke Gedung *Cokan Kantai* (Gedung Agung) untuk menurunkan Bendera *Hinomaru* yang bercokol di atap gedung. Slamet, Sutan Iljas, Supardi, Samawi, Rusli, dan Siti Ngaisah segera naik ke atas *Cokan Kantai* lalu menurunkan *Hinomaru* dan menggantinya dengan Sang Saka Merah Putih. Saat itu pula, dikumandangkan lagu Indonesia Raya sebagai puncak sukacita mereka.²⁵ Di tanggal yang bersamaan, kesatuan kepolisian Yogyakarta yang berasrama di Jalan Patuk di bawah komando R.P. Sudarsono mengikrarkan diri untuk melaksanakan perintah Hamengku Buwono IX yang tertuang dalam Amanat 5 September 1945.²⁶ Mereka mengikrarkan diri untuk setia mendukung segala tindakan raja dan rakyat yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia. Mereka pun langsung terjun bergabung dengan rombongan yang ada di *Cokan Kantai* untuk mengawal demonstrasi di Jalan Malioboro. Serangkaian peristiwa 21 September 1945 ini menunjukkan penerapan “*manunggaling kawula Gusti*”, sekaligus gelora nasionalisme dari seluruh lapisan masyarakat Yogyakarta.

Sebagai bagian dari republik, Kasultanan Yogyakarta merasa perlu membantu Indonesia apabila berada dalam kondisi yang sulit. Ketika Jakarta sebagai ibu kota negara berada dalam kondisi genting, Hamengku Buwono IX secara sukarela menawarkan agar ibu kota dipindahkan sementara ke Yogyakarta. Pada 2 Januari 1946 ia mengirimkan pesan melalui seorang kurir ke Jakarta untuk disampaikan kepada presiden mengenai tawaran tersebut. Soekarno pun menyambut baik tawaran dari sang Raja Yogyakarta. Pada 3 Januari 1946 dalam gelapnya malam, Soekarno beserta jajarannya menyusup ke gerbong kereta api yang lampunya sengaja dimatikan. Tujuannya, untuk mengelabui patroli Belanda agar disangka gerbong itu adalah gerbong kosong. Pagi harinya, 4 Januari 1946 rombongan Soekarno telah tiba di Yogyakarta dan disambut oleh Hamengku Buwono IX, serta Paku Alam VIII. Rombongan dari Jakarta itu pun segera memulai aktivitasnya di ibu kota sementara dengan berkantor di bekas rumah gubernur Hindia-Belanda yang kini dikenal sebagai Gedung Agung.²⁷

Sebagai konsekuensi atas posisinya yang kala itu menjadi ibu kota sementara, serangan fisik yang tadinya dialamatkan kepada Jakarta turut berpindah ke Yogyakarta melalui serangkaian Agresi Militer Belanda (AMB) I dan II. AMB I dimulai pada 19 Juli 1947 sekitar pukul 17.00 WIB. Untuk wilayah Yogyakarta, pada 21 Juli 1947 pukul 07.00 WIB lapangan terbang Maguwo dihujani bom oleh pihak Belanda. Serangan itu menjadi serangan pertama yang berlangsung kurang lebih 15 menit. Sore harinya, serangan kedua kembali menghujani Maguwo sekitar pukul 15.00 WIB.²⁸ Peristiwa lain terjadi pada 29 Juli 1947. Sebuah pesawat *Dakota VT-CLA* dari India yang membawa bantuan obat-obatan, ditembak jatuh oleh dua pesawat *Kitty Hawk* milik Belanda. Dalam peristiwa tersebut 5 orang awak asing dan 4 orang awak asal Indonesia meninggal dunia. Keempat awak asal

24 Baha'Uddin et.al, *op.cit.*, hlm. 1.

25 Tashadi et.al, *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945-1949) di DIY*, (Yogyakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan DIY, 1987), hlm. 63.

26 Sutrisno Kutoyo, *Sri Sultan Hamengku Buwono IX: Riwayat Hidup dan Perjuangan*, (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1997), hlm. 139.

27 Baha'Uddin et.al, *op.cit.*, hlm. 4.

28 Tashadi et.al, *op.cit.*, hlm. 114.

Indonesia itu adalah sang perwira berprestasi-Adi Sucipto, Adi Sumarmo, Abdulrahman Saleh, dan Arifin.²⁹ Peristiwa tersebut menimbulkan kecaman dunia internasional terhadap Belanda. Dewan Keamanan Persatuan Bangsa Bangsa (DK-PBB) mendesak Belanda untuk segera mengakhiri agresi militernya. Kecaman dan desakan dari dunia internasional pun berhasil menyitukan nyali Belanda hingga mereka memutuskan untuk menghentikan agresi militernya pada 5 Agustus 1947.³⁰

Namun, tampaknya penghentian agresi militer hanya berlangsung sesaat. Pada 19 Desember 1948 pihak Belanda kembali melancarkan agresi militernya yang menandai dimulainya AMB II. Pihak Belanda melancarkan serangan dengan cara licik. Mereka menggunakan jadwal latihan perang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang sudah diumumkan oleh Jenderal Soedirman. Oleh karena itu, ketika pukul 05.15 WIB saat ada suara pesawat udara yang melintasi Yogyakarta, masyarakat tidak mengiranya sebagai pesawat musuh. Masyarakat mengira itu adalah pesawat yang sedang mengadakan latihan perang.³¹ Pada pukul 05.30 WIB Maguwo telah dihujani bom oleh pesawat *Mitchell* (B-25). Di atas Maguwo berputar-putar pula pesawat *Spitfire*, *Mustang*, *Lookhead*, dan *Dakota*.³² Setelah berhasil mengendalikan situasi di Maguwo, sekitar pukul 07.00 WIB ada 15 pesawat *Dakota* yang melakukan pendaratan di sana. Pesawat tersebut menerjunkan pasukan baret merah dan peralatannya (senjata).³³ Pasukan baret merah pun bergabung dengan pasukan bantuan lain yang datang dari arah Magelang dan Surakarta. Di bawah pimpinan Letnan Kolonel van Beek, mereka bergerak ke arah Kota Yogyakarta untuk menduduki Gedung Agung yang menjadi kantor presiden dan segenap jajarannya. Sekitar pukul 15.00 WIB pasukan van Beek tiba di depan Gedung Agung. Sempat terjadi baku tembak selama kurang lebih 30 menit. Pada pukul 15.30 WIB Soekarno keluar dari Gedung Agung untuk menemui van Beek. Ia menyampaikan pernyataan menyerahkan diri dan menyerahkan gedung agung yang ditempatinya. Dengan demikian, jatuhlah Yogyakarta ke tangan Belanda. Peristiwa inilah yang menjadi pemicu dimulainya diplomasi dari Kasultanan Yogyakarta dalam bingkai Republik Indonesia melalui Serangan Umum 1 Maret 1949.

2.2 Bentuk dan Dampak Diplomasi

2.2.1 Serangan Umum 1 Maret 1949

Serangan Umum 1 Maret 1949 bisa dikategorikan sebagai diplomasi bersenjata. Beberapa pihak ada yang mengistilahkannya sebagai diplomasi fisik. Pasalnya, serangan tersebut diwarnai dengan aksi tembak menembak dan pengepungan yang dilakukan oleh TNI bersama dengan masyarakat Yogyakarta. Setelah Yogyakarta berhasil diduduki oleh Belanda dalam AMB II pada 19 Desember 1948, Hamengku Buwono IX dijadikan sebagai tahanan rumah. Ia hanya boleh bergerak secara leluasa di dalam kediamannya, keraton Kasultanan Yogyakarta. Sementara itu, para pemimpin Indonesia seperti Soekarno-Hatta dan para menteri telah diasingkan secara terpisah ke tempat yang saling berjauhan.

Dalam kondisinya yang serba terbatas, Hamengku Buwono IX pun merenung untuk memikirkan cara yang bisa membebaskan dirinya dan bangsanya dari situasi buruk ini. Akhirnya, sebuah cara berhasil terpikir olehnya. Ia berencana untuk membuat serangan balasan kepada pasukan Belanda. Hamengku Buwono IX pun mengirimkan surat kepada Jenderal Soedirman yang sedang bergerilya. Ia menjelaskan rencananya mengenai urgensi serangan balasan. Soedirman setuju dan menyarankan agar rencana ini dibahas juga dengan Letnan Kolonel Soeharto. Pembahasan dengan Soeharto berlangsung pada 13 Februari 1949. Soeharto datang ke Kasultanan Yogyakarta dengan menyamar menggunakan pakaian *abdi dalem*. Kontak-kontak selanjutnya dilakukan melalui

29 Irna Hanny Nastoeti Hadi Soewito et.al, *Awal Kedirgantaraan di Indonesia: Perjuangan AURI 1945-1950*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 107.

30 Nyoman Dekker, *Sejarah Revolusi Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 75.

31 Yayasan Dharma Sakti Pancasila, *Sejarah Monumen Yogya Kembali*, (Yogyakarta: CV Adi Sarana, 1994), hlm. 59.

32 Djamal Marsudi et.al, *op.cit.*, hlm. 130.

33 Yayasan Dharma Sakti Pancasila, *op.cit.*, hlm. 61.

perantara kurir untuk mengurangi kecurigaan pihak Belanda. Pada awalnya, serangan umum hendak dilaksanakan pada 28 Februari 1948. Namun, tanggal tersebut terlanjur bocor ke pihak musuh. Serangan pun dialihkan pada keesokan harinya, 1 Maret 1949 bersamaan dengan bunyi sirene.³⁴

Tepat pukul 06.00 WIB saat sirene berbunyi, TNI yang dikomandoi oleh Soeharto menyerbu dari berbagai sektor. Sektor selatan dan timur dipimpin oleh Mayor Sardjono yang bertugas menyerang kedudukan Belanda di Kantor Pos, Gedung Agung, Benteng Vredenburg, Kotabaru, Lempuyangan, sampai Jembatan Bantar. Kemudian, sektor barat yang dikepalai oleh Mayor Ventje Sumual menyerang di wilayah yang hampir sama yakni Malioboro, Hotel Tugu, Hotel Merdeka, dan Patuk. Sektor utara bersama dengan Mayor Kusno menyerang kedudukan Belanda di Maguwo dan menutup jalan ke Kota Yogyakarta dari arah utara. Terakhir, sektor kota yang berada di bawah kepemimpinan Letnan Amir Murtono dan Letnan Masduki mengamankan bagian dalam kota. Serangan dari berbagai sektor ini membuat pasukan Belanda kewalahan dan Yogyakarta berhasil diduduki kembali oleh TNI selama kurang lebih enam jam. Pasukan TNI mundur dari Yogyakarta setelah Hamengku Buwono IX memberi kabar bahwa pasukan bantuan untuk Belanda telah berangkat dari Magelang.³⁵

Selanjutnya, Radio AURI PC-2 yang berada di Playen, Gunung Kidul dengan segera menyiarkan berita mengenai keberhasilan Serangan Umum 1 Maret 1949 ke Bukit Tinggi. Dari Bukit Tinggi berita diteruskan ke India hingga akhirnya sampai kepada PBB.³⁶ PBB yang mendengarnya pun “murka” terhadap Belanda yang sebelumnya menyatakan bahwa Republik Indonesia telah musnah. Ternyata, Indonesia masih eksis dan tengah berjuang mengusir pihak Belanda sebagai musuh yang tak diundang. Demikianlah, bagaimana diplomasi bersenjata dari Hamengku Buwono IX yang merupakan bagian dari Kasultanan Yogyakarta berhasil menarik simpati dari berbagai pihak, sekaligus memperbaiki posisi Indonesia di mata dunia internasional. Sekalipun sang Sultan tidak turun langsung ke medan pertempuran dalam artian tidak ikut mengangkat senjata, tetapi posisi sentralnya di balik layar tidak bisa diabaikan.

2.2.2 Tanda Tangan yang Menentukan

Sejarah melaju tanpa henti.

Hasil-hasil KMB disahkan.

Republik Indonesia Serikat (RIS) berdiri.

Negara Kesatuan RI diproklamasikan.

Sri Sultan Hamengku Buwono IX, seorang kesatria, negarawan, demokrat, maju terus sebagai Menteri dan Wakil Presiden.

Saya pulang kembali ke tengah-tengah masyarakat.

Kami berpisah.

Begitulah kutipan se bait sajak indah yang didapat dari tulisan Rh. Kusnan, seorang guru yang pernah bertemu secara pribadi dengan Hamengku Buwono IX.³⁷ Kutipan di atas menunjukkan bahwa sekalipun tidak ikut ke Den Haag, tetapi Hamengku Buwono IX memiliki peran yang signifikan

34 Caroline Slamet Margiyati, “Peranan Sultan Hamengku Buwono IX Pada Masa Pergerakan Nasional 1940-1949” dalam *Skripsi*, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sanata Dharma, Tahun 2007, hlm. 113-117.

35 *Ibid.*, hlm. 117-119.

36 Nurdianto, *Biografi Pahlawan Nasional Sultan Hamengku Buwono IX*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1998), hlm. 46.

37 Atmakusumah, *op.cit.*, hlm. 234.

dalam rangkaian Konferensi Meja Bundar (KMB). Ia tidak sekadar menjadi representasi dari Kasultanan Yogyakarta dan masyarakat Yogyakarta, melainkan pula representasi dari masyarakat Indonesia. KMB atau *De Ronde Tafel Conferentie* (RTC) berlangsung sejak 23 Agustus sampai 2 November 1949. Konferensi ini digelar untuk menyelesaikan permasalahan antara Indonesia dengan Belanda. Delegasi Indonesia yang bertolak ke Den Haag terdiri dari Mohammad Hatta, Mohammad Roem, Mr. Supomo, dr. J. Leimena, Ali sastroamidjojo, Ir. Djuanda, dr. Sukiman, Suyono Hadinoto, Sumitro Djojohadikusumo, Abdul Karim Pringgodigdo, Kolonel T.B. Simatupang, dan Mr. Sumardi.³⁸

Alasan mengapa Hamengku Buwono IX tidak turut menjadi anggota delegasi adalah pertimbangan situasi. Apabila beliau disertakan, maka Republik Indonesia dapat dikatakan “kosong”. Mereka yang berada di Den Haag bisa diibaratkan sebagai “benteng” dari Indonesia. Apabila “benteng” terakhir juga harus ke sana, maka Indonesia menjadi sangat rapuh. Situasi Indonesia saat itu masih bisa dikategorikan rawan dan tidak ada yang tahu apakah pihak Belanda masih berkeinginan untuk melakukan agresi militer atau tidak.³⁹ Alasan lain ialah sang Raja Yogyakarta itu disiapkan untuk mewakili Indonesia sewaktu-waktu apabila diperlukan diplomasi dari dalam negeri. Benar saja, peran Hamengku Buwono IX dibutuhkan pada 27 Desember 1949 di hari kemenangan yaitu hari penyerahan dan pengakuan kedaulatan Indonesia.

Upacara penyerahan dan pengakuan kedaulatan berlangsung di dua tempat yakni di Amsterdam dan Jakarta. Upacara di Amsterdam dipimpin oleh Mohammad Hatta, sedangkan upacara di Jakarta dipimpin oleh Sri Sultan. Pada hari itu ribuan rakyat berkumpul untuk menyaksikan diturunkannya Bendera Belanda dan dinaikannya Sang Saka Merah Putih. Dihadapan Hamengku Buwono IX yang kini mewakili seluruh masyarakat Indonesia, tersaji selembar kertas yang membutuhkan tanda tangannya. Ia pun menandatangani bersama dengan Komisaris Tinggi Lovink sebagai perwakilan Belanda.⁴⁰ Sebuah tanda tangan dari Hamengku Buwono IX menjadi penentu bagi masa depan Indonesia. Tanda tangan yang menghentikan semua perjanjian yang mengekang pun menindas.⁴¹ Dengan satu tanda tangan tersebut diplomasi bilateral pun dinyatakan berhasil dan maknanya Kasultanan Yogyakarta melalui Hamengku Buwono IX menjadi bagian dalam proses panjangnya. Hamengku Buwono IX menjelma bukan sekadar sebagai tokoh lokal, melainkan juga tokoh nasional.

2.2.3 Kunjungan dari India

Terhitung sejak 28 Desember 1949 ibu kota Indonesia dikembalikan dari Yogyakarta ke Jakarta. Meskipun begitu, Yogyakarta tetap memasang “badan” untuk membantu urusan Indonesia, termasuk perihal diplomasi. Ketika Perdana Menteri India, Pandit Jawaharlal Nehru berkunjung ke Indonesia, Kasultanan Yogyakarta menjadi salah satu “tuan rumah” untuk kunjungan tamu agung itu. Rombongan Nehru tiba di Jakarta via Tanjung Priok pada 7 Juni 1950. Selanjutnya, pada 9 hingga 11 Juni 1950 mereka menghabiskan waktu di Bogor, Cipanas, dan Bandung. Barulah pada 11 Juni sore hari sampai 13 Juni 1950 rombongan berada di Yogyakarta.⁴²

Selama berada di Yogyakarta, rombongan Nehru tercatat mengunjungi Gedung Agung, Taman Siswa, Universitas Gadjah Mada (UGM), Kepatihan Yogyakarta, Kasultanan Yogyakarta, dan Candi Prambanan. Pada 11 Juni 1950 suasana Kota Yogyakarta mulai ramai. Di sepanjang jalan-jalan besar, bendera Merah Putih milik Indonesia dipasang berdampingan dengan bendera

38 Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notokusanto (eds), *Sejarah Nasional Indonesia VI: Zaman Jepang dan Republik* (Edisi Pemutakhiran), (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), hlm. 269.

39 Atmakusumah, *op.cit.*, hlm. 153.

40 *Ibid.*, hlm. 173.

41 *Ibid.*, hlm. 154.

42 Arsip Sekretariat Negara Kabinet Perdana Menteri 1950-1959, *Berkas Mengenai Kunjungan Tamu Agung Presiden RIS dan Perdana Menteri India, Pandit Jawaharlal Nehru di Jogjakarta. 11-13 Juni 1950*, Nomor 1964.

milik India. Masyarakat Yogyakarta berbaris rapi di pinggir jalan untuk menanti rombongan “tamun agung” melewati mereka. Kira-kira pukul 16.00 WIB rombongan India tiba di Maguwo disambut dengan pemutaran lagu kebangsaan Indonesia Raya yang disusul dengan lagu kebangsaan India. Di sepanjang jalan dari Maguwo sampai Gedung Agung, masyarakat Yogyakarta termasuk anak-anak memekikan kata “Merdeka” dengan lantang. Dalam pidatonya di Yogyakarta, Nehru menyampaikan bahwa “*Yogyakarta adalah simbol dari perjuangan Kemerdekaan Indonesia*”. Ia merasa sangat senang bisa mengunjungi Yogyakarta.⁴³

Lantas, dimana porsi kontribusi dari Kasultanan Yogyakarta? Kasultanan Yogyakarta menjadi salah satu lokasi yang dikunjungi oleh rombongan Nehru. Pihak Kasultanan yang diwakili oleh Hamengku Buwono IX menjamu (hidangan dan pertunjukan budaya) Nehru dengan sangat baik yang menghasilkan kesan positif antara kedua pihak, Indonesia dan India. Pidato dan pengakuan Nehru di atas menjadi bukti bahwa secara tidak langsung Yogyakarta turut ambil andil dalam suksesnya kunjungan yang dapat dikatakan sebagai diplomasi budaya ini. Di luar itu, secara tidak langsung Nehru seolah menegaskan posisi Yogyakarta sebagai daerah yang “istimewa” karena perjuangan dan kontribusinya.

2.2.4 Memimpin *Goodwill Mission* ke Burma

Goodwill Mission apabila diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dapat dimaknai sebagai misi baik. Misi baik disini maksudnya adalah pengiriman tim sebagai bagian dari diplomasi persahabatan yang bertujuan untuk mempererat solidaritas antar negara yang bersangkutan. Indonesia dan Burma tercatat memiliki riwayat hubungan yang sangat baik. Dalam koleksi Arsip Sekretariat Negara Kabinet Perdana Menteri 1950-1959 terdapat sebuah nota yang mencatat jejak kebaikan Burma terhadap Indonesia. Ada enam kebaikan Burma yang tercatat di lembar pertama arsip tersebut dimulai dari (1) saat Indonesia mengalami AMB; (2) saat penyerahan kedaulatan, Burma telah mengirim misi yang besar ke Jakarta; (3) pada Agustus 1950 *goodwill mission* dari Burma yang dipimpin oleh Menteri Pertanian turut merayakan ulang tahun kemerdekaan Indonesia; (4) kunjungan Jenderal Bo No Win dan Menteri Luar Negeri Burma; (5) menjual beras kepada Indonesia dengan harga yang lebih murah daripada Bangkok; dan (6) *goodwill mission* Burma ke Indonesia pada 15 Juli 1951 yang dipimpin oleh Menteri Kehakiman Burma.⁴⁴

Mengenai kebaikan yang ke-6, sebuah surat dari Perdana Menteri Burma, Thakin Nu bertanggal 12 Juli 1951 menyampaikan bahwa rombongan yang telah berangkat turut serta membawa salam dari seluruh rakyat Burma. Sang perdana menteri menyadari bahwa Indonesia dan Burma sama-sama punya riwayat perjuangan yang sulit untuk memperoleh kemerdekaannya. Untuk itu, ia berharap *goodwill mission* bisa menjadi sarana mempererat hubungan sebagai bangsa yang pernah bernasib sama dan menghadapi masalah ke depan juga bersama.⁴⁵ Pada 17 Juli 1951 Uk Hin Mau Latt selaku Menteri Kehakiman Burma bersama dengan rombongan yang terdiri dari 10 orang tiba di Bandung pada pukul 16.30 WIB. Bertempat di Hotel Savoye Homann, *goodwill mission* dibuka dengan dialog antara delegasi Burma dengan kementerian agama dan militer. Pada hari berikutnya bertempat di kantor gubernur, anggota delegasi yang beragama Islam mengadakan pertemuan dengan Alim Ulama Bandung. Pada pertemuan kali ini delegasi Burma menyampaikan pidatonya yang membahas kedudukan Agama Islam di Burma, pelajaran Agama Islam di sekolah umum, serta pergerakan pemuda di Burma yang tidak memandang agama. Pidato kemudian dilanjutkan dengan saling tanya jawab, *sharing*, dan makan bersama.⁴⁶

43 Kantor Kepolisian Daerah Istimewa Jogjakarta Bagian P.A.M, Pelaporan Kedatangan P.M. India Pandit Jawaharlal Nehru; satu rangkaian dengan nomor 1964.

44 Arsip Sekretariat Negara Kabinet Perdana Menteri 1950-1959, Berkas Mengenai *Goodwill Mission* Republik Indonesia ke Birma dan Timor Tengah. 12 Juli 1951-9 April 1954, Nomor 2010.

45 Prime Minister Letter from Burma; satu rangkaian dengan nomor 2010.

46 Verslag Pertemuan J.M. Menteri Kehakiman dari Birma, Uk Hin Mau Latt alias Abdullatief dengan Pihak Resmi dan dengan Para Alim Ulama Bandung; satu rangkaian dengan nomor 2010.

Dalam rangka membalas *goodwill mission* dari Burma, Indonesia juga berniat untuk mengirimkan *goodwill mission* ke Burma. Pada 30 Januari 1952 delegasi *goodwill mission* Indonesia ke Burma pun diumumkan dengan susunan sebagai berikut:⁴⁷

- Ketua : Dr. J. Leimena (Menteri Kesehatan)
Wakil ketua : Hamengku Buwono IX
Sekretaris : Maria Ulfah Santoso
Anggota : 1) A.B.M. Jusuf (Partai Buruh)
2) Hadjerati (Parindra)
3) Smith (Katholik-Anggota DPR)
4) Ng. Meliala (Demokrat-Anggota DPR)
5) Zainal Abidin Achmad (Masjumi-Anggota DPR)
6) Hadikusumo (PNI-Anggota DPR)
7) Abubakar Ariadiningrat (PIR-Anggota DPR)
8) Raka (PRN-Anggota DPR)⁴⁸
9) Suska (Kementerian Penerangan)
10) Moh. Muin B.A. (Kementerian Luar Negeri)
11) Soenarso (Kementerian Luar Negeri)
Wartawan : 1) Rosihan Anwar (Pedoman)
2) Mochtar Lubis (Indonesia Raya)
3) Dajat Hardjakusumah (Antara, Bandung)
4) Henk Rondonuwu (Pedoman Rakjat, Makassar)

Pada awalnya, pemimpin delegasi dijabat oleh Dr. J. Leimena selaku Menteri Kesehatan. Namun, surat kabar *Merdeka* terbitan 23 Februari 1952 menyatakan bahwa pemimpin delegasi diganti dari Leimena kepada Hamengku Buwono IX.⁴⁹ Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai alasan penggantian tersebut. Kendati demikian, hal ini menunjukkan bahwa Hamengku Buwono IX telah menunjukkan kontribusi Kasultanan Yogyakarta bagi diplomasi Indonesia untuk Burma. Pada 28 Februari 1952 rombongan *goodwill mission* dari Indonesia pun berangkat ke Burma via Bandara Kemayoran.⁵⁰

Rombongan *goodwill mission* Indonesia berada di Burma selama 10 hari. Kepada pers, Hamengku Buwono IX menyampaikan bahwa kunjungan ke sana dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat solidaritas dan/atau persahabatan antara Indonesia dengan Burma. Lebih lanjut lagi, sang Raja Yogyakarta ini juga menjelaskan bahwa dua hari sebelum kepulangan mereka, ada dua kapal Burma yang berangkat terlebih dahulu ke Indonesia untuk mengangkut “oleh-oleh” berupa beras.⁵¹ Zainal Abidin Ahmad, salah satu anggota delegasi yang juga anggota DPR menerangkan bahwa ia sangat mengapresiasi sikap baik dari orang-orang Burma. Sebagai contohnya, anggota parlemen Burma dengan antusias mendengarkan setiap pidato yang ada dalam rangkaian acara.⁵² Ini menunjukkan mereka sangat menghargai Indonesia.

Tidak ada penjelasan di arsip atau surat kabar mengenai apa saja tindakan kepemimpinan yang dilakukan oleh pemilik nama kecil Dorodjatun ini selama di Burma. Kendati demikian kedatangan dua kapal pengangkut beras dan testimoni dari anggota delegasi, telah cukup untuk menunjukkan

47 Pengumuman Nomor 65 Kabinet Perdana Menteri; satu rangkaian dengan nomor 2010.

48 Daftar singkatan: (1) DPR= Dewan Perwakilan Rakyat; (2) Parindra= Partai Indonesia Raya; (3) Masjumi= Majelis Syuro Muslimin Indonesia; (4) PNI= Partai Nasional Indonesia; (5) PIR=Persatuan Indonesia Raya; dan (6) PRN= Partai Rakyat Nasional.

49 “Siapa Ketua Misi Indonesia ke Birma?”, *Merdeka*, 23 Februari 1952.

50 “Foto dan Keterangannya”, *Merdeka*, 1 Maret 1952.

51 “Missi ke Birma Telah Kembali”, *Merdeka*, 10 Maret 1952.

52 “Laporan Missi ke Birma”, *Merdeka*, 24 Maret 1952.

bahwa *goodwill mission* di bawah kepemimpinan Hamengku Buwono IX bisa dikatakan sukses. Artinya, ada satu lagi diplomasi yang sukses lewat campur tangan Kasultanan Yogyakarta.

III. Kesimpulan

Kontribusi Kasultanan Yogyakarta melalui diplomasi menunjukkan empat hal yang dapat dimasukkan dalam historiografi Yogyakarta dan Indonesia. *Pertama*, Hamengku Buwono IX sebagai orang yang maju mewakili diplomasi tidak bisa dipandang sebagai individu, melainkan representasi dari masyarakat Yogyakarta pada umumnya dan Kasultanan Yogyakarta pada khususnya. Bahkan, Sri Sultan juga bisa tampil sebagai representasi masyarakat Indonesia. *Kedua*, bentuk diplomasi yang dihadirkan secara berurutan ialah diplomasi bersenjata melalui Serangan Umum 1 Maret 1949, diplomasi bilateral dengan penanda tanganan hasil KMB di Jakarta mengenai pengakuan dan penyerahan kembali kedaulatan, diplomasi budaya melalui jamuan untuk Perdana Menteri India-Pandit Jawaharlal Nehru, dan diplomasi persahabatan melalui *goodwill mission* ke Burma. Kesemuanya itu menyiratkan bahwa Kasultanan Yogyakarta lihai dalam melakukan berbagai bentuk diplomasi. Lebih dari itu, kasultanan juga secara sungguh-sungguh telah melaksanakan amanat yang dikeluarkannya yakni Amanat 5 September 1945. Kasultanan Yogyakarta sungguh setia dan siap sedia untuk mendukung kepentingan Republik Indonesia.

Ketiga, memandang dan/atau menilai suatu kontribusi tidak bisa dinyatakan dalam sebuah ukuran, besar atau kecilnya kontribusi. Pasalnya, Kasultanan Yogyakarta dalam setiap diplomasi tidak pernah melakukannya seorang diri, melainkan dengan bekerja sama dan/atau berkolaborasi. Serangan Umum 1 Maret 1949 dilakukan dengan bekerja sama dengan TNI; penanda tanganan keputusan KMB melibatkan anggota delegasi lain, baik yang di Jakarta maupun Den Haag; kunjungan dari Perdana Menteri India menempatkan Kasultanan Yogyakarta sebagai kolaborator bersama dengan daerah lain di Indonesia; serta *goodwill mission* ke Burma biarpun sebagai seorang ketua tetapi Hamengku Buwono IX tidak menonjolkan dirinya. Ini dapat dimaknai bahwa Kasultanan Yogyakarta menempatkan dirinya dalam posisi yang tepat. Pihak Kasultanan Yogyakarta maupun Hamengku Buwono IX tidak bermaksud mendominasi apapun dikarenakan menyadari bahwa kasultanan berada di bawah payung kesatuan Republik Indonesia. Selain dari sudut pandang diplomasi, keempatnya juga semakin menambah variatif sudut pandang mengapa Yogyakarta pantas menyanggah status sebagai daerah istimewa.

Terakhir alias *keempat*, berbagai bentuk diplomasi yang telah dijabarkan mampu menunjukkan sebuah kenyataan bahwa Kasultanan Yogyakarta dalam hal ini diwakili oleh Hamengku Buwono IX berhasil menjadi agen hubungan internasional bagi Indonesia. Berikutnya, kenyataan bahwa kajian historis seputar diplomasi yang dilakukan oleh Kasultanan Yogyakarta belum banyak ditulis, menunjukkan perlunya untuk lebih mendalami kontribusi kasultanan pada periode awal kemerdekaan. Akhir kata, semoga tulisan ini dapat menambah khazanah keilmuan seputar kontribusi Kasultanan Yogyakarta, sekaligus menjadi pematik bagi peneliti selanjutnya untuk menggali lebih dalam seputar historiografi Yogyakarta pada periode awal kemerdekaan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Arsip dan Surat Kabar:

- Amanat Seri Paduka Inggeng Sinuwun Kangdjeng Sultan*. Koleksi Arsip Museum Tamansiswa Dewantara Kirti Griya, Nomor 01.186.
- Arsip Sekretariat Negara Kabinet Perdana Menteri 1950-1959. *Berkas Mengenai Kunjungan Tamu Agung Presiden RIS dan Perdana Menteri India, Pandit Jawaharlal Nehru di Jogjakarta. 11-13 Juni 1950*. Nomor 1964.

Arsip Sekretariat Negara Kabinet Perdana Menteri 1950-1959. *Berkas Mengenai Goodwill Mission Republik Indonesia ke Birma dan Timur Tengah*. 12 Juli 1951-9 April 1954. Nomor 2010.

Arsip Sekretariat Negara Kabinet Perdana Menteri 1950-1959. *Kantor Kepolisian Daerah Istimewa Jogjakarta Bagian P.A.M, Pelaporan Kedatangan P.M. India Pandit Jawaharlal Nehru*. Nomor 1964.

Arsip Sekretariat Negara Kabinet Perdana Menteri 1950-1959. *Pengumuman Nomor 65 Kabinet Perdana Menteri*. Nomor 2010.

Arsip Sekretariat Negara Kabinet Perdana Menteri 1950-1959. *Prime Minister Letter from Burma*. Nomor 2010.

Arsip Sekretariat Negara Kabinet Perdana Menteri 1950-1959. *Verslag Pertemuan J.M. Menteri Kehakiman dari Birma, Uk Hin Mau Latt alias Abdullatief dengan Pihak Resmi dan dengan Para Alim Ulama Bandung*. Nomor 2010.

Merdeka, 1 Maret 1952. "Foto dan Keteranganannya".

Merdeka, 10 Maret 1952. "Missi ke Birma Telah Kembali".

Merdeka, 23 Februari 1952. "Siapa Ketua Misi Indonesia ke Birma?".

Merdeka, 24 Maret 1952. "Laporan Missi ke Birma".

Sumber Buku, Jurnal, dan Tugas Akhir:

Atmakusumah (ed). 2011. *Takhta untuk Rakyat: Celah-Celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Baha'Uddin et.al. 2020. *Masyarakat Pedesaan dan Revolusi Kemerdekaan di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Daliman. 2012. *Metode Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.

Dekker, Nyoman. 1989. *Sejarah Revolusi Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Goenawan, Ryadi dan Darto Harnoko. 1993. *Sejarah Sosial Daerah-Daerah Istimewa Yogyakarta: Mobilitas Sosial D.I. Yogyakarta Periode Awal Abad Duapuluhan*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Gottschalk, Louis. 1975. *Mengerti Sejarah: Pengantar Metode Sejarah*. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia.

Hutagalung, Batara R. 2010. *Serangan Umum 1 Maret 1949 dalam Kaleidoskop Sejarah Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia*. Yogyakarta: LkiS.

Krentz, Edgar. 1975. *The Historical Critical Method*. Philadelphia: Fortress Press.

Kuntowijoyo. 2013. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Kutoyo, Sutrisno. 1997. *Sri Sultan Hamengku Buwono IX: Riwayat Hidup dan Perjuangan*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.

Ma'as, Ayu Amalya dan Dewi Yuliati. 2020. "Diplomasi Kebudayaan Antara Keraton Yogyakarta dan Pemerintah Kolonial Belanda Pada Masa Pemerintahan Sultan Hamengku Buwana VIII, 1921-1939". *Historiografi*. Volume 1. Nomor 2.

- Margiyati, Caroline Slamet. 2007. "Peranan Sultan Hamengku Buwono IX Pada Masa Pergerakan Nasional 1940-1949". *Skripsi*. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sanata Dharma.
- Marsudi, Djamel et.al. 1985. *Sejarah Perjuangan Yogya Benteng Proklamasi*. Yogyakarta: Badan Musyawarah Musea.
- Nurdiyanto. 1998. *Biografi Pahlawan Nasional Sultan Hamengku Buwono IX*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto (eds). 2010. *Sejarah Nasional Indonesia VI: Zaman Jepang dan Republik (Edisi Pemutakhiran)*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Seskoed. 1993. *Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta: Latar Belakang dan Pengaruhnya*. Jakarta: PT Citra Lamtoro Gung Persada.
- Soemohadiwidjojo, Rhien. 2017. *Bung Karno Sang Singa Podium*. Yogyakarta: Second Hope.
- Soewito, Irna Hanny Nastoeti Hadi et.al. 2008. *Awal Kedirgantaraan di Indonesia: Perjuangan AURI 1945-1950*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sulistyowati, Nur Aini dan Heri Priyatmoko. 2019. *Toponim Kota Yogyakarta*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Tashadi et.al. 1987. *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945-1949) di DIY*. Yogyakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan DIY.
- Tim Tempo. 2015. *Seri Tempo: Hamengku Buwono IX Pengorbanan Sang Pembela Republik*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Yayasan Dharma Sakti Pancasila. 1994. *Sejarah Monumen Yogya Kembali*. Yogyakarta: CV Adi Sarana.

Tentang Penulis

Pratika Rizki Dewi. Lahir di Surakarta, 10 Juli 1998. Ia adalah alumni S1 Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada (UGM). Semasa kuliah, Pratika terpilih menjadi mahasiswa berprestasi (2019), menjadi asisten dosen, dan berkontribusi dalam berbagai proyek sejarah. Sekarang, ia berkarier sebagai peneliti lepas dan pegiat sejarah. Karya-karyanya dapat dijumpai di surat kabar, jurnal, maupun media *online*. Pratika menggemari kajian seputar Jawa, kolonial, 1950-an, sosial-ekonomi, dan perempuan. Untuk berbincang lebih lanjut, silahkan hubungi pratikadewi10@gmail.com.

THE ROLE OF KRATON YOGYAKARTA TO LOCAL WISDOM IMPROVEMENT DURING NATIONALISM MOVEMENT

R.M. Pramutomo
mpram60@gmail.com
(Indonesia Institute of the Arts Surakarta)

Abstract

Kraton Yogyakarta in the transition period before the turn of the era of Sultan Hamengku Buwana VII to the era of Sultan Hamengku Buwana VIII along with the rise of the strengthening nationalism movement in the Republic of Indonesia. At that time the Budi Utomo organization was working on a counterculture model for the Dutch Colonial Government. The culture they call the “dansah” culture is very disturbing a role model of local wisdom for the Indonesian people. Meanwhile, among the high aristocrats of the Yogyakarta Palace there is also a movement to anticipate the possibility of the melting of local wisdom among the people. through several high-ranking nobles the choice of a dance school outside the walls of the Kraton is the most efficient way to instill the value of local wisdom in countering the rampant “dansah” culture. This article is a historical view with the perspective of the contribution of the Yogyakarta Kraton in generating nationalism through the establishment of a tariff school outside the walls of the Kraton named Krida Beksa Wirama in 1918. The research method used is an archive study that has ethnochoreological content as the main approach.

Keywords: *role, local wisdom, archival studies, dance school*

***Full Paper dari judul dan abstrak ini terdapat pada Book Chapter yang diproduksi pada Simposium 2022**

Analisis Wacana Keteladanan Sikap Putri Keraton Yogyakarta: Keraton Inklusif Bukan Eksklusif

Endang Tri Irianingsih & W. Hendro Saputro

eryankusuma@gmail.com, waridihs@gmail.com

Universitas Sebelas Maret, Jl. Ir. Sutami 36 A Surakarta, Indonesia

Abstrak

Pada era modernisasi dan perkembangan teknologi informasi identitas menjadi hal yang penting dan rentan tergerus oleh perubahan. Identitas nasional sebagai jati diri bangsa merupakan unsur penting untuk melindungi generasi penerus bangsa. Identitas nasional menjadi penentu arah dan tujuan gerak ke depan bangsa. Namun dengan menjamurnya tren budaya global telah banyak mengaburkan identitas nasional. Banyak anak muda Indonesia lebih gandrung dengan budaya manca daripada budaya sendiri. Indonesia yang kaya akan budaya daerah juga telah tergerus dengan tren budaya global. Maka penting adanya benteng pertahanan identitas untuk melindungi identitas bangsa karena identitas bangsa merupakan aset berharga negara yang tidak ternilai harganya.

Kemajuan teknologi informasi semakin memudahkan dalam penyebaran segala bentuk informasi ke masyarakat. Media sosial kini bukan hanya sebagai media penghubung dalam bersosialisasi tetapi sekarang telah menjadi kebutuhan dan gaya hidup. Hal ini semakin memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pengaburan identitas karena kecenderungan orang untuk memposting atas dasar apa yang diinginkan dan dilihat *followers* sehingga tidak dapat menampilkan identitas yang dimiliki sesungguhnya. Generasi muda sekarang lebih suka mengikuti arus tanpa memperhatikan dampak yang ditimbulkan. Kehilangan identitas ini seperti layaknya menderita penyakit kanker yang menyerang perlahan kemudian menguasai secara keseluruhan tanpa terasa tiba-tiba mematikan. Seperti budaya global yang masuk perlahan kemudian menjadi tren. Tentu saja perubahan seperti ini juga membawa dampak perubahan pada perilaku. Jika dulu ada istilah *ora njawani* adalah untuk orang yang tidak mengerti budaya Jawa tetapi kini istilah itu sekarang sudah digunakan untuk orang yang sudah tidak mencerminkan perilaku dan nilai-nilai Jawa lagi. Artinya kini semakin terjadi degradasi nilai-nilai dalam masyarakat.

Keraton Yogyakarta sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya budaya Jawa dapat menjadi salah satu benteng pertahanan identitas nasional. Identitas nasional Indonesia tersusun dari berbagai identitas kultural kedaerahan, salah satunya adalah identitas kultural Jawa. Keraton Yogyakarta yang mampu mempertahankan eksistensinya di arus tren budaya global dapat menjadi *role mode* benteng pertahanan identitas. Keraton Yogyakarta mampu menampilkan image inklusif bukan eksklusif bagi masyarakat sehingga sampai sekarang masih disegani dan ditaati. Selain itu keraton Yogyakarta juga membuka diri terhadap perubahan jaman dengan mengikuti perkembangan teknologi informasi sehingga dapat menjangkau kaum milenial yang kebanyakan aktif bermedia sosial.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif interpretatif menggunakan pendekatan kajian kritis. Model analisis data menggunakan model analisis interaktif. Data yang digunakan adalah wacana-wacana tentang keraton Yogyakarta yang merakyat yang bersumber pada artikel berita *online* dan selanjutnya dianalisis menggunakan teori *critical discourse analysis*. Hasil analisis menunjukkan bahwa wacana yang mencerminkan sikap keteladanan dari para putri keraton Yogyakarta mampu mengedukasi masyarakat dan dapat menjadi tonggak dalam pemertahanan identitas kultural untuk ikut memberikan sumbangsih dalam penjagaan identitas nasional sebagai jati diri bangsa.

Dengan demikian keraton Yogyakarta dapat membantu menjaga dan memberikan perlindungan bagi generasi penerus bangsa melalui penanaman dan aplikasi nilai-nilai budaya Jawa. Selain itu, identitas kultural ini juga dapat menjadi ciri khas sebagai modal untuk mampu bersaing dalam dunia internasional karena dibalik wacana dunia tentang globalisasi telah ada resistensi wacana tandingan yaitu wacana autentisitas. Maka dengan adanya benteng pertahanan identitas ini, selain menyelamatkan dan memberikan perlindungan bagi generasi penerus bangsa Indonesia juga dapat menjadi modal dalam bersaing dalam kancah internasional.

Kata Kunci: Putri Keraton Yogyakarta; Benteng Pertahanan Identitas; Budaya Global; dan Identitas Kultural.

A. Pendahuluan

Keraton Yogyakarta telah melewati berbagai kondisi dan mampu bertahan dalam berbagai perubahan yang ada di Indonesia. Sejak jaman kerajaan, nmasa perang kemerdekaan, orde lama, orde baru, reformasi, dan sampai masuk pada abad ke-21 Keraton Yogyakarta mampu bertahan dalam segala bentuk perubahan jaman. Abad ke-21 adalah era modernisasi dan perkembangan teknologi informasi berkembang pesat. Sekarang tidak ada batas ruang dan waktu sehingga sangat memudahkan manusia dalam berkomunikasi (Ida, 2014). Namun, dalam suatu perubahan selain membawa dampak positif di sisi lain juga membawa dampak negatif.

Dampak negatif yang telah terjadi tetapi masih banyak orang tidak menyadari adalah adanya gerusan identitas. Pada era keterbukaan informasi dan kemudahan akses membuat semakin menjamurnya media *online* dalam berbagai platform baik berupa media sosial maupun media massa. Semua orang dapat mengakses dengan mudah di mana saja dan kapan saja. Sekarang banyak hal dapat menjadi viral asalkan mendapatkan banyak perhatian dari masyarakat dunia maya dan menaikkan jumlah *followers*. Adanya fenomena viral ini mempengaruhi banyak orang untuk membuat konten-konten dalam media sosial karena dorongan untuk menjadi viral. Hal ini membuat identitas seseorang menjadi kabur. Mereka tidak dapat menampilkan identitasnya secara nyata. Identitas yang ditampilkan sesuai tuntutan pasar karena mengikuti tren.

Tren tidak lepas dari pengaruh budaya global. Budaya global menjadi budaya bersama dan sedang digandrungi generasi muda. Seperti yang terjadi sekarang ini, banyak negara-negara terkena *hallyu wave* termasuk Indonesia. *Hallyu wave* menjadi tren mampu mendominasi dan menjadi budaya global yang banyak memberikan pengaruh. Adanya perkembangan budaya global ini nyatanya membuat budaya nasional bahkan budaya lokal juga ikut terancam eksistensinya. Serangan budaya global ini seperti penyakit kanker yang menyerang secara perlahan kemudian menguasai secara keseluruhan tanpa terasa tiba-tiba mematikan. Apalagi di jaman modernisasi dengan kecanggihan teknologi seperti ini semakin mudah menyebarkan segala bentuk-bentuk budaya tersebut. Media sosial menjadi platform arus utama dalam penyebaran budaya global karena paling banyak penggunaannya dan digandrungi generasi muda sekarang. Media sosial selain untuk membentuk hubungan dan jaringan sosial juga dapat dijadikan tempat mencari keuntungan. Bahkan media sosial sekarang ini pada perkembangannya dapat menjadi media penyebaran budaya.

Namun sayangnya budaya global yang masuk tidak terfilter karena mereka dapat dengan mudah memperolehnya secara langsung sehingga dengan mudahnya mereka juga terdominasi dengan tren jaman. Hal ini lama-kelamaan menggerus budaya sendiri karena mereka sudah terbuai dengan budaya lain yang menjadi pusat budaya global. Anak muda Jawa juga tidak luput dari tren ini. Sekarang banyak anak muda Jawa sudah tidak *njawani* lagi karena gerusan budaya global ini. Jika dulu ora *njawani* adalah istilah untuk orang yang tidak mencerminkan perilaku budaya Jawa (Mulder, 2005; Anderson 2016) tetapi kini istilah ini untuk menunjukkan adanya degradasi nilai-nilai budaya Jawa dalam masyarakat.

Jawa sebagai suku terbesar di Indonesia yang memiliki identitas kultural sebagai penyokong identitas nasional nyatanya juga tidak luput dari gerusan budaya global. Generasi tua banyak yang merasa gelisah dan gundah dengan fenomena ini tetapi juga tidak dapat melakukan perlawanan karena masyarakat Indonesia kini banyak didominasi kaum muda. Namun, memang tidak semua generasi muda melupakan budaya lokal karena masih memiliki kesadaran akan pentingnya budaya lokal sebagai identitas kultural yang menjadi jati diri. Seperti para putri Sultan Hamengku Buwana X dari Keraton Yogyakarta yang dapat dikatakan menjadi pilar budaya Jawa.

Putri keraton Yogyakarta menjadi pilar budaya Jawa bukanlah sebutan yang tanpa alasan, meskipun mungkin dianggap hal wajar. Hal ini dikarenakan kewajiban melestarikan dan menjaga budaya Jawa tentu sudah menjadi tugasnya sebagai putri keraton, tetapi pada era abad ke-21 ini di mana semua orang bebas mempunyai pilihan nyatanya mereka memilih untuk tetap mengemban amanah dan tugasnya dalam segala perubahan yang terjadi saat ini. Putri Keraton Yogyakarta menjadi pilar budaya Jawa baik dalam melestarikan, menjaga, maupun mengembangkan budaya Jawa.

Budaya global menjadi suatu wacana tersendiri pada abad ke-21 ini. Segala sesuatu didorong mengikuti arus globalisasi, tetapi ada hal yang dilupakan bahwa globalisasi memiliki kekurangan yaitu dapat memudarkan identitas kultural yang menimbulkan krisis identitas nasional. Krisis identitas dapat menyebabkan berbagai permasalahan sosial di masyarakat. Sekarang ini sangat dibutuhkan benteng-benteng pertahanan budaya untuk menjaga identitas nasional. Salah satunya adalah Keraton Yogyakarta menjadi benteng pertahanan budaya lokal yang memiliki identitas kultural. Identitas nasional Indonesia terkenal dengan keragaman budaya yang disokong oleh berbagai budaya lokal dengan berbagai identitas kulturalnya, salah satunya budaya Jawa. Keraton Yogyakarta sebagai pusat budaya Jawa harus mengambil peran dalam pemertahanan identitas nasional dengan turut andil menjaga budaya Jawa.

Keraton Yogyakarta melalui putri-putrinya dapat menjadi salah satu simbol identitas kultural Jawa. Hingga kini Keraton Yogyakarta dapat menampilkan ciri khas kejawaannya di berbagai kesempatan. Meskipun di tengah gempuran arus budaya global, Keraton Yogyakarta mampu mempertahankan eksistensinya dan tidak sekadar bertahan tetapi juga masih mampu menarik perhatian. Hal ini tentu tidak dapat terlepas dari peran para pilarnya yaitu para putri Keraton Yogyakarta. Tumbuh besar di dalam lingkungan yang kental budaya Jawa bahkan menjadi pusatnya budaya Jawa telah menempa para putri keraton menjadi sosok yang *njawani*. Namun demikian, para putri juga tidak ketinggalan jaman karena mampu mengikuti perkembangan dan tidak menutup diri dari terjadinya perubahan. Sikap putri Keraton Yogyakarta banyak menarik perhatian khalayak umum dan masuk dalam pemberitaan media massa. Bahkan beberapa diantaranya sempat viral karena sikap yang ditunjukkan putri Keraton Yogyakarta. Sikap tersebut adalah sikap-sikap yang mengandung nilai-nilai yang patut diteladani.

Putri keraton Yogyakarta dapat menjadi contoh dan figur dalam masyarakat. Sebagai perempuan yang menjadi figur tentu tidak mudah, karena segala gerak-gerik dilihat oleh khalayak. Seperti pemberitaan dalam media adalah salah satu sorotan yang diberikan khalayak umum pada putri Keraton Yogyakarta dan menghasilkan berbagai wacana. Maka sangat menarik untuk membahas wacana-wacana yang berkembang dalam masyarakat seputar putri Keraton Yogyakarta untuk menggali nilai-nilai keteladanan yang dapat digunakan sebagai ciri khas dalam membangun identitas kultural.

B. Kajian Pustaka

Identitas kultural didefinisikan menjadi dua yaitu pertama dalam hal satu budaya bersama semacam jati diri kolektif yang tersembunyi dalam banyak diri dan memiliki sejarah dan leluhur yang sama dan kedua menjadi (*becoming*) bukan cerminan dari keadaan (*state of being*) (Rutherford,

1990). Identitas kultural terus diciptakan dalam persamaan dan perbedaan. Identitas kultural adalah titik identifikasi yang tidak stabil yang dibuat dalam wacana sejarah dan budaya sehingga bukan lagi esensi tetapi sebuah *positioning*. Titik identifikasi ini diantaranya identifikasi kelas, gender, seksualitas, umur, etnisitas, kebangsaan, posisi politik (dalam berbagai isu), moralitas, agama, dan lain-lain serta masing-masing posisi diskursif ini tidak stabil (Barker, 2005: 232). Pada identitas kultural akan selalu ada politik identitas dan politik posisi di mana politik posisi ini akan menunjukkan watak politis identitas.

Identitas kultural di Indonesia sangat beragam karena terdapat berbagai suku dan budaya daerah. Namun budaya global pada era globalisasi semakin melunturkan identitas kultural seperti masyarakat kini yang lebih suka berbahasa asing dari pada bahasanya sendiri, bahasa Jawa misalnya (Suryandari, 2017). Identitas kultural sebagai representasi diri merupakan bagian dari pengalaman sejarah dan kode budaya yang sama dari suatu etnis, sehingga antara etnis satu dengan etnis yang lain akan memiliki perbedaan.

Identitas kultural juga menjadi representasi dari sesuatu yang berkaitan dengan ruang dan waktu yang dilalui. Maka apabila seseorang yang tidak lahir di Jawa tetapi sudah lama hidup dan tinggal di Jawa dirinya dapat merepresentasikan diri menjadi orang Jawa. Hal ini karena ia akan memiliki perilaku seperti lingkungannya di Jawa sehingga konstruksi dan cara berpikir menjadi ke-Jawa-an karena kehidupan yang dilalui telah menyatu dan membaaur dengan apa yang ada di Jawa. Akhirnya orang lain juga akan melihat sebagai orang Jawa. Maka penting sekali dalam mempertahankan identitas kultural asli yang dimiliki karena ruang dan waktu dapat mengubahnya.

Identitas kultural memiliki politik posisi sehingga juga dapat mempengaruhi wacana yang berkembang dalam masyarakat. Identitas kultural dapat memberikan tempat tersendiri dalam masyarakat untuk menjadi mayoritas atau minoritas. Maka sangat miris apabila identitas kultural kedaerahan kalah dengan identitas yang terbentuk dari budaya global, kalah di negeri sendiri. Identitas nasional yang disusun dari berbagai identitas kultural ini penting untuk dikuatkan dimulai dengan penguatan masing-masing identitas kultural agar jelas representasi diri yang ditampilkan tidak kabur kalah dengan identitas lain.

Adanya gempuran budaya global ini telah banyak memunculkan wacana pemertahanan identitas di tengah masyarakat. Namun selain itu juga perlu adanya wacana tentang identitas kultural agar masyarakat ingat kembali akan identitasnya masing-masing, tidak melebur dalam identitas global. Pengembangan wacana tentang identitas kultural ini sebagai upaya untuk terus menggaungkan dan memberikan ingatan kolektif tentang budaya daerahnya. Wacana mengandung makna simbolik yang perlu didalami untuk mendapatkan makna aslinya (Foucault, 1998). Maka media massa sangat berperan dalam pembangunan wacana ini karena sebagai perantara dan pengarah wacana yang lebih dekat dengan masyarakat sehingga meskipun tidak disampaikan secara lugas masyarakat lebih mudah memahaminya.

Media sosial sekarang juga dapat dimanfaatkan sebagai media perluasan informasi. Informasi yang disebarakan dapat berkaitan dengan hal-hal tentang budaya lokal agar para pengguna media sosial juga dapat mempelajari budayanya sendiri sehingga tetap dapat menjaga budaya lokal tanpa batas ruang dan waktu. Seperti keraton Yogyakarta yang kini aktif di berbagai media *online* berbagai platform terutama media sosial sebagai ruang edukasi masyarakat. Selain itu juga sebagai tempat untuk menyebarluaskan informasi tentang Keraton Yogyakarta dan budaya Jawa agar tidak lekang oleh waktu. Media *online* ini dikelola Keraton Yogyakarta dalam divisi baru yaitu divisi IT dan dokumentasi Tepas Tandha Yekti sebagai jalur komunikasi teknologi keraton dengan masyarakat menggunakan media baru (Canniggia, 2020).

Divisi ini dipimpin oleh GKR Hayu yang merupakan putri keempat Sultan Hamengkubuwana X. GKR Hayu mampu memimpin dan mengemban tugasnya sebagai pengageng Tepas Tandha Yekti dengan baik. Tepas Tandha Yekti sejak berdirinya 2012 hingga saat ini telah banyak

menyebarkan segala bentuk informasi tentang Keraton Yogyakarta. Sebagai seorang perempuan tidak menyurutkan semangatnya dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya. Perempuan pada jaman sekarang ini memang sudah berbeda dengan pada masa lalu. Kini perempuan mendapatkan kesempatan berkiprah di sektor publik. Di sini dapat dilihat bahwa Keraton Yogyakarta sekali lagi mengikuti perkembangan jaman dengan mengikuti perubahan dan isu yang sedang berkembang yaitu tentang wacana kesetaraan gender. Hal ini sesuai nafas feminisme yang memperjuangkan hak-hak kesetaraan gender.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif interpretatif menggunakan pendekatan kajian kritis. Data yang digunakan adalah data kualitatif berupa wacana-wacana tentang putri Keraton Yogyakarta yang mencerminkan sikap ataupun perilaku identitas kultural Jawa. Sumber data diperoleh dari judul artikel berita pada media massa *online*. Berita yang dipilih adalah berita yang memuat profil putri keraton Yogyakarta khusus dari wacana yang berkembang di media sosial kemudian diangkat dalam berita. Data kemudian dianalisis menggunakan analisis wacana kritis. Wacana-wacana yang relevan dikumpulkan kemudian dianalisis secara kritis dan diinterpretasi untuk memaknai wacana yang ada. Selain itu data sekunder untuk mendukung penelitian ini diperoleh berdasarkan hasil studi pustaka. Data sekunder berupa sejarah Keraton Yogyakarta dikumpulkan dengan metode simak dan catat.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Nilai Keteladanan Sultan Hamengku Buwana X

Pada dasarnya bangsa Indonesia memiliki kekayaan dari berbagai peninggalan nenek moyang berupa hasil kekayaan intelektual dan ada yang berbentuk kebendaan kemudian menjadi cagar budaya nasional. Salah satu hasil kekayaan intelektual di antaranya adalah karya sastra lama atau disebut juga naskah. Karya sastra lama tersebut merupakan bentuk komunikasi antara pengarang dengan masyarakat pembacanya. Karya sastra lama diciptakan bukan sekedar dan dihayati isinya. Justru yang lebih penting adalah dalam rangka alternatif untuk membentuk kepribadian pembaca yang unggul dan berbudi luhur (Teeuw, 1983). Hakikat budaya nasional itu identik dengan pembangunan nasional. Pembangunan nasional hakikatnya merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Dalam pelaksanaannya dilakukan secara adil, merata; baik jasmani maupun rohani. Dengan demikian diharapkan sesuai dengan pembangunan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Hasil dari penciptaan karya sastra lama atau naskah tersebut dapat mentransfer konsep-konsep kepemimpinan paham Hindu. Pada jaman dulu konsep kepemimpinan dalam paham ini mengisyaratkan bahwa raja itu merupakan *dewa angejawantah* atau disebut juga dengan istilah *dewa raja kultus*. Selanjutnya, disebutkan bahwa raja ideal itu *sekti mandraguna, mukti wibawa anyakrawati ambau dhendha*. Maksudnya adalah bahwa seorang raja itu bersifat sakti, baik lahir maupun batin. Juga berwibawa dan mulia, dapat menguasai dunia dengan kekuatan dan aturannya. Sabda seorang raja merupakan hukum atau undang-undang yang harus dilaksanakan dan dipatuhi. Orang Jawa menyebutnya sebagai *sabda brahmana raja, pangandikane ratu datan kena wola-wali sepiasan dadi*. Maksudnya bahwa perkataan seorang brahmana dan raja, sabda seorang pemimpin kerajaan tidak boleh diulang-ulang, sekali bersabda jadilah.

Model kepemimpinan negara Republik Indonesia amat dipengaruhi oleh kekuasaan raja sebelumnya. Mengingat di nusantara ini dahulu pernah berdiri kerajaan-kerajaan besar dan berwibawa. Hal ini dapat dilihat misalnya Kerajaan Singasari, Majapahit, Demak, Pajang, dan Mataram. Kerajaan yang amat berpengaruh terhadap konsep-konsep kepemimpinan dewasa ini

adalah Kerajaan Mataram Islam (Sultan Agung). Raja benar-benar amat berkuasa, dan kebesaran dari kekuasaan tersebut terlihat dan tercermin pada: (1) gelar yang disandanginya; (2) mitos sebagai legitimasi; dan (3) kepemilikan atau pengumpulan pusaka. Kekuasaan raja mencakup tiga hal, yaitu urusan pemerintahan pada umumnya, militer dan agama. Raja Mataram adalah pembuat dan pelaksana (pengendali) hukum itu sendiri. Kebesaran kekuasaan raja yang tak terbatas tersebut, maka raja sering disebut: *gung binathara*, *nyakrawati ambau dhendha*. Maksudnya adalah kekuasannya amat besar laksana dewa, pemelihara hukum dan penguasa dunia. Untuk menjalankan tugas tersebut, para pujangga atau raja membuat *piwulang* atau panduan yang dijadikan sebagai pedoman agar para pemimpin atau penguasa itu dalam menjalankan tugasnya selalu berperilaku baik dan bertanggung jawab.

Salah satu *piwulang* tersebut adalah *Asthabrata*. “delapan kewajiban negarawan”. *Asthabrata* merupakan sumber rujukan paling klasik dan sekaligus paling utama. *Asthabrata* diyakini sebagai ajaran etis kepemimpinan sejak dulu kala. Hingga sekarang tampaknya masih banyak orang yang menempatkan ajaran ini sebagai sumber rujukan untuk menilai karakteristik keberhasilan seorang pemimpin. *Asthabrata* dikenali masyarakat melalui tradisi tulis dan lisan. Ajaran *Asthabrata* berisi tentang delapan watak dan perbuatan delapan dewa, yaitu: Indra, Surya, Bayu, Kuwera, Baruna, Yama, Candra, dan Brama.

Istilah *Asthabrata* berasal dari bahasa Jawa Kuna. *Astha* berasal dari bahasa Sanskerta, yang artinya “delapan”. Kata *astha* juga berarti membawa atau memegang. Kata *brata* merupakan kosa kata baru dari bahasa Jawa Kuna, yang berarti “laku”. Kata “laku” bisa juga disejajarkan dengan sikap, tindakan, atau sejenisnya. Kata *laku* dapat juga disejajarkan dengan kata watak atau sifat. Dengan demikian *Asthabrata* dimaknai “delapan laku” atau “delapan watak” atau “delapan sifat”. *Asthabrata*, bisa juga berarti tindakan atau laku memegang; di mana yang dipegang adalah negara. Oleh karena itu, *Asthabrata* dapat juga dimaknai sebagai delapan syarat dalam memegang negara atau pemerintahan. *Asthabrata* juga bisa ditafsirkan sebagai delapan anasir jagad raya, yaitu: matahari, bulan, bintang, awan, angin, api, laut, dan tanah. Ajaran *Asthabrata* ini bersifat universal dan *up to date*, karena kedelapan unsur alam itu berdasarkan kenyataan selalu berada di sekitar kita dan selalu berhadapan dengan manusia. Para pemimpin apabila dapat bercermin dengan alam, kepemimpinannya dapat berjalan dengan baik dan sukses. Sesuai dengan isi alam semesta yang secara sistematis telah diatur dan ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.

Berdasarkan paparan dan uraian yang telah disebutkan di atas jelaslah bahwa konsep kepemimpinan dalam budaya Jawa bersifat absolut, penguasa tunggal. Raja bukan saja pembuat hukum, bahkan ia sendiri adalah hukum. Raja bukan sekedar pemimpin kerajaan atau negara, tetapi ia sendiri adalah negara. Konsep kekerasan dan kesewenang-wenangan tersebut harus dilakukan oleh seorang pemimpin atau raja pada waktu itu. Hal ini dilakukan karena untuk menjawab berbagai persoalan kemasyarakatan pada masa itu. Pada waktu itu memang keras dan harus mengandalkan kekuatan dan hukum rimba yang berlaku. Siapa yang kuat akan selalu berkuasa dan menindas yang lemah. Dengan demikian sebagai akibatnya keadilan belum terpikirkan.

Konsep kesewenang-wenangan tersebut setelah pengaruh Islam masuk di Jawa menjadi semakin berkurang. Konsep yang dikembangkan lebih cenderung dan lebih menuju kepada pemimpin sebagai penasihat, pemberi teladan, pengayom, pelindung negara dan rakyat. Pengaruh Islam ini selain terlihat dalam konsep pemberian gelar seorang raja, juga dalam konsep-konsep kepemimpinan seorang raja dalam mengatur negara atau kerajaan. Tugas dan kesanggupan raja mengharmoniskan keseluruhan tatanan sosial dan sekaligus daya-daya kosmis alam semesta. Dengan demikian dari keberhasilan kepemimpinannya untuk mendapatkan kemakmuran dan kesejahteraan. Pribadi seorang raja dituntut berperan sebagai penjaga keselarasan untuk mencapai *tatatentreming praja*. Hal yang demikian bukan hanya menuntut kesanggupan raja menjaga keselarasan antara manusia (mikrokosmos) dan alam (makrokosmos), melainkan juga keselarasan antara elemen

sosiopolitik *kawula* atau masyarakat (mikrokosmos) dan Gusti/ Raja (makrokosmos). Dalam konstruksi kepemimpinan ala Jawa inilah, bicara etik kepemimpinan raja Jawa, merupakan suatu keharusan. Di sini patut dikemukakan adanya konsepsi *Asthabrata* sebagai bagian dari sistem pengetahuan, ide, gagasan, dan sumber nilai-nilai mengenai model ideal seorang pemimpin dan kepemimpinan dalam budaya masyarakat Jawa.

Susunan birokrasi pemerintahan tradisional masih diikuti oleh birokrasi kesultanan, yakni dengan membagi urusan pemerintahan menjadi urusan dalam kerajaan dan urusan luar kerajaan. Kualitas birokrasi dan aparat yang diharapkan tidak lain adalah terciptanya aparatur pemerintah yang handal. Di samping itu juga harus mampu melaksanakan keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan umum, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Kesemuanya harus dilakukan dengan efektif, efisien, dan profesional. Kinerja dapat didefinisikan sebagai tingkat pencapaian hasil. Kinerja merupakan tingkat pencapaian tujuan organisasi pemerintahan daerah. Jadi untuk menentukan kinerja pemerintahan daerah dapat dilihat dari bagaimana tampilannya dalam mewujudkan hasil dan seberapa besar hasil dapat dicapai sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Sistem birokrasi pemerintahan yang dikembangkan pemerintah kolonial justru sepenuhnya ditujukan untuk mendukung semakin berkembangnya pola paternalistik yang telah menjwai sistem birokrasi pada era kerajaan. Meskipun terjadi pembaharuan sistem birokrasi pada masa pemerintahan kolonial, secara substansial sebenarnya tidak mengubah corak birokrasi pemerintah dalam berhubungan dengan publik. Sentralisasi kekuasaan dalam birokrasi masih tetap sangat dominan dalam praktik penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Pembuatan berbagai keputusan dan kebijakan publik oleh birokrasi pemerintah tidak pernah bergeser dari penggunaan pola *top-down*.

Perubahan sosio-kultural di Keraton Yogyakarta mencakup perubahan dalam wujud pemikiran/pandangan atau ide yang diimplemetasikan secara tegas dengan sikap demokrasi Sultan Hamengku Buwana IX untuk bergabung dengan NKRI, berdampak pada artefak bangunan keraton yang terbuka untuk rakyat dan berfungsi sebagai fasilitas pendidikan dan pariwisata. Sultan Hamengku Buwana IX banyak terlibat dalam perjuangan kemerdekaan, melakukan perubahan sistem pemerintahan keraton, dan pengembangan fungsi keraton sebagai pusat kebudayaan. Eksistensi keraton berubah dari fungsinya sebagai pusat kekuasaan raja menjadi pusat pengembangan seni, budaya, dan pariwisata. Sultan Hamengku Buwana IX menghargai tradisi dan wujud budaya yang diciptakan oleh leluhurnya. Keraton Yogyakarta tetap difungsikan sebagai pusat kebudayaan Jawa yang sakral dan adiluhung. Kesemuanya itu, menunjukkan keberhasilan Sultan Hamengku Buwana IX dalam memadukan pemikiran tradisional dan modern, yang mengacu pada konsep tahta untuk rakyat dan mengedepankan kepentingan pembangunan masyarakat luas.

Sultan Hamengku Buwana IX meninggal dunia pada 2 Oktober 1988 di Washington DC. Kedudukan raja Yogyakarta selanjutnya adalah Sultan Hamengku Buwono X yang dinobatkan pada 7 Maret 1989 dan menjabat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta pada 3 Oktober 1998. Dalam silsilah, Sultan Hamengku Buwana X merupakan putra pertama dari istri kedua Hamengku Buwono IX. Selama hidupnya, Hamengku Buwono IX menikahi lima perempuan dan memiliki 21 anak. Empat anak tertua Hamengku Buwono IX adalah perempuan. Sementara Sultan Hamengku Buwana X merupakan anak laki-laki Hamengku Buwono IX yang paling tua. Ibunya bernama KRAY Windyaningrum. Nama kecilnya adalah Bendara Raden Mas Herjuno Darpito. Sultan Hamengku Buwana X lahir pada tanggal 2 April 1946. Beliau menikah dengan Tatiek Drajad Supriastuti/Gusti Kangjeng Ratu (GKR) Hemas. Dari hasil pernikahan tersebut memiliki lima orang putri yaitu: (1) GRAj Nurmalita Sari /GKR Pembayun; (2) GRAj Nurmagupita /GKR Candrakirana; (3) GRAj Nurkamnari Dewi/GKR Maduretno; (4) GRAj Nurabra Juwita/ GKR Hayu, dan (5) GRAj Nurastuti Wijareni/ GKR Bendara. Sri Sultan Hamengku Buwana X naik takhta pada tanggal 7 Maret 1989, dengan sebutan Ngarso Dalem Sampeyan Dalem Inkgang Sinuwun Sri Sultan Hamengku Bawana

Ingkang Jumeneng Kaping 10, Suryaning Mataram, Senopati Ing Ngalogo, Langgenging Bawana Langgeng, Langgenging Tata Panotogomo.

Sultan Hamengku Buwana X juga mendapatkan gelar Doktor Kehormatan dari Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Gelar ini diperoleh karena beliau memberikan dukungan pada seni pertunjukan kontemporer dan tradisi. Di samping itu beliau selalu memberikan hasil yang sangat positif dalam kegiatan sosial, politik dan kebudayaan dalam banyak kalangan.

Kelima putri Sultan Hamengku Buwana X juga aktif berkegiatan baik di dalam maupun di luar Keraton Yogyakarta. Selain itu mereka juga menerima tugas masing-masing sebagai berikut. (1) GKR Mangkubumi, putri sulung Sultan, memimpin Kawedanan Hageng Punokawan (KHP) Parwa Budaya, lembaga koordinator bidang-bidang inti kebudayaan keraton, seperti kesenian, masjid, makam, dan situs; (2) GKR Condrokirono, putri kedua Sultan, memimpin Kawedanan Hageng Panitrapura, semacam sekretariat negara dalam struktur pemerintahan keraton, Kawedanan Hageng Punokawan (KHP) Parwa Budaya, lembaga koordinator bidang-bidang inti kebudayaan keraton, seperti kesenian, masjid, makam, dan situs; (3) GKR Maduretno, putri ketiga Sultan, sebagai Penghageng I KHP Parasraya Budaya. GKR Maduretno menggantikan mendiang KGPH Hadiwinoto, adik Sultan, yang wafat pada 31 Maret 2021. Sebelumnya GKR Maduretno merupakan Wakil Penghageng di lembaga tersebut; (4) GKR Hayu, putri keempat Sultan, dipercaya memimpin Tepas Tandha Yekti, yakni semacam biro hubungan masyarakat dan dokumentasi atas berbagai kegiatan keraton dan (5) GKR Bendera, putri bungsu Sultan memimpin Kawedanan Hageng Punokawan (KHP) Nitya Budaya, pendukung inti kebudayaan keraton yang mengurus upacara adat, perpustakaan, sastra, museum, dan pariwisata.

Keraton Yogyakarta memiliki keunikan tersendiri apabila dibandingkan dengan keraton-keraton lain di Nusantara. Keraton ini juga memiliki kedudukan yang khusus dalam bidang pemerintahan sebagai bentuk keistimewaan tersebut. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 1988-1998 dijabat oleh Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dari Paku Alaman. Kemudian setelah itu baru diangkat dari keturunan Sultan Yogyakarta, karena telah memenuhi syarat dan mendapatkan prioritas. Akhirnya Sultan Hamengku Buwana X diangkat menjadi Yang Dipertuan Pemangku Tahta Keraton Yogyakarta. Bagi masyarakat Yogyakarta, Sultan Hamengku Buwana X tidak hanya sebagai sebuah simbol semata, akan tetapi juga sebagai salah satu pusat akar budaya bangsa Indonesia khususnya budaya Jawa. Keraton Yogyakarta masih menyelenggarakan tradisi-tradisi kebudayaan yang ada sejak awal mula keraton berdiri. Sultan sebagai pemangku adat tertinggi juga masih memiliki pengaruh yang kuat terhadap kehidupan masyarakat Yogyakarta. Masyarakat modern di Yogyakarta masih banyak yang tunduk dengan apa yang diperintahkan Sultan Hamengku Buwana X.

Pada waktu Sultan Hamengku Buwana X sebagai raja maupun gubernur, beliau tidak terlepas dari latar belakang kehidupannya yang merupakan Raja Keraton Yogyakarta. Gaya kepemimpinan beliau sangat unik dan tidak terlepas dari model komunikasinya yang sangat menarik masyarakat. Dengan kepemimpinan yang turun-temurun tidak membuat beliau mengabaikan nilai-nilai luhur dalam dirinya yang tidak semua pemimpin memilikinya. Cara berkomunikasi juga dipengaruhi oleh dominasi, sosiabilitas pemimpin serta situasi dan kondisi setempat, baik dari budaya kebiasaan yang ada, maupun perkembangan politik yang terjadi di wilayahnya.

Sultan Hamengku Buwana X bersifat demokratis, yaitu ingin selalu melakukan komunikasi dua arah. Beliau menganggap bawahan adalah bagian komponen penting dalam kepemimpinan. Beban kerja menjadi tanggung jawab bersama. Beliau selalu mengutamakan model dialog dua arah. Dialog dengan staff atau masyarakat menjadi hal penting karena dengan adanya dialog tersebut diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan dan komunikasi yang terjalin dapat berjalan dengan baik. Komunikasi dilakukan agar birokrasi pemerintahannya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Di dalam suatu organisasi, komunikasi digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan

setiap kegiatan yang dilakukan, memahami tujuan organisasi dan mempengaruhi orang-orang di sekitarnya agar melaksanakan tujuan yang sudah ditetapkan.

Sebagai seorang pemimpin, Sultan Hamengku Buwana X juga disebut sebagai seorang pemimpin yang visioner. Hal demikian ditunjukkan dengan adanya kemampuan membangun ekonomi masyarakat Yogyakarta dengan menghadirkan iklim bisnis yang kondusif. Beliau sangat mengutamakan kehidupan rakyat dengan memperhatikan keberadaan wong cilik. Wong cilik mendapatkan perhatian dan tempat khusus bagi Sultan. Hal demikian dapat dilihat misalnya adanya program-program percepatan ekonomi, kesejahteraan masyarakat sehingga bisa terus meningkat. Dengan demikian akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misalnya program pengembangan desa wisata yang sampai saat ini bermunculan di berbagai tempat atau di sejumlah desa wisata di DIY. Pengembangan desa wisata menjadi andalan untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat khususnya masyarakat Yogyakarta. Setiap desa ditingkatkan pendapatan daerahnya dengan cara mengembangkan potensi daerah setempat sesuai dengan kondisinya. Dengan adanya iklim bisnis yang kondusif maka akan dapat menarik investor untuk berinvestasi di Yogyakarta.

Sultan Hamengku Buwana X selama menjadi pemimpin, beliau senantiasa berupaya membawa perubahan untuk Yogyakarta. Hal demikian dimaksudkan untuk mencapai cita-cita pembangunan yang telah ditunjukkan dengan program-program visioner yang telah dicetuskan demi kesejahteraan masyarakat. Di tengah-tengah perubahan yang semakin modern, beliau tetap melandaskan dasar-dasar kepemimpinannya. Dasar kepemimpinannya terletak pada nilai-nilai dan moral adat istiadat Jawa dan tetap memegang teguh pada ajaran-ajaran yang telah diberikan oleh para pendahulu. Dengan cara demikian sehingga beliau dapat membawa DIY dalam mewujudkan tujuan pembangunan dengan tetap mempertahankan nilai, moral, dan tradisi lokal yang terkandung di dalamnya.

2. Keteladanan Sikap Putri Keraton Yogyakarta

Putri Keraton Yogyakarta adalah sosok putri pada jaman modern. Mereka akrab dengan kemajuan dan perkembangan teknologi yang terjadi saat ini. Mereka juga aktif bermedia sosial baik untuk pribadi maupun sebagai media untuk menyampaikan informasi terkait Keraton Yogyakarta ataupun informasi umum lainnya di Yogyakarta. Putri keraton lain yang akrab dengan media pada masanya adalah Gusti Noeroel. Beliau adalah anak dari Mangkunegara VII dengan permaisurinya GKR Timur. GKR Timur adalah putri dari Sultan Hamengku Buwana VII. Gusti Noeroel menari di Belanda dengan iringan gamelan dari pancaran radio. Beliau kemudian dikenal sebagai salah satu tokoh pendiri stasiun radio pertama di Indonesia. Keraton Yogyakarta yang sekarang juga akrab dengan media masa kini. Keraton Yogyakarta sekarang memiliki media sosial yang dikelola oleh Tepas Tandha Yekti sebagai divisi IT dan komunikasi keraton sebagai media komunikasi *online* dengan masyarakat dalam bentuk website, instagram, dan *twitter*. Adanya media sosial ini membuat masyarakat dapat lebih mengenal para putri.

Selain aktif di media sosial, para putri juga mendapatkan sorotan di media massa *online*. Sorotan ini tidak hanya tentang sosok sebagai putri raja tetapi juga karena tulisan ataupun viralnya video dari putri Keraton Yogyakarta. Pada penelitian ini ada dua orang putri Keraton Yogyakarta yang menjadi wacana masyarakat di media sosial kemudian sampai viral dan diangkat dalam berita. Kedua putri tersebut adalah GKR Bendera dan GKR Hayu. GKR Bendera sempat mendapat sorotan berita karena videonya naik becak menjadi viral. Video tersebut direkam orang lain yang secara tidak sengaja melihat GKR Bendera naik becak lalu mengupload video tersebut. Ternyata video tersebut mendapatkan banyak tanggapan dan komentar sehingga viral. Kemudian berbagai media massa *online* memuatnya dalam berita. Berikut beberapa media massa *online* yang memuat beritanya.

Tabel 1. Judul Pemberitaan Tentang GKR Bendara

No	Nama Media	Judul Berita
1.	www.liputan6.com	Video Naik Becak Jadi Viral, Putri Keraton Yogyakarta Banjir Pujian
2.	www.genpi.co	Putri Sultan HB X Naik Becak: Warganet Memang Panutan
3.	www.tribunnews.com	Kaget Videonya Naik Becak Jadi Viral, Putri Sultan, GKR Bendara, Ungkap Sudah Sering Naik Becak
4.	kumparan.com	Cerita Putri Keraton Yogya yang Hobi Naik Becak
5.	cewekbanget.grid.id	Viral Karena Naik Becak, Intip 5 Potret Kesederhanaan Putri Keraton Yogyakarta, GKR Bendara

Judul berita yang ditampilkan di atas terdapat wacana yang dibangun dari media-media tersebut. Pada berita pertama yang dimuat di laman www.liputan6.com berjudul “Video Naik Becak Jadi Viral, Putri Keraton Yogyakarta Banjir Pujian”, menunjukkan respon positif masyarakat kepada GKR Bendara. Seorang putri keraton mau naik becak mendapat perhatian dari masyarakat berupa pujian. Pujian adalah bentuk ekspresi respon positif dan sekaligus menunjukkan sesuatu yang bertolak belakang dengan keadaan sebenarnya. Maksudnya adalah seorang putri keraton yang dilimpahi segalanya tetapi masih mau untuk naik becak. Hal ini dianggap sebagai hal yang bertolak belakang karena di balik kemewahan dan status sosial yang dimiliki GKR Bendara tetapi masih bersedia menggunakan becak untuk alat transportasi. Masyarakat yang melihatnya memberikan respon positif terhadap kondisi ini dan mengekspresikannya melalui pujian. Bahkan video ini menjadi viral berarti sangat banyak masyarakat yang melihat dan memberikan komentar terhadap video ini. Artinya peristiwa seorang putri keraton naik becak merupakan peristiwa yang bisa dianggap sebagai peristiwa yang istimewa.

Pada berita kedua yang dimuat di laman www.genpi.co berjudul “Putri Sultan HB X Naik Becak: Warganet Memang Panutan”, juga menunjukkan respon positif dari masyarakat. Respon ini diekspresikan dalam kata panutan yang menunjukkan bahwa tindakan GKR Bendara dapat ditiru sebagai contoh bagi masyarakat. Meskipun sebagai seorang putri keraton tetapi GKR Bendara naik becak menggambarkan sifat yang dimiliki yaitu tentang kesederhanaan sehingga perlu dicontoh masyarakat. Putri Sultan HB X naik becak diletakkan di depan untuk menunjukkan peristiwa yang menjadi sorotan dan menyangatkan suatu peristiwa.

Pada berita ketiga yang dimuat di laman www.tribunnews.com berjudul “Kaget Videonya Naik Becak Jadi Viral, Putri Sultan, GKR Bendara, Ungkap Sudah Sering Naik Becak”, menunjukkan bahwa GKR Bendara tanpa sadar videonya naik becak direkam dan diupload orang lain kemudian menjadi viral. Kalimat selanjutnya menjelaskan bahwa naik becak merupakan kebiasaan sang putri, GKR Bendara, karena sering melakukannya dan menjadi hal yang lumrah baginya sehingga ia merasa kaget ketika video yang merekamnya naik becak menjadi viral. Namun, ternyata hal lumrah bagi GKR Bendara ini adalah hal yang istimewa bagi masyarakat umum yang menyaksikannya.

Pada berita keempat yang dimuat di laman kumparan.com berjudul “Cerita Putri Keraton Yogya yang Hobi Naik Becak”, memperlihatkan kembali bahwa GKR Bendara menganggap naik becak sebagai kelumrahan. Ia menganggap naik becak adalah hal biasa dan bahkan telah menjadi hobinya sehingga itu wajar saja. Penggunaan kata hobi sebenarnya menunjukkan bahwa GKR Bendara naik becak frekuensinya cukup tinggi bukan semata-mata hobi adalah kegemaran. Naik becak untuk alat transportasi memang wajar jika dilakukan wong cilik tetapi bisa menjadi berbeda ketika naik becak sebagai alat transportasi yang menggunakan adalah seorang putri keraton yang notabene memiliki alat transportasi lain yang lebih mewah. Tentu saja hal ini menarik perhatian

khalayak umum karena biasanya jika orang kaya naik becak karena untuk berfoto atau sekedar ingin mendapatkan pengalaman unik saat berwisata bukan dijadikan alat transportasi.

Pada berita kelima yang dimuat di laman cewekbanget.grid.id berjudul “Viral Karena Naik Becak, Intip 5 Potret Kesederhanaan Putri Keraton Yogyakarta, GKR Bendara”, menunjukkan secara lebih lugas tentang kehidupan GKR Bendara. Viralnya video naik becak GKR Bendara kemudian membuat khalayak semakin penasaran sehingga dalam berita ini menampilkan sosok GKR Bendara yang memiliki gaya hidup sederhana. Meskipun sebagai seorang putri keraton tetapi kehidupannya terbalut dengan kesederhanaan yang dapat dilihat melalui potret kesehariannya. Naik becak merupakan salah satu potret kesederhanaan yang dilakukannya dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Peristiwa GKR Bendara naik becak langsung menjadi sorotan karena juga tidak lepas dari keadaan sosial masa kini dalam masyarakat. Kondisi sosial yang ditunjukkan GKR Bendara berbanding terbalik dengan keadaan sosial dalam masyarakat. Biasanya anak pejabat meskipun belum terlalu tinggi jabatannya saja sudah berlagak sok dan bergaya. Namun, GKR Bendara dengan status sosial ningrat dan menjadi pimpinan perusahaan saja masih mau untuk naik becak bahkan menjadi salah satu alat transportasi yang rutin ia gunakan. Akhirnya memunculkan wacana kesederhanaan kehidupan putri keraton. Wacana ini berkembang di masyarakat dan mampu menyedot perhatian publik karena GKR Bendara merepresentasikan identitasnya sebagai seorang yang sederhana dan hidup seperti orang pada umumnya dibalik status sosial yang dimilikinya. Representasi identitas yang ditampilkan GKR Bendara ini juga tidak lepas dari identitas kultural Jawa yang mengandung nilai-nilai budaya Jawa.

Putri Keraton Yogyakarta lainnya yang mendapat sorotan media massa *online* karena viral adalah GKR Hayu. GKR Hayu menjadi viral karena cuitannya di twitter tentang pengalaman saat di Jakarta. Berikut beberapa media massa yang memberitakannya.

Tabel 2. Judul Pemberitaan Tentang GKR Hayu

No	Nama Media	Judul Berita
1.	nasional.okezone.com	Nyebrang Bilang “Terima Kasih”, Putri Keraton Yogya Diledak Warga Jakarta
2.	www.solopos.com	Duh Duh Duh Putri Keraton Yogyakarta Dikatain Kampungan di Jakarta Gegara Ucapkan Makasih
3.	news.okezone.com	GKR Hayu Dibilang Kampungan Saat Nyebrang Ternyata Lulusan Luar Negeri
4.	www.liputan6.com	Fakta Mencengangkan GKR Hayu Putri Keraton Yogyakarta yang Pernah Disebut Kampungan
5.	www.cnbcindonesia.com	Kenali Lebih Dekat Kehidupan Sederhana Putri Sri Sultan

Pada berita pertama yang dimuat dalam laman nasional.okezone.com berjudul “Nyebrang Bilang “Terima Kasih”, Putri Keraton Yogya Diledak Warga Jakarta” menunjukkan peristiwa ironi yang dirasakan putri keraton. Peristiwa ironi di sini adalah karena ucapan terima kasih dari GKR Hayu kepada orang yang telah membantunya saat menyeberang jalan justru mendapatkan respon negatif dari pengguna jalan lain. Peristiwa ini terjadi saat GKR Hayu berada di Jakarta. Respon negatif ini ditunjukkan secara langsung oleh pengguna jalan lain yang berada tepat di belakang GKR Hayu dengan melontarkan ucapan kampungan. Ucapan kampungan ini adalah bentuk ekspresi ejekan dan bahkan menjurus pada makian.

Pada berita kedua yang dimuat di laman www.solopos.com berjudul “Duh Duh Duh Putri Keraton Yogyakarta Dikatain Kampungan di Jakarta Gegara Ucapkan Makasih” juga menunjukkan ironi dengan penekanan lebih dalam. Penggunaan kata duh sampai tiga kali memperlihatkan peristiwa yang sangat ironi atau orang jaman sekarang mengatakan kebangetan. Penggunaan bahasa yang tidak baku pada judul berita ini juga merupakan sebuah sindiran sarkasme pada orang Jakarta yang mengejek putri Keraton Yogyakarta. Sindiran sarkasme ini merupakan bentuk perlawanan atas perlakuan yang tidak mengenakkan pada orang yang sebenarnya berbuat benar. Ketika seseorang setelah diberikan bantuan dari orang lain mengucapkan terima kasih tetapi mereka justru mengejek dengan kata yang merendahkan kelompok lainnya. Ucapan ejekan kampungan ini adalah sebuah bentuk pertarungan wacana atas ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat. Sebutan kampungan disematkan pada mereka yang dianggap terbelakang, kurang berpendidikan, kuno, dan hidup di daerah miskin dan kumuh yang diidentikkan dengan desa. Padahal tidak semua orang yang tinggal di desa seperti itu, begitu pula sebaliknya orang yang tinggal di kota belum tentu memiliki gaya hidup perkotaan yang modern tetapi inilah dampak adanya wacana ketimpangan sosial yang menghasilkan stereotipe masyarakat dan akhirnya menjadi jurang pemisah antara si kota dan si desa, si kaya dan si miskin. Berdasarkan hal ini dapat dilihat bahwa wacana mampu menguasai masyarakat dan menimbulkan konflik.

Pada berita ketiga yang termuat dalam laman news.okezone.com yang berjudul “GKR Hayu Dibilang Kampungan Saat Nyebrang Ternyata Lulusan Luar Negeri” menunjukkan kontradiksi di dalamnya. Di satu sisi disebut sebagai kampungan tetapi di sisi lain ditunjukkan sebagai lulusan luar negeri. Hal ini memperlihatkan bahwa pembuat berita ini langsung mengkonter wacana yang berkembang dalam masyarakat secara telak. Kontradiksi yang ditunjukkan berbeda jauh sehingga pembaca dapat langsung memahami bahwa yang mengejek kampungan adalah sebenarnya yang bersikap kampungan. Seorang lulusan luar negeri saja masih menganggap budaya sendiri adalah yang terbaik terbukti dengan masih melakukan ajaran dalam budayanya sedangkan orang yang mengejek justru menganggap budaya sendiri sebagai budaya yang rendah.

Pada berita keempat yang termuat dalam laman www.liputan6.com yang berjudul “Fakta Mencengangkan GKR Hayu Putri Keraton Yogyakarta yang Pernah Disebut Kampungan” menunjukkan hal yang sama dengan sebelumnya yaitu memperbandingkan hanya ini lebih halus. Kontradiksi yang ditampilkan tidak digambarkan secara gamblang sehingga pembaca tidak langsung mendapatkan poinnya. Namun penggunaan kata mencengangkan merupakan bentuk ekspresi menyangatkan dan terjadi perbandingan yang hasilnya jauh berbeda. Tentu saja fakta yang diungkapkan dalam berita adalah untuk melakukan perlawanan pada kata kampungan yang dilontarkan pada GKR Hayu.

Pada berita kelima yang termuat dalam laman www.cnbcindonesia.com berjudul “Kenali Lebih Dekat Kehidupan Sederhana Putri Sri Sultan” menunjukkan gambaran kehidupan kesederhanaan putri Keraton Yogyakarta. Judul berita ini mudah dipahami pembaca karena disampaikan secara lugas yang langsung merujuk pada kehidupan sederhana putri Keraton Yogyakarta. Putri Keraton Yogyakarta dalam judul berita ini diidentikkan sebagai putri Sri Sultan karena ingin menunjukkan tentang latar belakang keturunan dan menunjukkan ikatan eksistensi dengan Sultan Hamengku Buwana X.

Pemberitaan GKR Hayu tentang cuitannya di *twitter* ini membentuk wacana orang yang melupakan budayanya sendiri. Budaya Jawa dan budaya yang lain sekiranya mengajarkan apabila setelah dibantu orang lain hendaknya mengucapkan terima kasih. Ini merupakan perilaku yang sederhana tetapi sekarang banyak yang melupakan dan meninggalkannya. Ucapan terima kasih adalah bentuk ekspresi menghargai dan menghormati orang lain karena telah memberikan pertolongan. Meskipun dalam bentuk sekecil apapun hendaknya ini selalu dilakukan untuk memberikan rasa penghargaan dan penghormatan kepada orang lain. Pada ajaran budaya Jawa ini termasuk dalam

ajaran *tepa slira* yang dapat menjaga keharmonisan dan kerukunan dalam bermasyarakat karena satu sama lain saling menempatkan diri. Namun sayangnya dengan perilaku orang yang mengejek GKR Hayu ini menunjukkan bahwa telah terjadi degradasi moral di masyarakat Indonesia. Apabila ini berlanjut dapat menyebabkan permasalahan di masyarakat berupa konflik dan membuat masyarakat menjadi tidak rukun.

Pada dua topik berita di atas menunjukkan nilai-nilai dari putri Keraton Yogyakarta yang dapat dipetik. Nilai-nilai ini menunjukkan sikap rendah hati dan keedekatan putri keraton kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa para putri ingin merangkul masyarakat dan menunjukkan bahwa Keraton Yogyakarta melalui representasi para putri tidak bersifat eksklusif membuat menara gading justru sebaliknya mau merangkul masyarakat dengan sifat inklusifnya. Sikap ini juga telah dicontohkan oleh Sultan Hamengku Buwana X kemudian menurun pada para putrinya. Dua topik dalam pemberitaan media terdapat dua nilai yang direpresentasikan oleh kedua puteri yaitu pertama adalah tentang kesederhanaan dan kedua *tepa slira/* tenggang rasa. Dua nilai ini sekarang sudah mulai pudar di masyarakat. Padahal nilai-nilai ini dapat menunjukkan identitas kultural seseorang dilihat dari budaya yang dimilikinya. Kesederhanaan sudah jarang ditunjukkan karena tuntutan jaman yang mengikuti tren membuat hidup justru sebaliknya yaitu menonjolkan kemewahan. Bahkan muncul fenomena *crazy rich* yang mempertontonkan kekayaan pada khalayak. Hal ini jauh dari nilai kesederhanaan yang ditampilkan para putri Keraton Yogyakarta. Fenomena mempertontonkan kekayaan ini menjadi tren tersendiri terutama di kalangan pegiat media sosial karena dapat menghasilkan jumlah penonton ataupun *followers* dalam jumlah yang tidak sedikit dan bisa sampai viral sehingga orang yang mempertontonkannya dapat seketika terkenal di publik. Namun, tren ini membawa dampak negatif yaitu ada orang yang sengaja menampilkan kekayaan tetapi hanya untuk di media sosial saja sedangkan di dunia nyata keadaannya berbanding terbalik. Artinya orang jaman sekarang mau melakukan kebohongan demi menjadi terkenal dan mendapatkan perhatian dari masyarakat di dunia maya. Hal ini tentu saja identitas yang ditampilkan adalah identitas yang kabur bahkan identitas palsu.

Selain itu aksi mempertontonkan kekayaan ini juga dapat menimbulkan masalah sosial karena adanya gap ketimpangan sosial. Gap ini dapat menjadi konflik yang menyebabkan masyarakat menjadi tidak rukun. Jika menjalankan ajaran nilai kedua yang dicontohkan putri keraton yaitu tenggang rasa tentu sebelum bertindak akan memikirkan orang lain. Segala tindakan yang dilakukan seseorang baik langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada orang lain sehingga tenggang rasa sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Tenggang rasa adalah suatu hal yang simpel tetapi tidak semua orang dapat melakukannya apalagi di jaman sekarang.

Nilai ajaran budaya Jawa kini mulai banyak dilupakan generasi muda. Entah karena memang tergerus budaya global atau karena mereka merasa malu dengan budayanya sendiri karena menganggap ketinggalan jaman. Padahal nilai ajaran budaya Jawa ini tidak lekang oleh waktu dan dapat digunakan sepanjang masa karena di dalamnya mengandung nilai-nilai kehidupan. Jadi jaman mau seperti apapun jika menjalankan nilai-nilai kehidupan ini tentu akan selamat. Nilai ajaran Jawa tidak terbatas pada etnis saja, melainkan di dalamnya mengandung nilai-nilai kehidupan yang dapat diamalkan oleh siapapun. Nilai ajaran Jawa ini adalah hasil pemikiran secara mendalam yang diambil dari sari-sari kehidupan.

Nilai ajaran budaya Jawa yang dicontohkan para putri keraton ini adalah sikap para putri keraton yang dapat mencerminkan identitas kulturalnya. Adanya identitas kultural ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi pada masyarakat. Para putri mengajarkan tidak hanya sebatas memberikan pengertian saja tetapi juga memberikan contoh secara nyata pada masyarakat. Hal inilah yang menjadi sangat penting karena orang jaman sekarang tidak butuh teoritik semata tetapi lebih membutuhkan contoh nyata sikap keteladanan. Keteladanan dari para putri keraton ini dapat menjadi salah satu sumber benteng pemertahanan identitas kultural. Dengan demikian apabila

identitas kultural mampu bertahan dan lestari tentu dapat menjadi penyokong bertahannya identitas nasional. Identitas kultural memiliki ciri khas yang masing-masing berbeda dengan daerah lain dan negara lain. Ciri khas ini dapat menjadi autentisitas yang dimiliki suatu daerah. Dengan demikian adanya autentisitas ini dapat menjadi suatu wacana sebagai tandingan dari wacana globalisasi yang mana segala sesuatu diseragamakan tetapi dalam wacana autentisitas seagalanya adalah otentik ciri khas kedaerahan yang berbeda dengan yang lainnya. Identitas nasional sebagai jati diri bangsa tidak boleh kalah dengan perubahan jaman.

3. Putri Keraton Yogyakarta sebagai Perempuan Jawa di Sektor Publik

Putri Sultan Hamengku Buwana X ada lima orang. Kelimanya dapat hidup rukun dan berdampingan. Mereka masing-masing memiliki peran baik di dalam lingkup keraton maupun di luar keraton. Sebagai seorang perempuan tidak membatasi peran mereka untuk berkiprah di ruang publik. Meskipun latar belakang sebagai putri raja yang notabene kental dengan budaya daerah, mereka tidak ketinggalan dalam mengikuti perubahan dan perkembangan jaman. Pada arus modernisasi bidang teknologi dan informasi di mana banyak menjamur media sosial mereka juga mengikutinya.

Perempuan Jawa dulu sering diistilahkan dengan 3M atau 3R. Istilah ini banyak ditentang para perempuan jaman sekarang karena istilah itu mendometifikasi peran perempuan. Istilah 3M adalah *masak*, *manak*, dan *macak* artinya memasak, melahirkan, dan berdandan. Istilah 3R juga tidak jauh berbeda dengan 3M yaitu kasur, sumur, dan dapur. Istilah-istilah ini seakan menjadikan perempuan sebagai warga kelas dua yang mengerjakan hal-hal terkait rumah tangga saja sehingga di Jawa para perempuan juga dikenal sebagai *kanca wingking*. Para kaum feminis jelas menolak istilah ini karena perempuan maupun laki-laki adalah sama sehingga dapat memperoleh kesempatan yang sama juga. Kaum feminis selalu menekankan pada kesetaraan gender di mana gender tidak terpatri pada jenis kelamin melainkan berdasarkan konstruksi sosial dalam masyarakat. Namun hal ini sering disamaartikan dengan jenis kelamin sehingga banyak terjadi perempuan sebagai kaum tertindas karena selalu dijadikan sebagai objek.

Berbeda dengan kehidupan para putri Keraton Yogyakarta yang diberikan pendidikan dan kesempatan yang sama meskipun perempuan. Sejak kecil mereka sudah mendapatkan pendidikan untuk menjadi mandiri dari Sultan Hamengku Buwana X dan GKR Hemas. Kemandirian perempuan ini juga telah diajarkan oleh kakeknya yaitu Sultan Hamengku Buwana IX. Sejak Sultan Hamengku Buwana IX bertakhta perempuan mulai diberikan ruang untuk berekspresi karena perempuan bukan sebagai pajangan tetapi perempuan sebagai manusia yang hidup dan berhak untuk berekspresi. Kelima putri juga mendapatkan akses pendidikan tinggi bahkan sampai ke luar negeri dan diberikan kebebasan menjalani kehidupannya secara bertanggung jawab. Misalnya dalam menentukan pilihan studi yang ditempuh disesuaikan dengan minat dan bakat masing-masing. Selain itu mereka juga diberikan tanggung jawab untuk memimpin perusahaan. Di samping itu mereka juga aktif di berbagai organisasi kemasyarakatan dan mengemban amanah dalam memajukan dan menjaga budaya Jawa melalui tugas-tugasnya di dalam lingkup Keraton Yogyakarta serta tidak lupa mereka tetap menjalankan peran sebagai isteri ataupun sebagai ibu.

Mereka adalah lima anak perempuan yang dalam budaya Jawa dikenal dengan *pendawi*. *Pendawi* ini merupakan pilar budaya Jawa yang bekerja bersama saling bahu-membahu dengan rukun dan saling melengkapi seperti halnya kisah *pandawa*. *Pandawa* putra Pandu yang terdiri dari 5 orang anak laki-laki memiliki kemampuan yang berbeda-beda bekerja bersama, bersatu saling melengkapi menjadi satu kesatuan. Mereka menjadi lengkap ketika bersatu, jika berkurang satu akan menjadi kurang sehingga untuk menjadi kuat mereka selalu bersatu. Demikian halnya juga *pendawi* yang saling melengkapi satu sama lain sehingga mereka dapat menjadi satu kesatuan yang utuh. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan Jawa yang dulu sempat dilabeli sebagai *kanca*

wingking itu hanyalah wacana semata karena adanya pihak-pihak yang menginginkan kuasa atas perempuan. Padahal perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki. Para putri keraton yang juga merupakan perempuan Jawa yang menjadi tokoh dan contoh masyarakat saja telah memberikan contoh tentang kesetaraan gender sehingga segala *stereotype* untuk perempuan Jawa jaman dulu adalah sebuah wacana. Wacana memang jalan paling efektif untuk menentukan relasi kuasa yang dibangun dan untuk memperoleh kekuasaan.

E. Simpulan

Keraton Yogyakarta dapat membantu menjaga dan memberikan perlindungan bagi generasi penerus bangsa melalui penanaman dan aplikasi nilai-nilai budaya Jawa. Nilai-nilai budaya Jawa ini mengandung ajaran yang dapat dicontohkan melalui sikap keteladanan dari para putri keraton. Sikap dari para putri dapat menunjukkan identitas kulturalnya. Selain itu, identitas kultural ini juga dapat menjadi ciri khas sebagai modal untuk mampu bersaing dalam dunia internasional karena dibalik wacana dunia tentang globalisasi telah ada resistensi wacana tandingan yaitu wacana autentisitas. Maka dengan adanya benteng pertahanan identitas ini, selain menyelamatkan dan memberikan perlindungan bagi generasi penerus bangsa Indonesia juga dapat menjadi modal dalam bersaing dalam kancah internasional.

F. Referensi

- Althusser, Louis. (1971). *Lenin and Philosophy and Other Essays (translated by Ben Brewster)*. New York and London: Monthly Review Press.
- Altugan, Arzu dan Tozun Issa. (2014). An Effect on Cultural Identity: Dialect. *Procedia*, 555-562.
- Anderson, Benedict R. O’G. (2016). *Mitologi dan Toleransi Orang Jawa* (diterjemahkan Revianto B. Santosa dan Luthfi Wulandari). Yogyakarta: Mata Bangsa.
- Arikunto. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Barker, Chris. (2005). *Cultural Studies: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Bentang.
- Basuki, Sulisty. (2010). *Metode Penelitian*. Jakarta: Penaku.
- Cannigia, Andreina .2020. Komunikasi Teknologi Masyarakat Tepas Tandha Yekti Keraton Yogyakarta. *POLYGOT: Jurnal Ilmiah*, 16 (2), 154-171.
- Fairclough, Norman. (1995). *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. New York: Longman Publishing.
- Foucault, Michel. (1998). *Aesthetics, Method, and Epistemology (Essential Works of Foucault, 1954-1984, Vol. 2)*. New York: The New Press.
- Geertz, Clifford. (1960). *The Religion of Java*. London: The University of Chicago Press.
- Hall, Stuart. (1990). *Identity, Community, Culture, Difference*. Jonathan Rutherford, editor. London: Lawrence & Wishart.
- Ida, Rachmah. (2014). *Metode Penelitian Studi Media dan Kajian Budaya*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Illahiati, Nisa Kurnia. (2017). Diskursus Identitas Perempuan dalam Majalah Perempuan Muslim Indonesia. *Bahasa dan Seni*, 45 (1), 86-98.
- Koentjaraningrat. (1994). *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka.
- _____. (2015). *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: PT Gramedia.
- Lubis, Akhyar Yusuf. (2014). *Postmodernisme: Teori dan Metode*. Depok: PT Rajagrafindvo Persada.

- _____. (2015). *Pemikiran Kritis Kontemporer*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulder, Niels. (2005). *Mysticism in Java*. Yogyakarta: Kanisius.
- Nasikun. (1993). *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Navajas, Gonzalo. (2009). The Spanish Case for Europe: The Power of Cultural Identity. *Studies in 20th & 21st Century Literature*, 33 (2), 321-335.
- O'donnell, Kevin. (2009). *Postmodernisme*. Yogyakarta: Kanisius.
- Pemberton, John. (1994). *on The Subject of Java*. America: Cornell University Press.
- Pickering, Michael (ed.). (2008). *Research Method for Cultural Studies*. Inggris: Edinburgh University Press.
- Piliang, Yasraf Amir. (2012). *Semiotika dan Hipersemiotika*. Bandung: MATAHARI.
- Rahyono, F.X. (2015). *Kearifan Budaya dalam Kata Edisi Revisi*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.
- Ratna, Nyoman Kutha. (2010). *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ricklefs, Merle Calvin. (2006). *Mystic Synthesis in Java: A History of Islamization from the Fourteenth to the early Nineteenth Centuries*. Inggris: EastBridge.
- Ricoeur, Paul. (2014). *Teori Interpretasi: Membedah Makna dalam Anatomi Teks*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Soehadha, Moh. (2017). Struggle for Identity and Social Image of Haji: Study on Life History of Social Construction of Haji in Sasak Community, Lombok, NTB. *Esensia*, 18 (1), 1-12.
- Soekanto, Soerjono. (1986). *W.F. Ogburn: Ketertinggalan Kebudayaan*. Jakarta: CV Rajawali.
- Susanto, Dina Amalia. (2017). Kontestasi Politik Identitas dalam Cerita Asal-Usul Raja Ampat. *Atavisme*, 20 (1), 84-97.
- Sutopo. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Penerbit Universitas Sebelas Maret.
- Suyanto, Bagong dan Sutinah. (2015). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Sztompka, Piötr. (2007). *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Talukder, Barnali. (2019). Mtijaner Meyera in Translation: Cultural Identity Construction Through Untranslatability of Language. *Advances in Language and Literary Studies*, 10 (6), 36-40.
- Teeuw, Andreas. 1984. *Teori Sastra: Pengantar Ilmu Sastra*. Jakarta: Pustaka Jawa.
- Torrecilla, Jesús. (2009). Spanish Identity: Nation, Myth, and History. *Studies in 20th & 21st Century Literature*, 33(2), 204-226.
- Turner, Bryan S. (2008). *Teori-Teori Sosiologi Modernitas Posmodernitas* (terjemahan Imam Baehaqi dan Ahmad Baidlowi). Yogyakarta: Puspataka Pelajar.
- Widiarto, Tri. (2009). *Psikologi Lintas Budaya Indonesia*. Salatiga: Widya Sari Press.
- Wuri, Dian Mukti. (2014). Identitas Kosmopolitan dan Parokial Pekerja Migran India di Batam sebagai Strategi Negosiasi Budaya. *Paradigma*, 5 (1), 21- 35.
- Zoetmulder, PJ. 1982. *Old Javanese English Dictionary*. Den Haag: Gravenhage.

PERAN DAN SUMBANGSIH KRATON YOGYAKARTA TERHADAP LEMBAGA PENDIDIKAN MUSIK DI INDONESIA

Oleh: R.M. Surtihadi

Abstrak

Tujuan penulisan artikel ini untuk mengungkap fakta sejarah bahwa sejak tujuh tahun pasca kemerdekaan Republik Indonesia para pemimpin bangsa telah memikirkan pendidikan Nasional khususnya pendidikan musik (Barat) secara formal. Beberapa tokoh Nasional seperti: Moh. Hatta, Moh. Yamin, Ki Hadjar Dewantara dan Sultan Hamengku Buwono IX diketahui sebagai pemrakarsa lahirnya Sekolah Musik Indonesia (SMIND). Beberapa tokoh akademisi, kritikus musik maupun praktisi musik unggulan pernah mengenyam pendidikan di SMIND dan mereka telah memberikan kontribusi terhadap perkembangan musik Nasional di Indonesia. Kraton Yogyakarta sebagai salah satu pusat budaya Jawa telah memberikan fasilitas tempat di salah satu rumah bangsawan kraton untuk proses belajar-mengajar bagi para siswa, para guru musik lokal yang pernah mengabdikan sebagai abdi dalem musik juga ikut berperan aktif dalam proses pembelajaran musik di SMIND. Para alumni SMIND juga telah memberikan sumbangsuhnya terhadap perkembangan musik industri di tanah air. Pada masa sekarang Kraton Yogyakarta memberi kesempatan bagi para lulusan Sekolah Musik untuk dapat berpartisipasi terutama dalam berkegiatan musik orkestra dengan membentuk kelompok musik orkestra yakni Yogyakarta Royal Orchestra sebagai wadah kegiatan bermusik.

Kata kunci: Kraton Yogyakarta, peran, sumbangsih, lembaga pendidikan

I. PENDAHULUAN

Melacak kehadiran musik Barat di Indonesia dapat ditelusuri melalui tiga jalur diseminasi musik Barat: 1) Jalur Misionaris Katolik di Maluku dan Flores; 2) Jalur Pertunjukan musik; 3) Jalur Institusi atau Lembaga. Untuk jalur yang ketiga ini ada tiga lembaga penting sebagai tempat diseminasi musik Barat yakni: a) Kraton Yogyakarta, b) Radio Republik Indonesia, dan c) Lembaga Pendidikan Musik. Kembali kepada jalur diseminasi musik Barat yang pertama yakni: Jalur Misionaris Katolik di Indonesia Timur melalui aktivitas para misionaris pada abad ke-16 khususnya di Maluku dan Flores sebagai dampak Kristenisasi yang melahirkan musik gereja (Bramantyo, 2004: 31). Jalur kedua adalah jalur Pertunjukan Musik, ditandai dengan kedatangan para pemusik Eropa yang diawali para pemusik jalanan (*straat muziekanten*) yang melahirkan musik nasional, musik populer, dan musik industri, salah satu contoh jenis musik populer awal di Indonesia yakni keberadaan kelompok musik *Krontjoeng Toegoe* yang dilahirkan dari Komunitas *Kampoeng Toegoe* (Ganap, 2011: 98). Jalur ketiga adalah institusi atau lembaga, yakni: Kraton Yogyakarta, Radio Republik Indonesia (RRI), dan Lembaga Pendidikan Musik (SMIND) dan Akademi Musik (AMI). Dari ketiga jalur diseminasi musik Barat tersebut, fokus yang akan dibahas dalam tulisan ini yakni jalur institusi atau lembaga yang pertama yakni Kraton Yogyakarta.

Keberadaan musik Barat di Kraton Yogyakarta dapat dibagi menjadi tiga konstelasi musik yakni: musik militer atau korps musik keprajuritan, musik untuk iringan tari, dan musik orkestra. Korps musik keprajuritan kraton adalah bagian dari satu pasukan (*bregada*) prajurit kraton yang masing-masing pasukan memiliki nama dan jenis musik yang disebut *gendhing* prajurit. Musik untuk iringan tari mengacu pada *gendhing* iringan tari yang dipakai dan ditambahkan beberapa instrumen Barat seperti trompet, trombone, saxophone, dan genderang, kadang juga ditambahkan instrumen gesek. Musik iringan tari biasa mengiringi gerakan *kapang-kapang bedhaya* atau

srimpi memainkan komposisi *gendhing mars* atau *gendhing gati*, juga untuk mengiringi *beksan Lawung Ageng*, namun seiring perkembangan zaman, beberapa tari klasik Kraton Yogyakarta juga ditambahkan instrumen Barat untuk mengiringi tarian. Musik orkestra adalah sebuah korps musik Barat yang berkembang pada era Sri Sultan Hamengku Buwono VIII (1921-1939), para pemusik orkestra ini diberi fasilitas tempat tinggal oleh kraton di Kampung Musikanan. Fungsi dari musik orkestra ini salah satunya untuk upacara penyambutan tamu kraton, dan mengisi acara hiburan, dan mengiringi pesta dansa. Berdasarkan paparan di atas, tulisan ini akan membahas apa yang istimewa dari Kraton Yogyakarta terhadap keberadaan lembaga pendidikan musik di Indonesia, mengapa lembaga pendidikan musik formal pertama di Indonesia didirikan di Yogyakarta, pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dibahas pada bagian diskusi dalam paper ini.

II. DISKUSI

A. Dampak Kolonialisme Eropa di Jawa Sebagai Indikasi Awal Masuknya Musik Barat di Kraton Yogyakarta.

Perkembangan musik di Indonesia terjadi melalui proses interaksi dengan budaya Barat yang telah menyusup masuk ke Indonesia sejak abad ke-16 dibawa oleh para pelaut, pedagang dan para misionaris Barat. Kemampuan musik anak bangsa dalam menyerap musik Barat diperoleh melalui otodidak maupun pembelajaran musik secara terstruktur. Dalam tradisi Barat, musik diajarkan melalui proses pendidikan yang terstruktur, disajikan secara terbatas pada lembaga konservatori, dengan tujuan agar siswa menguasai teknis musikal melalui program pelatihan yang terstruktur dan intensif untuk menghasilkan vokalis, pemusik, dan komponis yang profesional (Ganap, 2019: 4). Terkait dengan perkembangan musik Barat di Jawa, R.M. Soedarsono (2002) dalam sebuah analisisnya menyatakan bahwa, pada masa kolonial baik di Kraton Kasunanan Surakarta maupun Kasultanan Yogyakarta memiliki kelompok musik orkestra Barat, dan salah satu fungsinya untuk melantunkan lagu kebangsaan Belanda Wilhelmus, bilamana di keraton-keraton tersebut dilaksanakan upacara kenegaraan yang dihadiri oleh para petinggi kolonial Belanda (Soedarsono, 2002: 63).

Keberadaan musik Barat khususnya di Kraton Yogyakarta sangat diperhatikan, bahkan pihak kraton mengakomodir musik Barat dengan membuat Kampung Musikanan yang merupakan kampung pemain musik Barat di kawasan *njeron beteng* Kraton Yogyakarta. Mereka adalah para *abdi dalem musikan* kraton yang tergabung dalam kelompok *Kraton Orcest Djogja* pimpinan Raden Lurah Prodjowaditro pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono VIII (1921-1939) (Surtihadi, 2008: 29). Keberadaan Kampung Musikanan memperjelas posisi dan peran *abdi dalem musikan* cukup penting keberadaannya. Bagian diskusi ini akan diawali dari fenomena penerimaan musik Barat di Kraton Yogyakarta, dimana pemerintah Kolonial Belanda turut serta membantu menyediakan kebutuhan untuk perlengkapan upacara-upacara kerajaan seperti: pengadaan peniup trompet, gajah-gajah, kuda-kuda Persia, dan sebuah kereta kuda (Ricklefs, 1974: 87).

Seperti telah diuraikan di atas, bahwa pada masa kolonial Belanda di Kraton Kasunanan Surakarta dan Kraton Kasultanan Yogyakarta memiliki korps musik orkestra Barat yang aktif mengisi agenda seremoni istana. Menurut data sejarah, Korps musik orkestra Kraton Kasunanan Surakarta keberadaannya pada masa pemerintahan Sri Susuhunan Paku Buwono X (1893-1939) dengan dirigen Paul Seelig, sedangkan Orkestra Kraton Yogyakarta atau dikenal dengan nama *Kraton Orcest Djogja* keberadaannya pada masa Sri Sultan Hamengku Buwono VIII (1921-1939) dengan dirigen Walter Spies. Khususnya di Yogyakarta, keberadaan Walter Spies sebagai *Kapeelmeister Kraton Orcest Djogja* hanya bertahan selama tiga tahun, selanjutnya pada tahun 1927 Spies melanjutkan karir kesenimanannya sebagai pelukis di Bali. Posisi dirigen *Kraton Orcest Djogja* kemudian digantikan oleh Raden Lurah Regimentdochter I, dan pada 1931 posisi dirigen

Kraton Orcest Djogja dijabat oleh Raden Lurah Prodjowaditro sampai dengan tahun 1950 (Edi Sukardi *et.al.*, 1982: 17).

Eksistensi musik Barat di Kraton Yogyakarta, tentu saja tidak terlepas dari peran masyarakat pendukung musik kraton, yakni Kampung Musikanan, yang menarik di sini bahwa para pemusik kraton difasilitasi berupa tempat tinggal bagi para *musikan* kraton. Salah satu data sejarah tentang keberadaan Korps Musik Eropa di Kraton Yogyakarta dapat disimak dalam laporan penelitian Tim Peneliti Akademi Musik Indonesia (AMI, 1982). Setelah membaca dan mengkaji apa yang tersirat dalam penelitian Tim Peneliti Akademi Musik (1982), orang dapat membayangkan betapa seringnya praktik-praktik pertunjukan musik Barat baik di dalam maupun di luar di Kraton Yogyakarta pada masa kolonial Belanda sebagai bentuk ekspresi kesenian asing yang diakomodir oleh pihak kraton.

B. Pembaratan Jawa, Modernisasi dan Reformasi

Dampak diberlakukannya Kebijakan Politik Etis pada awal abad ke-20 yang mempunyai asumsi bahwa tindakan pembaratan Jawa dapat diartikan sebagai modernisasi dan reformasi (Lindsay (1991: 17). Pendidikan musik gaya Barat sebagai dampak modernisasi dan reformasi menjadi inspirasi berbagai institusi atau lembaga pendidikan musik di Indonesia. Lembaga pendidikan musik pertama ialah Konservatori Karawitan (KOKAR) didirikan di Surakarta pada 27 Agustus 1950 dibuka secara resmi oleh Menteri P dan K, S. Mangunsarkoro. KOKAR mempunyai tujuan mengkaji, mengajarkan dan melestarikan musik tradisional menggunakan metode-metode mutakhir dalam bingkai pembinaan suatu budaya nasional pasca kemerdekaan (Bogaerts, 2012: 233).

Konteks sosial budaya di Yogyakarta sebagai tempat terjadinya modernisasi, dan reformasi di Yogyakarta. Yang dimaksud dengan konteks sosial adalah pada masa kolonial Belanda, di Yogyakarta ada kraton sebagai pusat kebudayaan, dan pada saat yang sama Yogyakarta merupakan pusat industri perkebunan, hal ini yang membuat orang-orang Eropa jumlah populasinya semakin banyak sehingga muncul orang-orang Eropa yang tinggal di Yogyakarta kemudian tertarik dengan budaya Jawa. Di sisi lain, pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono VIII (1921-1939) banyak tokoh seniman asing yang tergila-gila dengan budaya keraton, terutama seni karawitan gaya Yogyakarta. Beberapa seniman tersebut antara lain: Jaap Kunst, Walter Spies, Linda Bandara, dan musisi asing lainnya yang *gandrung* dengan musik gamelan Jawa.

Khususnya Walter Spies dan Linda Bandara, kedua seniman asing ini adalah komposer yang sering berkolaborasi, berkesperimen, dan berdiskusi dengan RM. Jayadipura¹ tentang seni karawitan gaya Yogyakarta. Bentuk-bentuk musik campuran gamelan dan musik Eropa mulai diciptakan oleh mereka dari hasil diskusi dan eksperimentasi mereka, bahkan Jayadipura dan Linda Bandara berhasil menciptakan notasi musik yang kemudian diikutsertakan dalam kompetisi pada Kongres Java Instituut pada 1921 di Bandung tetapi hasil dari kompetisi itu mereka hanya meraih posisi juara dua. Mereka berdua kecewa dengan hasil keputusan itu tetapi kemudian penjelasan Jaap Kunst dan J.S. Brandst Buys sebagai perwakilan panitia kompetisi tersebut dapat meredakan kekecewaan mereka (Mak van Dijk, 2007).

Keberadaan *Societeit de Vereeniging*² yang didirikan pada tahun 1822 oleh pengusaha perkebunan Belanda di Yogyakarta juga merupakan salah satu gambaran situasi sosial di Yogyakarta pada masa kolonial. Dalam suatu masyarakat kolonial, golongan kelas penguasa (golongan Eropa) yang jumlahnya relatif lebih kecil membangun sebuah tempat rekreasi yang megah sebagai tempat memisahkan diri dari kaum bumi putera dan sekaligus menunjukkan kekuasaan mereka. Di tempat ini memiliki berbagai macam hiburan, seperti permainan *bilyard*, tempat minum-minum,

1 Jayadipura salah seorang bangsawan dan *abdi dalem* Keraton Yogyakarta era Sultan Hamengku Buwono VIII (1921-1939) yang mempunyai banyak talenta seni.

2 *Societeit de Vereeniging* dikenal dengan istilah “kamar bola” atau “ballroom” (Ing.), pada masa kemerdekaan biasa disebut Gedung Seni Sono.

dansa-dansi, dan adanya kelompok musik orkestra musik Barat. Pertunjukan musik orkestra yang bervariasi dengan menyajikan musik irama *waltz*, *polonaise* hingga musik *jazz*. Pimpinan orkestra pernah dijabat oleh Attilio Genochi (Italia) dan Karl Gotsch (Austria), bahkan Walter Spies pernah bekerja sebagai pemain piano dalam orkestra *Societeit* ini di bawah pimpinan Carl Gotsch (Buitenweg, 1966: 139). Dua orang bumi putera dan seorang keturunan Tionghoa pernah bekerja sebagai pemain biola di orkestra *Societeit* pimpinan Carl Gotsch, mereka adalah Soewandi, Mas Sardi dan Tan Thiam Kwie, mereka bertiga pernah berguru kepada violinist Attilio Genochi (Italia) (Surtihadi, 2009: 31).

C. Artefak Budaya Yang Berkaitan Dengan Keberadaan Musik Barat di Kraton Yogyakarta.

Di pelataran bagian dalam cepuri Kraton Yogyakarta terdapat bangunan berbentuk segi delapan yang disebut dengan Bangsal Mandalasana. Bangunan ini pada bagian atas terdapat ornamen yang terbuat dari kaca patri dengan gambar beberapa macam instrumen musik. Bangunan ini pada masa kolonial dipakai untuk bermain musik para *abdi dalem musikan* Kraton Yogyakarta. Sejak dibubarkannya *Kraton Orcestr Djogja* pada tahun 1950, Bangsal Mandalasana tidak dipergunakan lagi untuk bermain musik, namun pada masa Sri Sultan Hamengku Buwono X (saat ini) mulai difungsikan kembali sebagai tempat bermain musik *abdi dalem musikan* sejak tahun 2019 hingga saat ini.

Bangunan Bangsal Mandalasana ini dapat dimaknai sebagai artefak budaya yang menjadi bukti keberadaan musik Barat di Kraton Yogyakarta pada masa lampau, di samping itu juga keberadaan Kampung Musikanan sebagai tempat tinggal para *abdi dalem musikan* yang tergabung dalam *Kraton Orcestr Djogja* pada masa kolonial.

D. Lahirnya Sekolah Musik Indonesia (SMIND) Yogyakarta

Pasca kemerdekaan Republik Indonesia lembaga pendidikan musik yang terstruktur lahir untuk pertama kali di Indonesia diawali dari pendirian Sekolah Musik Indonesia (SMIND) di Yogyakarta pada tahun 1952, kemudian pada tahun 1964, SMIND berkembang menjadi Akademi Musik Indonesia (AMI), pada tahun 1984 AMI kemudian berintegrasi menjadi Jurusan Musik di bawah Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta. Alasan mengapa Yogyakarta dipilih sebagai lokasi pendirian SMIND, karena Yogyakarta memiliki banyak pemusik yang menguasai permainan instrumen musik Barat. Keahlian para *musikan* kraton diperoleh dari para guru musik asing yang pernah tinggal di Yogyakarta, mereka dilatih para musisi tamu dari Barat, seperti: Karl Gotsch, Luitenant Dongelman, dan Walter Spies. Fungsi *Kraton Orcestr Djogja* pada masa kolonial Belanda dipakai sebagai perangkat upacara penghormatan militer pejabat Belanda dan untuk hiburan pada acara jamuan kenegaraan di Kraton Yogyakarta (Edi Sukardi *et.al*, 1982: 21-22).

Menurut Suka Hardjana (2006), gagasan untuk membuka Sekolah Musik Indonesia (SMIND) di Yogyakarta tahun 1952 dikemukakan oleh dua tokoh Nasional yakni Moh. Yamin dan Sultan Hamengku Buwono IX. Kelahiran SMIND juga tidak lepas dari para pelopor pendiri SMIND lainnya antara lain, Tan Thiam Kwie dan Ir. Supardi Prawiranegara (Surtihadi, 2008: 84). Para guru dari Sekolah Musik Indonesia di Yogyakarta terdiri dari beberapa orang asing dan hanya ada empat orang pribumi dan seorang Tionghoa yang diperbolehkan mengajar musik Barat, antara lain: Soewandi dan Tan Thiam Kwie (biola), Djoned Sastro Puspito (trombon), Pradjawaditra (flute) dan Soekimin (klarinet).³ Henk Te Strake, seorang musisi asal Belanda yang waktu itu masih menjabat sebagai *dirigen Orkes Radio Djakarta (ORD) diboyong* ke Yogyakarta untuk membantu proses belajar-mengajar di Sekolah Musik Indonesia Yogyakarta (Surtihadi, 2008: 23).

3 Wawancara dengan Suka Hardjana tanggal 19 Januari 2006 di Jakarta, diizinkan untuk dikutip.

Guru-guru SMIND pada saat itu banyak yang berasal dari negara asing seperti: Nicolai Farfolomeyef (guru biola dan cello), Jos Bodmer (guru piano), Gerald Kenney (guru piano), Robert Fuch, Sihal (guru piano), sedangkan guru-guru lokal seperti Amir Pasaribu (guru komposisi), Dailamy Hasan (guru vokal), Tan Thiam Kwie (guru biola) dan para guru mantan abdi dalem musik Kraton Yogyakarta (Sitorus, 2009: 120). Perlu penulis sampaikan sebagai informasi tambahan dalam tulisan ini, bahwa pada tahun yang sama (1952), Sekolah Musik Yayasan Pendidikan Musik (YPM) didirikan di Jakarta. Sekolah Musik YPM ini diprakarsai oleh keluarga Dr. Tjipto Mangunkusumo yang sampai saat ini masih aktif menyelenggarakan proses pembelajaran musik Barat.

Pendirian Sekolah Musik Indonesia (SMIND) tahun 1952 di Yogyakarta ditetapkan dengan SK Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Mr. Wongso Negoro nomor 35520/RAB yang menyebutkan bahwa tmt. 1 Januari 1952 di Yogyakarta didirikan sekolah musik dengan nama Sekolah Musik Indonesia di bawah Bagian Kesenian, Direktorat Kebudayaan pada tanggal 17 Desember 1951 dengan masa studi selama 5 tahun. Dengan demikian tanggal penerbitan SK inilah yang ditetapkan sebagai hari ulang tahun SMIND. Akhir tahun 1952 SMIND yang berlokasi di Jetis pindah ke Jalan Suryodiningratan 6 Yogyakarta. Tahun 1965 masa studi di SMIND dipersingkat menjadi 4 tahun (Buku Profil SMK Negeri 2, 2008 : 2).

Tahun 1976 melalui SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no. 0295/U/1976 Sekolah Musik Indonesia berganti nama menjadi Sekolah Menengah Musik Negeri Yogyakarta (SMM) di bawah Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah, dan pada tahun 1978 terjadi pergeseran permulaan tahun ajaran dari bulan Januari menjadi bulan Juli. Pada tahun 1984 SMM pindah dari Jalan Suryodiningratan 6 ke kampus Mardawa Mandala, Jl. PG. Madukismo, Ngestiharjo Kasihan Bantul Yogyakarta. Pada tahun 1994 masa studi lebih dipersingkat menjadi 3 tahun, bersamaan dengan dilaksanakannya Kurikulum 1994. Pada tahun 1997 melalui SK. Mendikbud No. 036/0/1997 nama SMM diganti SMK Negeri 2 Kasihan, dan saat ini SMK N 2 sebagai sekolah menengah musik negeri satu-satunya yang berbasis musik klasik di Indonesia sedang merintis jenjang lebih tinggi menuju Sekolah Bertaraf Internasional dengan program SMK Invest ADB (Buku Profil SMK Negeri 2, 2008 : 2).

E. Beberapa Alumni SMIND Yang Telah Berkontribusi Terhadap Perkembangan Musik Nasional

Beberapa musisi terkenal di tanah air yang pernah menempuh pendidikan di SMIND maupun SMM Yogyakarta antara lain: Suka Hardjana, Idris Sardi, Yudhianto Hinu Purwadi, Amir Katamsi, (SMIND); Luluk Purwanto, Oni Krisnerwinto (SMM) dan sebagainya. Para alumni tersebut telah memulai karirnya di dunia musik industri dan telah menorehkan tinta emasnya ke dalam perkembangan musik nasional di Indonesia.

Suka Hardjana seorang *clarinetist* asli Yogyakarta menempuh pendidikan musik formalnya di SMIND di bawah asuhan guru lokal Soekimin, kemudian belajar clarinet dari guru asal Jerman, Rene Baumgartner yang akhirnya merekomendasikannya untuk belajar musik di Deltmon Konservatori Muziek, Jerman Barat. Setelah menyelesaikan studi musiknya di Jerman, selain sebagai *clarinetist* handal Suka lebih banyak menulis buku dan sebagai kritikus musik.

Sosok Idris Sardi seorang violinist asal Yogyakarta itu dibesarkan dari keluarga pemusik. Ayahnya bernama Mas Sardi tinggal di Kampung Musikanan Yogyakarta adalah seorang musisi, aranjer, kondakter dan violinist. Masa kecil Idris penuh dengan perjuangan keras untuk berlatih biola. Pada saat studi di SMIND tahun 1952, Idris bertemu dengan guru-guru asing seperti Nicolai Varvolomejeff (Rusia), dan George Setet (Hongaria), Saat Idris hijrah ke Jakarta sebagai *Concert Master* Orkes Studio Djakarta (Orkes RRI Jakarta) ia sempat berguru pada violinist Hongaria, Henri Tordasi. Untuk permainan biola klasik Idris sangat mengidolakan violinist Amerika Jascha Heifetz,

namun gesekan biola Idris yang khas untuk musik industri dan musik hiburan, ia terinspirasi dari violinist Helmut Zackarias.

Berbeda dengan kiprah Yudhianto Hinu Purwadi, pemuda asal Kampung Musikanan ini belajar musik di SMIND kemudian mendapat kesempatan belajar musik di Swiss. Memperdalam permainan clarinet dan flute dari seorang maestro Giri Tancibudek (Swiss). Setelah menamatkan studi musiknya di Swiss, ia kembali pulang ke tanah air meniti karir sebagai seorang pemain flute dan clarinet profesional. Puncak karirnya dalam dunia musik Nasional di Indonesia sebagai Kondakter Orkes Simfoni Jakarta dan Jakarta Philharmoni Orchestra.

Tiga musisi alumni SMIND dan SMM berikutnya yakni: Amir Katamsi, Luluk Purwanto dan Oni Krisnerwinto, kiprah mereka dalam dunia musik lebih mengarah pada dunia musik populer dan musik industri. Amir Katamsi sebagai seorang pemain Kontrabass senior memulai karirnya di bidang musik industri pada era tahun 70-an. Amir mulai ‘menebang hutan’ dijadikan lahan usaha industri musik di Jakarta terutama dalam dunia musik orkestra. Dimulai sebagai pemain kontrabass Orkestra Radio Republik Indonesia Jakarta di bawah pimpinan Adhidarma Widjaja (Lie Eng Liong), Amir Katamsi kemudian mengembangkan karirnya sebagai pemain orkestra, sampai pada puncak karirnya sebagai kondakter Orkestra Radio Republik Indonesia mengiringi acara tahunan Bintang Radio tingkat Nasional.

Luluk Purwanto yang memiliki nama asli Luna Lidya Purwanto adalah seorang violinist wanita kelahiran Yogyakarta. Luluk adalah salah satu putri dari pasangan Julian Purwanto dengan Aysha Gani. Kedua orang tua Luluk adalah guru musik, bahkan ibunya pernah menjabat sebagai Kepala Sekolah Menengah Musik Medan, Sumatera Utara. Luluk pernah belajar biola di SMIND di bawah asuhan Tan Thiam Kwie alias Karnadji Krestanto atau sering dipanggil pak Tan oleh para muridnya. Kiprahnya dalam musik nasional Luluk menekuni musik jazz bersama rekan-rekannya membentuk kelompok musik ‘Baskara’, membentuk kelompok musik ‘Helsdingen Trio’ bersama suaminya Rene Van Helsdingen (piano). Sebagai pemain biola wanita dengan memainkan jenis musik jazz, tentu saja Luluk menginspirasi para wanita Indonesia untuk belajar biola.

Oni Krisnerwinto sebagai siswa SMM Yogyakarta, awalnya mempelajari instrumen biola sebagai instrumen mayornya, namun karena ia mempunyai talenta yang besar dalam mempelajari musik, ia juga mempelajari bahkan menguasai saxophone, bass elektrik, gitar, keyboard dan menguasai ilmu aransemen dan komposisi. Pada era 90’an ia membentuk grup musik *Sa’Unine String Quartet* bersama penulis, kemudian ia membentuk kelompok musik tiup *Hypersax* dimana ia memainkan saxophone, kemudian ia membentuk kelompok musik yang berkiprah dalam dunia musik industri Oni n Friends, mengisi acara Idola cilik, Indonesian Idol dan sebagainya.

F. Peran dan Sumbangsih Kraton Yogyakarta

Kenyataan membuktikan bahwa peran dan sumbangsih Kraton Yogyakarta terhadap dunia pendidikan tidak dapat dipisahkan dari figur Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai penguasa Kraton Yogyakarta yang mempunyai pengaruh luar biasa terhadap kebijakan yang dilakukannya. Peran dan sumbangsih Kraton Yogyakarta terhadap dunia pendidikan sudah terbukti dengan memberikan fasilitas belajar-mengajar kepada Universitas Gadjah Mada di *Siti Hinggil* dan *Pagelaran* Kraton Yogyakarta pada masa awal berdirinya perguruan tinggi tertua di Indonesia itu, juga terhadap penyelenggaraan pendidikan Sekolah Musik Indonesia (SMIND) yang semula dilaksanakan di Jetisharjo kemudian atas ijin Sultan, kampus SMIND dipindahkan ke *nDalem* Purboseputran di Jalan Suryodiningratan 6 Yogyakarta.

Keberadaan Kraton Yogyakarta mempunyai kedudukan strategis sebagai institusi yang menyediakan sarana dan prasarana awal terbentuknya Sekolah Musik Indonesia (SMIND) dan Akademi Musik Indonesia (AMI) pada masa lampau. Sampai saat ini pun peran dan sumbangsih Kraton Yogyakarta terhadap lembaga pendidikan musik masih tetap ada. Era Sultan Hamengku

Buwono X, Kraton Yogyakarta telah merevitalisasi keberadaan korps musik Eropa milik Kraton yang diberi nama 'Yogyakarta Royal Orchestra'. Atas restu dari Sri Sultan Hamengku Buwono X, 'Yogyakarta Royal Orchestra' di bawah lembaga Kawedanan Hageng Punakawan Kridha Mardawa pimpinan KPH. Notonegoro menampung para alumni sekolah musik baik dari SMM maupun ISI Jurusan Musik yang bersedia mengabdikan di Kraton melalui musik dengan mengikuti audisi *abdi dalem musikan*.

Lebih lanjut KPH. Notonegoro mengungkapkan, hadirnya 'Yogyakarta Royal Orchestra' dapat menjadi sarana untuk mengabdikan di Kraton Yogyakarta bagi para alumni sekolah musik daripada mereka harus mencari aktivitas bermusik di luar Kota Yogyakarta. Selain itu, terbukanya perpustakaan kraton sebagai tempat studi pustaka bagi para peneliti dari akademisi baik mahasiswa, dan dosen yang akan melakukan riset tentang seni budaya *adiluhung* kraton dapat mendapatkan manfaat dari fasilitas yang diberikan oleh pihak kraton. Hal ini semakin memperjelas peran dan sumbangsih Kraton Yogyakarta terhadap lembaga pendidikan musik maupun terhadap masyarakat akademik.

III. PENUTUP

Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan isapan jempol. Keistimewaan Yogyakarta salah satunya dibuktikan dengan fakta sejarah yang menarik, terutama fakta sejarah lahirnya lembaga pendidikan musik formal pertama kali di Indonesia didirikan di Kota Yogyakarta. Situasi sosial di Yogyakarta masa kolonial Belanda menjadikan keberadaan musik Barat di Yogyakarta bukan hal yang baru. Yogyakarta sudah lama 'akrab' dengan musik Barat, para pelaku musik Barat yang terdiri dari musisi asing di Yogyakarta, *abdi dalem musikan* kraton, musisi dari golongan Tionghoa, sudah sering mengisi dunia panggung musik Barat di Yogyakarta.

Keberadaan *Societeit de Vereeniging* sebuah tempat rekreasi golongan elite politik kolonial juga sering menggelar pertunjukan musik Barat secara rutin. Beberapa pelaku pertunjukan musik di *Societeit* juga pernah menjadi guru para pengajar di SMIND. Sudah sewajarnya jika Yogyakarta dipilih sebagai tempat pembelajaran musik Barat pertama secara formal milik pemerintah karena memiliki sejarah yang panjang terhadap kehidupan musik Barat di Yogyakarta. Tanpa mengesampingkan kota-kota lain yang juga memiliki gedung *Societeit* sebagai tempat hiburan bagi golongan elite politik, namun setidaknya dipilihnya Yogyakarta sebagai tempat pendidikan musik Barat secara formal dikarenakan masih memiliki sumber daya pemusik yang menguasai instrumen musik Barat, dan mereka adalah para *abdi dalem musikan* Kraton Yogyakarta.

Para pelaku kegiatan musik yang terdiri dari para musisi asing maupun lokal telah memberikan sumbangsihnya terhadap aktivitas musik Barat di Yogyakarta. Setelah Indonesia merdeka tahun 1945, kelahiran dua institusi musik di Yogyakarta (SMIND dan AMI) tidak terlepas dari peran mereka. Beberapa *abdi dalem musikan* masa pemerintahan Sultan Hamengku Buwono VIII (1921-1939) dilibatkan dalam proses belajar-mengajar di SMIND dan hasil dari pendidikan di SMIND maupun Akademi Musik Indonesia (AMI) adalah musisi-musisi handal dalam menguasai instrumen masing-masing yang ikut mewarnai perkembangan musik di Indonesia, baik sebagai pelaku musik industri, musik populer maupun sebagai pengajar musik.

Hadirnya 'Yogyakarta Royal Orchestra' milik Kraton Yogyakarta pada saat ini dapat memberikan kesempatan bagi alumni untuk beraktivitas musik orkestra, demikian pula untuk para siswa dan mahasiswa lembaga pendidikan musik terutama yang berada di Kota Yogyakarta. Hal ini merupakan bukti nyata peran dan sumbangsih Kraton Yogyakarta terhadap perkembangan musik Barat di Indonesia pada umumnya, dan kontribusi terhadap lembaga pendidikan musik pada khususnya, dari Yogyakarta untuk Indonesia.

Pustaka Acuan

- Bogaerts, Els. (2012). ‘ “Whither Indonesian Culture” Rethinking “culture” in Indonesia in a time of decolonization’, dalam Jennifer Lindsay dan Maya H.T. Liem (ed.), *Heirs to world culture: Being Indonesian 1950-1965*. Leiden: KITLV Press (VKI 274).
- Bramantyo, Triyono. (2004). *Diseminasi Musik Barat di Timur*, Yogyakarta: Yayasan Untuk Indonesia.
- Buitenweg, Hein. (1966). *Soos en Samenleving in Tempo Doeloe*. Den Haag: Servire.
- Buku Profil SMK Negeri 2, (2008). “SMK NEGERI 2 KASIHAN BANTUL YOGYAKARTA”. *The Solution for Your Future*. Yogyakarta.
- Edi Sukardi *et.al.*, (1982). “Laporan Penelitian Musik Diatonik Dalam Kraton Kasultanan Yogyakarta”. Yogyakarta: Tim Peneliti Akademi Musik Indonesia, Yogyakarta, Direktorat Kesenian, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kesenian, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan.
- Ganap, Victor. (2008). “SUMBANGSIH ILMU PENGETAHUAN MUSIK DALAM PEMBENTUKAN JATI DIRI BANGSA” , Pidato Pengukuhan Guru Besar Musikologi, Jurusan Musik, Fakultas Seni Pertunjukan, ISI Yogyakarta.
- _____. (2020). *Krontjong Toegoe Asal Usul Musik Keroncong*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Hans Rhodius, and John Darling, dalam John Stowell (Ed.) (1980). *Walter Spies and Balinese art*, Amsterdam: Tropical Museum, Terra, Zutphen.
- Hardjana, Suka (2004). *Musik Antara Kritik dan Apresiasi*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Mak van Dijk, Henk, (2007), *De oostenwind waait naar het westen: Indische componisten, Indische composities, 1898-1045*, Leiden: KITLV Uitgeverij.
- Lindsay, Jennifer. (1991). *Klasik, Kitch, Kontemporer: Sebuah Studi Tentang Pertunjukan Jawa*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Sitorus, Erita. (2009). *Amir Pasaribu Komponis, Pendidik & Perintis Musik Klasik Indonesia*, Yogyakarta: Media Kreatifa.
- Soedarsono, R.M. (2002). *Seni Pertunjukan Indonesia di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Soemardjan, Selo. (1986). *Social Change in Jogjakarta*, terj. H.J. Koesoemanto Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Surtihadi, R.M. (1995). “Instrumen Musik Tradisi Barat Dalam Iringan Tari dan Upacara Protokoler Kraton Yogyakarta (Sebuah Tinjauan Historis)”. (Skripsi). Yogyakarta: Fakultas Seni Pertunjukan, ISI Yogyakarta.
- _____, (2008). *TAN THIAM KWIE, Celah-celah Kehidupan Sang Maestro Pendidik Musik Tiga Zaman*, Panta Rhei Book, Yogyakarta.

Sumber lain

Wawancara dengan Suka Hardjana tanggal 19 Januari 2006 di Jakarta, diizinkan untuk dikutip.

AJARAN FILSAFAT MORAL TARI *SRIMPI PANDHELORI* DAN JOGED MATARAM SEBAGAI PENDIDIKAN OLAH RASA DAN ETIKA

Risa Kaizuka
Titik Agustin

PENDAHULUAN

Kesultanan Yogyakarta sejak berdirinya pada tahun 1755, memberikan beberapa kontribusi kepada bangsa dalam berbagai bidang. Salah satu kontribusinya adalah pendidikan, terutama ajaran filsafat moral kepada masyarakat Jawa pada umumnya dan masyarakat Yogyakarta pada khususnya. Masyarakat Jawa khususnya Yogyakarta memiliki sifat halus, sopan santun, rendah hati, serta menghormati orang lain. Sifat ini terbentuk dari ajaran filosofis dan etika keraton. Ajaran filosofis dan etika Keraton Yogyakarta berlandaskan filsafat Jawa. Filsafat Jawa merupakan sebuah pedoman hidup dan petunjuk bagaimana menjalani kehidupan dengan baik.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana ajaran filsafat moral tari *Srimpi Pandhelori* dan ajaran Joged Mataram berkontribusi pada pendidikan olah rasa dan etika kepada kaum sentana keraton maupun kepada masyarakat Yogyakarta. Untuk itu, penelitian ini menggali inti ajaran filsafat moral tari *Srimpi Pandhelori* dan ajaran Joged Mataram. Ajaran filsafat moral tari *Srimpi Pandhelori* sebetulnya berasal dari ajaran filsafat Jawa, sehingga penelitian ini menjelaskan apa itu filsafat Jawa. Penelitian ini membahas konsep mandala yang diwujudkan dalam tari *Srimpi Pandhelori* juga, karena konsep mandala terkait dengan ajaran filsafat Jawa.

Istilah “seni klasik” dalam konteks budaya Jawa disebut sebagai seni *hadiluhung*. Dalam bahasa Jawa, kata “*hadi*” berarti “indah” atau “bagus”, sementara kata “*luhung*” berarti “agung” dan “hebat”, sehingga sebutan kesenian klasik *hadiluhung* seolah-olah telah mengalami tataran puncak kesempurnaan (Soedarso, 1998) melalui Hadi (2001: 10). Istilah *hadiluhung* yang berarti “luhur” maupun “mulia” digunakan untuk membedakan seni tari klasik di keraton dengan seni yang dikembangkan oleh masyarakat di luar keraton. Seni yang berkembang di luar lingkungan keraton tidak bisa disebut sebagai seni *hadiluhung*. Menurut GBPH. Suryobrongto dalam Dewan Ahli Yayasan *Siswa Among Beksa* (1981: 13), tari klasik gaya Yogyakarta (Joged Mataram) adalah seni kebatinan dan tanpa pengisian jiwa, tari akan kurang hidup, kosong, dangkal, tidak bergaya, dan tanpa berkarakter.

Tari *Srimpi* adalah sebuah jenis tari putri klasik yang telah ada sejak masa kerajaan Kesultanan Mataram. Tari *Srimpi* yang merupakan salah satu pusaka kerajaan di Yogyakarta dan Surakarta dapat dikatakan sebagai legitimasi raja. Tari *Srimpi* yang dimiliki oleh Keraton Yogyakarta disebut sebagai tari *Srimpi* gaya Yogyakarta. Tari *Srimpi* sebagai salah satu jenis tari sakral merupakan simbol kekuasaan kerajaan Jawa dan biasanya dipertunjukkan dalam ritual keraton.

Ada beberapa pendapat terkait asal usul kata “*srimpi*” yang berasal dari bahasa Jawa. Pertama adalah pendapat oleh Prof. Dr. Prijono. Prof. Dr. Prijono melalui Suprihono (1994/1995: 16) berpendapat bahwa kata “*srimpi*” atau “*serimpi*” berakar pada kata “*impi*” atau “*mimpi*” dan alasan pendapat ini adalah cara menikmati tari *Srimpi* dengan durasi waktunya lebih dari satu jam seolah-olah membawa penonton ke alam mimpi.

Kedua adalah pendapat oleh almarhumah Ibu Yudanegara. Menurut Hughes- Freeland (2009: 136), B.R.Ay. Yudanegara (1931-2004) adalah seorang koreografer dan tari guru keraton yang terkemuka. Menurut almarhumah Ibu Yudanegara melalui Nyi RL. Sastrawidyakartika (penjelasan,

4 Februari 2022), kata “*sri*” berarti “baik” atau “indah” dan “*impi*” berarti “mimpi”, sehingga kata “*srimpi*” berarti “impian yang baik” atau “impian yang indah”. Dari kedua pendapat ini, dapat dikatakan bahwa kata “*srimpi*” melambangkan dunia mimpi.

Ada pula semacam asumsi bahwa pada masa lalu sajian tari *Srimpi* dimaksudkan sebagai sarana menyatukan pikiran oleh raja (Suprihono, 1994/1995: 16). Dari pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa tari *Srimpi* berfungsi sebagai meditasi. Tari *Srimpi* lazimnya ditarikan oleh empat penari putri. Angka empat ini melambangkan empat arah mata angin (timur, selatan, barat, dan utara) dan empat unsur alam (api, angin, air, dan tanah). Konsep ini disebut sebagai *kiblat papat lima pancer* dalam filsafat Jawa.

Penelitian ini berfokus pada analisis salah satu jenis tari *Srimpi*, yaitu tari *Srimpi Pandhelori*. Penamaan *Pandhelori* disesuaikan dengan nama *gendhing* yang mengiringi tarinya, yaitu *gendhing Pandhelori*. Kata “*pandhelori*” berasal dari dua kata bahasa Jawa, yaitu “*pandhe*” yang mengacu “pembuat perkakas dari besi” dan “*lori*” yang mengacu “gada berukuran kecil”. Tari *Srimpi Pandhelori* diciptakan pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwana VI, yaitu antara tahun 1855 sampai 1877. Namun, karya ini memiliki beberapa versi. Versi yang diteliti dalam penelitian ini adalah *Yasan Dalem* (karya) Sri Sultan Hamengku Buwana VIII (masa pemerintahan: 1921-1939).

Jika melihat daftar nama-nama karya tari *Srimpi* yang ada di Keraton Yogyakarta melalui Suprihono (1994/1995: 14-15), tari *Srimpi* gaya Yogyakarta memiliki 37 karya seperti *Srimpi Irim-irim*, *Srimpi Muncar (Srimpi Cina)*, *Srimpi Teja* dan sebagainya.

Sebetulnya hampir semua karya tari *Srimpi* gaya Yogyakarta memiliki filsafat yang sama yaitu, menang kalah dan baik buruk. Keunikan tari *Srimpi Pandhelori* dapat ditemukan dari segi *gendhing* dan dari segi properti tarinya. Dalam tari *Srimpi Pandhelori*, gerakan *kicat gajah ngoling* diiringi dengan *gendhing Ndawah Ladrang Sobrang Betawen* yang menggunakan trompet. Ini membuat suasana tari lebih megah. Gerakan *kicat gajah ngoling* menggambarkan seekor gajah yang menggerakkan belalainya sambil berguling-guling. Hughes-Freeland (2009: 191) mengatakan bahwa ragam gerak ini terinspirasi dari gajah yang dipelihara oleh Sultan di alun-alun selatan pada zaman kolonial.

Sedangkan dalam segi properti tarinya, para penari memakai *jebeng* (semacam tameng yang digunakan dalam tari) di mana digambarkan dua tokoh yang diceritakan dalam tarinya yaitu, Dewi Kadarwati dan Dewi Ngumyumadikin dari *Serat Menak*.

Apalagi tari *Srimpi Pandhelori* menjadi materi tari putri yang diajarkan dalam *Gladhen Beksan Bangsal Ksatriyan* yang dulu dilakukan setiap hari Minggu di Keraton Yogyakarta sebelum pandemi. Alasan mengapa tari *Srimpi Pandhelori* dipilih untuk diteliti dalam penelitian ini adalah *Srimpi Pandhelori* adalah karya tari *Srimpi* yang penulis belajar langsung di Yogyakarta.

METODE

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Sumber data primer penelitian ini adalah wawancara dengan Sagitama Krisnandaru Kaswarjono. Sumber data sekunder adalah naskah *gerongan “Srimpi Kadarwati Ngumyumadikin Gendhing Pandhelori”* yang ditulis oleh KRT. Sasmintadipura. Teknik pengumpulan data adalah observasi terlibat melalui latihan praktik tari *Srimpi Pandhelori* dengan Nyi RL. Sastrawidyakartika, wawancara dengan Sagitama Krisnandaru Kaswarjono, dan telaah dokumen naskah *gerongan “Srimpi Kadarwati Ngumyumadikin Gendhing Pandhelori”*. Analisis data dilakukan melalui tiga tahap yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kredibilitas data diperoleh melalui perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, dan *member check*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ajaran filsafat moral tari *Srimpi Pandhelori* gaya Yogyakarta berperan sebagai pendidikan olah rasa serta pedoman dan pegangan hidup bagi masyarakat Yogyakarta. Sebagai pendidikan olah rasa, seorang yang mempelajari tari *Srimpi Pandhelori* akan mengalami perasaan halus yang akan diwujudkan dalam sikap halus dan sopan santun. Dia juga akan mengalami ketenteraman batin melalui penyatuan diri dengan alam semesta. Dari ajaran filsafat moral tersebut, seorang akan mendapat petunjuk bagaimana menjalani kehidupan dengan baik.

Srimpi Pandhelori adalah tari abstrak, metafisis, dan filosofis yang mengutamakan tema ajaran hidup dari filsafat Jawa. Hal ini dapat diketahui dari adegan peperangan, jumlah empat penari, ragam gerak konseptual (maknawi), dan pola lantai tarinya. Selain filsafat Jawa, tari *Srimpi Pandhelori* sekaligus mewujudkan konsep mandala. Meskipun tari *Srimpi Pandhelori* menceritakan kisah *Menak Kustub* dari *Serat Menak*, cerita ini berfungsi sebagai sekadar tema sekunder.

Serat Menak adalah salah satu wiracarita (epos) yang dikagumi oleh masyarakat Jawa. *Serat Menak* berasal dari wiracarita Persia *Qissa il Emir Hamza* yang bernafaskan agama Islam. Wiracarita Persia ini kemudian masuk ke sastra Melayu yang berjudul *Hikayat Amir Hamzah*. *Serat Menak* adalah hasil transformasi dari sastra Melayu ini. *Serat Menak* bercerita tentang kepahlawanan tokoh Amir Hamzah yang menyebarkan agama Islam.

1. Ajaran Filsafat Moral Tari *Srimpi Pandhelori* sebagai Pendidikan Olah Rasa

Ajaran filsafat moral tari *Srimpi Pandhelori* merupakan esensi ajaran filsafat Jawa yang terdiri dari beberapa konsep yaitu, konsep keseimbangan, *kiblat papat lima pancer*, *sangkan paraning dumadi*, dan *manunggaling kawula-Gusti*. Sedangkan olah rasa adalah “menggarap perasaan hati manusia (Sutiyono, 2012: 144)”. Melalui ajaran filsafat moral tari *Srimpi Pandhelori*, perasaan orang bisa menjadi halus. Menurut Sutiyono (2012: 49), pengalaman berolah rasa dalam bidang seni karawitan maupun tari dapat membentuk jiwa manusia berbudi luhur dan berperasaan halus.

Filsafat Jawa adalah sebuah pedoman hidup yang bertujuan untuk mencari “*kasampurnan urip*” (kesempurnaan hidup) melalui *sangkan paraning dumadi* dan *manunggaling kawula-Gusti*. Filsafat Jawa terdiri dari unsur-unsur agama Buddha, agama Hindu, ajaran tasawuf agama Islam, kejawen, serta animisme dan dinamisme lokal. Kejawen adalah ajaran tasawuf Islam dengan nuansa Jawa yang bersifat mistis. Tasawuf adalah sufisme yang merupakan ilmu untuk menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak (tingkah laku), membangun lahir dan batin, dan memperoleh kebahagiaan abadi (Shashangka, 2014: 465).

Meskipun filsafat Jawa meliputi unsur dari beberapa agama yang berbeda, prinsip pokoknya adalah satu, yakni hidup manusia akan mencapai kesempurnaan ketika mengetahui asal usul dan tujuan hidup melalui menyatu diri dengan Tuhan. Filsafat Jawa bersifat mistik yang mementingkan keseimbangan antara mikrokosmos (manusia) dan makrokosmos (alam semesta). Alam pemikiran mistis tentang kesatuan kosmos adalah apa yang disebut sebagai “budaya mistis” (Sumardjo, 2016: 320, 323).

Lawannya adalah “budaya ontologis” dinamai oleh van Peursen, yang mengandung nilai-nilai hidup modern Barat (Sumardjo, 2016: 319). Ajaran filsafat moral tari *Srimpi* yang merupakan budaya mistis dapat menjadi filter dari pengaruh budaya barat. Herusatoto (2000: 119) berpendapat bahwa pandangan dan sikap hidup orang Jawa selalu menuju kepada tiga tujuan sebagai berikut.

Pertama, selalu memperdalam ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Kedua, selalu menjaga keselarasan diri dengan alam pembangunan yang sedang dilaksanakan, sesuai dengan bidang tugas masing-masing, sesuai kode etik profesi. Dengan melaksanakan kode etik berarti telah melaksanakan ketertiban dunia. Pembangunan akan berhasil dengan baik jika ada tanggung-jawab etis dari pelaksana-pelaksananya.

Ketiga, selalu sadar diri, *eling lan* waspada. Dengan sadar diri segala tindakan yang dilakukan niscaya bermanfaat bagi sesama, alam sekitar, dan diri sendiri.

Kalau menerapkan tiga tujuan pandangan dan sikap hidup orang Jawa dalam filsafat tari *Srimpi Pandhlori*, dapat dikatakan sebagai berikut. Pertama, selalu mengingat bahwa semua hal yang ada di dunia merupakan penciptaan dan simbol kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, selalu mempertahankan keseimbangan antara nafsu baik dan nafsu buruk dalam perjalanan kehidupan. Ketiga, selalu *eling lan* waspada ketika memutuskan sesuatu untuk memilih jalan yang tepat dalam kehidupan. Ketiga hal ini diwujudkan secara simbolis dalam tarinya.

i. Konsep Keseimbangan

Ajaran filsafat Jawa inti digambarkan dalam adegan peperangan tari *Srimpi Pandhlori*. Adegan ini menggambarkan konflik antara nafsu baik (nafsu *mutmainah*) dan nafsu buruk (nafsu *aluamah*, nafsu *amarah*, dan nafsu *supiyah*) yang dimiliki oleh setiap manusia. Tiga nafsu buruk (*aluamah*, *amarah*, dan *supiyah*) selalu ingin menaklukkan nafsu baik (*mutmainah*). Tidak ada yang kalah atau menang dalam konflik batin ini, karena selama hidup manusia harus berupaya untuk mengatasi nafsu buruk yang selalu ada di dalam dirinya sendiri. Dengan kata lain, manusia harus dapat mengendalikan serta menyeimbangkan empat nafsu ini agar dapat menjalani kehidupan yang selaras dan seimbang dengan alam semesta. Jika manusia tidak dapat mengendalikan empat nafsu ini dengan baik, maka dia akan menghilangkan akalunya dan tidak akan berperilaku sebagai makhluk rasional. Setiap manusia memiliki nafsu baik dan nafsu buruk, jika salah satu nafsu hilang, dia tidak dapat menjadi manusia seutuhnya.

Keseimbangan adalah sebuah konsep dari kosmologi Jawa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002: 597), kosmologi adalah ilmu (cabang dari metafisika) tentang alam semesta sebagai sistem yang beraturan. Dalam kosmologi Jawa, alam merupakan perwujudan makrokosmos (*jagad gedhe*) dan manusia sendiri merupakan perwujudan mikrokosmos (*jagad cilik*). Manusia sebagai mikrokosmos merupakan bagian dari makrokosmos. Keseimbangan antara mikrokosmos dan makrokosmos selalu harus dijaga atau dipertahankan agar dunia menjadi selamat dan damai. Keseimbangan dalam tari *Srimpi Pandhlori* tidak menggambarkan konflik antara nafsu baik dan nafsu buruk saja, tetapi juga keseimbangan antara konsep dualistis lain, seperti gelap-terang dan bumi-langit.

Berdasarkan penjelasan Endraswara (2018: 63), asal usul pemikiran keseimbangan orang Jawa dapat dipaparkan sebagai berikut. Sejak zaman saat belum ada peradaban di Jawa, orang Jawa mengakui adanya kekuatan lain di luar dirinya yang merupakan kekuatan gaib, yaitu alam semesta. Orang Jawa mempercayai bahwa jika mampu menegosiasi kekuatan lain di luar dirinya, hidupnya akan dibantu oleh alam semesta. Oleh karena itu, orang Jawa selalu berusaha membuat keharmonisan antara alam semesta (makrokosmos) dan dirinya sendiri (mikrokosmos).

Konsep keseimbangan ini sebetulnya diceritakan dalam kisah *Menak Kustub* sebagaimana terlihat dalam naskah *gerongan* “*Srimpi Kadarwati Ngumyumadikin Gendhing Pandhlori*”. Dalam *gerongan* tersebut, diceritakan peperangan antara Dewi Kadarwati dari negeri Koparman dan Dewi Ngumyumadikin dari negeri Ambarkustub. Sinopsis *Menak Kustub* adalah dua putri Retno Kadarwati dan Dewi Ngumyumadikin mencari dan berjuang untuk merebut Jayengrana, tokoh dan pahlawan utama dari *Serat Menak*. Dua putri ini bertemu di tengah perjalanan dan karena mereka belum saling kenal pada saat itu, keduanya saling bertanya tentang tujuan masing-masing. Ketika dua-duanya mengetahui bahwa tujuan mereka adalah sama, yaitu mencari Jayengrana untuk dijadikan suami mereka pun berperang. Dua putri sama-sama kuat, sehingga tidak ada yang kalah atau menang dan mereka dua-duanya menjadi istri Jayengrana.

Dalam adegan peperangan tari *Srimpi*, meskipun tema adalah tidak ada yang menang atau kalah, kadang-kadang terlihat gambaran di mana satu karakter menaklukkan yang lain untuk

sementara. Sebagai contoh, dalam tari *Srimpi Muncar*, ada adegan di mana Dewi Kelaswara (putri Jawa) menaklukkan Dewi Adaninggar (putri Cina) dalam peperangan. Menurut Morrison (1978: 208), hal ini menunjukkan bahwa walaupun satu kekuatan dapat menaklukkan kekuatan lain untuk sementara, kehidupan manusia pada dasarnya merupakan saling mempengaruhi, konflik, dan keseimbangan antara kekuatan baik buruk yang tak henti-hentinya. Filosofi hidup yang terkandung dalam kisah *Menak Kustub* adalah keseimbangan dalam hidup yang selalu disertai oleh konsep dualistis, yakni gelap-terang, baik-buruk, benar-salah, kalah-menang, dan sebagainya. Keseimbangan antara dua konsep kontradiktif menjalankan kehidupan yang harmonis. Baik dan buruk dua-duanya selalu mendampingi manusia selama hidup.

Sagitama Krisnandaru Kaswarjono juga mengatakan sebagai berikut (wawancara, 18 Agustus 2021). Gambaran konflik dalam tari *Srimpi* secara simbolik merupakan peperangan antara kebaikan dan keburukan di mana tokoh baik selalu memenangkan pertarungan. Keburukan tidak digambarkan mati atau hilang, tetapi hanya kalah saja. Kebaikan selalu menang, tetapi kejahatan juga tidak pernah mati atau hilang. Apa yang menjadi simbol kehidupan manusia adalah keduanya selalu akan berperang dalam diri manusia.

Berdasarkan penjelasan Galus (2015: 107-108), dapat dikatakan sebagai berikut. Konflik batin dapat diatasi dengan kedewasaan jiwa manusia (peningkatan kesadaran) dan tingkat kedewasaan manusia ini akan membentuk watak yang menentukan laku susilanya. Kesusilaan ini tidak dilepas dari laku dalam perjalanan manusia menuju kesempurnaan dalam kehidupan. Ketika manusia mencapai tingkat *manunggaling kawula-Gusti*, manusia sudah mengatasi pertentangan baik buruk (konflik batin) dengan kedewasaan jiwa yang akan terjelma sebagai sifat ilahi.

Dapat disimpulkan bahwa pesan filosofis dari adegan peperangan tari *Srimpi Pandhelori* tidak mengajarkan apa yang baik atau buruk, yang mana kalah atau menang. Akan tetapi yang terpenting adalah keseimbangan antara nafsu baik dan nafsu buruk. Ini berlandaskan konsep dualistis dalam filsafat Jawa tentang keseimbangan antara konsep kontradiktif seperti baik-buruk, kalah-menang, benar-salah, gelap-terang, makrokosmos-mikrokosmos, dan sebagainya.

Keseimbangan antara konsep dualistis akan membuat kehidupan manusia sempurna. Kita dapat menerima pesan moral bahwa setiap manusia memiliki nafsu baik maupun nafsu buruk dan kehidupan manusia dijalankan dengan keseimbangan antara nafsu baik dan nafsu buruk. Hal ini merupakan petunjuk bagaimana manusia dapat menjalani kehidupan dengan baik.

ii. *Kiblat Papat Lima Pancer*

Sebagaimana sudah disebutkan dalam bagian dahulu, jumlah empat penari *Srimpi* melambangkan empat arah mata angin (timur, selatan, barat, dan utara) dan empat unsur alam (api, angin, air, dan tanah) yang dikenal sebagai *kiblat papat lima pancer*. *Kiblat papat lima pancer* adalah istilah bahasa Jawa yang berarti “empat penjuru mata angin dan kelima di tengah”. *Kiblat papat lima pancer* adalah sebuah kosmologi Jawa, yakni menurut Endraswara (2018: 53), wawasan orang Jawa terhadap hubungan antara makrokosmos (alam semesta) dan mikrokosmos (manusia).

Menurut Endraswara (2016: 7), *kiblat papat* (empat arah mata angin) yang terdiri dari *wetan/witan* (timur), *kidul* (selatan), *kulon* (barat), dan *lor* (utara), dianggap diberikan oleh Tuhan agar orang Jawa tidak salah arah. Dalam kosmologi Jawa, perjalanan kehidupan manusia dianggap selalu ditemani oleh *kadang papat* (empat saudara) manusia yang berada di setiap empat arah mata angin. Konsep ini disebut sebagai *kadang papat lima pancer* yang berarti “empat saudara dan kelima di tengah”. Empat saudara manusia adalah *kawah* (air ketuban) berwarna putih yang berada di sebelah timur, *getih* (darah) berwarna merah yang berada di sebelah selatan, *puser* (tali pusar) berwarna hitam yang berada di sebelah barat, dan ari-ari berwarna kuning yang berada di sebelah utara. *Pancer* (tengah) adalah ego atau manusia itu sendiri. Manusia yang berada di tengah selalu

harus menyeimbangkan dan menyatukan diri dengan empat arah mata angin dan empat saudara gaib ini. Endraswara (2016: 7) mengatakan bahwa jika tercapai keseimbangan dalam berteman dengan empat saudara tersebut, keempatnya akan membantu manusia, tetapi jika tidak mereka akan mengganggu hidup manusia.

KPH. Brontadiningrat dalam Dewan Ahli Yayasan *Siswa Among Beksa* (1981: 21) mengatakan bahwa komposisi empat penari *Srimpi* merupakan empat arah mata angin yang disamakan dengan asal manusia yang terdiri dari empat unsur: api, angin, air, dan tanah. Setiap empat unsur manusia ini meliputi prinsip sebagai berikut. Api menjadi roh yang meliputi empat jenis nafsu manusia yaitu, *aluamah* (nafsu makan yang berwarna hitam), *amarah* (nafsu berjud kemarahan yang berwarna merah), *supiyah* (nafsu keinginan menguasai yang berwarna kuning), dan *mutmainah* (nafsu baik yang berwarna putih). Angin menjadi roh yang meliputi empat jenis nafas manusia yaitu, nafas baik (udara yang menghidupkan seluruh tubuh manusia), *ampas* (udara yang ditarik masuk ke dalam tubuh), *tanapas* (udara yang berdiam dalam darah), dan *nupus* (udara yang dikeluarkan dari dalam tubuh). Air menjadi roh yang meliputi empat jenis roh manusia yaitu, roh jasmani (roh yang menghidupkan badan fisik), roh *norani* (cahaya dari Nabi Muhammad), roh *nabati* (hati atau perasaan), dan roh hewani. Tanah menjadi roh yang meliputi empat unsur tubuh manusia, yaitu darah, daging, tulang, dan darah putih. Jika satu unsur tubuh manusia pun hilang, manusia tidak bisa hidup.

Keseimbangan kuantitas juga penting. Misalnya darah merah dan darah putih tidak boleh kelebihan atau kekurangan, harus seimbang. Dapat disimpulkan bahwa pesan filosofis yang terkandung dalam *kiblat papat lima pancer* adalah manusia harus mengingat bahwa semua unsur alam, yaitu empat arah mata angin, empat unsur alam semesta (empat anasir manusia), dan substansi manusia, semuanya merupakan penciptaan dan kekuasaan Tuhan. Manusia harus bersyukur kepada Tuhan atas penciptaan ini. Ajaran moral ini akan membuat manusia *andhap asor* (rendah hati) dan *tepa slira* (tenggang rasa/menghargai orang lain) yang tidak akan mengarahkan ke *mburu menange dhewe* (egois/mau menangnya sendiri), *nggugu karepe dhewe* (semaunya sendiri), dan *nuhoni benere dhewe* (merasa paling benar sendiri).

iii. Sangkan Paraning Dumadi

Dalam tingkat yang lebih mendalam, tari *Srimpi* bertujuan untuk mencapai tingkat *sangkan paraning dumadi* melalui menyatukan diri dengan Tuhan. *Sangkan paraning dumadi* adalah istilah filsafat Jawa yang berarti “asal dan tujuan segala hal yang menjadi”. Dengan kata lain, tujuan hidup manusia adalah mencari *kasampurnaning urip* (kesempurnaan hidup), yaitu mengetahui apa tujuan hidupnya dan dia berasal dari mana. Untuk itu manusia harus menemukan sifat ilahi di dalamnya diri sendiri yang merupakan jati diri sesungguhnya (hakikat ilahi manusia) melalui menyatukan diri dengan Tuhan. Dapat dikatakan bahwa konsep menyatukan diri dengan Tuhan ini hampir sama dengan pencapaian pencerahan spiritual dalam ajaran tantrisme agama Buddha. Daliman (2012: 8) mengatakan “filsafat Jawa tidak mempertanyakan eksistensi manusia, melainkan lebih mempertanyakan *sangkan* (asal) -*paraning* (tujuan) hidup manusia”.

“Hidup” (*Urip*) dalam konteks *sangkan paraning dumadi*, berkonotasi Tuhan itu sendiri. Berdasarkan penjelasan Shashangka (2014: 83), dapat dipaparkan sebagai berikut. Tuhan melampaui semua keadaan yang ada di dunia ini, sehingga Hidup (*Urip*) itu sendiri merupakan bukti nyata tanda keberadaan-Nya (keberadaan Tuhan). Hidup (*Urip*) itulah Tuhan. Oleh karena itu, manusia dalam Hidup (perwujudan Tuhan) harus tahu siapa sebenarnya dia sendiri. Tuhan berada di balik setiap pribadi manusia, sehingga menyadari dan mengalami sendiri tentang apa dan siapa dirinya adalah sesungguhnya menemukan siapa itu Tuhan. Maka manusia disebut memiliki hakikat ilahi yang merupakan manusia yang sesungguhnya. Dengan kata lain, untuk mencapai kesempurnaan hidup, manusia harus menemukan hakikat ilahi dalam diri sendiri yang merupakan Tuhan.

Berdasarkan penjelasan Shashangka (2014: 83), tingkatan Hidup (*Urip*) dapat dikatakan sebagai berikut. Sang *Urip* (Sang Hidup) memiliki tiga tingkatan perwujudan, yaitu *Urip* (Hidup), *Kang Gawe Urip* (Yang Membuat Hidup), dan *Kang Nguripi* (Yang Menghidupi). Hidup (*Urip*) adalah sumber segala kehidupan yang tidak berubah dan juga merupakan asal dan tujuan hidup yang disebut sebagai *sangkan paraning dumadi*. *Kang Gawe Urip* (Yang Membuat Hidup) adalah roh yang menghidupkan manusia.

Kang Nguripi (Yang Menghidupi) adalah roh yang menghidupkan nafsu manusia. Nafsu merupakan manusia itu sendiri. Apa yang dimaksudkan dalam penjelasan ini adalah Hidup (*Urip*) itu Tuhan sendiri yang merupakan *sangkan paraning dumadi*, yaitu asal usul dan tujuan hidup. Manusia dihidupkan oleh dua jenis roh, yaitu roh yang menghidupkan keberadaan manusia atau badan manusia dan roh yang menghidupkan nafsu manusia. Nafsu manusia adalah jiwa manusia. Dengan nafsu manusia menjadi manusiawi, karena hidup manusia adalah perjuangan mengendalikan nafsu baik dan nafsu buruk yang selalu ada di dalam dirinya. Maka manusia dianggap terdiri dari aspek lahiriah (badan fisik) dan batin (roh, jiwa, dan nafsu).

Sangkan paraning dumadi merupakan tahap kematian juga. Menurut Layungkuning (2020: 49-50), makna kematian bagi orang Jawa adalah kembali ke asal mula keberadaan (*sangkan paraning dumadi*). Kelahiran, kehidupan, dan kematian adalah siklus hidup yang merupakan sebuah lingkaran. Inilah hakikat perjalanan hidup manusia yang menuju ke tujuan akhir yang disebut sebagai *sangkan paraning dumadi*. Struktur sajian tari *Srimpi* justru menggambarkan tiga tahap hidup manusia ini, yaitu kelahiran pada maju *gawang*, pokok kehidupan di mana manusia menghadapi tantangan (adegan peperangan), dan kematian pada mundur *gawang*. *Gawang* dalam konteks tari merupakan area pentas di pendapa.

Sangkan paraning dumadi merupakan hakikat ajaran hidup dalam filsafat Jawa. Keberadaan manusia di dunia ini diistilahkan hanya sebatas “*mampir ngombe*” (singgah untuk sekadar minum), karena bagi orang Jawa sifat duniawi adalah sementara yang menuju ke “terminal” yaitu, *sangkan paraning dumadi* (Sutiyono, 2013: 110).

iv. *Manunggaling Kawula-Gusti*

Manunggaling kawula-Gusti merupakan sebuah ajaran tasawuf Islam dan ajaran mistik kejawen yang disebarluaskan oleh Syekeh Siti Jenar (1404-1517) dengan nama asli Raden Abdul Jalil, seorang sufi yang menyebarkan agama Islam di pulau Jawa. Menurut Achmad (2017: 50-51), frasa “*manunggaling kawula-Gusti*” kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, berarti “bersatunya antara hamba (manusia) dengan Tuhan” atau lebih tepat “bersatunya antara kehendak manusia dan kehendak Tuhan”.

Galus (2015: 242) mengungkapkan bahwa melalui kesatuan hamba dengan Tuhan, manusia akan mencapai *kawruh sangkan paraning dumadi* (pengetahuan tentang asal dan tujuan segala apa yang diciptakan). Apa yang dimaksudkan di sini adalah melalui *manunggaling kawula-Gusti*, manusia tidak hanya mengenal identitas aslinya, tetapi sekaligus menemukan sifat ilahi yang merupakan realitas manusia sesungguhnya. Hal ini merupakan tujuan yang diungkapkan dalam filsafat Joged Mataram juga “...dengan landasan filosofis yang pertama dari Joged Mataram, seorang dapat mengembangkan sikap yang menyatukan seluruh rohani dan jasmani, yang akan menjadi kesatuan *kawula lan Gusti* (Wibowo, 2002: 8)”.

Menurut Galus (2015: 152), jalan untuk mencapai tingkat *manunggaling kawula-Gusti* adalah melakukan *manekung amuntu samadi* (selalu dan bersungguh-sungguh dalam melakukan semadi). Kalau menerapkan konsep ini dalam konteks Joged Mataram, seorang penari akan mencapai tingkat *manunggaling kawula-Gusti* melalui menari yang sekaligus berfungsi sebagai meditasi.

Implementasi *manunggaling kawula-Gusti* terlihat dalam kehidupan sehari-hari orang Jawa juga. Menurut Rochayati (2016: 136), kemanunggalan adalah keteraturan, yaitu ketenteraman,

keseimbangan, kesopanan, dan keharmonisan antara perorangan maupun sosial. Kemanunggalan ini direalisasikan dalam hubungan antara Sri Sultan Hamengku Buwana dan masyarakat Yogyakarta. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Daliman (2012: 37) bahwa “*manunggaling kawula lan Gusti* memperoleh makna konkret dalam manunggalnya rakyat dan raja atau sebaliknya”. Melalui kemanunggalan, hubungan antara Sri Sultan Hamengku Buwana dan masyarakat Yogyakarta menjadi selaras dan kerajaan maupun kehidupan masyarakat menjadi selamat.

Tari *Srimpi Pandhelori* menggambarkan perjuangan seorang pria yang mengatasi nafsu buruk dalam diri sendiri dan mengarahkan diri untuk memilih jalan yang tepat, berkonsentrasi, dan akhirnya berhasil menyatukan diri dengan Tuhan, sebagaimana diungkapkan oleh Morrison (1978: 208). Maka dapat dikatakan bahwa tari *Srimpi Pandhelori* bertujuan untuk mencapai tingkat *manunggaling kawula-Gusti*. Sagitama Krisnandaru Kaswarjono (wawancara, 18 Agustus 2021) menjelaskan bagaimana tari *Srimpi* menggambarkan pencapaian *manunggaling kawula-Gusti* sebagai berikut.

Dalam masyarakat Jawa, simbol empat digambarkan dalam beberapa hal yang disebut sebagai *kiblat papat lima pancer*. Hal ini juga terlihat dari simbol warna yang dipakai dalam masyarakat Jawa, yaitu warna hitam yang menyimbolkan *aluamah*, rakus, tamak, dan tanah. Warna merah yang menyimbolkan *amarah* (marah), angkara, kebencian, dan api. Warna kuning yang menyimbolkan *supiyah*, keinginan akan duniawi, kemuliaan, benda, dan air. Warna putih yang menyimbolkan *mutmainah*, kebaikan, kesucian, mendekatkan diri pada Tuhan, dan angin. Manusia diharapkan bisa mengendalikan keempat hal tersebut, bukan hanya nafsu duniawi tetapi juga nafsu batin. Hal tersebut dikatakan sebagai *manunggaling kawula-Gusti*.

Manunggaling kawula-Gusti tidak bertujuan untuk hanya bisa mengendalikan kehidupan batiniah saja yakni, kepada pencipta-Nya, Tuhan, *Gusti*, dan *Hablum Minallah* (hubungan antara manusia dan Tuhan), tetapi juga pada sesama manusia, yaitu kawula, masyarakat, duniawi, dan *Hablum Minannas* (hubungan antara sesama manusia). Konsep tersebut bisa kita lihat dari simbol *beksan sekawan*, misalnya *Srimpi*.

Dari hasil wawancara ini, dapat dikatakan bahwa tari *Srimpi Pandhelori* bertujuan untuk mencapai tingkat *sangkan paraning dumadi* juga, karena melalui *manunggaling kawula-Gusti*, manusia akan mencapai tingkat *sangkan paraning dumadi*.

2. Joged Mataram sebagai Pendidikan Etika Jawa

i. Filsafat Joged Mataram

Tari klasik gaya Yogyakarta dikembangkan dari tari yang sudah ada sejak masa kerajaan Kesultanan Mataram (1586-1755). Setelah pemecahan Kesultanan Mataram pada tahun 1755 dengan Perjanjian Giyanti, Keraton Yogyakarta memutuskan untuk melestarikan tari Mataram. Oleh karena itu, tari klasik gaya Yogyakarta disebut sebagai Joged Mataram juga. Joged Mataram memiliki filsafat sendiri yang disebut sebagai filsafat Joged Mataram. Filsafat Joged Mataram merupakan filsafat penjiwaan tari yang terdiri dari empat sikap, yaitu *sawiji*, *greget*, *sungguh*, dan *ora mingkuh*. Filsafat Joged Mataram perlu dihayati dan dijiwai oleh setiap penari tari klasik gaya Yogyakarta. Para penari harus membangunkan empat sikap Joged Mataram ini pada saat mereka muncul di pinggir panggung sampai pada saat mereka keluar dari panggung.

Filsafat Joged Mataram berlandaskan “*kawruh* Joged Mataram” yang diciptakan oleh Sri Sultan Hamengku Buwana I (Nuryani, 2020: 228). *Kawruh* Joged Mataram adalah pengetahuan Joged Mataram yang berfungsi sebagai perumusan teori filsafat. Sedangkan filsafat Joged Mataram berfungsi sebagai implementasi *kawruh* Joged Mataram. *Kawruh* Joged Mataram diciptakan pada masa penjajahan Belanda, sehingga *kawruh* ini bertujuan untuk memberikan motivasi kepada kesatria untuk tetap semangat berlawan dan berani. Menurut Nuryani (2020: 228), *kawruh* Joged

Mataram ini kemudian menjadi dasar filosofi dan estetika tari klasik gaya Yogyakarta. Berikut adalah penjelasan tentang empat sikap penjiwaan tari dalam filsafat Joged Mataram.

Sawiji (menyatu) berarti “berkonsentrasi” dalam konteks filsafat Joged Mataram. Konsentrasi ini adalah konsentrasi total tanpa menimbulkan ketegangan jiwa. Seorang penari harus berupaya agar seluruh konsentrasinya berfokus pada peran tokoh yang dibawakan dalam tari. Konsentrasi penari ini tidak boleh mengarah ke hal-hal lain. Dengan implementasi *sawiji*, penari baru bisa menghidupkan peran tokoh yang dia bawakan dan juga menyatu diri dengan karakter tokoh. Menurut Wibowo (2002: 8), melalui *sawiji*, seorang dapat mengembangkan sikap yang menyatukan seluruh rohani dan jasmani, yang akan menjadi kesatuan *kawula lan Gusti*.

Greget berarti “semangat” adalah kemauan yang kuat, semangat yang berkobar dan mendorong suatu dinamika di dalam jiwa seorang penari (Wibowo, 2002: 9). Dengan implementasi *greget*, seorang penari bisa mengekspresikan karakter tokoh yang dibawakan. Pada tingkat yang mendalam, ekspresi tubuh didorong oleh kemauan kuat akan dikendalikan sepenuhnya oleh sikap batin yang sudah menyatu dengan Sang Pencipta (Wibowo, 2002: 10).

Sungguh yang berarti “rasa percaya diri” adalah kebanggaan pada diri sendiri, tetapi rasa ini tidak boleh mengarah ke kesombongan. Dengan implementasi *sungguh*, ekspresi gerak penari akan menjadi pasti, *kenceng* (memiliki kekuatan), dan *resik* (bersih, cermat, dan tidak asal-asalan). Wibowo (2002: 11) mengatakan bahwa “*sungguh* adalah perasaan kebanggaan yang lahir oleh kesadaran akan martabat, kehormatan sebagai tokoh (tokoh wayang yang dibawakan) yang lahir berkat seni”.

Ora mingkuh yang berarti “bertanggung jawab” mengacu sikap ulet dan setia secara bertanggung jawab dan tidak lari menghadapi kesulitan (Wibowo, 2002: 11). Wibowo (2002: 12) mengatakan “keuletan ini berarti usaha yang terus-menerus, pantang mundur untuk menghadapi situasi yang bagaimanapun dengan pengorbanan apa pun”.

Filsafat Joged Mataram dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari pada masa kini juga. Jika menerapkan filsafat Joged Mataram dalam profesionalisme bekerja, akan menjadi sebagai berikut: *sawiji* sebagai fokus pada satu tujuan; *greget* sebagai bersemangat yang terkendali untuk mencapai tujuan; *sungguh* sebagai percaya diri untuk mampu mencapai tujuan; dan *ora mingkuh* sebagai berani menghadapi tantangan dalam mencapai tujuan.

Ajaran empat sikap *sawiji*, *greget*, *sungguh*, dan *ora mingkuh* berperan sebagai pendidikan etika Jawa. Dengan empat sikap dari filsafat Joged Mataram ini, seorang bisa menjadi manusia yang berani, bertanggung jawab, dan kerja keras. Sikap ini merupakan sumber karakter orang Jawa.

ii. Etika Jawa

Etika secara sederhana adalah filsafat moral, sebagaimana diungkapkan oleh Surlasumantri (2010: 32). Menurut Magnis-Suseno (1985: 6), etika adalah keseluruhan norma dan penilaian yang dipergunakan oleh masyarakat yang bersangkutan untuk mengetahui bagaimana manusia seharusnya menjalankan kehidupannya. Etika Jawa merupakan etika hidup orang Jawa yang berdasarkan pandangan dunia Jawa.

Etika Jawa menekankan kepentingan rasa. Hal ini berlawanan dengan filsafat Barat yang bersifat logis dan menekankan argumen. Kepentingan rasa ditekankan dalam tari juga. Apa yang paling penting ketika menari dalam konteks budaya Jawa adalah menari dengan hati dan rasa. Menari dengan sekadar hafalan ragam gerak saja dianggap sebagai menari tanpa jiwa atau wadah tanpa isinya.

Sagitama Krisnandaru Kaswarjono (wawancara, 18 Agustus 2021) menjelaskan etika keraton yang diwujudkan dalam tari *Srimpi* sebagai berikut. Tari *Srimpi* menggambarkan estetika dan etika perempuan Jawa di keraton. Wanita Jawa atau putri di keraton memiliki sifat dan gerak yang halus, lembut, dan terstruktur. Wanita Jawa atau putri di keraton tidak boleh menunjukkan emosinya di

hadapan banyak orang dan pandangan mereka juga dijaga. Namun putri di keraton bisa menjadi prajurit yang siap mempertahankan negara, keluarga, dan kehormatannya pada suatu ketika jika dibutuhkan. Etika keraton ini sekaligus merupakan etika Jawa yang terlihat secara umum dalam masyarakat Yogyakarta juga. Masyarakat Yogyakarta menerapkan etika keraton dalam kehidupan sehari-hari. Dengan penerapan etika ini, orang Yogyakarta memiliki sifat yang halus, sopan, rendah hati, dan sikap menghormati orang lain. Bagi peneliti sendiri yang berasal dari luar negeri, etika Jawa yang halus dan sopan ini adalah hal paling mengesankan dan menonjol selama peneliti tinggal di Yogyakarta. Etika ini justru diwujudkan dalam tari *Srimpi Pandheleri*. Para penari *Srimpi Pandheleri* yang memperlihatkan sifat halus, sopan, rendah hati, dan sikap menghormati orang lain, merupakan perwujudan sikap nyata yang dapat terlihat sebagai bukti-buktinya.

Etika Jawa terlihat dalam beberapa ragam gerak tari *Srimpi Pandheleri* yang konseptual (makna), yakni: sembahan sila panggung, *tasikan kengser*, dan *ulap-ulap cathok*. Ragam gerak sembahan sila panggung menggambarkan seorang yang sedang berdoa dan berkonsentrasi. Sembahan sila panggung dilakukan untuk menghormati raja dan para penonton di depan dan juga meminta permohonan doa kepada Tuhan. Ragam gerak ini sekaligus merupakan gambaran kepasrahan manusia kepada Tuhan yang disebut sebagai *narima ing pandum* dalam filsafat Jawa. Menurut Galus (2015: 461), *narima ing pandum* adalah suatu sikap hidup dianut oleh orang Jawa yang prinsipnya pasrah dengan segala keputusan Tuhan. Dalam pandangan orang Jawa, hidup manusia itu seperti wayang yang digerakkan oleh dalang, karena nasib hidup manusia itu tidak bisa dibantah atau diubah. Manusia harus pasrah dengan nasib masing-masing, karena semua itu kehendak dan keputusan Tuhan.

Tasikan kengser adalah ragam gerak yang menggambarkan seorang wanita yang sedang bersolek atau berdandan diri. Secara lebih mendalam, ragam gerak ini adalah gambaran seorang yang sedang berbenah diri, memperbaiki diri, melihat ke dalam diri sendiri atau merefleksikan diri. Sikap merefleksikan diri ini disebut sebagai mawas diri. Sikap mawas diri merupakan salah satu etika Jawa. Menurut Galus (2015: 471), melalui mawas diri, seorang akan selalu berupaya melihat kekurangan dalam diri sendiri dan sikap ini akan menjauhkan seorang dari menjadinya orang yang sombong.

Ulap-ulap cathok merupakan penggambaran seorang yang sedang melihat apa yang berada di depan dengan waspada. Ragam gerak ini dilakukan sebelum masuk ke adegan peperangan. *Ulap-ulap cathok* sekaligus menggambarkan adegan peperangan dari cerita *Menak Kustub* di mana dua putri, yaitu Dewi Kadarwati dan Dewi Ngumyumadikin, mulai sadar tentang keadaan lawannya dan mengintai satu sama lainnya. Ragam gerak *ulap-ulap cathok* mengandung pesan moral bahwa manusia harus waspada, pandai membaca situasi di lingkungan sekitar, dan memilih atau memutuskan dengan cermat arah kehidupan yang sesuai. Sikap ini disebut sebagai watak *rereh*, *ririh*, dan *ngati-ati*, serta *eling lan* waspada dalam filsafat Jawa. Menurut Herusatoto (2000) melalui Galus (2015: 470), "*rereh*" berarti "sabar dan bisa mengekang diri"; "*ririh*" berarti "tidak tergesa-gesa dalam bertindak" dan "memiliki pertimbangan matang untuk sebuah tindakan dan keputusan"; dan "*ngati-ati*" berarti "berhati-hati dalam bertindak". Melalui watak *rereh*, *ririh*, dan *ngati-ati*, manusia akan menjadi seorang yang mampu mengendalikan diri, mempunyai wawasan, dan berakal panjang.

Eling lan waspada berarti "sadar dan waspada". Menurut Endraswara (2010: 133), *eling lan* waspada berasal dari kata-kata pelipur laranya dari filsafat hidup Jawa: "*tinimbang sing edan, luwih becik sing eling lan waspada*" (ketimbang yang gila, lebih baik yang sadar). Apa yang dimaksud dari kata-kata pelipur lara ini adalah "puas dengan kata-kata serba bijak ini, manusia Jawa bersangkutan pun merasa terlipur, bahwa di zaman ini ia tetap sadar akan bedanya antara baik dan buruk dan bahwa ia tak ikut menggila dengan berbuat seperti mereka yang berebut mengejar kepuasan materi" (Endraswara, 2010: 133). Dapat dikatakan bahwa dengan sikap *eling*

lan waspada, orang akan memiliki wawasan terhadap baik dan buruk, sehingga tidak muda tertipu atau tergoda dengan laba di depan.

Dapat disimpulkan bahwa tari *Srimpi Pandhelori* mengajarkan kepada kita ajaran moral hidup yang bisa diterapkan dalam kehidupan masing-masing.

3. Mandala

Tari *Srimpi* sekaligus merupakan perwujudan konsep mandala. Ini terlihat dalam pola lantai tari yang berputar dalam lingkaran baik besar maupun kecil. Kalau dalam ragam gerak *nglayang*, para penari memutar badan dalam satu lingkaran. Konsep mandala dalam tari *Srimpi* mengacu keseimbangan antara empat arah mata angin, empat unsur alam semesta, persatuan antara mikrokosmos dan makrokosmos, dan juga ketenteraman batin.

Kata “mandala” berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti “lingkaran”. Mandala merupakan lambang paling penting dalam ajaran tantrisme (esoteris) agama Buddha. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002: 1141), “tantrisme” disebut sebagai “ajaran dinas luar agama Hindu dan Buddha yang mengandung mistik dan magi”. Sementara kata “esoteris” berarti “bersifat khusus (rahasia, terbatas)” (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002: 308). Tantrisme agama Buddha yang juga disebut sebagai Varjayāna, adalah salah satu aliran agama Buddha. Tujuan ajaran tantrisme agama Buddha adalah mencapai tingkat pencerahan spiritual. Ketika seorang berhasil mencapai pencapaian ini, dia disebut menyatu dengan Buddha (Tuhan) maupun menjadi Buddha (Tuhan).

Mandala adalah kosmos yang mewujudkan alam semesta yang melingkari tempat tinggal Buddha (Tuhan). Tempat tinggal Buddha (Tuhan) ini dianggap berada di titik tengah dalam sebuah lingkaran. Dengan kata lain, mandala adalah perwujudan kosmologi agama Buddha (Tuhan) atau dunia Buddha (Tuhan), dan juga perwujudan pencapaian pencerahan spiritual. Mandala digunakan sebagai penjelasan ajaran tantrisme agama Buddha, karena ajaran ini terlalu sulit dan abstrak untuk dijelaskan dengan kata-kata. Konsep ini dapat dikatakan sama dengan *manunggaling kawula-Gusti*.

Menurut Rochayati (2016: 133), konsep mandala digunakan untuk membahas keadaan keteraturan, keseimbangan, dan ketertiban yang terbentuk di ruang yang tidak berstruktur. Berdasarkan penjelasan Sumardjo (2003: 65) melalui Rochayati (2016: 133), dapat dipaparkan sebagai berikut. Pusat lingkaran mandala dianggap sebagai tempat suci yang bebas dari kekuatan jahat yang merupakan kaos. Kaos melingkari mandala. Kaos adalah apa yang disebut tidak teratur, sedangkan mandala adalah apa yang disebut teratur. Mandala merupakan keselamatan, kedamaian, ketenteraman, dan kebahagiaan.

Dari penjelasan ini, dapat dikatakan bahwa alam semesta terdiri dari mandala dan kaos, yaitu antara yang teratur dan yang tidak teratur. Mandala juga dianggap memberikan ketenteraman batin, sehingga mandala digunakan sebagai terapi dalam seni lukis, maupun terapi dalam bidang psikologi hingga masa kini. Menurut Sutiyono (2013: 107), filsafat Jawa juga bertujuan untuk mengalami ketenangan batin melalui hidup yang selaras dengan dirinya sendiri dan juga selaras dengan Tuhan. Maka melalui menarikan tari *Srimpi Pandhelori*, penari akan mengalami ketenteraman atau ketenangan batin.

Sebetulnya Keraton Yogyakarta sendiri merupakan mandala juga. Hal ini dapat terlihat dari lokasi keraton yang terletak di tengah atau “jantung” kota Yogyakarta serta posisi yang ditata menurut dua poros besar yang saling berpotongan di tengahnya sesuai dengan pola *mancapat: kiblata papat lima pancer*, di mana keraton berfungsi sebagai *pancer*-nya, sebagaimana diungkapkan oleh Daliman (2012: x). Keraton Yogyakarta, karenanya, dipandang sebagai mandala, sebagai pusat “replika alam semesta” (kosmos) (Daliman, 2012: x).

Berdasarkan penjelasan Wardani, Soedarsono, Haryono, & Suryo (2011: 113), konsep mandala Keraton Yogyakarta dapat dipaparkan sebagai berikut. Konsep mandala Keraton

Yogyakarta terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran Hindu mengenai kosmologi *Jagad Purana* yang berpusat pada benua bundar *Jambudwipa* yang dikelilingi tujuh lapisan daratan dan samudera. Pada benua tersebut, terletak gunung (*meru*), tempat di mana para dewa bersemayam. Keraton disusun secara konsentrik berdasarkan replika *jagad raya* (makrokosmos/alam semesta) untuk menjaga keselarasan dengan kerajaan (mikrokosmos). Titik pusat dalam susunan keraton (replika alam semesta) merupakan tempat untuk menjaga keseimbangan antara makrokosmos dan mikrokosmos.

Kestabilan dunia manusia (mikrokosmos) terjaga dengan adanya kepercayaan terhadap makna filosofis garis imajiner Utara-Selatan, yaitu Keraton Yogyakarta sebagai titik pusat di antara Gunung Merapi dan Laut Selatan. Di keraton, Sultan menjadi sumber kekuatan yang membawa kesejahteraan dan kemakmuran, serta keselarasan seluruh tatanan kosmos. Keraton Yogyakarta merupakan mikrokosmos yang mengambil model dari makrokosmos.

Konsep mandala Keraton Yogyakarta ini terkait dengan ajaran Hindu, sehingga filsafat Jawa disebut dekat dengan filsafat India. Berdasarkan penjelasan oleh Klinken (1996: 32) melalui Wardani, Soedarsono, Haryono, & Suryo (2011: 113), dapat dipaparkan sebagai berikut. Dalam doktrin Hindu, alam semesta (makrokosmos) memiliki pusat, yaitu benua bulat yang bernama *Jambudwipa*. Dalam filsafat Jawa, esens peradaban Jawa adalah keteraturan sosial, kosmis, dan religius. Sedangkan dalam mistisisme (sufisme) Islam, ada sebuah diagram yang dikenal sebagai daerah yang terdiri dari lingkaran konsentris, yaitu mikrokosmos di dalam dan makrokosmos di luar. Pusat dari mikrokosmos dan makrokosmos ini adalah apa yang disebut sebagai *Dhat* (Yang Suci).

i. Konsep *Mataya* (*MaTaya*)

Tari dalam konteks tari klasik gaya Yogyakarta, termasuk tari *Srimpi Pandhelori*, memiliki sebuah arti lebih mendalam yang bersangkutan dengan dimensi spiritual. Konsep *mataya* (*maTaya*) merupakan dimensi spiritual dalam tari klasik gaya Yogyakarta. “*Taya*” adalah kata benda bahasa Kawi yang berarti “bentuk tari”, sedangkan “*mataya*” adalah kata kerja yang berarti “menari”. Namun, kata “*taya*” ini memiliki sebuah arti yang lebih mendalam, yaitu “Tuhan Yang Maha Esa”. Prawiroatmodjo (1981: 243) melalui Suharto (1992: 25) mengatakan bahwa *taya* berarti “keadaan kosong” (*emptiness/nothingness*). Menurut Suharto (1992: 25), Sultan Agung (1593-1645), raja ketiga dari kerajaan Kesultanan Mataram, berpendapat bahwa *taya* adalah Shiva (Tuhan) yang sekaligus merupakan keadaan kosong yang dihasilkan oleh kesatuan antara hati dan pikiran. *Taya* juga merupakan nama lain untuk Buddha, sebagaimana diungkapkan “...*Sang Hyang Taya* nama lain/gelar Buda” oleh Mardiwasito (1978: 350) melalui Suharto (1992: 25). Secara singkat, dapat dikatakan bahwa *taya* dalam arti yang mendalam adalah sebutan Tuhan (Shiva/Buddha) yang merupakan keadaan kosong.

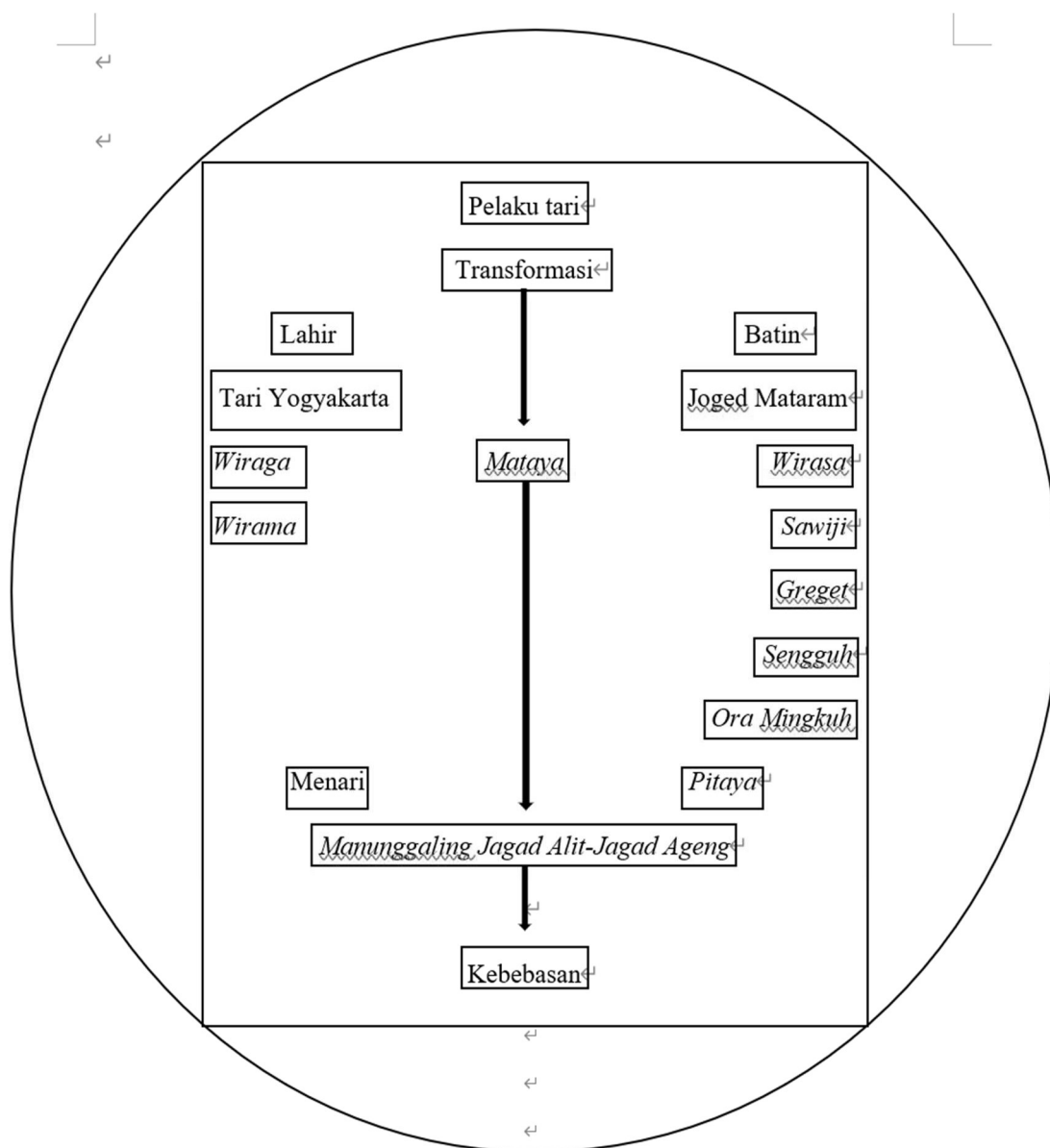
Kata “*mataya*” berarti “menari”, namun kalau dalam konteks “*maTaya*” dengan “t” yang besar, berarti “menyatu dengan Tuhan”. Maka dapat dikatakan bahwa *mataya* adalah implementasi *manunggaling kawula-Gusti*. Berdasarkan penjelasan Rochayati (2016: 133), hubungan antara kata “*taya*” dan kata “*mataya*” dapat dipaparkan sebagai berikut. *Taya* dan *mataya* dalam tingkat spiritual mengacu Tuhan. Dari pengertian bahwa *taya* berarti tari dan *Taya* berarti Tuhan, dapat dikatakan bahwa *mataya* berarti menari dan *maTaya* berarti manunggal dengan *Taya* (Tuhan). Melalui menari tari klasik gaya Yogyakarta, termasuk tari *Srimpi Pandhelori*, seorang penari akan menyatu diri dengan Tuhan dalam tingkat yang lebih mendalam.

ii. Mandala Sastra *Mataya*

Sastra *mataya* (pengetahuan *beksa/knowledge of the dance*) adalah nama mandala yang diberikan oleh Ben Suharto untuk merumuskan hubungan antara *Beksa* Mataram (lahiriah/*outer*) dan *Joged* Mataram (batin/*inner*) yang mengarah ke pemahaman tentang kesatuan antara

makrokosmos (Tuhan) dan mikrokosmos (penari), sebagaimana dikatakan oleh Suharto (1992: 26). Menurut Suharto (1992: 27), mandala sastra *mataya* merupakan konseptualisasi teori kesatuan antara makrokosmos dan mikrokosmos dalam tari klasik gaya Yogyakarta.

Menurut teori mandala sastra *mataya*, seorang penari tari klasik gaya Yogyakarta akan mengalami transformasi secara lahiriah dan batin. Transformasi lahiriah dan batin akan mengarahkan ke penyatuan diri dengan Tuhan melalui keadaan antara sadar (mengendalikan diri) dan tak sadar (*kepanjangan/ekstasi*). Pencapaian penyatuan diri dengan Tuhan ini adalah *manunggaling kawula-Gusti*, yakni penyatuan antara penari dan Tuhan. Melalui *manunggaling kawula-Gusti*, penari akan mencapai tingkat *manunggaling jagad alit* (*jagad cilik/mikrokosmos*) dan *jagad ageng* (*jagad gedhe/makrokosmos*). Setelah itu, penari akan mencapai tingkat terakhir yang disebut sebagai “kebebasan”. Kebebasan dalam konteks mandala sastra *mataya* dapat ditafsirkan sebagai pencapaian pencerahan spiritual. Pencapaian pencerahan spiritual adalah keadaan di mana seorang memahami segala hal tentang dunia ini, sehingga terbebas dari segala kesengsaraan. Pencerahan spiritual merupakan konsep utama dalam ajaran tantrisme agama Buddha.



Gambar 1. Mandala Sastra *Mataya*

Gambar ini adalah penjelasan tentang mandala sastra *mataya*. Gusti Suryobrongto (1981: 88; 1981a: 14) melalui Hughes-Freeland (2009: 263) menjelaskan bahwa tari Yogyakarta merupakan wadah atau teknik lahiriah, sedangkan Joged Mataram merupakan isi dan jiwa tarinya.

Wiraga, *wirama*, dan *wirasa* adalah tiga prinsip tari yang terkandung dalam tari klasik gaya Yogyakarta. Menurut Hadi (2007: 32), konsep *wiraga*, *wirama*, dan *wirasa* merupakan inti rangkuman definisi tari yang diungkapkan oleh Soerjodiningrat sebagai berikut: *inggang kawastanan djoged inggih poenika ebahing sadaja sarandhuning badhan, kasarengan oengeling gangsa, katata pikantoeok wiramaning gendhing djoemboehing pasemon kalijan pikadjenging djoged* (yang disebut tari adalah gerak seluruh anggota badan bersamaan dengan bunyi suara gamelan, ditata sesuai dengan irama gending, kesesuaian ekspresi dengan maksud tari). Hadi (2007: 32) kemudian menjelaskan konsep *wiraga*, *wirama*, dan *wirasa* sebagai berikut.

1. *Wiraga*: Bersangkutan dengan seluruh tata hubungan gerak dalam satu kesatuan bentuk, sehingga disebut sosok tari.
2. *Wirama*: Berhubungan dengan aspek waktu, yaitu yang mengatur panjang pendeknya frase gerak tari. Dalam hal ini menyangkut irama gerak, ritme, tempo, dan kesesuaiannya dengan irama iringan tari atau gending pengiring. Kesesuaian antara irama gerak dan irama gending ini sering disebut joged resik (bersih, teliti, atau cermat).
3. *Wirasa*: Berkaitan dengan rasa gerak atau maksud dan isi tari.

Menari secara batin dalam konteks mandala sastra *mataya* adalah menghidupkan filsafat Joged Mataram (*sawiji*, *greget*, *sungguh*, dan *ora mingkuh*) dan menari dengan *wirasa*. Menari secara batin ini juga mengacu keadaan "*pitaya*" yang berarti "dipercaya" atau "percaya".

Dapat disimpulkan bahwa penyatuan konsep dualistis adalah esens mandala sastra *mataya*. Penyatuan konsep dualistis adalah penyatuan antara *Beksa* Mataram (lahir) - Joged Mataram (batin) yang sekaligus merupakan penyatuan antara penari (mikrokosmos) dan Tuhan (makrokosmos). Mandala sastra *mataya* mengajarkan etika *memayu hayuning bawana* juga. Menurut Galus (2015: 474-475), "*memayu*" berarti "membuat selamat" dan "*bawana*" berarti "bumi", sehingga *memayu hayuning bawana* merupakan sikap dan tindakan untuk menjaga keselamatan dan kelestarian bumi serta sikap dan tindakan menjaga keselamatan bumi dari segi ketenteraman dan kedamaian.

iii. Mandala Sastra *Srimpi Wiragadadi*

Perumusan teori kesatuan antara mikrokosmos dan makrokosmos dalam konteks tari klasik gaya Yogyakarta disebut sebagai "mandala sastra *mataya*". Suharto (1992: 27) mengatakan bahwa implementasi kesatuan antara mikrokosmos dan makrokosmos dalam teori "mandala sastra *mataya*" disebut sebagai "mandala sastra *srimpi wiragadadi*". Mandala sastra *mataya* adalah teori tari klasik gaya Yogyakarta secara keseluruhan, sedangkan mandala sastra *srimpi wiragadadi* adalah implementasi teori mandala sastra *mataya* khusus untuk tari *Srimpi*. Kata "*wiragadadi*" berasal dari dua kata yaitu, "*wiraga*" dan "*dadi*". *Wiraga* adalah konsep yang bersangkutan dengan gerak tari, sedangkan kata "*dadi*" berarti "selesai", "siap", atau "menyelesaikan dengan sukses". Berarti mandala sastra *srimpi wiragadadi* adalah suatu keadaan ideal untuk menari tari *Srimpi* gaya Yogyakarta.

Suharto mendapat ide tentang konsep mandala sastra *srimpi wiragadadi* dari gula Jawa yang dijual di pasar. Gula Jawa dijual dalam bentuk *lirang* (salah satu bagian dari sesuatu yang dibelah menjadi dua) dengan satu sisi yang datar dan sisi lain bulat. Jika ada dua *lirang* gula Jawa dipasang pada sisi datar, maka akan menjadi sebuah gula Jawa dalam bentuk bulat yang disebut sebagai *tangkep*. *Lirang* gula Jawa tidak dianggap sebagai bagian separuh dari *tangkep* gula Jawa, melainkan *lirang* gula Jawa ini memiliki integritas atau keutuhan sendiri dalam keseluruhan. Kata "*lirang*" berarti "satu", sedangkan kata "*tangkep*" berarti "dua".

Mandala sastra *srimpi wiragadadi* diwujudkan sebagai lingkaran dalam pola lantai tari. Dalam tari *Srimpi Pandhelori*, terlihat beberapa adegan di mana para penari berputar dalam bentuk lingkaran, baik dalam lingkaran besar maupun kecil. Pola lantai ini menyimbolkan lingkaran tanpa batas yang bisa menjadi kecil maupun besar.

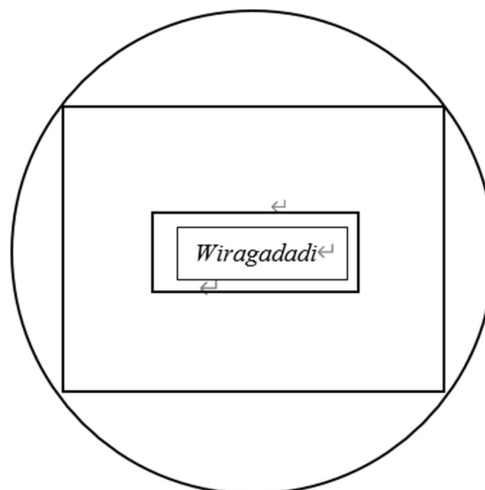
Lingkaran ini sekaligus merepresentasikan keadaan “*kothong nanging kebak*” yang berarti “kosong tetapi penuh” atau “kekosongan sekaligus kepenuhan”. Menurut Suharto (1992: 29), “*kothong nanging kebak*” adalah sebuah konsep filsafat Joged Mataram bahwa seorang penari harus mengosongkan diri sendiri dulu untuk menuangkan jiwa tokoh yang diperankan dengan konsentrasi secara total.

Keadaan “*kothong nanging kebak*” dalam lingkaran tari *Srimpi* dianggap sebagai kepenuhan di mana setiap lingkaran mengandung empat unsur (empat arah mata angin dan empat unsur alam) dari dua pasangan *Srimpi*. Keadaan “*kothong nanging kebak*” ini disatukan dengan keadaan *ngenceng* atau *tensegrity* yang mengacu keseimbangan antara tensi dan harmoni dalam jiwa seorang penari. *Ngenceng (tensegrity)* juga merupakan hubungan kekuatan antara mikrokosmos dan makrokosmos. *Ngenceng* akan dihasilkan jika seorang penari bisa menyatukan dua unsur kontradiktif Joged Mataram. Dua unsur kontradiktif Joged Mataram adalah keadaan sadar (mengendalikan diri) dan tak sadar (*kepanjangan/ekstasi*).

Suharto (1992: 27) mengumpamakan istilah “*ngenceng*” dengan istilah “*tensegrity*” dalam bahasa Inggris yang digunakan oleh Buckminster Fuller. Buckminster Fuller (1895-1983) adalah seorang pemikir, desainer, arsitek, penemu, dan penyair yang berasal dari Amerika Serikat. Istilah “*tensegrity*” adalah kata ciptaan yang terdiri dari kata “*tension*” (tensi) dan “*integrity*” (integritas). Fuller (1975: 372) melalui Suharto (1992: 27) menggunakan kata “*tensegrity*” untuk menjelaskan hubungan kekuatan alam dalam alam semesta, yakni tensi dan integritas atau integritas kontradiktif. *Tensegrity* digunakan untuk menyebut kerangka atau struktur arsitek yang digabungkan dengan kekuatan elastis saja. Kekuatan elastis ini adalah apa yang membuat tensi.

Mandala sastra *srimpi wiragadadi* adalah keadaan keseimbangan antara *kiblat papat* (empat arah mata angin dan empat unsur alam), keseimbangan antara konsep dualistis (mikrokosmos dan makrokosmos), dan keadaan *ngenceng (tensegrity)*.

Mandala sastra *srimpi wiragadadi* memiliki segi empat dalam lingkaran dan di tengahnya ada titik pusat. Setiap empat sudut dalam segi empat merepresentasikan konsep dualistis antara “tanpa batas” (makrokosmos) dan “keterbatasan” (mikrokosmos). Dalam segi empat ini, konsep *wiraga* (konsep yang bersangkutan dengan gerak tari) akan mempertahankan titik pusat antara semua elemen dualistis yang ada di dalam segi empat. Berikut adalah gambar mandala sastra *srimpi wiragadadi* berdasarkan penjelasan tadi.



Gambar 2. Mandala Sastra Srimpi Wiragadadi

Penari yang mencapai titik pusat ini dianggap berhasil menyatu diri dengan makrokosmos. Menyatu diri dengan makrokosmos diwujudkan dalam lingkaran mandala. Dengan kata lain, lingkaran mandala adalah perwujudan penyatuan antara mikrokosmos dan makrokosmos.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut. Ajaran filsafat moral tari *Srimpi Pandhelori* dan ajaran filsafat Joged Mataram berperan sebagai pendidikan olah rasa dan etika bukan hanya kepada kaum sentana keraton saja, tetapi kepada masyarakat Yogyakarta juga. Ajaran filsafat moral tari *Srimpi Pandhelori* berlandaskan ajaran filsafat Jawa. Melalui ajaran filsafat moral tari *Srimpi Pandhelori*, seorang dapat mengalami penghalusan perasaan (olah rasa) dan mempelajari etika Jawa seperti *narima ing pandum*, mawas diri, watak *rereh*, *ririh*, *ngati-ati*, *eling lan* waspada, dan sebagainya. Sedangkan melalui ajaran filsafat Joged Mataram, seorang dapat membangun sikap berani, bertanggung jawab, dan kerja keras yang merupakan sumber karakter orang Jawa. Dengan kata lain, ajaran filsafat moral tari *Srimpi Pandhelori* dan ajaran filsafat Joged Mataram berkontribusi pada pembentukan identitas dan karakter orang Jawa.

Filsafat Jawa meliputi unsur-unsur kepercayaan lokal asli Jawa (animisme dan dinamisme), agama Hindu (filsafat India), tantrisme agama Buddha, ajaran tasawuf Islam, dan mistik kejawaen. Filosofi utama tari *Srimpi Pandhelori* adalah baik buruk dan kalah menang. Baik buruk dan kalah menang ini mengacu konflik antara nafsu baik dan nafsu buruk yang selalu ada dan dimiliki oleh setiap manusia. Pesan filosofis ini tidak mengajarkan baik atau buruk, kalah atau menang, namun yang terpenting dari pesan filosofis ini adalah keseimbangan antara nafsu baik dan nafsu buruk, karena keduanya selalu berada dan tidak akan hilang. Dunia ini terdiri dari konsep dualisme.

Jumlah empat penari *Srimpi Pandhelori* melambangkan konsep *kiblat papat lima pancer* yang merupakan kosmologi Jawa tentang hubungan antara mikrokosmos (manusia) dan makrokosmos (alam semesta). Manusia atau ego manusia sebagai *pancer* (tengah) selalu harus berupaya menyatukan dan menyeimbangkan diri dengan empat arah mata angin (timur, selatan, barat, dan utara), empat unsur alam (api, angin, air, dan tanah), dan empat saudara gaib (*kawah*, *getih*, *puser*, dan *ari-ari*).

Esensi filsafat Jawa yang terkandung dalam tari klasik gaya Yogyakarta termasuk tari *Srimpi Pandhelori* adalah *sangkan paraning dumadi* dan *manunggaling kawula-Gusti*. *Sangkan paraning dumadi* berarti “asal dan tujuan segala hal yang menjadi”, sedangkan *manunggaling kawula-Gusti* berarti “bersatunya antara hamba (manusia) dengan Tuhan”. Tujuan filsafat Jawa adalah mencari *kasampurnaning urip/kasampurnaning dumadi* (kesempurnaan hidup), yaitu mengetahui apa tujuan hidupnya dan dia sebenarnya berasal dari mana (*sangkan paraning dumadi*). Untuk itu manusia harus menemukan sifat ilahi di dalamnya melalui *manunggaling kawula-Gusti* (menyatukan diri dengan Tuhan). Tari klasik gaya Yogyakarta, termasuk tari *Srimpi Pandhelori* dapat dikatakan sebagai implementasi *sangkan paraning dumadi* dan *manunggaling kawula-Gusti* bertujuan untuk menyatukan mikrokosmos (penari) dan makrokosmos (Tuhan). Penyatuan mikrokosmos dan makrokosmos ini akan mengarahkan ke pencapaian pencerahan spiritual.

Tari *Srimpi Pandhelori* adalah perwujudan mandala juga, karena sebetulnya Keraton Yogyakarta sendiri merupakan mandala. Mandala adalah simbol yang mewujudkan pencapaian pencerahan spiritual maupun dunia Buddha (Tuhan) dalam tantrisme agama Buddha. Mandala merupakan simbol penting dalam doktrin Hindu, yakni benua bulat yang bernama *Jambudwipa*. Dalam mistisisme (sufisme) Islam juga ada diagram yang dikenal sebagai daerah yang terdiri dari lingkaran konsentris dan di tengah ada tempat suci yang disebut sebagai *Dhat*. Keterkaitan tari *Srimpi* dengan mandala dapat ditemukan dalam konsep *mataya* (*maTaya*), mandala sastra *mataya*, dan mandala sastra *srimpi wiragadadi*.

Dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa ajaran filsafat moral tari *Srimpi Pandhelori* dan ajaran filsafat Joged Mataram berperan sebagai perwujudan kekuatan batin manusia yang mempunyai kedewasaan individual, sosial, maupun spiritual dengan sikap tenggang rasa, sopan, berusaha keras, tahu bagaimana menepatkan dirinya dalam situasi apa pun, dan sudah menemukan jati dirinya. Perwujudan kekuatan batin ini sekaligus merupakan pedoman dan pegangan bagi orang Jawa. (7941 kata)

REFERENSI

- Achmad, S. W. (2017). *Filsafat Jawa Mengungkap Filosofi, Ajaran, dan Laku Hidup Leluhur Jawa*. Yogyakarta: Araska.
- Daliman, A. (2012). *Makna Sengkalan sebagai Dinamika Kesadaran Historis Kajian Filosofis Historis Keraton Yogyakarta*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Dewan Ahli Yayasan Siswa Among Beksa. (1981). *Kawruh Joged Mataram*. Yogyakarta: Yayasan Siswa Among Beksa.
- Endraswara, S. (2010). *Etika Hidup Orang Jawa: Pedoman Beretika dalam Menjalani Kehidupan Sehari-hari*. Yogyakarta: NARASI.
- Endraswara, S. (2016). *Falsafah Hidup Jawa Menggali Mutiara Kebijakan dari Intisari Filsafat Kejawen*. Yogyakarta: CAKRAWALA.
- Endraswara, S. (2018). *Mistik Kejawen Sinkretisme, Simbolisme, dan Sufisme dalam Budaya Spiritual Jawa*. Yogyakarta: Narasi.
- Galus, B. S. (2015). *Hermeneutika Filsafat Jawa dan Kosmologi Jawa*. Yogyakarta: Penerbit Beta Yogyakarta.
- Hadi, Y. S. (2001). *Pasang Surut Tari Klasik Gaya Yogyakarta Pembentukan- Perkembangan- Mobilitas*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
- Hadi, Y. S. (2007). *Kajian Tari Teks dan Konteks*. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher. Herusatoto, B. (2000). *Simbolisme dalam Budaya Jawa*. Yogyakarta: Hanindita.
- Hughes-Freeland, F. (2009). *Komunitas yang Mewujud Tradisi Tari dan Perubahan di Jawa*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Layungkuning, B. (2020). *Sangkan Paraning Dumadi*. Yogyakarta: Penerbit Narasi.
- Magnis-Suseno, F. (1985). *Etika Jawa Sebuah Analisis Falsafi tentang Kebijakan Hidup Jawa*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia.
- Morrison, M. J. (1978). *The Bedaya-Serimpi Dances of Java*. *Dance Chronicle*, 2(3). Nasional, P. B. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka Jakarta.
- Nuryani, W. (2020). *Nilai-Nilai Pendidikan Tari Srimpi Pandhelori Gaya Yogyakarta dalam Perspektif Hermeneutik*. Disertasi, tidak diterbitkan, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.
- Rochayati, R. (2016). *Konsep Mandala dalam Srimpi Kadang Premati*. *Jurnal Pendidikan Seni dan Budaya SITAKARA*, 1(1).

- Shashangka, D. (2014). *Induk Ilmu Kejawen*. Jakarta Selatan: dolphin.
- Suharto, B. (1992). *Cosmology and Aesthetics of the Javanese Dance*. SPAFA Journal, 2(3).
- Sumardjo, J. (2016). *Filsafat Seni*. Bandung: ITB Press.
- Suprihono, A. E. (1994/1995). *Tari Srimpi Ekspresi Budaya Para Bangsawan Jawa*. Jakarta: Proyek Pengembangan Media Kebudayaan Ditjen Kebudayaan, Departmen Pendidikan dan Kebudayaan .
- Surlasumantri, J. S. (2010). *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sutiyono. (2012). *Paradigma Pendidikan Seni di Indonesia*. Yogyakarta: UNY Press. Sutiyono. (2013). *Poros Kebudayaan Jawa*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wardani, L. K., Soedarsono, R., Haryono, T., & Suryo, D. (2011). *Gaya Seni Hindu-Jawa pada Tata Ruang Keraton*. *Dimensi Interior*, vol. 9, no. 2, Dec. 2011, pp. 108-118. Wibowo, F. (2002). *Tari Klasik Gaya Yogyakarta*. Jogjakarta: Yayasan Bentang Budaya.



<http://symposium.kratonjogja.id/>